QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2017 - 2022

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2019

BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2017-2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya menunjukkan penetapan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 belum sepenuhnya berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-

2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);

9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16);
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);
12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 40) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Isi beserta uraian RPJMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 3 Oktober 2019 M
4 Shafar 1441 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 4 Oktober 2019 M
5 Shafar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2019 NOMOR 12

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH : (13/110/2019)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2017-2022

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Jaya Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Jaya, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara makro.

Pelaksanaan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam:

a. RKPK Tahun 2018;
b. RKPK Tahun 2019;
c. RKPK Tahun 2020;
d. RKPK Tahun 2021; dan
e. RKPK Tahun 2022.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama pemangku kepentingan.

Qanun ini dimaksudkan untuk melakukan penyempurnaan terhadap Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022. Penyempurnaan dimaksud dengan melakukan Perubahan terhadap Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 berdasarkan hasil Pengendalian dan Evaluasi RPJMK Aceh Jaya pada Tahun 2018 dan Tahun 2019, serta penyesuaian dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

SAMBUTAN BUPATI ACEH JAYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya berupa kesempatan dan pengetahuan kepada kita semua sehingga Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Jaya 2017-2022 ini bisa selesai tepat pada waktunya.

Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah islam kepada seluruh umat untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat.

Dokumen ini adalah perubahan terhadap dokumen RPJMK Aceh Jaya 2017-2022 yang telah disusun sebelumnya dah telah ditetapkan melalui Qanun Nomor 1 tahun 2018. Perubahan RPJMK ini masih tetap merupakan penjabaran dari Visi dan Misi kami Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam PILKADA 2017 yang lalu. Perubahan lebih menitikberatkan pada upaya mempertajam kembali beberapa rumusan arah kebijkan dan strategi pembangunan sesuai dinamika yang terjadi, terutama menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaannya yang sudah memasuki tahun kedua. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan mutlak bagi SKPK dalam penyesuaian kembali Renstra, dan penyusunan Renja serta program dan kegiatan pembangunan demi kemajuan Aceh Jaya. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang terlibat yang telah bepartisipasi dalam penyusunan dokumen ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita memohon petujuk agar segala urusan yang akan dilaksanakan tercapai sesuai harapan. Amin ya Rabbal 'Alamin

Calang, 03 Oktober 2019
04 Safar 1441 H

BUPATI ACEH JAYA
Dto
Drs. H. T. IRFAN TB

SAMBUTAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa yang dengan izin-Nya kita telah dapat menyelesaikan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perubahan (RPJMK) Aceh Jaya 2017-2022. Shalawat dan salam tiada henti-hentinya kita persembahkan kepada junjungan umat nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah islam kepada umat yang memuat aturan dalam kehidupan untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dokumen Perubahan RPJMK Aceh Jaya 2019-2022 ini merupakan penyempurnaan kemabali dokumen RPJMK Aceh Jaya sebelumnya, namun tanpa merubah visi dan misi kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Periode 2017-2022, perubahanya hanya difokuskan pada penyempurnaan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan untuk mempercepat capaian target kinerja yang telah ditetapkan. Perubahan RPJMK ini masih tetap mengacu kepada dokumen RPJP Aceh Jaya 2005-2025 serta penyelarasan kembali dengan RPJMA 2017-2022 yang lahir setelah Qanun RPJMK Aceh Jaya 2017-2022 ditetapkan. Kepada seluruh SKPK kami mintakan agar menjadikan dokumen perubahan RPJMK ini sebagai acuan perubahan renstra SKPK dan penyusunan Renja SKPK khususnya untuk sisa tahun perencanaan 2020-2022.

Terima kasih kepada Tim penyusun dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Semoga menjadi amal ibadah serta mendapat balasan yang setimpal disisi Allah SWT.

Akhirnya Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mari kita wujudkan cita-cita menjadikan Aceh Jaya menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

Calang, 03 Oktober 2019
04 Safar 1441 H

WAKIL BUPATI ACEH JAYA
Dto
TGK. YUSRI S

KATA SAMBUTAN KETUA DPRK ACEH JAYA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tidak ada kata lain yang harus diucapkan selain puji serta syukur alhamdulillah kepada Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat kesehatan,baik jasmani maupun rohani sehingga dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Aceh Jaya 2019-2022 telah selesai disusun. Shalawat beriring salam tiada hentinya kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan beraklak mulia.

Tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Aceh Jaya 2017-2022 dan telah ditetapkan dengan qanun Kabupaten Aceh Jaya ini menunjukkan komitmen kita semua, baik legislatif maupun eksekutif yang saling mendukung dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Aceh Jaya. Arah kebijakan dan program pembangunan yang tertuang didalamnya harus kita implementasikan secara konsisten dan penuh tanggung jawab, sehingga akan membawa dampak dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya tidak lupa pula, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini, terutama kepada pimpinan dan anggota DPRK Aceh Jaya Periode 2014-2019, karena pembahasan rancangan qanun tentang perubahan RPJMK ini dilakukan dan diselesaikan oleh DPRK periode tersebut. Kami berkomitmen menyambut estafet dalam upaya mewujudkan apa yang sudah direncanakan. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semua serta mendapat Pahala yang setimpat disisi Allah SWT.

Akhirnya kepada Allah kita memohon petunjuk dan berserah diri, agar apa yang kita cita-citakan dapat terwujud hendaknya.

Calang, 03 Oktober 2019
04 Safar 1441 H

KETUA DPRK ACEH JAYA
Dto
MUSLEM .D

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga dapat menyelesaikan "PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN (RPJMK) ACEH JAYA 2017 - 2022". Shalawat dan salam kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah ALLAH SWT sehingga mengantarkan kita ke alam yang berilmu pengetahuan.

Perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 dilaksanakan sejalan dengan amanat Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018 belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Secara keseluruhan terdapat beberapa hal yang mendasari dilakukannya perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022, yaitu :

a. Adanya beberapa kebijakan yang dirumuskan kembali dalam rangka mempercepat pencapaian misi pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dirasa perlu dipertajam kembali rumusan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022;
b. Lahirnya Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022, sehingga perlu dilakukan penyelarasan kembali dengan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan sebelum Qanun Aceh tersebut ditetapkan;
c. Lahirnya Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, dimana dalam Qanun Aceh tersebut mengamanatkan bahwa sebagian alokasi Dana Otonomi Khusus yang diterima Pemerintah Aceh diperuntukkan untuk pembangunan Kabupaten/Kota dengan mekanisme dana transfer, hal ini menyebabkan perubahan perhitungan kapasitas keuangan kabupaten;
d. Penyesuaian kembali program-program SKPK yang disesuaikan dengan kapasitas keuangan kabupaten serta dalam upaya mempercepat pencapaian indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan.

Penyusunan Perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 ini sudah melalui berbagai tahapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, termasuk pembahasan rancangan Qanun, fasilitasi oleh Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh, evaluasi rancangan qanun oleh Biro Hukum Setdaprov Aceh, hingga pada akhirnya ditetapkan menjadi Qanun

Kabupaten Aceh Jaya Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022. Berbagai masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat telah diakomodir dan dijadikan bahan penyempurnaan penyelesaian dokumen perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022. Untuk hal tersebut, kami sebagai tim penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan masukan yang bersifat konstruktif yang telah disampaikan kepada kami demi kesempurnaan dokumen perencanaan ini. Selanjutnya, Perubahan RPJMK ini akan menjadi pedoman perubahan Rencana Strategis (Renstra) SKPK Tahun 2017-2022, serta menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya selama periode 2017-2022.

Banda Aceh, Oktober 2019
Kepala Bappeda Aceh Jaya,

HENDRI KUSNADI, S.Pd., M. Si

EXECUTIVE SUMMARY

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Jaya Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Penyusunan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 dilakukan melalui berbagai tahapan analisis data dan informasi hasil pembangunan, serta penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK) Aceh Jaya Tahun 2005 – 2025, *pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMK adalah : politik; teknokratik; partisipatif; atas bawah (top-down); dan bawah atas (bottom-up).*

Adapun yang menjadi isu- isu strategis, permasalahan-permasalahan pembangunan prioritas yang menjadi agenda utama rencana pembangunan Kabupaten dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan daya saing, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang inklusif;
- ✓ Kedaulatan Pangan;
- ✓ Peningkatan mutu dan akses pendidikan;
- ✓ Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang menyeluruh;
- ✓ Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
- ✓ Penguatan nilai-nilai keislaman dan kebudayaan;
- ✓ Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur yang terintegrasi;
- ✓ Penciptaan tata kelola dan pemerintahan yang baik;
- ✓ Penanggulangan bencana alam serta pengendalian lingkungan hidup;
- ✓ Peningkatan kehidupan sosial serta peran pemuda dan olahraga.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Aceh Jaya, maka Visi Tahun 2017-2022 yaitu:

"**Gerakan Pembangunan Rakyat Aceh Jaya: Sehat, Ekonomi, Kejayaan Agama, Tangguh Infrastruktur dan Informatif dengan Potensi Sumber Daya Manusia yang Kompetitif (GERBANG RAJA SEJATI)***"*

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta

memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

Misi Pertama	:	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Misi Kedua	:	Mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat.
Misi Ketiga	:	Kejayaan nilai-nilai agama islam dalam kehidupan masyarakat.
Misi Keempat	:	Mewujudkan infrastruktur daerah yang tangguh, Informatif dan merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.
Misi Kelima	:	Mewujudkan pendidikan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.
Misi Keenam	:	Meningkatkan kehidupan sosial, serta peran pemuda dan olahraga.
Misi Ketujuh	:	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Maksud penyusunan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017–2022 adalah menyusun dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi dan misi Bupati/Wakil Bupati, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan.

Tujuan penyusunan RPJMK Aceh Jaya tahun 2017 – 2022 adalah Menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten, Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2017-2022, Menetapkan indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan indikator kinerja Bupati dan Wakil Bupati sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten periode 2017-2022, Menetapkan pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK), Rencana Kerja (Renja) SKPK, dan perencanaan penganggaran; seta Menjadikan RPJMK sebagai dokumen penting dalam mendorong partisipasi semua stakeholder dalam pembangunan daerah yang didalamnya menampung janji-janji politik Calon Kepala Daerah sesuai dengan amanat “UU No. 25/2004 tentang peranan Bappeda untuk menyiapkan RPJMK”.

Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Daerah adalah sebagai berikut:

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi menjadi 5,98 persen pada tahun 2022
b. Indeks Pembangunan Manusia menjadi 69,91 poin pada tahun 2022
c. Angka Harapan Hidup menjadi 68,60 tahun pada tahun 2022
d. Tingkat Kemiskinan menjadi 12,01 persen pada tahun 2022
e. Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 2,46 persen pada tahun 2022
f. Indeks Pola Pangan Harapan yang mencapai 86,17 poin pada tahun 2022
g. Jumlah Hafidzh/hafidzah pada tahun 2022 sudah mencapai 60 orang pada tahun 2022
h. Jumlah Qari/qariah pada tahun 2022 sudah mencapai hingga 90 orang pada tahun 2022
i. Angka Melek Al-Qur'an pada tahun 2022 meningkat hingga 90 persen pada tahun 2022
j. Persentase ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan mencapai 99 persen pada tahun 2022
k. Indeks Aksesibilitas (KM/KM²) pada tahun 2022 sudah mencapai 0,1064 poin
l. Angka Melek Huruf mencapai 97,35 persen pada tahun 2022
m. PMKS yang ditangani mencapai 80 persen pada tahun 2022
n. Nilai SAKIP mencapai 74 poin pada tahun 2022

Dalam Rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sampai dengan tahun 2022 secara lebih fokus dan terarah, Pelaksanaan Program pembangunan dikemas dalam **5 (Lima) gerakan pembangunan (GERBANG), yaitu:**

1. Gerbang Seroja (Gerakan Pembangunan Sehat Rohani dan Jasmani) untuk mewujudkan Misi Pertama dengan indikator kinerja yang ingin dicapai :
   - ✓ Angka Usia Harapan Hidup pada tahun 2022 sudah mencapai 68,60 tahun
   - ✓ Cakupan Desa Siaga Aktif pada tahun 2022 sudah mencapai 53,49 persen
   - ✓ Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Tahun 2022 sudah mencapai 100 persen

   Terdapat 27 (Dua Puluh Tujuh) Program Prioritas untuk mendukung ketercapaian indikator Gerbang Seroja

2. Gerbang Emas (Gerakan Pem bangunan Ekonomi Masyarakat Sejahtera) untuk mewujudkan Misi Kedua dan Keenam dengan indikator kinerja yang ingin dicapai:
    - ✓ Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh Jaya pada tahun 2022 sudah mencapai 5,98 persen
    - ✓ Tingkat Kemiskinan Aceh Jaya pada tahun 2022 menurun hingga 12,01 persen
    - ✓ Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2022 mencapai 5,98 Persen
    - ✓ Tingkat Pengangguran Terbuka Aceh Jaya pada tahun 2022 menurun hingga 2,46 persen
    - ✓ Nilai Investasi berskala nasional (PMA-PMDN) pada tahun 2022 mencapai Rp 2.149.979,-
    - ✓ Peningkatan indeks Pola Pangan Harapan pada tahun 2022 yang mencapai 86,17 poin
    - ✓ Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mencapai 80 Persen pada tahun 2022
    - ✓ Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi lainnya pada tahun 2022 yang mencapai 39,19 persen
    - ✓ Indeks Pembangunan gender (IPG) pada tahun 2022 yang mencapai 89,08 persen

    Terdapat 63 (Enam Puluh Tiga) Program Prioritas untuk mendukung ketercapaian indikator Gerbang Emas
3. Gerbang Permata (Gerakan Pembangunan Pendidikan Agama dan Fasilitas Ibadah) untuk mewujudkan Misi Ketiga dengan Indikator Kinerja yang ingin dicapai:
    - ✓ Jumlah Hafidzh/hafidzah pada tahun 2022 yang mencapai 60 orang
    - ✓ Jumlah Qari-Qariah pada tahun 2022 yang mencapai 90 orang
    - ✓ Peningkatan Persentase Angka Melek Al-quràn pada tahun 2022 yang mencapai 87 persen
    - ✓ Persentase Mesjid yang memenuhi standar dengan kriteria Ri`ayah 87 persen, Imarah 82 persen dan Idarah 45 persen pada akhir tahun 2022

- ✓ Persentase angka melek al-quràn pada tahun 2022 yang mencapai 87 persen
- ✓ Dayah yang memenuhi standarisasi dayah pada tahun 2022 yang mencapai 58,06 persen
- ✓ Persentase Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS) yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan mencapai 99,00 persen
- ✓ Terkumpulnya Dana Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf (ZISWAF) pada tahun 2022 mencapai Rp. 7.754.929.875, -

Terdapat 17 (Tujuh Belas) Program Prioritas untuk mendukung ketercapaian indikator Gerbang Permata

4. Gerbang Intan (Gerakan Pembangunan Infrastruktur – Informatika) untuk mewujudkan Misi Keempat dengan indikator kinerja yang dicapai:
   - ✓ Indeks Aksesibilitas (KM/KM²) pada tahun 2022 mencapai 0,0793 poin
   - ✓ Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2022 yang mencapai 307,11 Km
   - ✓ Indeks resiko bencana pada tahun 2022 yang mencapai 135 poin
   - ✓ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 yang mencapai 86,6 poin
   - ✓ Persentase kepatuhan terhadap peraturan tentang pemanfaatan ruang pada tahun 2022 yang mencapai 100 persen

   Terdapat 41 (Empat Puluh Satu) Program Prioritas untuk mendukung ketercapaian indikator Gerbang Intan
5. Gerbang Perak (Gerakan Pembangunan Pendidikan Rakyat yang Kompetitif) untuk mewujudkan Misi Kelima dan Misi Enam dengan Indikator Kinerja yang ingin dicapai:
   - ✓ Angka Melek Huruf pada tahun 2022 sudah mencapai 97,35 persen
   - ✓ Angka Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2022 mencapai 8 tahun 2 bulan
   - ✓ Penyelamatan Seni Budaya Tradisional dan Pengembangan Seni Kreatif pada tahun 2022 sudah mencapai 86,67 persen
   - ✓ Jumlah cabang olahraga yang berprestasi pada tahun 2022 ditingkat provinsi 15 cabang dan di tingkat nasional mencapai 7 cabang

Terdapat 28 (Dua Puluh Delapan) Program Prioritas untuk mendukung ketercapaian indikator Gerbang Perak

DAFTAR SINGKATAN

ADHB	: Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
AFP	: *Acute Flacid Paralysis*
AHH	: Angka Harapan Hidup
AKABA	: Angka Kematian Balita
AKI	: Angka Kematian Ibu
AKN	: Angka Kematian Neonatus
AMH	: Angka Melek Huruf
APBK	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
APIP	: Aparat Pengawas Internal Pemerintah
APK	: Angka Partisipasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
APS	: Angka Partisipasi Sekolah
ASN	: Aparat Sipil Negara
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BKPRD	: Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
BLK	: Balai Latihan Kerja
BPHTB	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
BPRS	: Bank Pembiayaan Rakyat Syariàh
BPS	: Badan Pusat Statistik
BTM	: Batuan Telsis Mekanis
CSR	: *Corporate Social Responsibility*
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBD	: Demam Berdarah Dengue
DI	: Daerah irigasi
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPRK	: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
GERBANG RAJA	: Gerakan Pembangunan Rakyat Aceh Jaya
GERMAS	: Gerakan Masyarakat Sehat
IKK	: Indikator Kinerja Kunci
IKU	: Indikator Kinerja Utama
IPG	: Indeks Pembangunan gender

IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
KAH	: Kimia Agro dan Hasil Hutan
Kespro	: Kesehatan Reproduksi
KH	: Kelahiran Hidup
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KPL	: Kawasan Peudhiet Laot
KRL	: Kawasan Ramah Lingkungan
KSP	: Koperasi Simpan Pinjam
LMEA	: Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka
MDGs	: *Milenium Development Goals*
MMR	: *Maternal Mortality Rate*
MPU	: Majelis Permusyawaratan Ulama
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PORA	: Pekan Olahraga Aceh
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PSKS	: Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
PUG	: Pengarustamaan Gender
PUS	: Pasangan Usia Subur
RAD-PPK	: Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Pengendalian Korupsi
RAN-PPK	: Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Pengendalian Korupsi
Renja	: Rencana Kerja
Renstra	: Rencana Strategis
RKA	: Rencana Kerja dan Anggaran
RKPK	: Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten
RLS	: Rata-rata Lama Sekolah
RPJMD	: Rencana Jangka Menengah Daerah
RPJMK	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPK	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SD	: Sekolah Dasar
SDGs	: *Sustainable Development Goals*

SIAK	: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
SILPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SKPK	: Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
SMK3	: Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SOTK	: Struktur Organisasi Tata Kelola
TIK	: Teknologi Informasi Komunikasi
TKSK	: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
TKSM	: Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat
TPD	: Total Pendapatan Daerah
UKM	: Usaha Kecil Menengah
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
WHO	: *World Health Organization*
WS	: Wilayah Sungai
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian
ZIS	: Zakat, Infaq, Sadaqah
ZISWAF	: Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf

DAFTAR ISI

Halaman

SAMBUTAN BUPATI ACEH JAYA i

SAMBUTAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA ii

KATA SAMBUTAN KETUA DPRK ACEH JAYA iii

KATA PENGANTAR iv

EXECUTIVE SUMMARY vi

DAFTAR SINGKATAN xii

DAFTAR ISI xv

DAFTAR TABEL xxi

DAFTAR GAMBAR xxvii

BAB I PENDAHULUAN 1-1

1.1 Latar Belakang 1-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1-2

1.3 Hubungan Antar Dokumen 1-5

1.3.1 Hubungan antara dokumen Perubahan RPJMK Aceh Jaya tahun 2017-2022 dengan RPJMN tahun 2015-2019 1-7

1.3.2 Hubungan antara dokumen Perubahan RPJMK Aceh Jaya tahun 2017-2022 dengan RPJM Provinsi Aceh tahun 2017-2022 1-11

1.3.3 Hubungan antara dokumen Perubahan RPJMK Aceh Jaya dengan RPJPK Aceh Jaya 1-13

1.3.4 Hubungan antara dokumen Perubahan RPJMK Aceh Jaya tahun 2017-2022 dengan RTRW Kabupaten Aceh Jaya tahun 2014-2034 1-15

1.3.5 Hubungan antara dokumen Perubahan RPJMK Aceh Jaya tahun 2017-2022 dengan renstra satuan kerja perangkat kabupaten (Renstra-SKPK) 1-15

1.4 Maksud dan Tujuan 1-16

1.5 Sistematika Penulisan 1-17

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN 2-1

2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2-1

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah 2-1

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi 2-1
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis 2-3
2.1.1.3 Topografi 2-5
2.1.1.4 Geologi 2-7
2.1.1.5 Hidrologi 2-13
2.1.1.6 Klimatologi 2-15
2.1.1.7 Penggunaan Lahan 2-16
2.1.2 Demografi 2-17
2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah 2-21
2.1.4 Wilayah Rawan Bencana 2-29
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2-32
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2-32
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB 2-32
2.2.1.2 Laju Inflasi 2-36
2.2.1.3 Angka Kemiskinan 2-37
2.2.1.4 Kasus Kriminalitas 2-39
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 2-40
2.2.2.1 Pendidikan 2-40
2.2.2.2 Kesehatan 2-43
2.2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2-47
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga 2-48
2.3 Aspek Pelayanan Umum 2-50
2.3.1 Layanan Urusan Keistimewaan Aceh..... 2-50
2.3.1.1.1 Pendidikan..... 2-50
2.3.1.1.1 Pendidikan Rakyat 2-50
2.3.1.2 Keagamaan 2-51
2.3.1.2.1 Syariat Islam 2-51
2.3.1.2.2 Permusyawaratan Ulama ……. 2-53
2.3.1.2.3 Baitul Mal ……..... 2-53
2.3.2 Layanan Urusan Pemerintahan Wajib 2-54
2.3.2.1 Layanan Urusan Wajib Dasar 2-54
2.3.2.1.1 Pendidikan 2-55
2.3.2.1.2 Kesehatan 2-59
2.3.2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2-69
2.3.2.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman 2-75
2.3.2.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 2-77
2.3.2.1.6 Sosial 2-78
2.3.2.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar 2-80
2.3.2.2.1 Ketenagakerjaan 2-81
2.3.2.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2-83
2.3.2.2.3 Pangan 2-85
2.3.2.2.4 Pertanahan 2-86
2.3.2.2.5 Lingkungan Hidup 2-87
2.3.2.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2-88
2.3.2.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .. 2-90
2.3.2.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2-90
2.3.2.2.9 Perhubungan 2-92
2.3.2.2.10 Komunikasi dan Informatika 2-94
2.3.2.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .. 2-95
2.3.2.2.12 Penanaman Modal 2-97
2.3.2.2.13 Kepemudaan dan Olahraga 2-98
2.3.2.2.14 Statistik 2-99
2.3.2.2.15 Persandian 2-100
2.3.2.2.16 Kebudayaan 2-101
2.3.2.2.17 Perpustakaan 2-102
2.3.2.2.18 Kearsipan 2-102
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan 2-103
2.3.3.1 Pariwisata 2-103
2.3.3.2 Pertanian 2-104
2.3.3.3 Energi dan Sumber Daya Mineral 2-109
2.3.3.4 Perdagangan 2-110
2.3.3.5 Perindustrian 2-111
2.3.3.6 Transmigrasi 2-113
2.3.3.7 Kelautan dan Perikanan 2-113
2.3.4 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan 2-116

2.3.4.1 Perencanaan 2-116
2.3.4.2 Keuangan 2-117
2.3.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan... 2-118
2.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan 2-119
2.3.4.5 Pengawasan 2-119
2.3.4.6 Sekretariat Dewan 2-120
2.4 Aspek Daya Saing Daerah 2-120
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 2-121
2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita 2-121
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 2-122
2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia 2-123
2.4.4 Fokus Iklim Berinvestasi 2-123

BAB III GAMBARAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH JAYA 3-1
3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2014-2018 3-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBK 3-2
3.1.1.1 Pendapatan Daerah 3-2
3.1.1.2 Belanja Daerah 3-6
3.1.1.3 Pembiayaan Daerah 3-9
3.1.2 Neraca Daerah 3-11
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan 2012-2017 3-15
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran 3-15
3.2.2 Analisis Pembiayaan 3-19
3.3 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017-2022 3-23
3.3.1 Proyek Keuangan Daerah 3-23
3.3.1.1 Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2022 3-23
3.3.1.2 Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2017-2022 3-26
3.3.1.3 Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Tahun 2017-2022 3-29
3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan 3-31
3.3.2.1 Kerangka Regulasi 3-36

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KABUPATEN ACEH JAYA 4-1
4.1 Permasalahan Pembangunan 4-1
4.1.1 Penunjang Urusan Pemerintahan 4-4
4.1.2 Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 4-5
4.1.3 Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 4-7
4.1.4 Pemerintahan Pilihan 4-10
4.1.5 Pemerintahan Wajib Lainnya yang Bersifat Keistimewaan dan Kekhususan 4-12
4.1.6 Perangkat Daerah Lainnya 4-13
4.2 Capaian SPM di Kabupaten Aceh Jaya 4-14
4.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis 4-16
4.4 Isu Strategis 4-16
4.4.1 Isu-isu Global 4-17
4.4.2 Isu-isu Nasional 4-20
4.4.3 Isu-isu Strategis Aceh 4-20
4.4.4 Isu-isu Strategis Kabupaten Aceh Jaya 4-21

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5-1
5.1 Visi 5-4
5.2 Misi 5-7
5.3 Tujuan dan Sasaran 5-12

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH JAYA 6-1

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA 7-1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH JAYA 8-1

BAB IX PENUTUP 9-1
9.1 Pedoman Transisi 9-1
9.2 Kaidah Pelaksanaan 9-3

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Pembagian wilayah administrasi	2-2
Tabel 2.2	Luas wilayah administrasi Kabupaten Aceh Jaya	2-3
Tabel 2.3	Teluk yang terdapat di Kabupaten Aceh Jaya	2-3
Tabel 2.4	Pulau yang terdapat di Kabupaten Aceh Jaya	2-4
Tabel 2.5	Kondisi kelerengan per Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya	2-6
Tabel 2.6	Kondisi geologi per Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya	2-7
Tabel 2.7	Persebaran jenis tanah di Kabupaten Aceh Jaya	2-10
Tabel 2.8	Sebaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Aceh Jaya.	2-14
Tabel 2.9	Potensi wilayah sungai di Kabupaten Aceh Jaya	2-14
Tabel 2.10	Rata-rata keadaan iklim Kabupaten Aceh Jaya 2013 - 2018..	2-15
Tabel 2.11	Rata-rata suhu udara, tekanan udara, dan kelembaban udara menurut Bulan di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013 - 2018...	2-16
Tabel 2.12	Penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Jaya	2-17
Tabel 2.13	Distribusi jumlah penduduk per Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013 – 2018	2-18
Tabel 2.14	Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018	2-20
Tabel 2.15	Rasio ketergantungan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2014-2018	2-21
Tabel 2.16	Kawasan perlindungan setempat berdasarkan luas Kabupaten Aceh Jaya tahun 2014 - 2034	2-22
Tabel 2.17	Jumlah desa rawan bencana alam menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2018	2-31
Tabel 2.18	Jumlah desa rawan bencana alam menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2018	2-32
Tabel 2.19	Jumlah bencana alam menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2017	2-32
Tabel 2.20	Jumlah bencana alam menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2017	2-32
Tabel 2.21	Laju indeks implisit menurut sektor Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013 - 2017	2-36
Tabel 2.22	Angka melek huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun ke atas Tahun 2013 - 2018	2-41

Tabel 2.23	Angka rata-rata lama sekolah tahun 2013 - 2018	2-42
Tabel 2.24	Angka harapan lama sekolah tahun 2013 - 2018	2-43
Tabel 2.25	Angka harapan hidup tahun 2013 - 2018	2-44
Tabel 2.26	AKN, AKB, AKABA, AKI, dan Pravelnsi Anak Pendek (stunting) Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013 - 2017	2-46
Tabel 2.27	Capaian indikator seni, budaya Aceh Jaya tahun 2018	2-48
Tabel 2.28	Capaian indikator olahraga Aceh Jaya tahun 2013 - 2017	2-49
Tabel 2.29	Tipe dayah, jumlah santri dan jumlah guru dayah Kabupaten Aceh Jaya tahun 2017 -2018	2-50
Tabel 2.30	Kondisi mesjid dan meunasah Kabupaten Aceh Jaya tahun 2018	2-52
Tabel 2.31	Jumlah pelanggaran Syariat Islam tahun 2014 - 2018.....	2-52
Tabel 2.32	Realisasi penerimaan zakat dan infaq Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013 – 2018	2-53
Tabel 2.33	Realisasi zakat yang disalurkan Baitul Mal menurut Senif Di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013 – 2018	2-54
Tabel 2.34	Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 5-18 tahun Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016	2-58
Tabel 2.35	Jumlah guru, murid dan jumlah sekolah di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 - 2017	2-60
Tabel 2.36	Rasio Posyandu dan balita Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013 - 2017	2-61
Tabel 2.37	Rasio Puskesmas, Polindes dan Pustu Kabupaten Aceh Jaya Jaya tahun 2013 - 2017	2-62
Tabel 2.38	Rasio dokter di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013 – 2018	2-63
Tabel 2.39	Rasio tenaga kesehatan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2015 - 2018	2-64
Tabel 2.40	Rasio tenaga kesehatan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2017 - 2018	2-65
Tabel 2.41	Perkembangan cakupan penemuan dan penanganan penyakit Kabupaten Aceh Jaya tahun 2012 - 2017	2-66
Tabel 2.42	Persentase ibu hamil dan balita kurang gizi dan gizi buruk Kabupaten Aceh Jaya tahun 2017 - 2018	2-68
Tabel 2.43	Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013 - 2017	2-70

Tabel 2.44 Kondisi panjang jalan menurut tingkat kerusakan di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2012 - 2016 2-70
Tabel 2.45 Kondisi panjang jalan menurut jenis permukaan di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2012 - 2015 2-71
Tabel 2.46 Panjang drainase dan jembatan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013 - 2017 2-72
Tabel 2.47 Jenis prasarana irigasi/pengairan di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2014 - 2017 2-73
Tabel 2.48 Persentase rumah tangga menurut sumber air untuk minum, memasak, dan mandi/cuci/dll di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 2-74
Tabel 2.49 Persentase rumah tinggal bersanitasi Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013 - 2017 2-75
Tabel 2.50 Rekapitulasi data RTLH per kecamatan menurut klarifikasi kerusakan 2-76
Tabel 2.51 Kondisi indikator persampahan di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2014 - 2017 2-77
Tabel 2.52 Perkembangan jumlah aparatur Pamong Praja, jumlah aparat Linmas dan jumlah patroli petugas satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 jam di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013 - 2017 2-77
Tabel 2.53 Kondisi keamanan dan ketertiban umum Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013 – 2017 (kasus) 2-78
Tabel 2.54 Jumlah penduduk penyandang masalah sosial dan jumlah PMKS Kabupaten Aceh Jaya tahun 2015 - 2017 2-80
Tabel 2.55 Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) Kabupaten Aceh Jaya tahun 2015 – 2017 2-82
Tabel 2.56 Angkatan kerja, bukan angkatan kerja, tingkat partisipasi Angkatan kerja dan tingkat pengangguran Kabupaten Aceh Jaya tahun 2015 2-83
Tabel 2.57 Indeks pembangunan gender Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013 – 2018 2-84
Tabel 2.58 Jumlah lahan persawahan di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013 – 2017 2-86
Tabel 2.59 Regulasi ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Jaya tahun

2013 – 2017 2-86
Tabel 2.60 Jumlah kawasan lindung, plasma nutfah dilindungi dan endemik, hutan bakau dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013 – 2016 2-88
Tabel 2.61 Data kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 – 2017 2-89
Tabel 2.62 Jumlah peserta program KB aktif, jumlah akseptor KB, jumlah pasangan usia subur dan jumlah pasangan usia subur ber KB di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2012 – 2017 2-91
Tabel 2.63 Jumlah orang melalui dermaga/terminal di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013 – 2016 2-92
Tabel 2.64 Persentase layanan Angkutan Darat dan kepemilikan KIR angkutan umum Kabupaten Aceh Jaya tahun 2012 -2016 2-93
Tabel 2.65 Banyaknya Halte Bus dan rambu lalu lintas di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2015 – 2016 2-94
Tabel 2.66 Perkembangan koperasi dan jumlah pengusaha kecil dan menengah di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2012-2017 2-96
Tabel 2.67 UMKM Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013 – 2017 2-97
Tabel 2.68 Jumlah proyek PMA, PMDN, dan Investasi di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013 – 2017 (juta rupiah) 2-98
Tabel 2.69 Jumlah klub olahraga, sarana olahraga dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Aceh Jaya 2-99
Tabel 2.70 Perkembangan perpustakaan di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013 – 2017 2-102
Tabel 2.71 Produksi hasil pertanian Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013 - 2017 2-105
Tabel 2.72 Produktivitas hasil pertanian Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013 – 2017 2-106
Tabel 2.73 Luas lahan tegal/kebun, ladang/huma, dan ladang yang Sementara tidak diusahakan menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya (ha) tahun 2016 2-108
Tabel 2.74 Populasi ternak di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013 – 2017 2-109
Tabel 2.75 Perkembangan sarana perdagangan di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2012 – 2016 2-111
Tabel 2.76 Perkembangan sarana perindustrian di Kabupaten Aceh Jaya

	tahun 2013 -2016	2-112
Tabel 2.77	Jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013-2016	2-114
Tabel 2.78	Jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016	2-115
Tabel 2.79	Jumlah Nelayan Per Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya.....	2-115
Tabel 2.80	Ketersediaan dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 – 2017	2-117
Tabel 2.81	Kontribusi PAD terhadap total pendapatan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2012-2016	2-118
Tabel 2.82	Jumlah temuan BPK, jumlah temuan yang ditindaklanjuti, dan jumlah APIP	2-120
Tabel 3.1	Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2014 – 2018	3-5
Tabel 3.2	Realisasi belanja daerah Kabupaten Aceh Jaya tahun 2014-2018	3-8
Tabel 3.3	Perincian pembiayaan daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 – 2018	3-10
Tabel 3.4	Neraca daerah Kabupaten Aceh Jaya tahun 2014-2018	3-12
Tabel 3.5	Perhitungan neraca daerah Kabupaten Aceh Jaya tahun 2014-2018	3-14
Tabel 3.6	Kapasitas ruang fiskal Kabupaten Aceh Jaya 2014-2018	3-18
Tabel 3.7	Defisit riil anggaran Kabupaten Aceh Jaya 2014-2018	3-20
Tabel 3.8	Rasio/kontribusi SILPA terhadap belanja daerah	3-22
Tabel 3.9	Proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Aceh Jaya tahun 2017-2022	3-25
Tabel 3.10	Proyeksi belanja Kabupaten Aceh Jaya tahun 2017-2022	3-28
Tabel 3.11	Proyeksi pembiayaan Kabupaten Aceh Jaya 2017-2022	3-30
Tabel 3.12	Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2017-2022	3-32
Tabel 3.13	Proyeksi alokasi pendanaan kapasitas riil keuangan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2017-2022	3-35
Tabel 5.1	Hubungan antara visi dan misi RPJM Kabupaten Aceh Jaya tahun 2017-2022 dengan visi dan misi RPJM Kabupaten sekitar	5-2

Tabel 5.2	Perumusan penjelasan visi	5-5
Tabel 5.3	Perumusan penjelasan misi	5-8
Tabel 5.4	Visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Aceh Jaya tahun 2017 – 2022	5-14
Tabel 6.1	Strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2017 – 2022	6-2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya 2018-2022	6-6
Tabel 6.3	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Aceh Jaya	6-13
Tabel 7.1	Kerangka pendanaan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2017 – 2022	7-3
Tabel 7.2	Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2017 – 2022	7-4
Tabel 8.1	Penetapan indikator kinerja utama Kabupaten Aceh Jaya tahun 2017 – 2022	8-3
Tabel 8.2	Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2017 – 2022	8-5

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Diagram Hubungan Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan	1-6
Gambar 1.2	Keterkaitan misi pembangunan RPJMN tahun 2015-2019 dan RPJMK Aceh Jaya tahun 2017-2022	1-8
Gambar 1.3	Hubungan antara misi RPJMK Aceh Jaya tahun 2017-2022 dengan agenda prioritas pembangunan nasional (NAWACITA)	1-9
Gambar 1.4	Hubungan antara misi RPJMK Aceh Jaya tahun 2017-2022 dengan agenda prioritas pembangunan nasional RPJMN 2020-2024	1-10
Gambar 1.5	Hubungan antara misi RPJMK Aceh Jaya tahun 2017-2022 dengan misi RPJM Aceh tahun 2017-2022	1-12
Gambar 1.6	Hubungan antara misi RPJMK Aceh Jaya tahun 2017-2022 dengan misi RPJPK Aceh Jaya tahun 2005-2025	1-14
Gambar 2.1	Peta administrasi Kabupaten Aceh Jaya	2-2
Gambar 2.2	Peta kemiringan lahan Kabupaten Aceh Jaya	2-6
Gambar 2.3	Persentase jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2018	2-18
Gambar 2.4	Grafik perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 - 2018	2-19
Gambar 2.5	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2013 – 2017 Kabupaten Aceh Jaya atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha (triliun rupiah).....	2-33
Gambar 2.6	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2013 – 2017 Kabupaten Aceh Jaya atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha (triliun rupiah).....	2-34
Gambar 2.7	Distribusi persentase PDRB ADHB Aceh Jaya menurut lapangan usaha tahun 2017.....	2-35
Gambar 2.8	Distribusi persentase PDRB ADHB Aceh Jaya menurut pengeluaran tahun 2017	2-35
Gambar 2.9	Tingkat kemiskinan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013-2017 .	2-38
Gambar 2.10	Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2012 – 2016	2-39

Gambar 2.11 Jumlah kasus kriminalitas di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2015 – 2017 2-40
Gambar 2.12 Angka melek huruf di Kabupaten Aceh Jaya 2013-2018 2-41
Gambar 2.13 Capaian RLS di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013 - 2018 2-42
Gambar 2.14 Perkembangan angka harapan hidup Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013 – 2018 2-44
Gambar 2.15 Perbandingan perkembangan IPM Aceh Jaya, Aceh dan Nasional tahun 2013 – 2017 2-48
Gambar 2.16 Perkembangan APK untuk SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013 – 2017 2-56
Gambar 2.17 Perkembangan APM untuk SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013 – 2017 2-57
Gambar 2.18 Perkembangan APS untuk SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013 – 2017 2-58
Gambar 2.19 Kondisi panjang jalan menurut tingkat kerusakan di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2012-2016 2-69
Gambar 2.20 Kondisi layanan air minum di Kabupaten Aceh Jaya 2011-2015 2-72
Gambar 2.21 Kondisi rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2017 2-73
Gambar 2.22 Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 2-85
Gambar 2.23 Jumlah pengunjung wisata di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2016..... 2-104
Gambar 2.24 Kontribusi sektor pertanian dan peternakan terhadap PDRB Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013-2017 2-109
Gambar 2.25 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013-2017 2-111
Gambar 2.26 Kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan PDRB Aceh Jaya 2-113
Gambar 2.27 Kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap pertumbuhan PDRB Aceh Jaya tahun 2013-2017 2-114
Gambar 2.28 Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten Aceh Jaya tahun 2013-2017 2-121
Gambar 2.29 Perbandingan perkembangan IPM Aceh Jaya, Aceh dan Nasional tahun 2013-2017 2-123

Halaman

Gambar 3.1 Proporsi PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan daerah 3-3
Gambar 3.2 Proporsi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah terhadap total PAD 3-4
Gambar 3.3 Realisasi belanja daerah Kabupaten Aceh Jaya tahun 2014-2018 (dalam miliar rupiah) 3-7
Gambar 3.4 Proporsi belanja langsung dan tidak langsung Kabupaten Aceh Jaya tahun 2014 – 2018 (dalam persen) 3-7
Gambar 3.5 Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah 3-16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya untuk periode 2017-2022 pada tanggal 18 Juli 2017, maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan peraturan daerah. RPJMK Aceh Jaya telah ditetapkan melalui Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 pada tanggal 23 Februari 2018.

Berdasarkan hasil pengendalian evaluasi terdapat beberapa ketidak kesesuaian yang menyebabkan terjadinya perubahan yang mendasar, dimana mengharuskan pemerintah kabupaten aceh jaya untuk menyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya 2017-2022 yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimana mengamanatkan perencanaan daerah dirumuskan secara

transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Penyusunan Perubahan RPJMK dilaksanakan melalui berbagai tahapan analisis setiap urusan pembangunan penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan *stakeholders* dan pemangku kepentingan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;

17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan ke tiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
21. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
22. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
23. Qanun Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;
24. Qanun Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya 2014-2034;
25. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;

26. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2019;
27. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019;
28. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 119 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2019.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMK Aceh Jaya tahun 2017-2022 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Aceh yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Penyusunan Perubahan RPJMK Aceh Jaya tahun 2017-2022 selain memperhatikan sinkronisasi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, juga menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Penyusunan Perubahan RPJMK Aceh Jaya tahun 2017-2022 tidak terlepas dari dokumen perencanaan lainnya dengan mempedomani RPJP Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005-2025 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2034, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Aceh Jaya . Selain itu juga memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019, RPJM Provinsi Aceh Tahun 2017-2022, RTRW Provinsi

Aceh, KLHS RPJMA, serta RPJM Kabupaten/Kota lain disekitar Kabupaten Aceh Jaya. Perubahan RPJMK dijabarkan oleh SKPK dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPK yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja SKPK (renja SKPK) sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 dibawah ini.

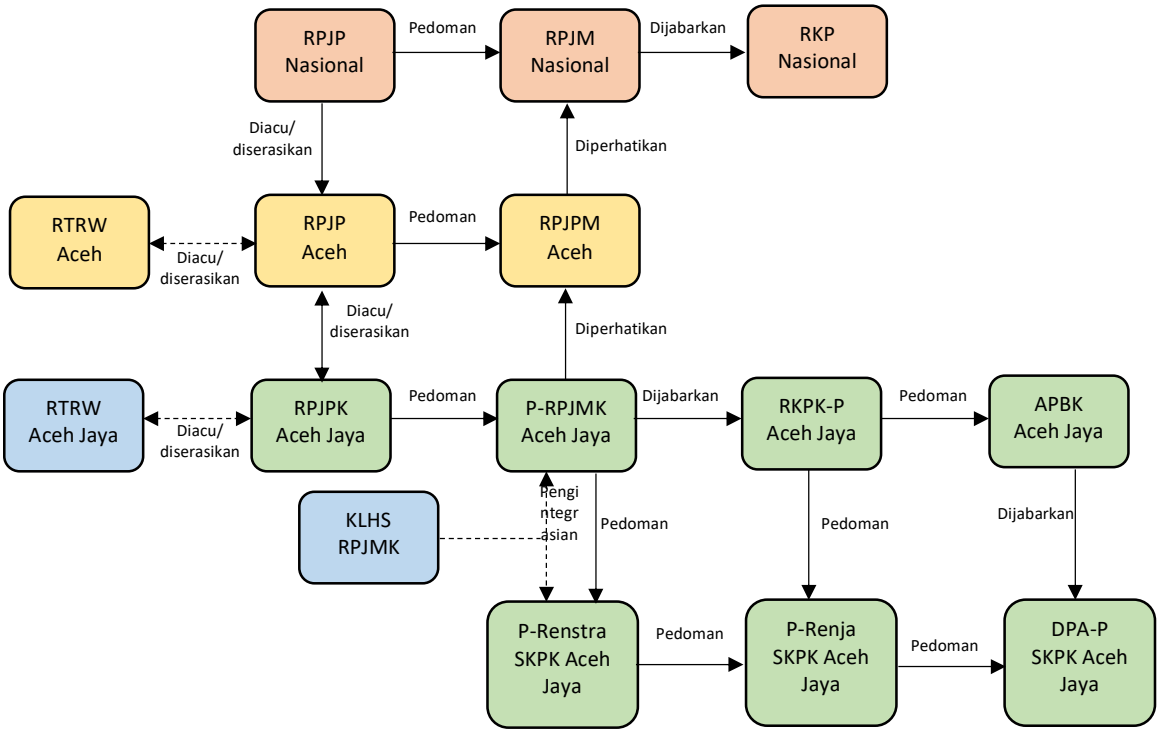

Gambar 1.1 Diagram Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017–2022 juga mempertimbangkan Sasaran dan target pencapaian pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Nasional yang menjadi acuan untuk melanjutkan pembangunan pasca *Milenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir Tahun 2015 atau merupakan bentuk dari penyempurnaan MDGs serta mempertimbangkan sasaran dan target pemberantasan korupsi yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional

Pemberantasan Pengendalian Korupsi (RAN-PPK) dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Pengendalian Korupsi (RAD-PPK).

Dengan demikian diharapkan akan terciptanya sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan wilayah baik bersifat jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, sehingga terwujudnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan.

1.3.1 Hubungan Antara Dokumen Perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 dengan RPJMN Tahun 2015-2019

Hasil analisa dalam tabel hubungan antara Perubahan RPJMK Aceh Jaya dengan RPJMN menunjukkan bahwa telah selaras, meliputi keselarasan perumusan visi RPJMK dengan arah pembangunan atau norma pembangunan RPJMN serta keselarasan perumusan misi dan tujuan dalam RPJMK Aceh Jaya dengan misi Presiden Republik Indonesia, kecuali pada Misi 3 “Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim” karena bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Identifikasi hubungan visi dan misi dalam RPJMK Aceh Jaya misi RPJMN dan agenda prioritas pembangunan nasional yaitu NAWA CITA dapat dilihat pada Gambar 1.2 dan Gambar 1.3. Demikian pula dengan keselarasan antara 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 juga telah selaras dengan Misi Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana terlihat pada Gambar 1.4.

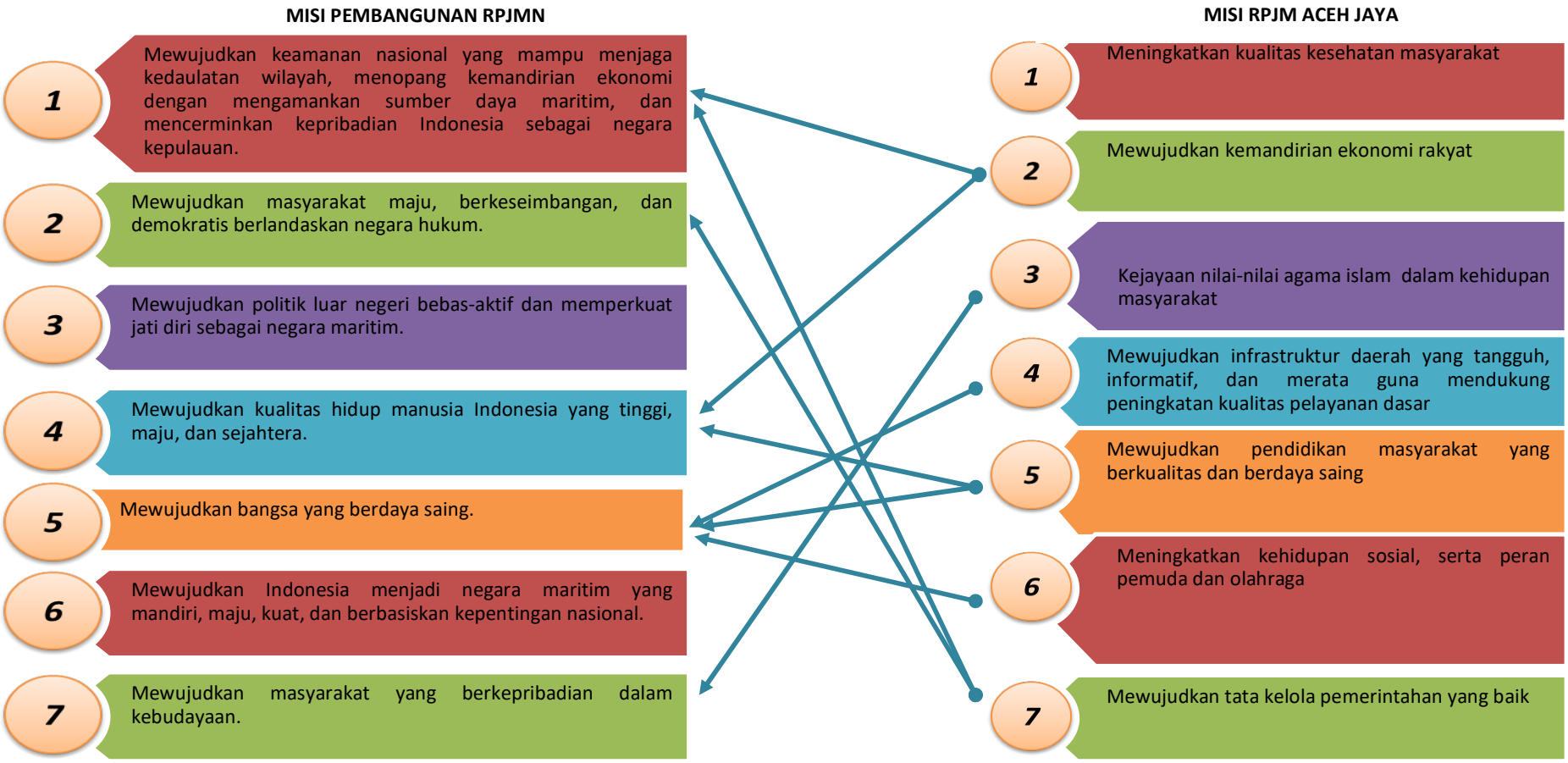

Gambar 1.2 Keterkaitan Misi Pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022

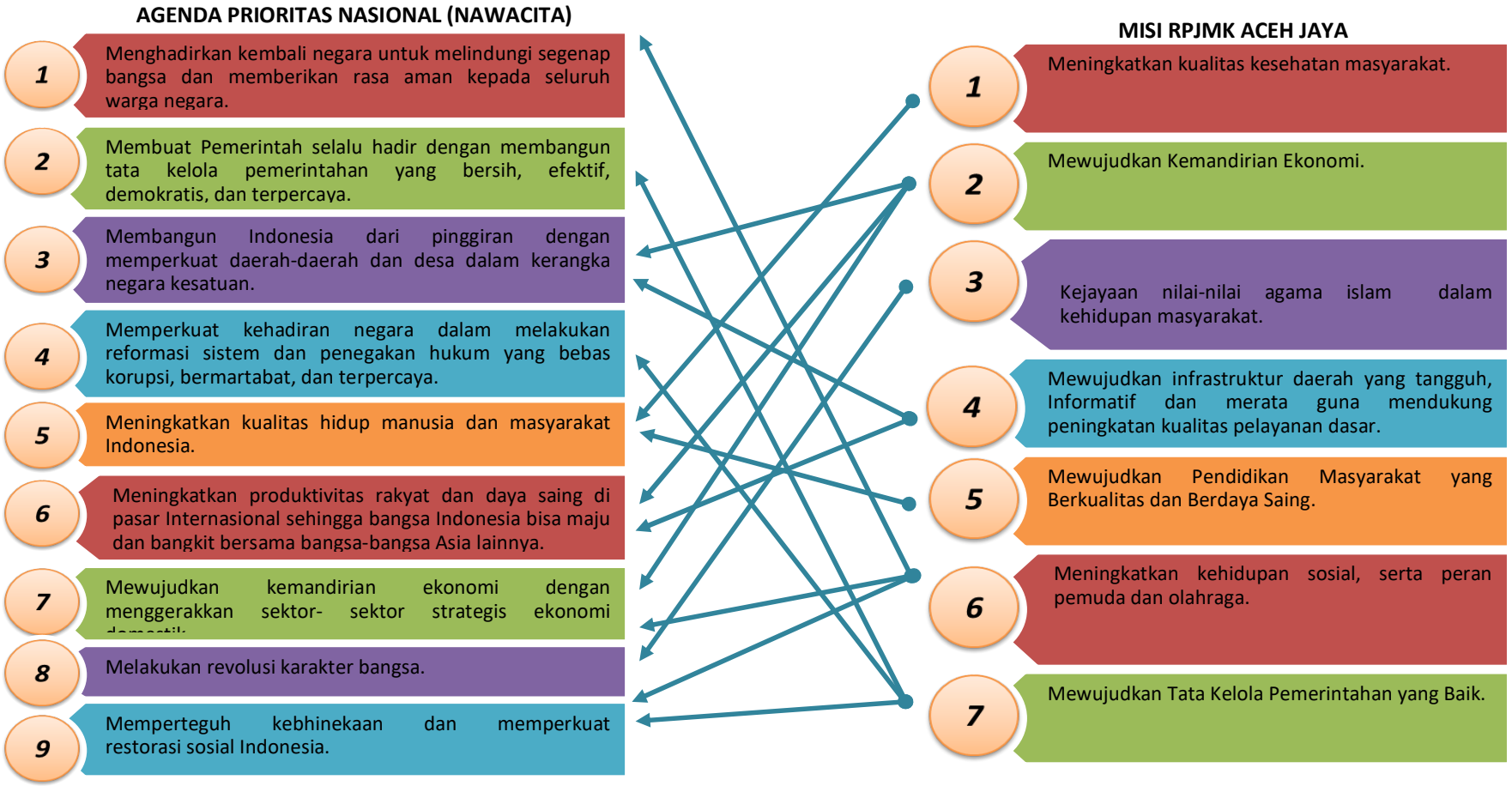

Gambar 1.3 Hubungan antara Misi RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 dengan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)

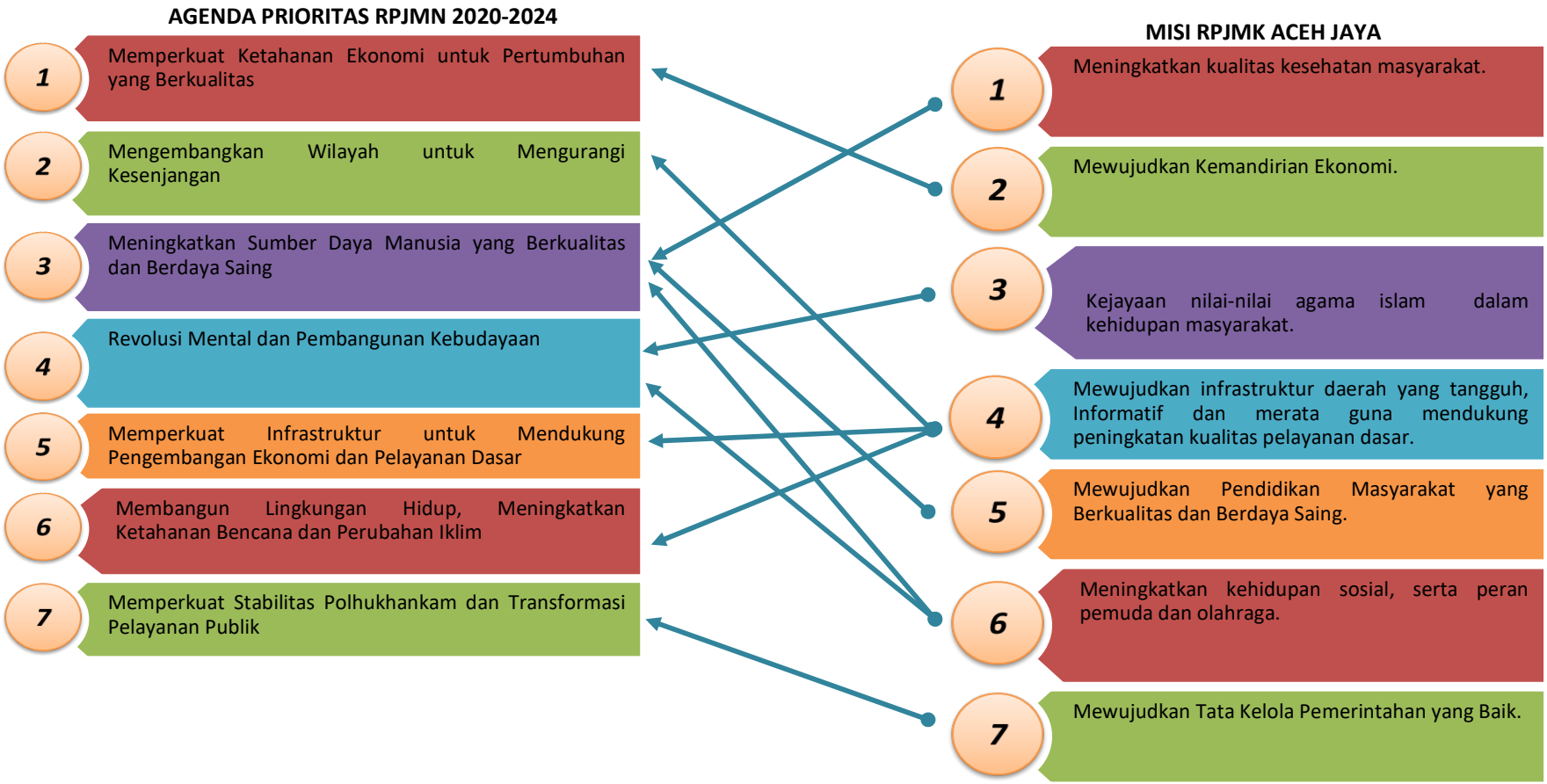

Gambar 1.4 Hubungan antara Misi RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 dengan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024

1.3.2 Hubungan Antara Dokumen Perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 dengan RPJM Propinsi Aceh Tahun Tahun 2017-2022

Perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 sebagai satu kesatuan dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah juga memperhatikan RPJM Provinsi Aceh Tahun 2017-2022. Hal ini dilaksanakan melalui penyelarasan misi Bupati dalam Perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 dengan misi Gubernur dalam RPJM Provinsi Aceh Tahun 2017-2022. Berdasarkan hasil analisa, perumusan misi dalam kedua dokumen tersebut telah selaras, sebagai berikut:

1. Misi 1 Bupati telah konsisten terhadap misi 5 Gubernur;
2. Misi 2 Bupati telah konsisten terhadap misi 6,8 Gubernur;
3. Misi 3 Bupati telah konsisten terhadap misi 2 Gubernur;
4. Misi 4 Bupati telah konsisten terhadap misi 7, 10 Gubernur;
5. Misi 5 Bupati telah konsisten terhadap misi 4 Gubernur;
6. Misi 6 Bupati telah konsisten terhadap misi 5,3 Gubernur; dan
7. Misi 7 Bupati telah konsisten terhadap misi 1, 9 Gubernur

   Penjelasan secara rinci dapat dilihat pada gambar 1.5 sebagai berikut:

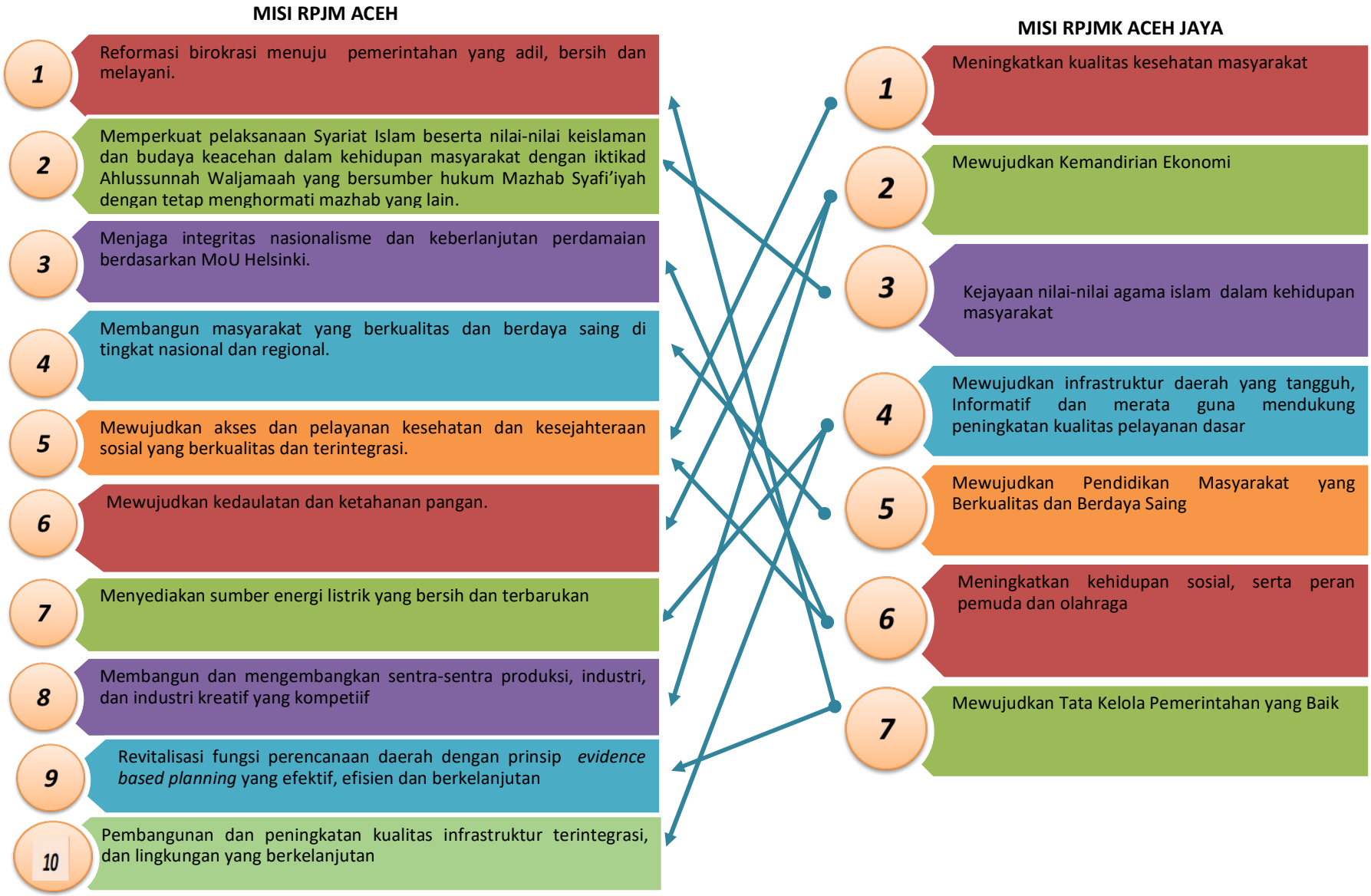

Gambar 1.5 Hubungan antara Misi RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 dengan Misi RPJM Aceh Tahun 2017-2022

1.3.3 Hubungan Antara Dokumen Perubahan RPJMK Aceh Jaya dengan RPJPK Aceh Jaya

Dokumen perencanaan jangka menengah merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka panjang sehingga dalam penyusunannya, Perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 harus mempedomani RPJP Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005-2025 pada periode lima tahunan ketiga. Analisa terhadap hubungan misi antar dokumen perencanaan tersebut diperlukan untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan arah pembangunan daerah. Hasil analisa menunjukkan bahwa perumusan misi dalam kedua dokumen tersebut telah selaras, yang dapat ditunjukkan melalui gambar 1.6 sebagai berikut:

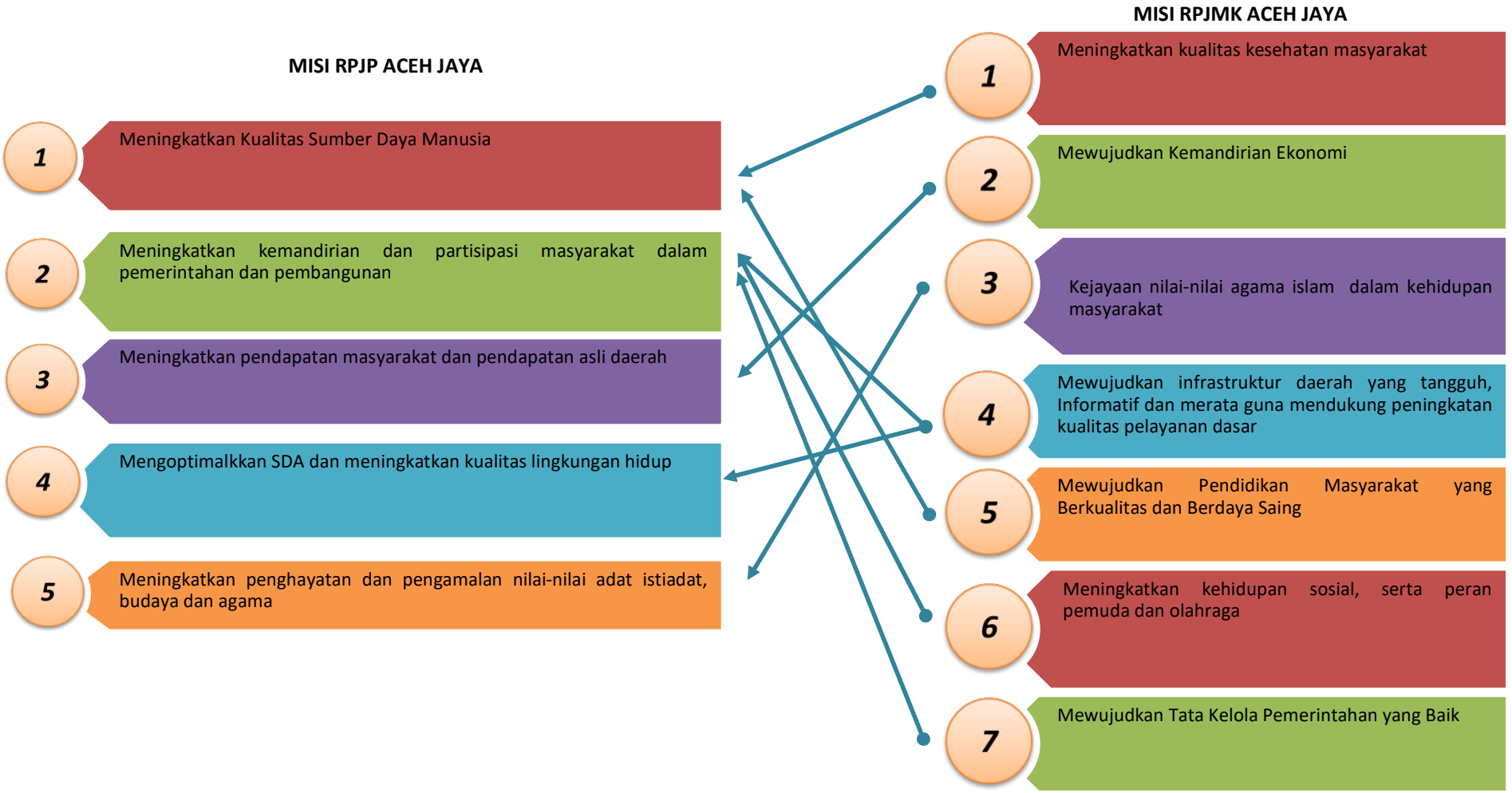

Gambar 1.6 Hubungan antara Misi RPJM Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 dengan Misi RPJPK Aceh Jaya Tahun 2005-2025

Pada tahap awal penyusunan, arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPK Aceh Jaya Tahun 2005-2025 menjadi salah satu bahan perumusan dalam menjabarkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan. Hasil perumusan Perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 selanjutnya diselaraskan dengan sasaran pokok dan arah pembangunan lima tahunan ketiga. Penyelarasan ini untuk mencapai konsistensi perumusan tujuan, sasaran, dan program dalam Perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 terhadap upaya RPJPK Aceh Jaya Tahun 2005-2025.

1.3.4 Hubungan antara dokumen Perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 dengan RTRW Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2034

Dalam penyusunan Perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 telah memperhatikan kesesuaian dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2034. Penyelarasan dilakukan terhadap program dalam RPJMK Aceh Jaya dengan kebijakan, strategi, dan indikasi program dalam RTRW Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2034.

1.3.5 Hubungan antara dokumen Perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 dengan Renstra Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra-SKPK)

Perubahan RPJMK Aceh Jaya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra-SKPK Aceh Jaya dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Perubahan Renstra-SKPK merupakan penjabaran teknis RPJMK yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan

serta indikasi program dan kegiatan siap urusan bidang dan/atau fungsi Pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun oleh setiap SKPK di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Jaya.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017–2022 dimaksudkan untuk menyesuaikan kembali berbagai kebijakan pembangunan dalam RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017–2022 dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, serta perkembangan pembangunan dan capaiannya. Dokumen hasil perubahan RPJMK ini nantinya akan memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 secara berkesinambungan serta mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Selanjutnya tujuan penyusunan Perubahan RPJMK Aceh Jaya tahun 2017 – 2022 adalah :

1. Menyesuaikan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten;
2. Menyesuaikan alternatif strategi dan arah kebijakan 5 (lima) tahun kedepan yang dapat digunakan untuk mencapai kerangka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Aceh Jaya;
3. Menyesuaikan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan, isu strategis daerah dan prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan;

4. Menyesuaikan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
5. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2017-2022, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPK tahun 2017-2022 dengan berpedoman pada RPJPK Aceh Jaya 2005-2025;
6. Menyesuaikan program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2017-2022;
7. Meninjau kembali indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan indikator kinerja Bupati dan Wakil Bupati sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten periode 2017-2022;
8. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK), Rencana Kerja (Renja) SKPK, dan perencanaan penganggaran;
9. Mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi serta dengan Kabupaten yang berbatasan.
10. Menjadikan Perubahan RPJMK sebagai dokumen penting dalam mendorong partisipasi semua stakeholder dalam pembangunan daerah yang didalamnya menampung janji-janji politik Calon Kepala Daerah sesuai dengan amanat “UU No. 25/2004 tentang peranan Bappeda untuk menyiapkan Perubahan RPJMK”.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017–2022 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dimana substansi dari masing-masing bab sebagai berikut: Bab I Pendahuluan menguraikan tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan,

Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan. Bab II Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Aceh Jaya menguraikan tentang Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Kabupaten. Bab III Gambaran Keuangan Kabupaten Aceh Jaya menguraikan tentang Kinerja Keuangan masa lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, dan Kerangka Pendanaan. Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kabupaten Aceh Jaya menguraikan tentang Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis. Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran menguraikan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya menguraikan tentang Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Aceh Jaya yang menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Kabupaten Aceh Jaya menguraikan tentang Program Prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra SKPK beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, SKPK penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menguraikan tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Aceh Jaya dan Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan dan Bab IX Penutup.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN ACEH JAYA

Gambaran umum wilayah Kabupaten Aceh Jaya menggambarkan kondisi umum wilayah dan potensi eksisting melalui beberapa aspek yaitu Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Aspek geografi membahas mengenai karakteristik lokasi dan kewilayahan, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi penduduk.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Aceh Jaya adalah 387.272,36 hektar atau 3.872 km^2, dengan ibukota kabupaten terletak di Calang yang berjarak 156 km dari Kota Banda Aceh. Menurut letak geografis, batas wilayah Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia dan Kabupaten Aceh Barat
- Sebelah Timur :Kabupaten Aceh Barat
- Sebelah Barat : Samudera Hindia

Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari 9 (sembilan), 21 (dua puluh satu) Kemukiman dan 172 (seratus tujuh puluh dua) Desa. Batas wilayah administrasi kecamatan dapat di lihat pada gambar 2.1. Pembagian wilayah administrasi dapat dilihat pada Tabel 2.1, Luas Wilayah Administrasi dan Teluk yang terdapat di Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.2, 2.3, dan 2.4.

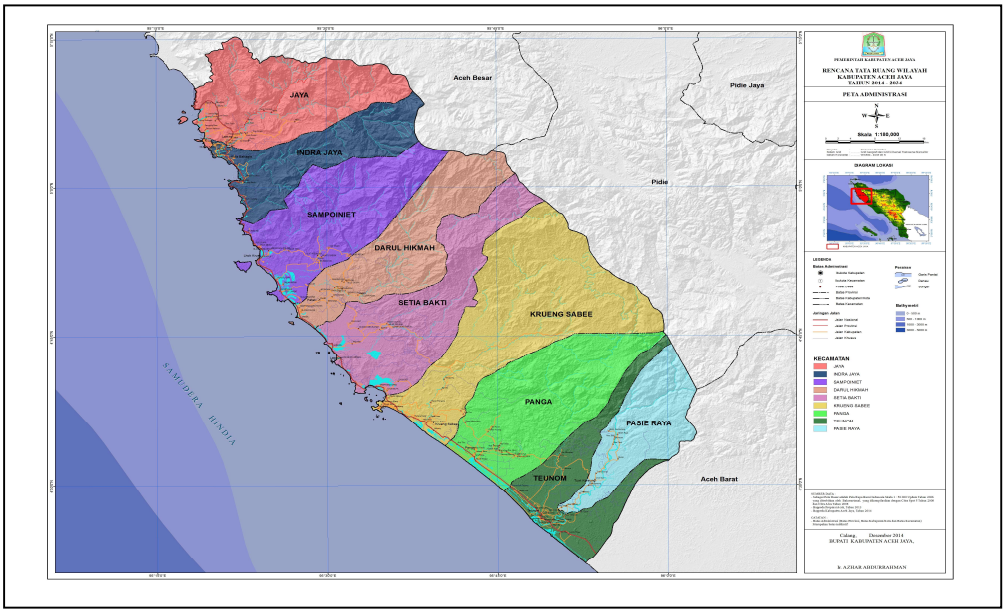

Sumber : Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten Aceh Jaya, 2013

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Aceh Jaya

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Nama Mukim	Jumlah Gampong
1.	Jaya	Lamno	1. Lamno 2. Lamme 3. Kuala Daya 4. Pante Cermin 5. Keluang	34
2.	Sampoiniet	Lhok Kruet	1. Pante Purba 2. Kulam Mutia	19
3.	Setia Bakti	Lageun	1. Rigaih 2. Lageun	13
4.	Krueng Sabee	Krueng Sabee	1. Calang 2. Keude Kr.Sabee	16
5.	Panga	Keude Panga	1. Panga Pucuk 2. Panga	19
6.	Teunom	Teunom	1. Keude Teunom 2. Paya Baro	24
7.	Pasie Raya	Tuwie Kareung	1. Pasi Teubee 2. Sarah Raya	14
8.	Darul Hikmah	Pajar	1. Kuta Baro 2. Lamteungoh	19
9.	Indra Jaya	Kuta Bahagia	1. Lambesoi 2. Kuala Unga	14
	Total		**21 Mukim**	**172**

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya, 2013

Tabel 2.2 Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Jaya

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Gampong	Luas Kecamatan (Ha)
1.	Jaya	Lamno	34	45.091,46
2.	Sampoiniet	Lhok Kruet	19	45.040,86
3.	Setia Bakti	Lageun	13	47.440,70
4.	Krueng Sabee	Krueng Sabee	16	73.051,18
5.	Panga	Keude Panga	19	50.195,19
6.	Teunom	Teunom	24	28.477,83
7.	Pasie Raya	Tuwie Kareung	14	27.901,93
8.	Darul Hikmah	Pajar	19	40.126,60
9.	Indra Jaya	Kuta Bahagia	14	29.946,61
	Total		**172**	**387.272,36**

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya, 2013

Tabel 2.3 Teluk yang terdapat di Kabupaten Aceh Jaya

No	Nama Teluk	Kecamatan
1.	Teluk Calang	Krueng Sabee

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya, 2013

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

a. Posisi astronomis

Secara astronomis Kabupaten Aceh Jaya terbentang mulai $04^{0}22'$ sampai dengan $05^{0}16'$ Lintang Utara dan $95^{0}10'$ sampai dengan $96^{0}03'$ Bujur Timur.

b. Posisi geostrategis

Letak geografis suatu daerah merupakan determinan yang menentukan masa depan suatu daerah. Kabupaten Aceh Jaya memiliki posisi geografis yang unik dan strategis. Kabupaten Aceh Jaya merupakan bagian pantai barat dan daratan Kepulauan Sumatera yang membentang dari Barat ke Timur mulai dari Kaki Gunung Geurutee

(perbatasan dengan Aceh Besar) sampai ke sisi Cot Paleng (perbatasan dengan Aceh Barat). Secara geografis selain Kecamatan Pasie Raya semua kecamatan di Wilayah Kabupaten Aceh Jaya berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, Jaringan jalan provinsi yang menyusuri pinggir pantai yang menghubungkan Banda Aceh dengan kota-kota dibagian barat dan selatan provinsi ini menjadi faktor yang sangat strategis untuk mengembangkan pariwisata, pusat-pusat perdagangan dan berbagai aktifitas perekonomian lainnya.

c. Kondisi/kawasan

Kawasan Kabupaten Aceh Jaya, secara geografis berbatasan dengan laut, pegunungan, serta mempunyai pulau-pulau kecil dengan jumlah kurang lebih 34 (tigapuluh empat) pulau sebagaimana terlihat pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4 Pulau yang terdapat di Kabupaten Aceh Jaya

No	Nama Pulau	Kecamatan
1.	Baaloen	Krueng Sabee
2.	Batee	Krueng Sabee
3.	Batee burouk	Setia Bakti
4.	Batee penjaba	Setia Bakti
5.	Batee perling	Setia Bakti
6.	Batee rigah	Setia Bakti
7.	Batee Tutong	Krueng Sabee
8.	Batee Ulee Gajah	Krueng Sabee
9.	Blekoh	Krueng Sabee
10.	Enggang	Krueng Sabee
11.	Keuluang	Jaya
12.	Khek	Sampoiniet
13.	Kreueh	Darul Hikmah
14.	Limpan	Indra Jaya
15.	Mane	Sampoiniet
16.	Pleng	Setia Bakti
17.	Pasi	Krueng Sabee
18.	Pegasih	Setia Bakti
19.	Penjaba Besar	Setia Bakti
20.	Panjaba Kecil	Setia Bakti
21.	Peureuleng Cut Barat	Setia Bakti
22.	Peureuleng Cut Timur	Setia Bakti
23.	Peureuleng Rayeuk	Setia Bakti
24.	Pingi	Darul Hikmah

No	Nama Pulau	Kecamatan
25.	Raya	Sampoiniet
26.	Reusam	Setia Bakti
27.	Rigaih	Setia Bakti
28.	Sidom	Setia Bakti
29.	Tengku meusa	Setia Bakti
30.	Tengku usman	Setia Bakti
31.	Tuloo	Krueng Sabee
32.	Tumae	Krueng Sabee
33.	Ujong baroh	Setia Bakti
34.	Ujong sudheun	Jaya

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya, 2013

2.1.1.3. Topografi

Kondisi Kabupaten Aceh Jaya, geografis berbatasan dengan laut serta secara topografi memiliki daratan yang berbukit-bukit, tebing terjal dan kemiringan yang tajam yang dialiri sungai besar dan kecil. Kondisi ketinggian Kabupaten Aceh Jaya dibedakan menjadi 2.000 – 2.500 dpl, <2.000 Berdasarkan kelompok ketinggian tersebut dominan memiliki ketinggian <2.000 dpl, hanya Kecamatan Sampoiniet dan Kecamatan Darul Hikmah yang memiliki ketinggian 2000-2500 dpl.

Berdasarkan kelerengan Kabupaten Aceh Jaya memiliki klasifikasi kelerengan <8%, 8-15%, 16-25%, dan 26-40% dan >40%. Berdasarkan kelompok kelerengan tersebut dominan berkelerengan <8% dengan luasan 1.809,81 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.2dan tabel 2.5.

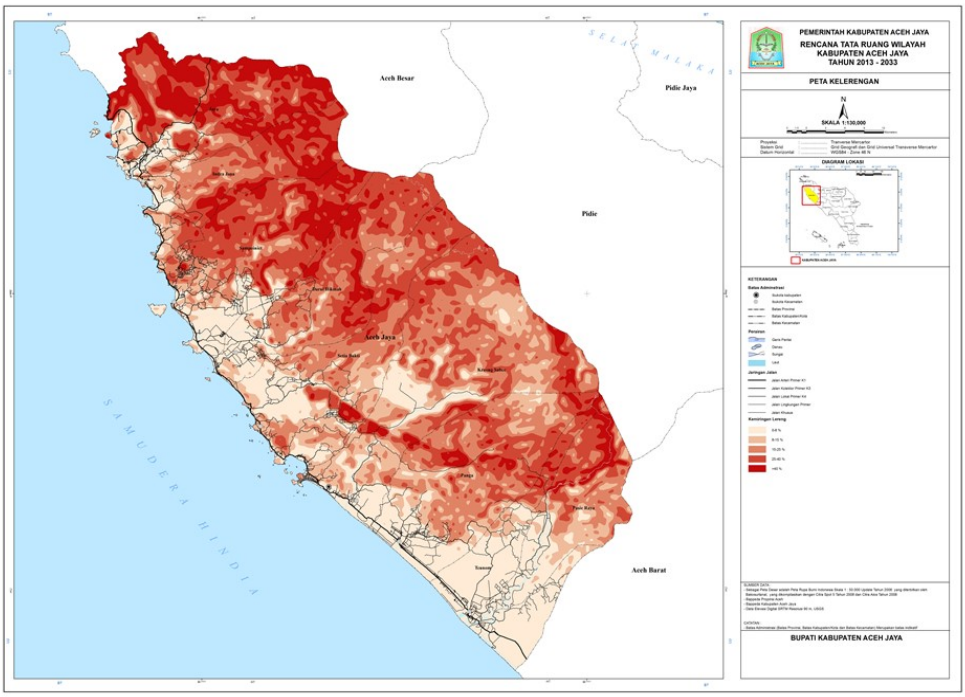

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya, 2013

Gambar 2.2 Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Aceh Jaya

Tabel 2.5 Kondisi Kelerengan per Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya

No.	Kecamatan	Kelas Lereng					
		0-8 %	8-15 %	15-25 %	25-40 %	>40 %	Jumlah
1.	Darul Hikmah	6070.54	3089.57	10366.61	15910.52	4695.37	40132.61
2.	Indra Jaya	2036.36	3374.73	7258.86	10580.34	6761.90	30012.19
3.	Jaya	3791.03	2528.98	5856.99	14612.07	18302.39	45091.46
4.	Krueng Sabee	11221.94	16231.41	25317.40	17743.40	2537.03	73051.18
5.	Panga	9909.03	9219.27	17087.08	11670.49	2309.32	50195.19
6.	Pasie Raya	7599.87	5243.30	6714.35	5570.40	2773.69	27901.61
7.	Sampoiniet	7367.91	4587.37	8144.33	16421.36	8448.30	44969.27
8.	Setia Bakti	9584.90	10956.59	14561.94	10531.76	1805.51	47440.70
9.	Teunom	22183.70	1970.65	866.62	2569.88	884.84	28475.69
Jumlah		**79765.28**	**57201.87**	**96174.18**	**105610.22**	**48518.35**	**387269.90**

Sumber : Kabupaten Aceh Jaya dalam Angka dan Hasil Interprestasi Peta tahun 2013

2.1.1.4. Geologi

Ditinjau dari kondisi Geologi, Keadaan geologi Kabupaten Aceh Jaya umumnya ditempati oleh berbagai jenis batuan meliputi :

- Batuan Telsis Mekanis (BTM);
- Batuan Basalt dan Mekanis Mafis (BBM)
- Batuan kapur Terutama Mafis dan Horizontal (BK1);
- Batuan kapur yang Terlipat Mafis dan Berlapis (BK2);
- Batuan Kapur yang Berkristal dan Liputan Metamorvhiv (BK3);
- Shales Kadang Batu Kapur (BK_5);

Sebaran batuan yang terdapat di Kabupaten Aceh Jaya seperti terlihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6 Kondisi Geologi per Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya

No.	Kecamatan	Formasi Geologi	Luas (Ha)	Persen (%)
1.	**Jaya**	Formasi batu gamping Raba	6495.72	1.68
		Formasi Lhoo	12623.81	3.26
		Batuan Gunung api Bentaro	4926.43	1.27
		Anggota Terumbu	3085.13	0.80
		Formasi Tangla	2622.69	0.68
		Aneka Terobosan	1552.54	0.40
		Lamno Limestone Formation	6072.26	1.57
		Anggota batu gamping Terumbu	346.31	0.09
		Aluvium Muda	3745.9	0.97
		Anggota Ligan	2468.05	0.64
		Formasi Idi	1152.6	0.30
2.	**Sampoinet**	Formasi Tangla	8095.66	2.09
		Anggota batu gamping Terumbu	2642.63	0.68
		Aluvium Muda	7145.25	1.85
		Anggota Ligan	2289.46	0.59
		Batolit Sikuleh	6978.52	1.80

No.	Kecamatan	Formasi Geologi	Luas (Ha)	Persen (%)
		Fasies Gunung api	12557.26	3.24
		Formasi Gunung api Calang	4417.92	1.14
		Diorit Unga	778.64	0.20
		Formasi Batu gampingTeunom	63.93	0.02
3.	**Setia Bakti**	Formasi Tangla	1688.59	0.44
		Anggota batu gamping Terumbu	2056.52	0.53
		Aluvium Muda	8634.52	2.23
		Batolit Sikuleh	20242.48	5.23
		Fasies Gunungapi	8577.1	2.21
		Kelompok Woyla Tak terpisahkan	5860.96	1.51
		Formasi Batu gampingTeunom	77.94	0.02
		Formasi Gunung api Calang	302.6	0.08
4.	**Krueng Sabee**	Formasi Tangla	179.24	0.05
		Anggota batu gamping Terumbu	2862.89	0.74
		Aluvium Muda	11938.63	3.08
		Anggota Ligan	159.77	0.04
		Batolit Sikuleh	47454.67	12.25
		Fasies Gunungapi	6980.88	1.80
		Formasi Gunung api Calang	701.23	0.18
		Kelompok Woyla Tak terpisahkan	235.17	0.06
		Formasi Kueh	2231.99	0.58
		Retas dan sil	18.49	0.00
		Meulaboh Formation	288.22	0.07
5.	**Panga**	Anggota batu gamping Terumbu	8437.9	2.18
		Aluvium Muda	6591.36	1.70
		Batolit Sikuleh	11711.85	3.02
		Fasies Gunung api	3589.6	0.93
		Formasi Gunung api Calang	9946.39	2.57
		Kelompok Woyla Tak terpisahkan	5055.75	1.31
		Formasi Batu gampingTeunom	3385.08	0.87
		Meulaboh Formation	1348.99	0.35

No.	Kecamatan	Formasi Geologi	Luas (Ha)	Persen (%)
		Formasi Kueh	128.28	0.03
6.	**Teunom**	Anggota batu gamping Terumbu	553.8	
		Aluvium Muda	8101.78	2.09
		Formasi Gunung api Calang	3911.84	1.01
		Kelompok Woyla Tak terpisahkan	2723.94	0.70
		Formasi Batu gampingTeunom	435.69	0.11
		Meulaboh Formation	8252.79	2.13
		Takengon-Calang (Cek)	4495.85	1.16
7.	**Pasie Raya**	Formasi Tangla	1666.37	0.43
		Anggota batu gamping Terumbu	5793.5	1.50
		Aluvium Muda	4,406.32	1.14
		Formasi Gunung api Calang	7,552.29	1.95
		Kelompok Woyla Tak terpisahkan	3,300.9	0.85
		Formasi Batu gampingTeunom	62.77	0.02
		Formasi Kueh	1,499.67	0.39
		Meulaboh Formation	1,037.43	0.27
		Retas dan Retas Lempeng Muda	34.96	0.01
		Takengon-Calang (Cek)	2,547.4	0.66
8.	**Darul Hikmah**	Formasi Geumpang	625.01	0.16
		Formasi Tangla	3,298.46	0.85
		Anggota batu gamping Terumbu	755.68	0.20
		Aluvium Muda	6,735.38	1.74
		Batolit Sikuleh	23,942.78	6.18
		Kelompok Woyla Tak terpisahkan	3,429.97	0.89
		Formasi Batu gampingTeunom	1,345.32	0.35
9.	**Indra Jaya**	Formasi batu gamping Raba	3,558.21	0.92
		Formasi Lhoo	1,328.32	0.34
		Batuan Gunung api Bentaro	137.67	0.04
		Anggota Terumbu	1.06	0.00
		Formasi Tangla	5,357.98	1.38
		Lamno Limestone Formation	3.12	0.00
		Aluvium Muda	2,284.78	0.59
		Anggota Ligan	5,063.92	1.31
		Formasi Idi	72.39	0.02
		Batolit Sikuleh	903.1	0.23
		Anggota Keubang	1,676.45	0.43

No.	Kecamatan	Formasi Geologi	Luas (Ha)	Persen (%)
		Fasies Gunungapi	7,177.82	1.85
		Formasi Gunung api Calang	1,947.65	0.50
		Diorit Unga	499.71	0.13
Jumlah			**387,272.36**	**100.00**

Sumber : Bappeda Kabupaten Aceh Jaya dan Hasil Interprestasi Peta tahun 2013

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Aceh Jaya antara lain :

- regosol, merupakan tanah yang sangat muda dan terdapat diatas endapan mineral lunak yang dalam dan tidak keras;
- andosol, adalah tanah yang berasal dari abu gunung api, dan umumnya terdapat di lereng-lereng gunung api;
- latosol, yaitu tanah yang banyak mengandung zat besi dan aluminium. Tanah ini sudah sangat tua, sehingga kesuburannya rendah;
- podsolik merah kuning yang sesuai untuk tanaman perkebunan dan tahunan; dan
- alluvial yang pada umumnya relatif subur dan sesuai untuk perkembangan pertanian.

Tabel 2.7 Persebaran Jenis Tanah Kabupaten Aceh Jaya

No	Kecamatan	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1.	Jaya	Aluvial	3,32
		Aluvial, Podsolik Coklat	11,25
		Aluvial, Grumosol, Aluvial	25,02
		Grumosol, Renzina, Litosol, Rock Outcrops	9,79
		Latosol, Grumosol	130,93
		Podsolik Coklat	24,38
		Podsolik Coklat, Podsolik Merah Kuning	30,13
		Podsolik Coklat, Podsolik Merah Kuning, Grumosol	18,69
		Podsolik Coklat, Podsolik Merah Kuning, Regosol	15,05
		Podsolik Merah Kuning, Podsolik Coklat, Latosol	16,97
2.	Sampoiniet	Aluvial	3,29
		Aluvial, Podsolik Coklat	19,13
		Aluvial, Grumosol, Aluvial	11,18
		Organosol, Aluvial	23,82

No	Kecamatan	Jenis Tanah	Luas (Ha)
		Podsolik Coklat	27,19
		Podsolik Coklat, Grumosol	24,09
		Podsolik Coklat, Podsolik Merah Kuning	61,00
		Podsolik Coklat, Podsolik Merah Kuning, Regosol	24,53
		Podsolik Merah Kuning, Podsolik Coklat, Latosol	180,01
		Regosol, Aluvial, Grumosol	18,49
3.	Setia Bakti	Aluvial	1,24
		Aluvial, Podsolik Coklat	39,37
		Latosol, Grumosol	44,79
		Organosol, Aluvial	17,68
		Podsolik Coklat	5,06
		Podsolik Coklat, Aluvial	6,02
		Podsolik Coklat, Podsolik Merah Kuning	219,91
		Podsolik Coklat, Podsolik Merah Kuning	21,03
		Podsolik Coklat, Podsolik Merah Kuning, Regosol	22,00
		Podsolik Merah Kuning, Podsolik Coklat, Latosol	14,90
		Regosol, Aluvial, Grumosol	8,80
4.	Krueng Sabee	Aluvial	7,36
		Aluvial, Podsolik Coklat	70,06
		Aluvial, Grumosol, Aluvial	23,16
		Grumosol, Renzina, Litosol, Rock Outcrops	23,96
		Latosol, Grumosol	0,65
		Podsolik Coklat, Aluvial, Podsolik Merah Kuning	4,76
		Podsolik Coklat	45,23
		Podsolik Coklat, Aluvial	15,14
		Podsolik Coklat, Podsolik Merah Kuning	481,28
		Podsolik Coklat, Podsolik Merah Kuning, Regosol	6,95
		Podsolik Merah Kuning, Podsolik Coklat, Latosol	8,21
		Regosol, Aluvial, Grumosol	12,90
5.	Panga	Aluvial	7,98
		Aluvial, Podsolik Coklat	21,46
		Aluvial, Grumosol, Aluvial	10,83
		Grumosol, Renzina, Litosol, Rock Outcrops	41,14
		Grumosol, Renzina, Podsolik, Litosol, Rock Outcrops	156,45
		Latosol, Grumosol	31,87
		Organosol, Aluvial	50,02
		Podsolik Coklat, Aluvial, Podsolik Merah Kuning	13,42

No	Kecamatan	Jenis Tanah	Luas (Ha)
		Podsolik Coklat	94,04
		Podsolik Coklat, Aluvial	59,80
		Podsolik Coklat, Podsolik Merah Kuning	143,26
		Podsolik Merah Kuning, Podsolik Coklat, Latosol	2,08
6.	Teunom	Aluvial	1,63
		Aluvial, Podsolik Coklat	14,20
		Aluvial, Grumosol, Aluvial	10,30
		Organosol, Aluvial	54,57
		Podsolik Coklat, Aluvial, Podsolik Merah Kuning	30,28
		Podsolik Coklat	3,61
		Podsolik Coklat, Aluvial	10,62
		Podsolik Coklat, Podsolik Merah Kuning	11,25
		Regosol, Aluvial, Grumosol	27,81
7.	Pasie Raya	Aluvial, Podsolik Coklat	8,96
		Aluvial, Grumosol, Aluvial	34,25
		Andosol, Podsolik Merah Kuning	8,79
		Grumosol, Renzina, Litosol, Rock Outcrops	34,14
		Grumosol, Renzina, Podsolik, Litosol, Rock Outcrops	69,95
		Latosol, Grumosol	25,64
		Organosol, Aluvial	3,66
		Podsolik Coklat, Aluvial, Podsolik Merah Kuning	19,86
		Podsolik Coklat	35,24
		Podsolik Coklat, Aluvial	34,05
		Podsolik Coklat, Podsolik Merah Kuning	7,03
		Podsolik Merah Kuning, Podsolik Coklat, Aluvial	9,37
		Podsolik Merah Kuning, Podsolik Coklat, Latosol	20,84
8.	Darul Hikmah	Aluvial	1,71
		Aluvial, Podsolik Coklat	24,43
		Aluvial, Grumosol, Aluvial	21,17
		Grumosol, Renzina, Podsolik, Litosol, Rock Outcrops	19,82
		Latosol, Grumosol	37,52
		Organosol, Aluvial	22,81
		Podsolik Coklat, Grumosol	0,46
		Podsolik Coklat, Podsolik Merah Kuning	249,67
		Podsolik Merah Kuning, Podsolik Coklat, Latosol	16,60
		Regosol, Aluvial, Grumosol	2,44
9.	Indra Jaya	Aluvial	4,46

No	Kecamatan	Jenis Tanah	Luas (Ha)
		Aluvial, Podsolik Coklat	0,12
		Aluvial, Grumosol, Aluvial	0,59
		Aluvial, Grumosol, Regosol	5,86
		Grumosol, Renzina, Litosol, Rock Outcrops	0,04
		Grumosol, Renzina, Podsolik, Litosol, Rock Outcrops	60,74
		Latosol, Grumosol	17,54
		Podsolik Coklat	9,20
		Podsolik Coklat, Grumosol	10,31
		Podsolik Coklat, Podsolik Merah Kuning	5,01
		Podsolik Merah Kuning, Podsolik Coklat, Latosol	119,04
		Regosol, Aluvial, Grumosol	3,23
Jumlah			**387.272,36**

Sumber : Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten Aceh Jaya, 2013

2.1.1.5. Hidrologi

Dalam menunjang berbagai kegiatan seperti pertanian, industri rumah tangga dan lain sebagainya, sumber daya air yang dapat dimanfaatkan antara lain sebagai berikut:

- ✓ Danau

  Danau yang tersedia di Kabupaten Aceh Jaya berpotensi untuk dijadikan sebagai obyek wisata, danau-danau tersebut antara lain Geunang Laot Pinenung Suasa, Geunang Laot Bhee, dan Geunang Paya Laot.
- ✓ Daerah Aliran Sungai (DAS)

  Untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya air, perairan terbuka yang dapat dimanfaatkan yaitu sungai. DAS yang terdapat di Kabupaten Aceh Jaya meliputi: Krueng Teunom, Krueng Calang, Krueng Sabee, Krueng Lageun, Krueng Masen, Krueng Panga, Krueng Pante Kuyun, Krueng Unga, Krueng Woyla dan Krueng Lambesoi. Untuk lebih jelasnya DAS yang terdapat di Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat pada tabel 2.8.

✓ Wilayah Sungai (WS)

Berdasarkan klasifikasi WS yang melewati Kabupaten Aceh Jaya adalah WS Teunom-Lambesoi dan WS Woyla-Batee. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.9.

Tabel 2.8 Sebaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Aceh Jaya

NO	NAMA DAS	LUAS
1.	Babah Awe	3.139,93
2.	Crakmong	6.046,81
3.	Pante Kuyun	23.952,60
4.	Ligan	30.941,68
5.	Krueng No	2.947,16
6.	Panga	31.018,55
7.	Krueng Sabee	53.715,78
8.	Teunom	80.359,54
9.	Krueng Tunong	5.766,05
10.	Unga	15.746,02
11.	Woyla	14.015,26
12.	Lambesoi	53.730,60
13.	Rigaih	10.443,54
14.	Masen	30.576,67
15.	Krueng On	24.872,18
	Jumlah	**387.272,36**

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya, 2013

Tabel 2.9 Potensi Wilayah Sungai di Kabupaten Aceh Jaya

Kecamatan		*Wilayah Sungai*		*Jumlah Luas*	*Persen (%)*
		Teunom - Lambeusoi	*Woyla - Batee*		
1	Teunom	22.099,03	6.378,78	28.477,81	7,36
2	Panga	50.195,20	-	50.195,20	12,96
3	Krueng Sabee	73.051,18	-	73.051,18	18,86
4	Setia Bakti	47.440,70	-	47.440,70	12,25
5	Sampoiniet	45.040,86	-	45.040,86	11,63
6	Jaya	45.091,45	-	45.091,45	11,64

Kecamatan		Wilayah Sungai		Jumlah Luas	Persen (%)
		Teunom - Lambeusoi	Woyla - Batee		
7	Pasie Raya	20.265,47	7.636,47	27.901,94	7,20
8	Darul Hikmah	40.126,60	-	40.126,60	10,36
9	Indra Jaya	29.946,61	-	29.946,61	7,73
Jumlah		373.257,10	14.015,26	387.272,36	100,00

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya, 2013

2.1.1.6. Klimatologi

Suhu udara rata-rata di wilayah Kabupaten Aceh Jaya sampai dengan tahun 2017 adalah berkisar antara 22,4 dan 32,5 derajat celcius dan kelembaban antara 53,3-100 persen. Hari hujan rata-rata perbulan 26 hari dengan rata-rata curah hujan per bulan 311,4mm^3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.10.

Tabel 2.10 Rata-rata Keadaan Iklim Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2017

No.	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (HH)	Kecepatan Angin (Knot)	Penyinaran Matahari (%)
1.	Januari	625,9	18	2,9	41
2.	Februari	209,7	12	2,9	5,6
3.	Maret	214,6	14	3.0	5,2
4.	April	264,8	18	2,6	4,6
5.	Mei	268,2	16	2,7	3,8
6.	Juni	63,1	7	2,8	5,4
7.	Juli	109,0	6	2,9	4,7
8.	Agustus	287,7	13	2,9	4,6
9.	September	210	15	2,7	2,9
10.	Oktober	545,5	14	3,1	5,3
11.	November	364,0	21	2.7	3,1
12.	Desember	573,9	17	3.0	41

Sumber: Stasiun Meteorologi dan Geofisika Cut Nyak Dhien,2017
**) Merupakan SMKG terdekat dari Kabupaten Aceh Jaya*

Suhu udara maksimum di Kabupaten Aceh Jaya adalah 32,5 derajat celcius dan suhu minimum berkisar antara 22,4 derajat celcius dengan tekanan udara rata-rata berkisar antara 1.010,1 mb, kelembaban udara antara 51,3-100 %,dan rata-rata kecepatan angin hanya sebesar 2,85 knot.

Tabel 2.11 Rata-rata Suhu Udara, Tekanan Udara, dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2017

No.	Bulan	Suhu Udara	Tekanan Udara	Kelembaban Udara
		(^{0}C)	(mb)	(%)
1.	Januari	26.0	1009.9	91.1
2.	Februari	26.6	1010.5	89.8
3.	Maret	27.0	1010.4	87.4
4.	April	26.8	1010.4	90.2
5.	Mei	27.1	1009.6	91.5
6.	Juni	27.2	1010.3	87.9
7.	Juli	26.3	1010.9	84.0
8.	Agustus	26.4	1009.8	84.4
9.	September	26.4	1010.4	91.1
10.	Oktober	26.4	1010.5	89.7
11.	November	26.1	1008.7	92.3
12	Desember	26.4	1009.9	89.0

Sumber: Stasiun Meteorologi dan Geofisika Cut Nyak Dhien, 2017
**) Merupakan SMKG terdekat dari Kabupaten Aceh Jaya*

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Berdasarkan data dari Bappeda Provinsi Aceh pengggunaan lahan di Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2012 masih di dominasi oleh hutan lindung yang luasannya mencapai 165.871,42 Ha atau sebesar 42,82 persen, pertanian lahan kering dengan luas 72.101,98 Ha atau 18,57 persen, hutan produksi sebesar 14.103,16 Ha atau 3,64 persen, hutan produksi terbatas sebesar 71.920,90 Ha atau 18,57 persen. Sedangkan sisanya untuk area peruntukan lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan eksisting di kabupaten Aceh Jaya secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12 Penggunaan Lahan di Kabupaten Aceh Jaya

NO	Jenis Penggunaan	Ha	Persen (%)
1	Danau	57,59	0,01
4	Hutan Lindung	165.871,42	42,82
5	Hutan Produksi	14.103,16	3,64
6	Hutan Produksi Terbatas	7.192,09	18,57
7	Perkebunan	16.611,17	4,31
8	Perkebunan Rakyat	16.433,28	4,25
9	Permukiman	3.804,27	0,99
10	Pertanian Lahan Kering	72.101,98	18,62
11	Peternakan	1.256,21	0,32
12	Sawah	4.198,01	1,08
13	Sungai	1.731,49	0,45
14	Tambak	4.770,54	1,24
15	Transmigrasi	14.358,4	3,7
16	Wilayah Pertambangan	53,89	0,01
Jumlah		**387.272,36**	**100**

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya, 2013

2.1.2 Demografi

Jumlah penduduk Aceh Jaya menurut BPS Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 mencapai 89.618 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 46.482 jiwa dan perempuan sebanyak 43.136 jiwa. Berdasarkan sebaran penduduk konsentrasi jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Jaya jumlah penduduk yang terbanyak ada di Kecamatan Krueng Sabee dengan proporsi terbesar yaitu 16.300 jiwa (18,19 persen) dan proporsi terendah di Kecamatan Darul Hikmah yaitu 6.686 jiwa (7,46 persen). Kepadatan penduduk Kabupaten Aceh Jaya hanya sebesar 21 orang/Km^2 (2012) dan meningkat menjadi 23 orang/km^2 pada tahun 2017. Distribusi jumlah penduduk perkecamatan dapat di lihat pada tabel 2.13, gambar 2.3, dan gambar 2.4.

Tabel 2.13 Distribusi Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2018

Kecamatan	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Teunom	12.155	12.707	12.745	12.928	13.222	19.928
Pasie Raya	6.211	6.494	6.513	6.606	6.757	6.606
Panga	7.014	7.334	7.355	7.460	7.630	7.460
Krueng Sabee	14.984	15.662	15.712	15.937	16.300	15.937
Setia Bakti	8.057	8.422	8.448	8.569	8.764	8.569
Sampoiniet	6.683	6.985	7.007	7.107	7.269	7.107
Darul Hikmah	6.147	6.426	6.445	6.537	6.686	6.537
Jaya	14.972	15.652	15.699	15.924	16.287	15.924
Indra Jaya	6.162	6.441	6.461	6.554	6.703	6.554
Aceh Jaya	**82.385**	**86.123**	**86.385**	**87.622**	**89.618**	**94.622**

Sumber : Disdukcapil Aceh Jaya, 2019

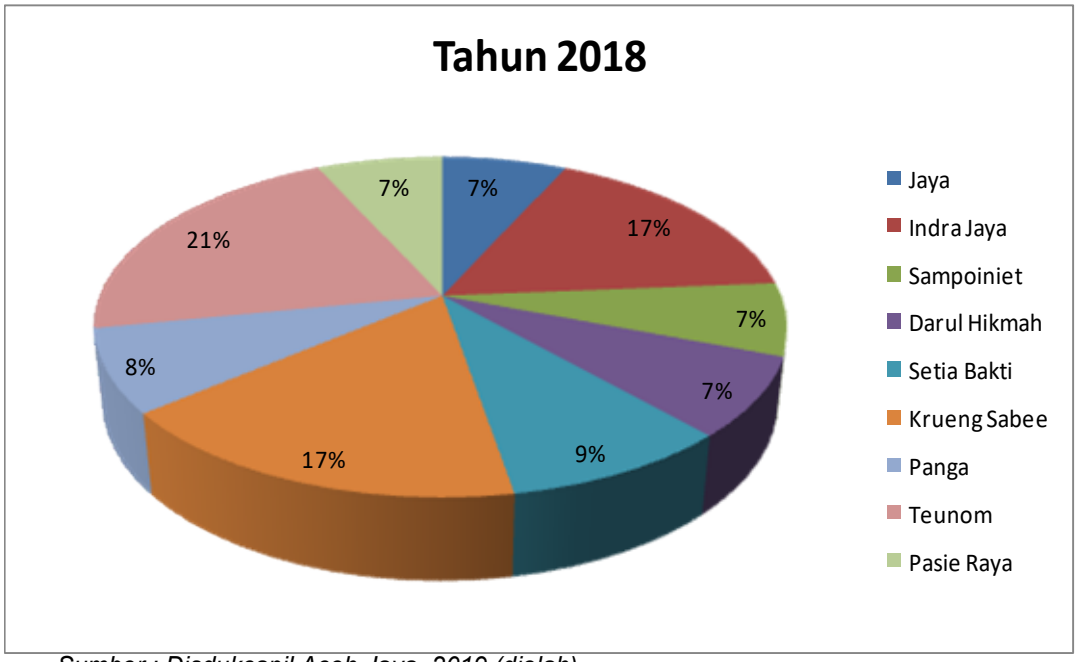

Sumber : Disdukcapil Aceh Jaya, 2019 (diolah)

Gambar 2.3 Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018

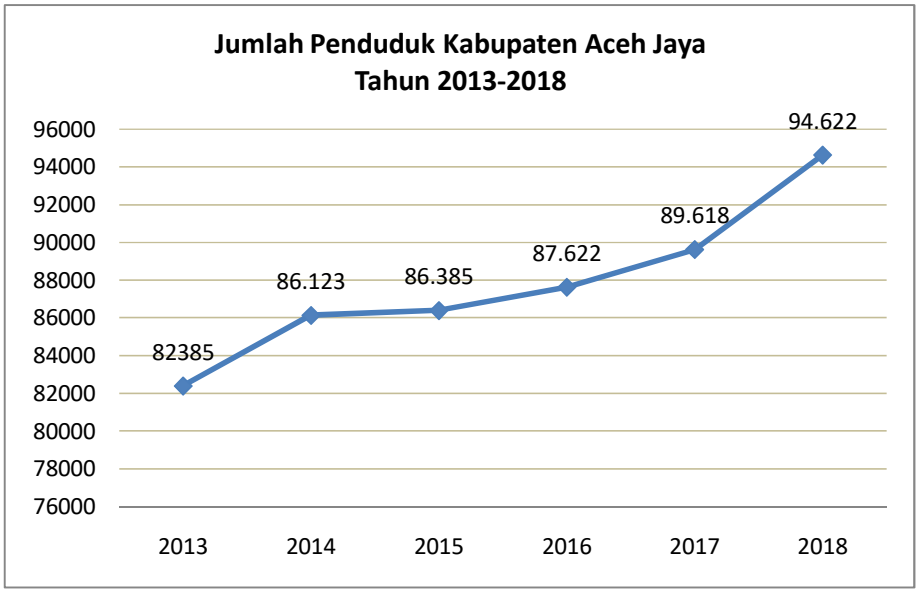

Sumber : Disdukcapil Aceh Jaya, 2019 (diolah)

Gambar 2.4 Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2018

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Jaya terus mengalami peningkatan. Pada periode 2013-2018, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Jaya sebesar 2,14 persen.

Secara demografis, komposisi penduduk KabupatenAceh Jaya tahun 2017 menurut kelompok umur dimulai dari kelompok usia anak-anak sampai usia remaja (0 - 24 tahun) sebesar 40.615 jiwa, kelompok umur 25-59 tahun sebesar 43.024 Jiwa, dan lanjut usia yaitu umur 60 tahun keatas sebesar 5.479 jiwa. Kecilnya proporsi usia lanjut menunjukkan rendahnya angka harapan hidup. Distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat di lihat pada tabel 2.14.

Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
1	*2*	*3*	*4*
0 – 4	5556	5531	11087
5 – 9	4084	3914	7998
10 – 14	3832	3673	7505
15 – 19	3508	3173	6681
20 – 24	3978	3609	7587
25 – 29	4737	4684	9421
30 – 34	4348	3961	8309
35 - 39	3899	3519	7418
40 - 44	3462	2823	6285
45 - 49	2878	2362	5240
50 - 54	2180	1930	4110
55 - 59	1694	1482	3176
60 - 64	1406	1193	2599
65 - 69	946	667	1613
70 - 74	462	539	1001
75+	461	596	1057
Total	**47431**	**43656**	**91087**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Jaya, 2019

Berdasarkan data BPS jumlah penduduk tahun 2018, jumlah penduduk menurut kelompok umur usia produktif (15 – 64 tahun) mencapai 62.973 jiwa, sedangkan untuk usia non produktif (0 - 14 tahun dan 65 th ke atas) mencapai 31.689 jiwa. Dengan data tersebut maka dapat diketahui rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) penduduk usia produktif atas penduduk usia non produktif, yaitu sebesar 33,33 persen, ini berarti 100 orang usia kerja (usia produktif) mempunyai

tanggungan 33 orang belum produktif dan tidak produktif lagi. Angka ini bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,41 persen karena tahun 2017, dimana *dependency ratio* mencapai 49 persen.

Nilai ketergantungan pada tahun 2018 ini semakin rendah dikarenakan jumlah penduduk usia produktif semakin meningkat sementara jumlah penduduk usia belum dan tidak produktif semakin menurun jumlahnya. Secara rinci perkembangan rasio ketergantungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15 Rasio Ketergantungan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 – 2018

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio Ketergantungan (%)	**47,91**	**50,92**	**51,19**	**50,32**	**49,91**	**33,33**
2	Penduduk usia 0-14 th (org)	25.898	25.841	25.898	25.953	26.290	28.098
3	Penduduk usia 15-64 th (org)	56.822	57.067	56.822	58.090	59.737	62.937
4	Penduduk usia +65 th (org)	1.326	3.215	3.188	3.379	3.523	3.591

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Jaya, 2019 (Sementara)

Berdasarkan rasio jenis kelamin, yaitu merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu derah tertentu, dan biasanya dinyatakan sebagai jumlah laki-laki per 100 perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2018 adalah 104 persen yang berarti dari setiap 100 perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki.

2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor. 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2034, Pola ruang wilayah Kabupaten Aceh Jaya dibedakan menjadi kawasan lindung, kawasan budi daya, dan pola ruang laut.

Kawasan Lindung Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut :

1. **Kawasan Hutan Lindung**

   Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Aceh Jaya di tetapkan seluas kurang lebih 165.253,51 Ha, sebagian besar terdapat di Kecamatan Krueng Sabee dan Kecamatan Sampoiniet.

2. **Kawasan Perlindungan Setempat**

   Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan-kawasan khusus setempat seperti sepadan pantai, sepadan sungai, sekitar danau,sekitar mata air dan kawasan ruang terbuka hijau. Untuk lebih jelasnya kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Aceh Jaya dapat di lihat pada tabel 2.16.

Tabel 2.16 Kawasan Perlindungan Setempat berdasarkan Luas Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2034

Kecamatan		Sepadan Sungai		Sepadan Pantai		Sekitar Danau		RTH/Hutan Kota	
		Luas (%)	Persen (%)	Luas (%)	Persen (%)	Luas (%)	Persen (%)	Luas (%)	Persen (%)
1	Jaya	1,107.70	0.29	166.54	0.04	-		69.65	0.02
2	Indra Jaya	947.25	0.24	194.73	0.05	-			
3	Sampoiniet	1,194.36	0.31	246.13	0.04	-			
4	Darul Hikmah	1,17.55	0.29	64.84	0.02	-			
5	Setia Bakti	182.13	0.05	159	0.04	-	0.001	4.31	0.001
6	Krueng Sabee	1,892.46	0.49	49.04	0.01	-		362.03	0.08
7	Panga	336.97	0.09	123.49	0.03	6.12	0.002		
8	Pasie Raya	630.88	0.16	-		-			
9	Teunom	861.07	0.22	189.51	0.05	24.20	0.006	93.96	0.02
Jumlah		**8,270.36**	**2.14**	**1,193.12**	**0.31**	**36.11**	**0.01**	**466.94**	**0.12**

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya, 2013

Berdasarkan tabel 2.10 diatas, sepadan pantai pantai di Kabupaten Aceh Jaya seluas 1,193.12 Ha, sempa dan sungai seluas 8,270.36 Ha, kawasan sekitar danau seluas 36.11 yang meliputi :

a. Danau Paya Laot di Kecamatan Setia Bakti seluas 5.79 Ha
b. Danau Laot Bhe di Kecamatan Panga seluas 6.12 Ha
c. Danau Laot Pineung di Kecamatan Teunom seluas 24.20 Ha

Kawasan Ruang Terbuka Hijau/Hutan Kota Permukiman Perkotaan Kabupaten Aceh Jaya seluas 319.01 Ha meliputi :

a. PPK Lamno seluas 69.65 Ha
b. PKL Kota Calang seluas 303.34 Ha
c. PPK Teunom seluas 93.96 Ha

3. Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya di Kabupaten Aceh Jaya yaitu kawasan cagar budaya berupa Makam Poeteumeuruhom yang berada di Kecamatan Jaya dan rencana pembuatan tugu tsunami di setiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya.

4. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya yang terdapat di Kabupaten Aceh Jaya adalah kawasan yang terdiri dari :

a. Kawasan terumbu karang, meliputi :
   - ✓ Kecamatan Jaya meliputi Gampong Babah Ie, Ujong Sudheun, Gampong Baro, Panton Makmur, Gle Jong, Darat.
   - ✓ Kecamatan Indra Jaya meliputi Gampong Ujong Muloh, Kuala, Kareung Ateuh, Keudee Unga, Cenamprong.
   - ✓ Kecamatan Sampoiniet meliputi Gampong Krueng No, Pulo Raya, Crak Mong, Lhok Kruet, Kuala Ligan, Babah Nipah, Jeumpheuk.
   - ✓ Kecamatan Darul Hikmah meliputi Gampong Baro Patek, Blang Dalam, Patek.
   - ✓ Kecamatan Setia Bakti meliputi Gampong Sawang, Lhok Geulumpang, Lhok Timon, Gampong Baro, Lhok Buya.
   - ✓ Kecamatan Krueng Sabee meliputi Gampong Panton Makmur, Gampong Blang, Bahagia,Sentosa, Dayah Baro,Keutapang, Mon mata, Padang Datar, Keude Krueng Sabee.

b. Kawasan konservasi seluas 2,998.77 Ha, meliputi :
   - ✓ Pengembangan kawasan peudhiet laot (KPL) Kuala Daya di Kecamatan Jaya.

- ✓ Pengembangan kawasan ramah lingkungan (KRL) Lhok Rigah dan sekitarnya di Kecamatan Setia Bakti.

c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan bergambut/resapan air seluas kurang lebih 414,14 Ha berada di kecamatan sampoiniet.

Kawasan Budidaya Kabupaten Aceh Jaya sebagai berikut :

1. **Kawasan Peruntukan Hutan Produksi**

   Kawasan Peruntukan Hutan Produksi terbatas dari hutan produksi tetapi dengan luasnya berturut-turut 70,137.50 Ha dan 13,509.79 Ha.

2. **Kawasan Peruntukan Pertanian**

   Kawasan Peruntukan Pertanian di bagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu, kawasan pertanian lahan basah seluas 47.473,54 Ha, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 3.890,83 Ha, kawasan holtikultural seluas 7.539,89 Ha, kawasan perkebunan seluas 28.018,96 Ha, kawasan perkebunan rakyat seluas 15. 395,90 Ha, kawasan perkebunan seluas 28.018,96 Ha, kawasan peternakan seluas 293,53 Ha, dan kawasan peternakan terpadu seluas 626 Ha yang berada di Kecamatan Setia Bakti meliputi Gampong Padang dan Sapek.

3. **Kawasan Peruntukan Perikanan**

   Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Aceh Jaya meliputi perikanan tangkap dan perairan laut, perairan umum rawa,perairan umum danau dan perairan umum sungai.

   Budidaya perikanan seluas 4.159,09 Ha yang tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan. Penyediaan prasarana perikanan terdiri atas peningkatan prasarana perikanan tangkap dan peningkatan prasarana perikanan budidaya.

4. **Kawasan Peruntukan Pertambangan**

   Kawasan Peruntukan Pertambangan di Kabupaten Aceh Jaya meliputi Pertambangan mineral, logam tersebar di seluruh Kecamatan

dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya dan IUP pertambangan seluas 746,99 Ha berada di Kecamatan Krueng Sabee. Kawasan peruntukan non logam tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Kawasan peruntukan pertambangan batuan meliputi :

- ✓ Pasir Batu terdapat di seluruh kecamatan.
- ✓ Tanah urug terdapat di seluruh kecamatan.
- ✓ Batu kali terdapat di seluruh kecamatan.
- ✓ Batu Gamping terdapat di seluruh kecamatan.

Kawasan peruntukan pertambangan batubara seluas 29.618,59 Ha berada di Kecamatan Panga, Teunom, Pasie Raya dan kawasan peruntukan pertambangan radioaktif tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya, serta kawasan peruntukan pertambangan migas tersebar di seluruh kecamatan wilayah dalam Kabupaten Aceh Jaya.

5. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Aceh Jaya meliputi :

1. Kawasan Peruntukan Industri besar terdapat di Mauree Gampong Aluepiet Kecamatan Panga seluas 671,19 Ha.
2. Kawasan Peruntukan Industri sedang, meliputi :
   - ➢ Kecamatan Jaya dengan jenis potensi industri rotan, kayu,, kakao, kopi, pala, karet dan sawit.
   - ➢ Kecamatan Panga dengan potensi industri rotan, kayu, coklat, sawit rakyat dan karet.
   - ➢ Kecamatan Pasie Raya dengan potensi industri nilam, rotan, kayu, kakao,sawit rakyat dan karet.
   - ➢ Kecamatan Teunom dengan potensi industri sawit.
   - ➢ Pengembangan industri pengelohan ikan di kawasan minapolitan Kecamatan Setia Bakti dan Kecamatan Krueng Sabee.
3. Kawasan Peruntukan Industri kecil tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya.

4. Kawasan Peruntukan Industri terpadu merupakan sebuah kawasan terpadu yang di kelola secara terintegrasi yang menyediakan berbagai macam fasilitas keperluan industri mulai dari penyediaan gudang, air bersih, listrik, tempat produksi pengelolaan limbah terpadu, infrastruktur seperti jalan atau pelabuhan seluas 63,64 Ha berada di Gampong Bahagia Kecamatan Krueng Sabee.

6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan Peruntukan Wisata wilayah Kabupaten Aceh Jaya meliputi:

a. Objek wisata budaya meliputi :
    1. Kecamatan Jaya berupa Seumeuleung .
    2. Kecamatan Indra Jaya berupa Batee Kapai Nakhoda Tgk. Maien, makam Po Meureudhom Unga dan makam Tgk.Disayeung.
    3. Kecamatan Setia Bakti berupa adat kenduri blang.
    4. Kecamatan Krueng Sabee beruba Monumen Tsunami 2004 Gampong Keutapang, Bate Putro Meurendam Dewi dan Gunong Carak.
    5. Kecamatan Panga berupa adat kenduri blang
    6. Kecamatan Teunom berupa Batu Sampah dan Tulak Bala.
b. Objek wisata alam, meliputi :
    1. Kecamatan Jaya berupa Eko Wisata Pante Cermin, Pulo Tsunami Ujong Sudheun dan Gunong Gerutee.
    2. Kecamatan Indra Jaya meliputi batu cap di km. 91, sungai Hongki,dan air terjun Batee Gajah.
    3. Kecamatan Sampoiniet berupa Ie Jeureungeuh,Sarah Deu, Pulo Raya, Krueng Noe, dan Kuala Bakong, pantai Pasie Saka, Gunong Keumala, dan air terjun Simpang Peut.
    4. Kecamatan Darul Hikmah berupa air terjun Gunung Keumi di Gampong Alue Gajah, Gua Sayeung Teurbang, Pulo Keuh,

air terjun Batee Patah dan Layang Terbang di Gampong Masen.

5. Kecamatan Setia Bakti berupa kawasan Lhok Geulumpang, Kuala Do (Dawod Jerman), pesona Krueng Lageun, pulau Reusam, teluk Rigaih, rawa Pengapet, Guha Teukabo, air terjun Alue Bheb, air terjun Pucok Alue Sampan dan Ujong Baroh Hilla.
6. Kecamatan Krueng Sabee berupa Ujong Serangga Gampong Keutapang, teluk Lhok Kubu, teluk Calang, Gunong Bhom dan Mon Toejoh.
7. Kecamatan Panga berupa Laot Bhee, Pante Ceumara Lancar Sira, Aron Meubanja/Konservasi Penyu, air terjun Ceuraceu Lue Teungoh berada di Gampong Panton Kabu dan Alue Abet.
8. Kecamatan Pasie Raya meliputi Tuwie Kareung, air terjun, Hutan Alam Ulu Masen dan Laot Pineung Suasa.
9. Kecamatan Teunom berupa Danau Laot Ni Pineung Suasa, pantai Tulak Bala, pantai Lampoh kawa, pantai Mutia Lueng Gayo dan pantai Paya Baro.

c. Objek wisata khusus atau minat, meliputi :
    1. Kecamatan Jaya berupa Puncak Gerutee Kuliner, Arun Jeuram dan Guha Teumiga.
    2. Kecamatan Sampoiniet berupa Arung Jeram.
    3. Kecamatan Setia Bakti berupa *Concrank Hills* kuliner, Rest Area Aceh Timber Rigaih dan wisata kuliner di Gampong Babah Ngom.
    4. Kecamatan Krueng Sabee berupa kuliner pinggir pantai dan Panorama Bate Tutong.
    5. Kecamatan Pasie Raya berupa Arung Jeram.
d. Objek wisata pantai meliputi wilayah pesisir pantai Kabupaten Aceh Jaya.

7. Kawasan Peruntukan Pemukiman

Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan di Kabupaten Aceh Jaya seluas 1.638,02 Ha meliputi :

1. Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Aceh Jaya seluas 1.638,02 Ha meliputi :
    a. Kawasan permukiman perkotaan Calang di Kecamatan Krueng Sabee seluas 773,32 Ha dan di Kecamatan Setia Bakti seluas 773,32 Ha.
    b. Kawasan permukiman perkotaan Lamno di Kecamatan Jaya seluas 403,35 Ha.
    c. Kawasan permukiman perkotaan Teunom di Kecamatan Teunom seluas 368.44 Ha.
2. Kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Aceh Jaya berupa desa-desa yang tidak termmasuk ke dalam Ibukota Kecamatan seluas 2.915,91 Ha, meliputi :
    a. Kecamatan Jaya seluas 259.22 Ha.
    b. Kecamatan Indra Jaya seluas 195.34 Ha.
    c. Kecamatan Sampoiniet seluas 448.09 Ha.
    d. Kecamatan Darul Hikmah seluas 329.86 Ha.
    e. Kecamatan Setia Bakti seluas 421.04 Ha.
    f. Kecamatan Krueng Sabee seluas 303.15 Ha.
    g. Kecamatan Panga seluas 342.73 Ha
    h. Kecamatan Pasie Raya seluas 303.30 Ha.
    i. Kecamatan Teunom seluas 313.19 Ha.

Kawasan perkantoran pemerintahan di Kabupaten Aceh Jaya terdiri atas perkantoran pemerintah. Peruntukan kawasan perkantoran pemerintah didasarkan pada rencana pengembangan yang sudah diputuskan sebelum perencanaan ini.

8. Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya di Kabupaten Aceh Jaya meliputi kawasan pertahanan dan keamanan serta kawasan transmigrasi.

Kawasan transmigrasi seluas 4.447,32 Ha meliputi Kecamatan Jaya, Darul Hikmah, Setia Bakti, Krueng Sabee, Panga, Pasie Raya dan Teunom.

Rencana Pola Ruang Laut Kabupaten Aceh Jaya terdiri atas :

1. Zona konservasi, meliputi seluruh kawasan yang sudah di tetapkan sebagai kawasan konservasi perairan sejauh 4 (empat) mil seluas 30.728,22 Ha.
2. Zona pemanfaatan umum, meliputi kawasan yang di tetapkan sebagai perikanan tangkap seluas 73.222,11 Ha meliputi seluruh wilayah perairan selain zona konservasi perairan sejauh 4 (empat) mil.
3. Zona budidaya laut seluas 382,57 Ha, meliputi :
    - ✓ Kecamatan Indra Jaya seluas 345,33 Ha.
    - ✓ Kecamatan Setia Bakti seluas 2,42 Ha.
    - ✓ Kecamatan Krueng Sabee seluas 34,82 Ha.
4. Penataan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Aceh Jaya akan disusun dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil yang akan di tetapkan dalam peraturan daerah tersendiri.

2.1.4.Wilayah Rawan Bencana

Sesuaidengankarakteristik Kabupaten Aceh Jaya,dimana Gerakan Tanah dapat dipahami sebagai salah satu proses geodinamik, yang berupa proses perpindahan massa tanah atau batuan penyusun lereng, akibat terjadi gangguan kestabilan pada lereng tersebut. Kestabilan suatu lereng dapat dikontrol oleh berbagai faktor, yaitu morfologi (kemiringan dan bentuk lereng), batuan penyusun lereng, struktur geologi, kondisi hidrologi lereng dan jenis pemanfaatan lahan pada lereng Aceh terdiri dari wilayah-wilayah yang sebagian besar merupakan perbukitan atau pegunungan sehingga banyak dijumpai lahan miring ataupun bergelombang. Lereng pada lahan yang miring ini berpotensi untuk

mengalami gerakan massa tanah atau batuan. Temperatur dan curah hujan yang tinggi sangat mendukung terjadinya proses pelapukan batuan pada lereng (proses pembentukan tanah), akibatnya lereng akan tersusun oleh tumpukan tanah yang tebal. Lereng dengan tumpukan tanah yang lebih tebal relatif lebih rentan terhadap gerakan tanah. Daerah rawan bencana gerakan tanah di Kabupaten Aceh Jaya tersebar di setiap kecamatan. Beberapa Kecamatan merupakan Kecamatan rawan banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain adalah:

- Gempa

  Jumlah Kecamatan, Mukim, Gampong dan jumlah penduduk rawan bencana gempa yaitu :

  - 9 Kecamatan;
  - 21 Mukim;
  - 172 Gampong;
  - 94,622 Jiwa; dan
  - Rumah 23.852 Unit;

- Tsunami

  Jumlah Kecamatan, Mukim, Gampong dan Jumlah Penduduk Rawan Bencana Tsunami yaitu :

  - 8 Kecamatan;
  - 16 Mukim;
  - 73 Gampong;
  - 45.374 Jiwa;

- Banjir

  Jumlah Kecamatan, Mukim, Gampong dan Jumlah Penduduk Rawan Bencana banjir yaitu :

  - 9 Kecamatan;
  - 19 Mukim;
  - 125 Gampong; dan
  - 56.606 Jiwa Yang Terancam.

- Tanah Longsor

  Jumlah kecamatan, mukim, gampong dan jumlah penduduk rawan terhadap bencana longsor adalah :

  - 9 Kecamatan;
  - 15 Mukim;
  - 62 Gampong; dan
  - 23.022 Jiwa

- Angin Puting Beliung

  Jumlah kecamatan, mukim, gampong dan jumlah penduduk rawan terhadap bencana Angin Putting Beliung adalah :

  - 7 Kecamatan;
  - 12 Mukim;
  - 26 Gampong; dan
  - 19.902 Jiwa

- Kebakaran Lahan (Rumah)

  Jumlah kecamatan, mukim, gampong dan jumlah penduduk rawan terhadap bencana Kebakaran Lahan adalah :

  - 8 Kecamatan;
  - 7 Mukim;
  - 53 gampong; dan
  - 10.505 Jiwa

Tabel 2.17 Jumlah Desa Rawan Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018

Kecamatan	Banjir	Gempa Bumi	Tsunami	Tanah Longsor	Kebakaran Lahan	Angin Puting Beliung
1. Teunom	14	22	12	0	3	2
2. Pasie Raya	14	14	0	3	0	0
3. Panga	19	20	4	8	1	1
4. Krueng Sabee	9	17	10	6	6	8
5. Setia Bakti	9	13	6	6	1	3
6. Sampoiniet	17	19	10	5	7	3
7. Darul Hikmah	15	19	3	6	3	3

Kecamatan	Banjir	Gempa Bumi	Tsunami	Tanah Longsor	Kebakaran Lahan	Angin Puting Beliung
8. Jaya	15	34	13	11	0	7
9. Indrajaya	12	14	8	19	1	1
Jumlah	**124**	**172**	**66**	**64**	**22**	**28**

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya, 2019

Dari tabel di atas terlihat peningkatan jumlah desa rawan bencana dibeberapa kecamatan untuk beberapa jenis bencana. Sementara jumlah bencana alam yang terjadi Adapun jumlah bencana alam menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya sebagai berikut:

Tabel 2.18 Jumlah Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018

Kecamatan	Banjir	Gempa Bumi	Tsunami	Tanah Longsor	Kebakaran Lahan	Angin Puting Beliung
1. Teunom	2	0	0	0	4	1
2. Pasie Raya	3	0	0	0	0	1
3. Panga	0	0	0	0	1	0
4. Krueng Sabee	1	0	0	0	8	0
5. Setia Bakti	3	0	0	3	0	0
6. Sampoiniet	1	0	0	2	2	1
7. Darul Hikmah	3	0	0	0	1	0
8. Jaya	0	0	0	0	1	0
9. Indra jaya	1	0	0	1	1	0
Jumlah	**14**	0	0	**6**	**18**	**3**

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya, 2019

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1.Pertumbuhan PDRB

Perekonomian Kabupaten Aceh Jaya didominasi oleh sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, hotel, jasa-jasa, dan lainnya. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten

Aceh Jaya terus mengalami kenaikan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada Tahun 2018 nilai PDRB ADHB Kabupaten Aceh Jaya sebesar 2,43 trilyun rupiah atau meningkat sebesar 160,4 milyar rupiah dibanding tahun 2017 yang mencapai 2,27 trilyun rupiah. Sama halnya dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), selama kurun waktu 5 tahun terakhir PDRB ADHK Kabupaten Aceh Jaya terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB ADHK Kabupaten Aceh Jaya adalah sebesar 2,11 Triliun rupiah atau meningkat 1,35 miliyar rupiah bila dibandingkan dengan tahun 2015 (1,98 triliyun rupiah). Perkembangan nilai PDRB menurut kategorinya dapat di lihat pada Gambar 2.5 dan Gambar 2.6.

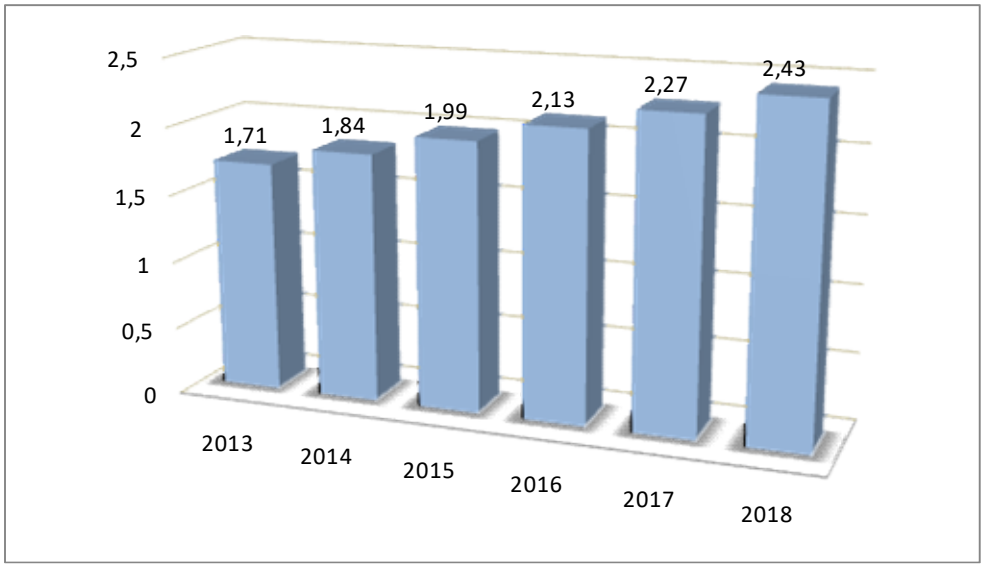

Sumber Data :Badan Pusat Statistik Aceh Jaya, 2019 (Data Sementara)

Gambar 2.5 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2013-2018 Kabupaten Aceh Jaya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Triliun Rupiah)

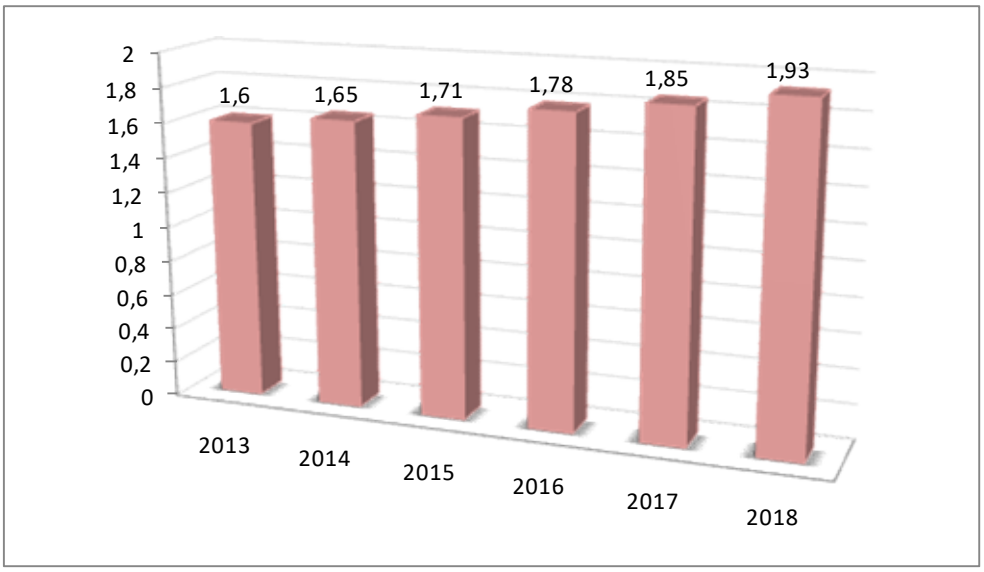

Sumber Data :Badan Pusat Statistik Aceh Jaya, 2019 (Data Sementara)

Gambar 2.6 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2013-2018 Kabupaten Aceh Jaya Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Triliun Rupiah)

Struktur ekonomi menunjukkan peranan sektor ekonomi dalam suatu daerah sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai kategori apa saja yang menopang perekonomian daerah tersebut. Selama tahun 2018, kategori pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan *Leading Sector* di Kabupaten Aceh Jaya, kontribusinya dalam PDRB sebesar 33,01 persen. Kategori kedua yang memiliki peranan terbesar adalah konstruksi sebesar 16,13 persen, dan kategori Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib padaperingkat ketiga penyumbang PDRB sebesar 13,05 persen sebagaimana terlihat pada gambar 2.7.

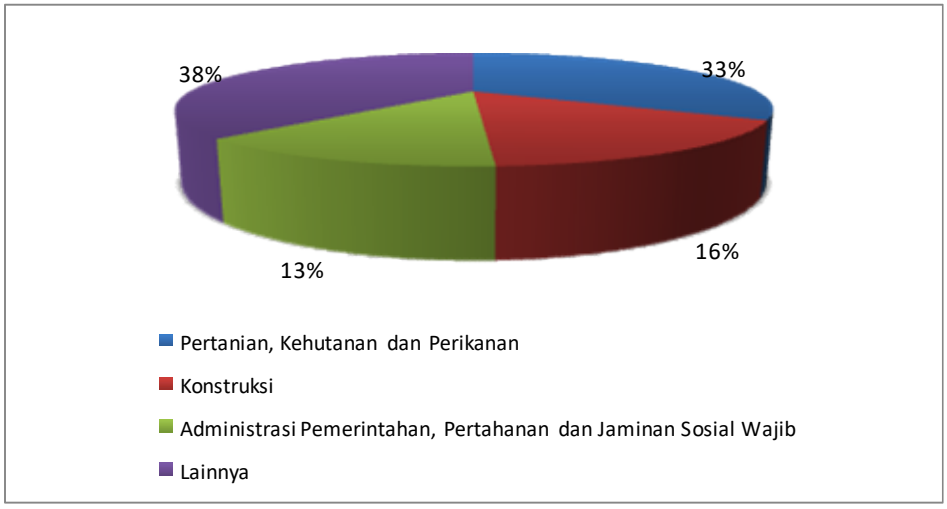

Sumber Data :Badan Pusat Statistik Aceh Jaya, 2019 (Data Sementara)

Gambar 2.7 Distribusi Persentase PDRB ADHB Aceh Jaya Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018

Seperti halnya perekonomian nasional, perekonomian Kabupaten Aceh Jaya bercirikan *domestic-demandleadgrowth*, dimana dominasi utama berasal dari konsumsi rumah tangga sebesar 52,12 persen pada tahun 2018.

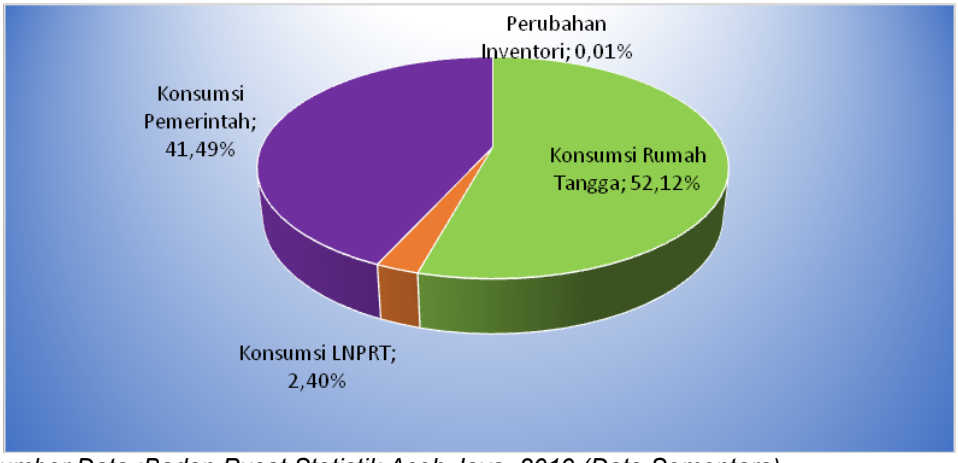

Sumber Data :Badan Pusat Statistik Aceh Jaya, 2019 (Data Sementara)

Gambar 2.8 Distribusi Persentase PDRB ADHB Aceh Jaya Menurut Pengeluaran Tahun 2018

Permintaan domestik menjadi kekuatan ekonomi Aceh Jaya untuk

tumbuh dan membentuk resistensi terhadap gejolak eksternal. Konsumsi rumah tangga yang tinggi akan menjadi sumber ketahanan ekonomi yang penting apabila dapat dimanfaatkan sebagai pasar hasi lproduksi.

2.2.1.2.Laju inflasi

Dengan menggunakan pertumbuhan dari PDRB deflator diperoleh indikator inflasi indeks harga implisit. Indek implisit merupakan salah satu indikator yang penting dalam menggambarkan stabiitas ekonomi suatu daerah. Indeks ini mencakup semua jenis harga seperti harga konsumen, harga produsen, harga perdagangan besar, harga eceran dan harga lainnya yang sesuai dalam perhitungan nilai produksi setiap sektor. Perubahan pada indeks implisit mampu mengukut tingkat perubahan harga atau inflasi dari sisi produsen atas agregat pendapatan terhadap harga pada tahun dasar.

Perubahan indeks implisit yang kemudian disebut dengan laju implisit, pada tahun 2018 besarnya mencapai 3,17 persen, Pada tahun 2017 sektor yang mempunyai laju implisit terendah adalah sektor Informasi dan Pertambangan dan pengalian (0,18) persen. Sedangkan sektor yang mengalami laju implisit tertinggi adalah pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (7,29 persen).

Tabel 2.21 Laju Indeks Implisit Menurut Sektor Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4	4.35	4.82	4.62	3.97
B. Pertambangan dan Penggalian	2.17	-	-	-	-
C. Industri Pengolahan	5.19	5.11	5.52	8.05	7,66
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5.44	7.10	10.54	10.95	9,64
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.31	5.76	5.53	5.85	5,54

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
F. Kontruksi	3.48	4.44	5.48	5,42	5,43
G. Perdagangan Besar dan Eceren, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.54	3.80	4.97	4.47	4.21
H. Tranportasi dan Pergudangan	2.20	2.47	-	1.67	1.60
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.47	2.12	6.08	5.99	4.77
J. Informasi dan Komunikasi	-	1,81	2,74	3,03	2,83
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5.70	6.60	3.55	6.80	5.34
L. Real Estate	4.74	6.14	6.98	5.48	6.13
M,N. Jasa Perusahaan	2.01	4.92	4.11	7.11	6.29
O. Adminitrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6.45	7.78	7.50	7.09	6.81
P. Jasa Pendidikan	4.81	6.18	8.07	7.48	6.24
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.17	6.59	7.38	7.60	6.36
R,S,T,U. Jasa Lainnya	3.87	5.67	4.55	6.08	6.19
Produk Domestik Regional Bruto	**3.69**	**3.71**	**3.89**	**4**	**4.03**

Sumber Data :Badan Pusat Statistik Aceh Jaya, 2019 (Diolah)

2.2.1.3. Angka Kemiskinan

Bappenas dalam dokumen strategi nasional penanggulangan kemiskinan mendefinisikan masalah kemiskinan bukan hanya sekedar diukur dari pendapatan, tetapi juga masalah kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang, baik laiki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin. Masalah kemiskinan juga menyangkut tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.Angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Jaya pada

tahun 2018 sebesar 14,16 persen, meskipun dibawah angka kemiskinan Provinsi Aceh (15.97persen), dengan penurunan dari tahun ke tahun menunjukan laju penurunan lambat. Dengan kata lain, upaya pengentasan kemiskinan menjadi salah satu permasalahan dan tantangan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana terlihat pada gambar 2.9.

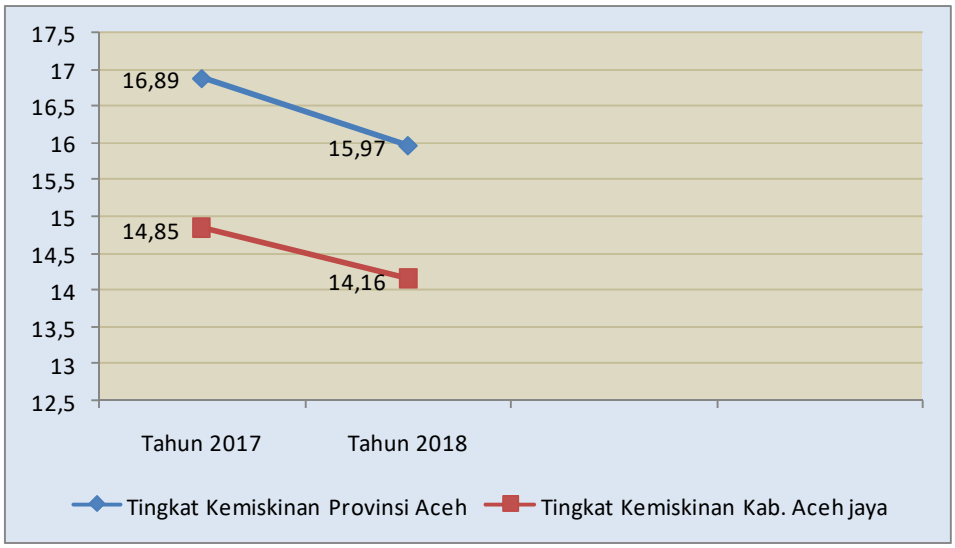

Sumber Data :Badan Pusat Statistik Aceh Jaya, 2018 (Diolah)

Gambar 2.9 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2018

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Berdasarkan data BPS tahun 2017-2018, indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Aceh Jaya menunjukan trend fluktuatif, kondisi ini menunjukan bahwa upaya pengurangan kesenjangan pengeluaran kemiskinan di Kabupaten Aceh Jaya selama tahun 2017-2018 harus lebih ditargetkan.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) merupakan gambaran mengenai penyataan pengeluaran di antara penduduk miskin. Capaian indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2018 sebesar 0,73, menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,5 (2017), sebagaimana diperlihatkan pada gambar 2.10.

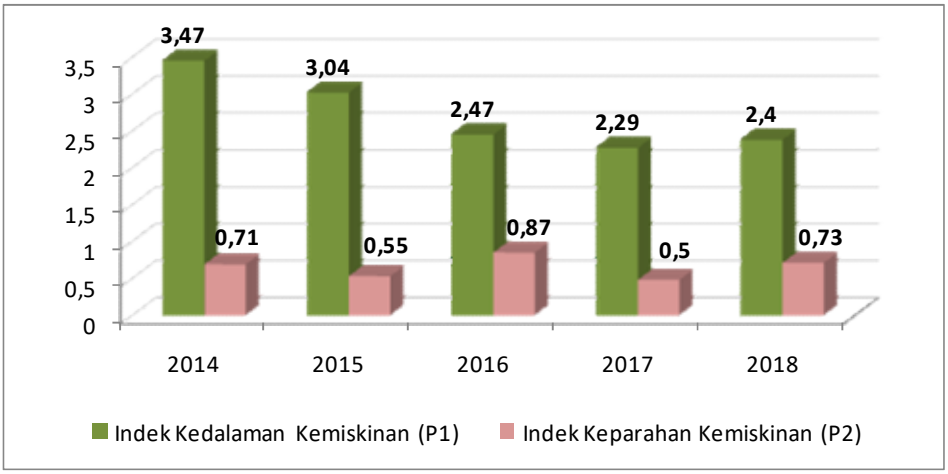

Sumber Data :Badan Pusat Statistik Propinsi Aceh, 2019 (Diolah)

Gambar 2.10 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2018

2.2.1.4. Kasus Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan dapat terselenggara dengan baik, apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Jumlah Kasus Kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Aceh Jaya terjadi pasang surut, dimana pada tahun 2018 kasus tertinggi yang sangat signifikan adalah kasus Curanmor naik hingga 3 kali lipat dari 8 kasus menjadi 39 kasus. Sedangkan kasus pencabulan terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 6 kasus tahun 2017 menjadi 3 kasus pada tahun 2018, sebagaimana terlihat pada gambar 2.11.

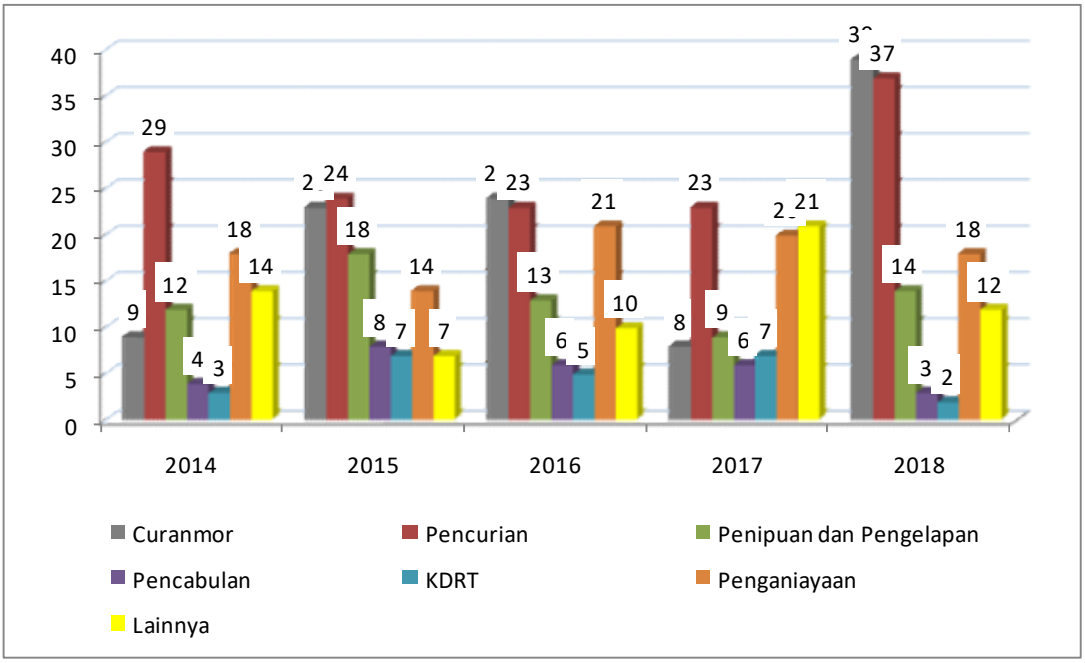

Sumber : Polres Kabupaten Aceh Jaya, 2019 (diolah)

Gambar 2.11Jumlah Kasus Kriminalitas di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2018

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Pendidikan

A. Angka Melek Huruf

Pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial berkaitan dengan kualitas manusia dan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya. yang tercermin pada pendidikan, kesehatan, kepemilikan tanah, dan kesempatan kerja. Capaian bidang pendidikan untuk indikator Angka Melek Huruf (AMH) pada tahun 2018 sebesar 95,01 persen, sedangkan Tahun 2011 sebagai tahun dasar perhitungan/*baseline* adalah sebesar 94,12 persen. Perkembangan angka melek huruf Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana terlihat gambar 2.12 di bawah ini.

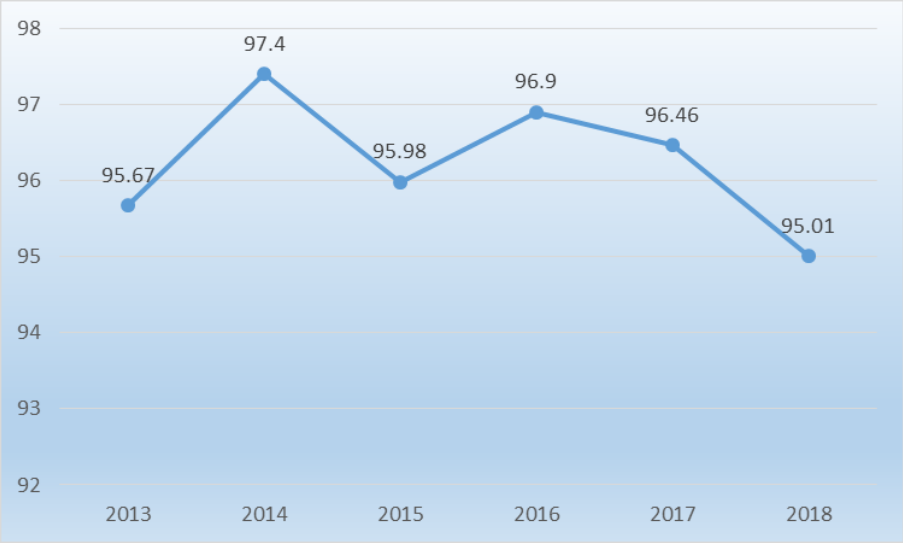

Sumber Data :Badan Pusat Statistik Aceh Jaya, 2018 (Diolah)

Gambar 2.12 Angka Melek Huruf di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2018

Hingga tahun 2018, rata-rata Angka Melek Huruf Kabupaten Aceh Jaya di bawah rata-rata AMH Provinsi Aceh, dimana rata-rata AMH Provinsi Aceh adalah 97,28 persen, sedangkan rata-rata AMH Kabupaten Aceh Jaya sebesar 95,01 persen. bahkan bila dibandingkan dengan rata-rata AMH Nasional, maka AMH Aceh Jaya masih berada di atas AMH Nasional (95,66 persen). Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.22 di bawah ini:

Tabel 2.22 Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Tahun 2013-2018

AMH	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aceh Jaya	95,67	97,40	95,98	96,90	96,46	95,01
Aceh	96,75	98,25	97,63	97,74	97,94	97,28
Nasional	94,14	95,88	95,22	95,38	95,50	95,66

Sumber Data :Badan Pusat Statistik Aceh Jaya, 2019 (Diolah)

B. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Untuk capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Aceh Jaya bisa dilihat pada tabel 2.23 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2010-2016 dimana pada tahun 2010 adalah 7,17 dan pada tahun 2016 adalah 7,95.

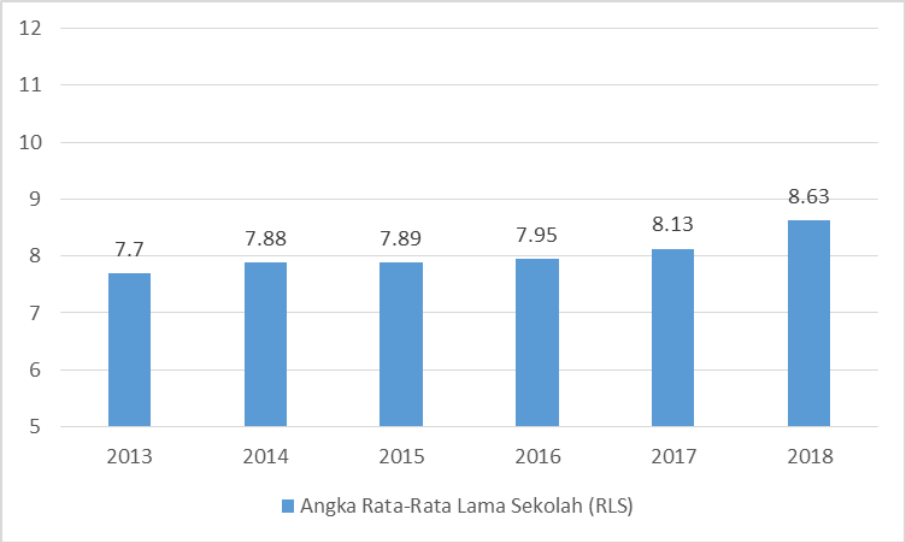

Sumber Data :Badan Pusat Statistik Aceh Jaya, 2019 (Diolah)

Gambar 2.13 Capaian RLS di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2018

Dari gambar di atas terlihat rata-rata lama sekolah di Aceh Jaya menunjukkan trend peningkatan, rata-rata penduduk Aceh Jaya mengenyam pendidikan selama 7,95 tahun, atau hingga kelas dua SMP sebelum akhirnya berhenti sekolah.

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2018 yaitu sebesar 8,37 tahun masih lebih rendah dari pada rata-rata lama sekolah Provinsi Aceh yang sudah mencapai 9,09 tahun, namun masih lebih tinggi daripada Nasional (7,74 tahun), sebagaimana terlihat pada tabel 2.23. Jika Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, Kabupaten Aceh Jaya menduduki posisi 16 dari 23 kabupaten/kota.

Tabel 2.23 Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)cTahun 2013-2018

ARLS	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aceh Jaya	7,70	7,88	7,89	7,95	8,13	8,37
Aceh	8,44	8,71	8,77	8,86	8,98	9,09
Nasional	7,61	7,73	7,84	7,95	8,10	8,17

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Aceh Jaya, 2019 (Diolah)

C. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah Kabupaten Aceh Jaya meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata angka harapan lama sekolah Kabupaten Aceh Jaya (13,96) sudah berada diatas rata-rata Provinsi Aceh (14,27) dan rata-rata nasional (12,91). Pada tahun 2022, penduduk Kabupaten Aceh Jaya diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan setara D1-D2.

Tabel 2.24 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2013-2018

AHLS	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aceh Jaya	13,69	13,81	13,93	13,94	13,95	13,96
Aceh	13,36	13,53	13,73	13,89	14,13	14,27
Nasional	12,10	12,39	12,55	12,72	12,72	12,91

Sumber Data :Badan Pusat Statistik Propinsi Aceh, 2019 (Diolah)

2.2.2.2 Kesehatan

A. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) menggambarkan panjang umur penduduk dalam suatu wilayah. Selama periode 2012 – 2016 Angka harapan hidup kabupaten Aceh Jaya mengalami kenaikan dari 66,70 tahun menjadi 66,77 tahun. Angka 66,77 menunjukkan bahwa seseorang yang lahir pada tahun 2016 mempunyai peluang rata – rata kelansungan hidupnya selama 66,77 tahun ke depan. Berarti kualitas hidupnya meningkat, seperti pemenuhan makanan lebih baik, kesehatan terjaga dan sebagainya sehingga membuat lama hidupnya bertambah.

Peningkatan ini menunjukkan pembenahan fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya sudah mulai menampakkan hasilnya baik tenaga kesehatan maupun sarananya dan terus naik hingga pada tahun 2018 mencapai angka 66.88 tahun sebagaimana terlihat pada gambar 2.14.

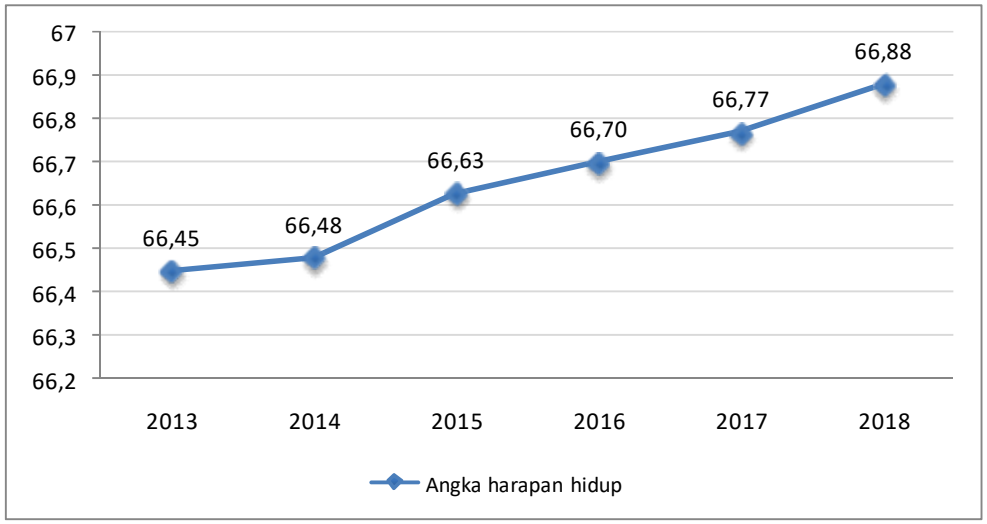

Sumber Data :Badan Pusat Statistik Propinsi Aceh, 2019 (Diolah)

Gambar 2.14 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2018

Namun jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional, Angka Harapan Hidup Kabupaten Aceh Jaya masih lebih rendah daripada Provinsi Aceh yang sudah mencapai 69,51 tahun dan Nasional (70,90 tahun), sebagaimana terlihat pada tabel 2.25 dibawah ini.

Tabel 2.25 Angka Harapan Hidup Tahun 2013-2018

Angka Harapan Hidup	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aceh Jaya	66,45	66,48	66,63	66,70	66,77	66,88
Aceh	69,31	69,35	69,50	69,51	69,52	69,64
Nasional	70,40	70,59	70,78	70,90	71,06	17,12

Sumber Data :Badan Pusat Statistik Aceh Jaya, 2019 (Diolah)

B. Angka Kematian Neonatus (AKN)

Penyebab utama kematian pada bayi dan balita adalah masa neonatus. Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbanyak adalah asfiksia, bayi berat lahir rendah dan infeksi. Sebagian besar kematian bayi di dominasi oleh kematian neonatus. Angka kematian Neonatus (AKN) di Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2012 sebesar 15,8 per 1.000 kelahiran hidup (KH) dan menurun secara bertahap hingga mencapai 8 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016, sebagaimana terlihat pada tabel 2.26.

C. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian BayiKabupaten Aceh Jaya dalam kurun waktu lima tahun mengalami kenaikan dari 11 per 1.000 KH pada tahun 2016 menjadi 17 per 1.000 KH pada tahun 2017. Penyebab kematian bayi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyebab kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan antara lain kehamilan risiko tinggi, berat badan lahir bayi rendah serta penyakit konginetal dan penyebab kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun, antara lain karena masih rendahnya pemberian ASI eksklusif, penyakit infeksi serta belum optimalnya pola asuh bayi dan balita. Kondisi AKB kabupaten Aceh Jaya kurun waktu Tahun 2011 – 2016 sebagaimana terlihat dalam tabel 2.26.

D. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita Kabupaten Aceh Jaya dalam kurun waktu lima tahun mengalami menurun dari 12,7 per 1.000 KH pada tahun 2016 menjadi 17 per 1.000 KH pada tahun 2017. Salah satu target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah penurunan AKB dan AKABA sehingga menjadi menjadi prioritas sektor kesehatan baik ditingkat nasional maupun daerah. Kondisi AKABA kabupaten Aceh Jaya kurun waktu Tahun 2012 – 2016 sebagaimana terlihat dalam tabel 2.26.

E. Angka Kematian Ibu (AKI)

AKI adalah banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Kecenderungan angka kematian ibu dalam kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan dari 111,4 Per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2013 menjadi 54 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2018. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat khususnya status kesehatan ibu masih perlu ditingkatkan terutama di wilayah – wilayah dengan kasus kematian ibu tinggi. Kondisi AKI kabupaten Aceh Jaya kurun waktu Tahun 2013 – 2018 sebagaimana terlihat dalam tabel 2.26.

F. Angka Prevalensi Anak Pendek *(Stunting)*

Berdasarkan data survey Pemantauan Status Gizi Balita yang diselenggarakan kemenkes hingga tahun 2017 menunjukan peningkatan (38,3) dari 22,8 pada tahun 2016Kondisi Angka Prevalensi Anak Pendek (Stunting) kabupaten Aceh Jaya kurun waktu Tahun 2011 – 2016 sebagaimana terlihat dalam tabel 2.26.

Tabel 2.26 AKN, AKB, AKABA, AKI, dan Prevalensi Anak Pendek (Stunting) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
AKN	12 per 1000 KH	11 per 1000 KH	13 Per 1000 KH	8 per 1000 KH	13 per 1000 KH	8 per 1000 KH
AKB	18per 1000 KH	16per 1000 KH	19Per 1000 KH	11 per 1000 KH	17 per 1000 KH	11 per 1000 KH
AKABA	20 per 1000 KH	17 per 1000 KH	21 Per 1000 KH	12 per 1000 KH	17 per 1000 KH	11 per 1000 KH
AKI	179 per 1000 KH	490 per 1000 KH	0 Per 1000 KH	322 per 1000 KH	54 per 100.000 KH	54 per 100.000 KH

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pendek (stunting) (TB/U)	-	-	25,5	22,8	16,2	13,8

Sumber : Dinkes Aceh Jaya, 2019 (Diolah)

G. Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga merupakan strategi baru pembangunan kesehatan. Desa siaga lahir sebagai respon pemerintah terhadap masalah kesehatan di Indonesia yang tak kunjung selesai. Tingginya angka kematian ibu dan bayi, munculnya kembali berbagai penyakit lama seperti tuberkulosis paru, merebaknya berbagai penyakit baru yang bersifat pandemik seperti HIV/AIDS, serta belum hilangnya penyakit endemis seperti diare dan demam berdarah merupakan masalah kesehatan di Kabupaten Aceh Jaya. Desa siaga adalah suatu konsep peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri. Dari 172 desa yang ada di Kabupaten Aceh Jaya, hingga tahun 2016 sudah ada 80 desa siaga aktif (46,51 persen). Sementara jumlah desa yang sudah melaksanakan STBM hingga tahun 2016 sudah sebanyak 103 desa (60 persen) dari total 172 desa yang ada di Kabupaten Aceh Jaya.Adapun Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) di Kabupaten Aceh Jaya juga sudah mulai digalakkan, dimana GERMAS mengedepankan upaya promotif dan preventif, tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan semua komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat, dengan pendekatan keluarga. Hingga tahun 2016 belum ada satupun kecamatan yang menggalakkan GERMAS di Kabupaten Aceh Jaya.

2.2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Jaya, menunjukan bahwa untuk tahun 2016 nilai IPM Kabupaten Aceh Jaya adalah 67,7

poin meningkat 1,47 poin dibanding nilai IPM tahun 2012 yang sebesar 66,23 poin sebagaimana terlihat pada gambar 2.15 di bawah ini:

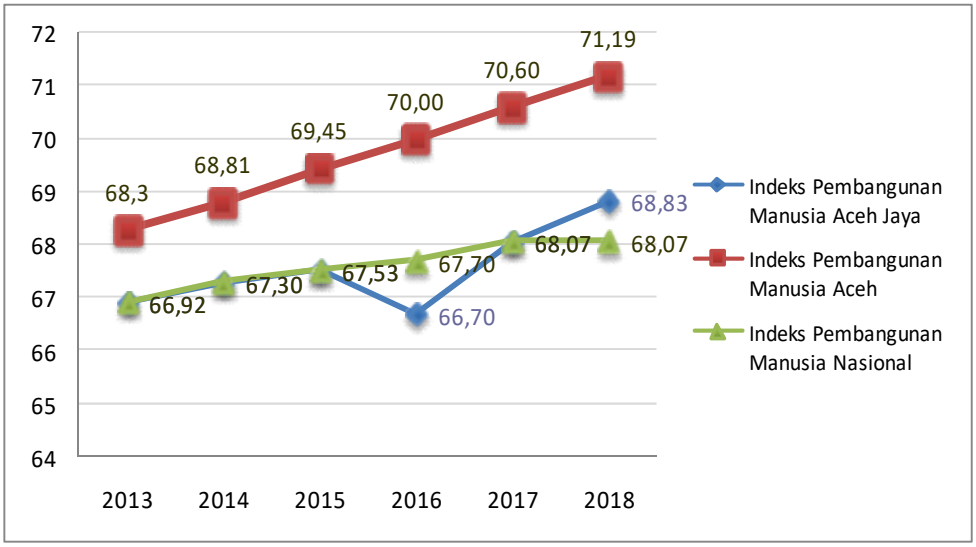

Sumber Data :Badan Pusat Statistik Propinsi Aceh, 2019 (Diolah)

Gambar 2.15 Perbandingan perkembangan IPM Aceh Jaya, Aceh dan Nasional tahun 2013-2018

Meskipun dari gambar di atas peningkatan IPM Kabupaten Aceh Jaa dari tahun ke tahun namun tetap masih dibawah IPM Aceh dan IPM Nasional. Jika Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, Kabupaten Aceh Jaya menduduki posisi 16 dari 23 kabupaten/kota.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Capaian terhadap indikator-indikator kesenian dan olahraga yang ada di Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat pada tabel 2.27 dibawah ini:

Tabel 2.27 Capaian Indikator Seni Budaya Aceh Jaya Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Jumlah
1	Komunitas Budaya	Lembaga	36
2	Sanggar Kesenian	Organisasi	30
3	Group Kesenian	Jumlah	15
4	Kegiatan Kebudayaan	Jumlah	10
5	Kegiatan Kesenian	Jumlah	10

No	Indikator	Satuan	Jumlah
6	Panggung Seni Kecamatan	Unit	10
7	Gedung Kesenian	Unit	1
8	Situs/Cagar Budaya (Makam)	Unit	41

Sumber : Disdik Aceh Jaya, 2019

Selain memiliki budaya benda berupa situs/cagar budaya, Kabupaten Aceh Jaya juga memiliki budaya tak benda *(intangible)* yang beragam, seperti tari-tarian, adat istiadat, dan kegiatan spiritual, seperti salah satunya kegiatan semeulung dan seumeunap pada makam Raja Meureuhom Daya di Lamno. Keberadaan gedung kesenian yang dipergunakan untuk mewadahi aktifitas seni menjadi perhatian khusus dalam mengembangkan budaya tak benda, kondisi gedung kesenian yang ada di Kabupaten Aceh Jaya tidak memiliki fasilitas yang memadai seperti tata pencahayaan serta akuistik yang secara arsitektural mendukung untuk dilakukan sebuah pertunjukan atau pameran, sudah selayaknya menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

Dalam Pekan Olahraga Aceh (PORA) pada tahun 2010 dari 46 cabang yang diperlombakan, Kabupaten Aceh Jaya hanya mengikuti 20 cabang olahraga dan menempati posisi 21 (6 emas), terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014, dimana menempati peringkat 15 (7 emas, 9 perak, dan 10 perunggu). Adapun cabang olahraga yang menjadi andalan adalah tarung derajat, balap motor, atletik, karate, kempo, balap sepeda, bulu tangkis, angkat berat, dan panahan. Adapun capaian indikator olahraga Aceh Jaya Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel 2.28 berikut ini.

Tabel 2.28 Capaian Indikator Olahraga Aceh Jaya Tahun 2013-2018

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah klub olahraga	161	187	193	193	193	193
2	Jumlah gedung olahraga	1	2	3	3	3	3

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3	Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi tingkat Propinsi	5	8	11	12	-	13
4	Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi tingkat Nasional	-	-	4	3	-	2
5	Jumlah Atlit yang Berprestasi tingkat Propinsi	30	70	100	110	-	50
6	Jumlah Atlit yang Berprestasi tingkat Nasional	-	-	10	20	-	2

Sumber : Dispora Aceh Jaya, 2019 (Diolah)

Dari tabel diatas, terlihat masih perlu adanya peningkatan infrastruktur untuk mendukung pencapaian indikator olahraga di Kabupaten Aceh Jaya. Jika dilihat dari prestasi yang dicapai, perlu adanya perhatian khusus untuk terus meningkatkan prestasi atlit baik ditingkat propinsi maupun nasional.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

2.3.1.1.1 Pendidikan

2.3.1.1.2 Pendidikan Rakyat

Pendidikan rakyat yang menjadi perhatian khusus Pemerintah kabupaten Aceh Jaya adalah Pendidikan Rakyat yang bernuansa islami. Bagi Pendidikan Dayah, dikabupaten Aceh Jaya terdapat 31 Dayah, dengan 8 Dayah sudah terakreditasi A, 4 Dayah terakreditasi B, 9 Dayah terakreditasi C, dan 10 Dayah terakreditasi D. Selain itu juga terdapat 4 Dayah Sulok, 54 Balee seumeubuet, dan 344 TPA. Peningkatan Sarana dan Prasarana peribadatan di Kabupaten Aceh Jaya telah tersebar merata di seluruh kecamatan dan gampong yang ada di Kabupaten Aceh Jaya.Perkembangan pendidikan dayah di Kabupaten Aceh Jaya dari tahun ke tahun terus meningkat dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pendidikan islam sebagaimana terlihat pada tabel 2.29 dibawah ini:

Tabel 2.29 Tipe Dayah, Jumlah Santri, Jumlah Guru Dayah,

Jumlah Hafidz/hafidzah dan Qari/Qariah di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah Dayah berdasarkan Tipe					Jumlah Santri	Jumlah Guru	Jumlah Hafidz/ Hafidzah	Jumlah Qari/ Qariah
	A	B	C	D	Non Tipe				
2016	8	4	12	7	-	2.576	313	29	72
2017	8	9	19	0	-	2,588	313	32	80
2018	8	9	19	0	-	2,588	313	32	80

Sumber : Dinas Pendidikan Dayah Aceh Jaya, 2019

Dari tabel di atas terlihat pertumbuhan jumlah santri yang cukup signifikan dari tahun 2016-2018, namun tidak pada jumlah guru. Peningkatan tipe dayah hanya pada tipe dayah C dan tipe D, tidak pada tipe dayah yang berada di atasnya. Selain itu di Kabupaten Aceh belum terdapat standar terkait kualitas kelulusan yang ada di pendidikan dayah, Diharapkan kedepan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menaruh perhatian khusus dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kemajuan pendidikan dayah yang ada di Kabupaten Aceh Jaya.

2.3.1.2 Keagamaan

2.3.1.2.1 Syariat Islam

Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan terkait keberadaan sebuah mesjid, yakni dari sisi peribadatan (imarah, shalat jamaah lima waktu); sisi pembangunan (ri'ayah, ruang tunggu imam dan khatib, operator); sisi sekretariatan (idarah, aktifnya remaja mesjid, ta'mir mesjid, phbi). Jika dilihat dari ketiga sisi tersebut hanya 9 Mesjid yang memiliki kriteria tersebut, hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk melihat kelengkapan akan ketiga hal tersebut, selain tentu saja kondisi mesjid dan meunasah sebagaimana terlihat pada tabel 2.30 berikut ini:

Tabel 2.30 Kondisi Mesjid dan Meunasah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018

No	Kecamatan	Mesjid				Meunasah			
		Baik	Sedang	Rusak	**Jumlah**	Baik	Sedang	Rusak	**Jumlah**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Teunom	5	10	2	**17**	4	13	5	**22**
2	Pasie Raya	1	9	2	**12**	1	10	4	**15**
3	Panga	5	3	0	**8**	5	11	7	**23**
4	Krueng Sabee	8	8	3	**19**	10	4	3	**17**
5	Setia Bakti	11	5	0	**16**	7	3	2	**12**
6	Darul Hikmah	3	2	4	**9**	8	6	1	**15**
7	Sampoiniet	5	4	4	**13**	7	9	3	**19**
8	Indra Jaya	6	2	3	**11**	14	2	0	**16**
9	Jaya	4	12	0	**16**	1	25	0	**26**
	Jumlah	**48**	**55**	**18**	**121**	**57**	**83**	**25**	**165**

Sumber : Dinas Syariat Islam Aceh Jaya, 2019

Kabupaten Aceh Jaya juga telah menetapkan beberapa produk hukum dalam rangka menunjang pelaksanaan syariat islam untuk meminimalisir masyarakat Aceh Jaya dalam bertindak dan bersikap yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Adapun jumlah pelanggaran syariat Islam dan jenis pelanggarannya dapat dilihat pada tabel 2.31 berikut ini:

Tabel 2.31 Jumlah Pelanggaran Syariat Islam Aceh Jaya Tahun 2013-2018

Jenis Pelanggaran	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Khamar	-	-	-	-	-	-
Maisir	-	-	1	-	-	-
Khalwat	2	2	4	3	1	-

Sumber : Satpol PP dan WH Aceh Jaya, 209

Dari tahun 2013-2018, terjadi peningkatan di jenis pelanggaran kasus khalwat, tidak ada pelanggaran khamar dan 1 (satu) perkara maisir. Pada tahun 2018 tidak ada terjadi pelanggaran.

2.3.1.2.2 Permusyawaratan Ulama

Aceh yang berstatus istimewa dan khusus membuat penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat islam. Kehadiran Ulama diharapkan pelaksanaan syariat islam akan lebih terkoordinir dan dapat berlangsung disemua aspek kehidupan masyarakat. Kabupaten Aceh Jaya dalam hal ini terus mendorong usaha peningkatan peran ulama melalui program peningkatan sumber daya dan peran ulama, pembinaan syariat islam, dan penguatan Aqidah Ahlusunnah wal jama'ah. Diharapkan dari ketiga program tersebut, akan lahir para ulama muda dan dai yang mempunyai wawasan ke-islaman yang luas sehingga nantinya dapat berkontribusi nyata dalam masyarakat.

2.3.1.2.3 Baitul Mal

Salah satu indikator menguatnya peran baitul mal dapat dilihat dari kemampuan menghimpun dana Zakat dan Infak. Dari data yang ada, seluruh dana tersebut 90 persen lebih disalurkan untuk penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan kaum dhuafa. Salah satu program baitul mal adalah membangun rumah bantuan untuk dhuafa dan mualaf, pada tahun 2016 telah dibangun 17 unit rumah dhuafa dan 7 unit rumah muallaf. Selain itu terdapat juga program yang lain, diantaranya modal usaha dan pemberian beasiswa santri. Realisasi penerimaan Zakat dan Infaq Baitul Mal Aceh Jaya dapat dilihat pada tabel 2.32 berikut ini.

Tabel 2.32 Realisasi penerimaan Zakat dan Infaq Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2018

Tahun	Zakat	Infaq dan Sadaqah	Jumlah
2013	837.000.000	1.486.700.000	2.323.700.000
2014	1.211.900.000	2.107.255.230	3.319.155.000
2015	1.761.542.801	2.862.152.840	4.623.695.641

Tahun	Zakat	Infaq dan Sadaqah	Jumlah
2016	3.022.625.532	2.782.828.432,45	5.805.453.964,45
2017	4.001.250.432.08	4.526.767.719.42	8.528.018.151.50
2018	3.611.537.141,30	3.653.330.341,65	7.264.867.482,95

Sumber : Baitul Mal Aceh Jaya, 2019

Dari tabel di atas terlihat peningkatan penerimaan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, dimana rata-rata peningkatan dari tahun 2012-2016 mencapai 28,45 persen. Namun pada tahun 2018 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya (2017). Adapun realisasi zakat yang disalurkan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.33 Realisasi zakat yang disalurkan Baitul Mal menurut Senif di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2018

Tahun	Zakat
2013	837.000.000
2014	1.211.900.000
2015	1.761.542.801
2016	3.022.625.532
2017	2.355.625.531
2018	3.869.465.184

Sumber : Baitul Mal Aceh Jaya, 2019

Dari tabel di atas terlihat antara realisasi penerimaan dan realisasi zakat yang disalurkan sudah mencapai target sebesar 97 persen.

2.3.2 Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

2.3.2.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan

permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial.

2.3.2.1.1 Pendidikan

A. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

PAUD merupakan upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga usia enam tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Angka Partisipasi Kasar PAUD pada tahun 2018 adalah sebesar 78,55 persen, dengan jumlah PAUD merata di seluruh gampong yang ada di Kabupaten Aceh Jaya.

B. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Pada tahun 2017, nilai APK pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Aceh Jaya masing-masing sebesar 106,5 persen dan 98,84 Persen. Meskipun menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, jumlah murid yang sedang sekolah jenjang SD/Sederajat dan SMP/Sederajat di Kabupaten Aceh Jaya lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk berumur 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Pada tahun 2018, nilai APK pada jenjang Sekolah Dasar (SD) adalah 115,01 dan nilai APK pada jengjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah 104,85. Data ini menunjukkan kenaikan sebesar 8,6 persen untuk Sekolah Dasar dan 6,01 persen kenaikkan APK pada jenjang SMP.
APK Aceh Jaya dari Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 2.16 sebagai berikut.

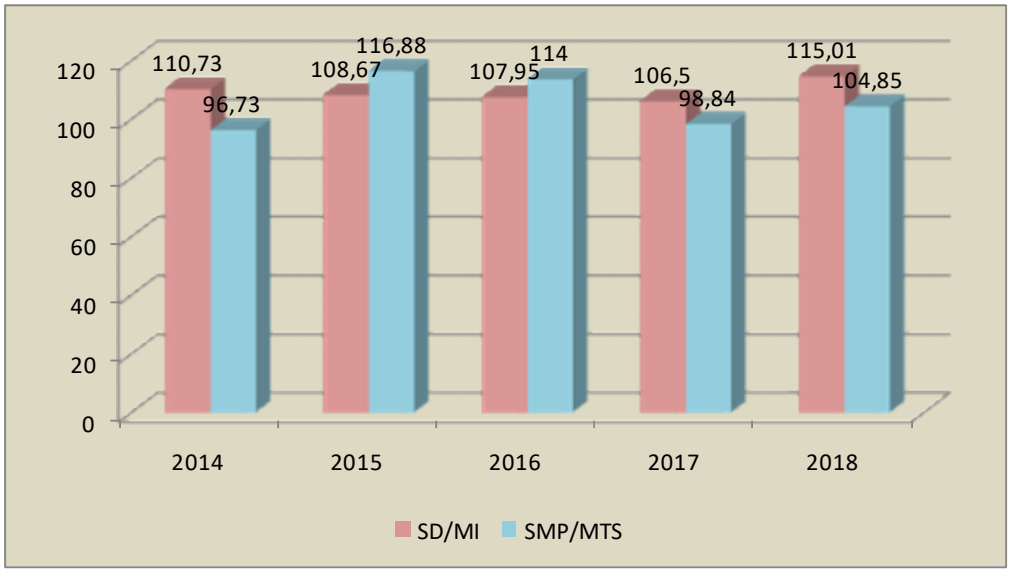

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Jaya, 2019 (diolah)

Gambar 2.16 Perkembangan APK untuk SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Aceh JayaTahun 2014-2018

C. Angka Partisipasi Murni (APM)

Capaian APM Kabupaten Aceh Jaya dari tahun ke tahun dari setiap jenjang pendidikan menunjukan peningkatan yang cukup berarti, terbukti dari tahun 2016 ke tahun 2017 tingkat APM jenjang Sekolah Dasar (SD) mencapai 97,67 (2016) dan 99,57 (2017). Hingga pada tahun 2018 tingkat APM jenjang Sekolah Dasar (SD) mencapai 100 persen, sebagaiamana data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Jaya pada tahun 2019, dan Pada Jenjang Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) naik dari tahun 2017 sebesar 91,56 menjadi 93,78 persen pada tahun 2019. sebagaimana terlihat pada gambar 2.17

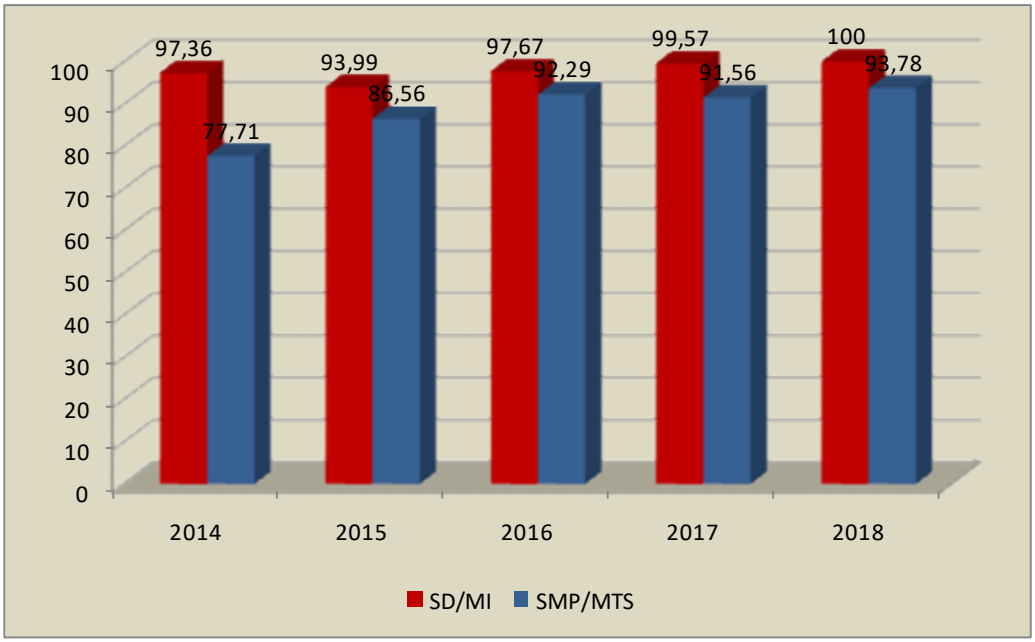

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Jaya, 2018 (diolah)

Gambar 2.17 Perkembangan APM untuk SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Aceh JayaTahun 2014-2018

D. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Selama periode tahun 2014-2018, pada kelompok usia pendidikan dasar, APS penduduk usia 7-12 tahun untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dalam dua tahun terakhir mencapai 100 persen dan pada tahun 2018 juga pada angka yang sama yaitu 100 persen, demikian juga dengan APS penduduk usia 13-15 tahun yang meningkat dari 95,59 persen pada tahun 2014 menjadi 97,09 persen pada taun 2018, sebagaimana terlihat di Gambar 2.18 di bawah ini.

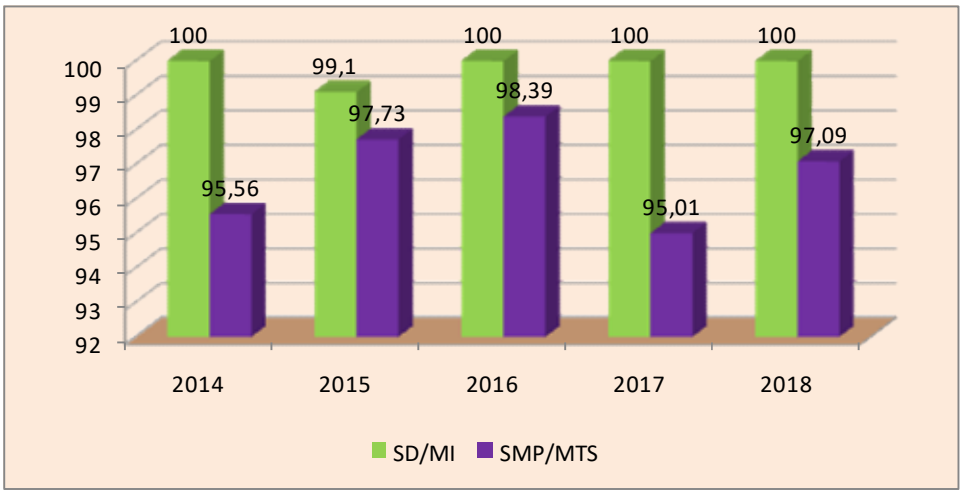

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Jaya, 2018 (diolah)

Gambar 2.18 Perkembangan APS untuk SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Aceh JayaTahun 2014-2018

E. Ketersediaan Sekolah, Guru dan Murid

Ketersediaan sekolah, guru, dan murid di Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2016 – 2018 tertera pada tabel 2.34

Tabel 2.34 Jumlah Guru, Murid, dan Jumlah Sekolah di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016-2018.

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018
1	**SD/MI**			
1.1	Jumlah Guru	725	925	703
1.2	Jumlah Murid	8.816	9.162	8.264
	Rasio Guru/Murid	1:10	1:9	1:11
	Jumlah Sekolah	98	98	98
	Rasio Sekolah/Murid	1:90	1:93	1:84
2	**SMP/MTs**			
2.1	Jumlah Guru	428	428	398
2.2	Jumlah Murid	2.903	2.760	1.922

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018
	Rasio Guru/Murid	1:7	1:6	1:5
	Jumlah Sekolah	34	34	35
	Rasio Sekolah/Murid	1:86	1:78	1:54

Sumber : Disdik Aceh Jaya, 2019 (Diolah)

Dari tabel 2.35 di atas, untuk jumlah sekolah 98 unit SD/MI, 84 unit dalam kondisi baik, sementara dari 35 unit SMP/MTs, 30 Unit dalam kondisi baik. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk sekolah-sekolah yang belum berkategori dengan kondisi baik. Sementara jika dilihat dari rasio guru terhadap murid sudah cukup bagus, demkian juga dengan rasio sekolah/murid yang sudah menunjukkan pemerataan akan jumlah sekolah.

2.3.2.1.2. Kesehatan

Aspek pelayanan umum bidang kesehatan difokuskan pada aspek fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan yang telah tersedia, kondisi mutu pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat, pembiayaan dan efisiensi pelayanan kesehatan serta aspek pemberdayaan masyarakat.

A. Rasio Posyandu per satuan balita

Pada umumnya posyandu ada disetiap desa dan bisa juga satu desa terdapat lebih dari satu posyandu, hal ini dimungkinkan karena jumlah penduduk yang banyak, luas desa yang terlalu lebar sehingga masyarakat sulit mendatangi pasyandu. Adapun rasio posyandu dan balita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 2.35 berikut ini.

Tabel 2.35 Rasio Posyandu dan Balita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Posyandu	199	198	200	200	200
Jumlah Balita	11227	11042	11033	11101	9.109
Rasio per 100 balita	17,73 per 1000 balita	17,93 per 1000 balita	18,13 per 1000 balita	18,05 Per 1000 balita	45,6 Per 1000 Balita

Sumber : Dinkes Aceh Jaya, 2019 (diolah)

Rasio Posyandu terhadap jumlah balita diperlukan dalam upaya peningkatan fasiitas pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan atau ditingkatkan.

Idealnya satu posyandu melayani 50 balita, jika kita melihat rasio posyandu sebagaimana ditampilkan pada tabel di atas bahwa tingkat ketersediaan posyandu sudah memadai, namun yang perlu ditingkatkan adalah kepedulian masyarakat untuk memanfatkan posyandu semaksimal mungkin.

B. Rasio Puskesmas, Polindes, Pustu per satuan penduduk

Berdasarkan Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 1976, kapasitas layanan satu puskesmas di satu kecamatan dengan jumlah penduduk antara 30.000 jiwa sampai dengan 50.000 jiwa. Kabupaten Aceh Jaya memiliki 10 unit puskesmas untuk 87.622 jiwa, artinya jumlah puskesmas yang tersedia sudah memadai. Namun, tingkat pelayanan dan fasilitasnya perlu terus ditingkatkan. Selanjutnya untuk mendekatkan pelayan kesehatan kepada masyarakat, jejaring pelayanan kesehatan dasar seperti pustu, poskesdes, polindes dan posyandu juga terus meningkat. Adapun rasio puskesmas, polindes, dan pustu Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 2.36 dibawah ini.

Tabel 2.36 Rasio Puskesmas, Polindes, dan Pustu Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Puskesmas	10	10	10	12	12
Jumlah Polindes/Poskesdes	107	107	109	110	42
Jumlah Pustu	29	29	29	29	29
Jumlah Penduduk	86.123	86.385	87.622	89.618	94.622
Rasio Puskesmas per satuan penduduk	6,022	6,041	6,126	6,265	7.591
Rasio Polindes/Poskesdes per satuan penduduk	0,601	0,602	0,600	0,608	2.169
Rasio Pustu per satuan penduduk	2,104	2,110	2,140	2,188	3.141

Sumber : Dinkes Aceh Jaya, 2019 (diolah)

C. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Aceh Jaya sebayak 1 unit, jika dilihat dari rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk untuk 100.000 penduduk menunjukkan jumlah rumah sakit di Kabupaten Aceh Jaya sudah memenuhi dari sisi jumlah namun kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan masih perlu ditingkatkan.

D. Rasio Dokter per satuan penduduk

Rasio ideal dokter umum adalah 40/100.000 penduduk atau 1 dokter melayani 2.500 Jiwa, dengan jumlah penduduk Aceh Jaya hingga tahun 2018 sebanyak 94.622 jiwa maka memerlukan dokter umum sebanyak 37 orang dokter umum. Rasio dokter spesialis adalah 20/100.000 penduduk (1:5.000 jiwa), jika dilihat dari jumlah penduduk Aceh Jaya hingga tahun 2018 maka Aceh Jaya memerlukan 19 dokter spesialis. Demikian juga untuk dokter gigi, dimana rasio dokter gigi adalah 1 : 9.000 jiwa, maka

ukuran idealnya Kabupaten Aceh Jaya harus memiliki 13 orang dokter gigi. Hingga tahun 2018 jumlah dokter umum sudah tersedia secara ideal, dokter gigi dan dokter spesialis hampir mendekati jumlah yang ideal, disamping itu distribusi dokter khususnya untuk kecamatan-kecamatan yang jauh pusat kabupaten/kota umumnya belum merata. Adapun rasio dokter Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 2.37.

Tabel 2.37 Rasio Dokter di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2018

Tenaga Medis		Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Dokter Umum	Tersedia	28	35	34	36	37
	Kebutuhan	34	34	35	35	0
Dokter Spesialis	Tersedia	1	5	10	14	12
	Kebutuhan	17	17	18	18	4
Dokter Gigi	Tersedia	5	5	8	8	11
	Kebutuhan	10	10	10	10	2
Penduduk Aceh Jaya		86.123	86.385	87.622	89.618	91,087
Rasio dokter umum per 40/100.000		32,5	41	39	14	41
Rasio dokter spesialis per 20/100.000		6	6	11	16	13
Rasio dokter gigi per 11/100.000		6	6	9	9	11

Sumber : Dinkes Aceh Jaya, 2019 (diolah)

E. Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk

Pada tahun 2016, total jumlah tenaga Medis kesehatan 721 sebanyak orang (1 orang tenaga medis melayani 281 orang penduduk). Rasio tenaga kesehatan menurut standar nasional untuk perawat dan bidan masing-masing 170 dan 100 tenaga per 100.000 penduduk. Target nasional dan WHO untuk tenaga bidan sekitar 100 per 100.000 penduduk, tenaga keperawatan 117 per 100.000 penduduk, tenaga kefarmasian 10

per 100.000 penduduk, sementara tenaga nutrisionis atau gizi sebesar 22 per 100.00 penduduk. Pada tahun 2018, jumlah tenaga medis kesehatan sebanyak 650 dengan perbandingan rasio per 100.000 artinya 1 orang perawat harus melayani 207 orang penduduk, 1 orang Bidan melayani 266 orang penduduk, 1 orang petugas farmasi melayani 36 penduduk, 1 orang petugas gizi melayani 15 penduduk, sedangkan petugas medis dokter gigi, teknis medis dan analis kesehatan (lab) setiap 1 orang melayani 75 orang penduduk. Adapun rasio tenaga kesehatan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015-2016 dapat dilihat pada tabel 2.38 dan rasio tenaga kesehatan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel 2.39 berikut.

Tabel 2.38 Rasio Tenaga Kesehatan Kabupaten Aceh JayaTahun 2015-2016

Tenaga Kesehatan	Standar	2015		2016	
	Rasio /100.000	Jumlah	Rasio /100.000	Jumlah	Rasio /100.000
Perawat	117	163	189	246	281
Bidan	100	197	228	277	316
Farmasi	10	21	24	34	39
Gizi	22	12	14	15	17
Perawat Gigi	-	28	32	28	32
Teknis Medis	-	15	17	40	46
Analisi Kesehatan (Lab)	-	15	17	25	28
Non Kesehatan	-	58	67	56	64
Jumlah	**-**	**509**	**-**	**721**	**-**

Sumber : Dinkes Aceh Jaya, 2019 (diolah)

Tabel 2.39 Rasio Tenaga Kesehatan per Penduduk Tahun 2017-2018

Tenaga Kesehatan	Standar	2017		2018	
	Rasio /100.000	Jumlah	Rasio /100.000	Jumlah	Rasio /100.000
Perawat	117	254	283	189	207
Bidan	100	279	311	242	266
Farmasi	10	34	38	33	36
Gizi	22	29	21	14	15
Perawat Gigi	-	18	20	25	75
Teknis Medis	-	61	68	68	75
Analis Kesehatan (Lab)	-	24	27	24	75
Non Kesehatan	-	50	56	55	-
Jumlah	**-**	**739**	**-**	**650**	**-**

Sumber : Dinkes Aceh Jaya, 2019 (diolah)

F. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit

Acute Flacid Paralysis (AFP) adalah semua anak berusia kurang dari 15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya *flacid* (layuh) terjadi secara akut (mendadak) dan bukan disebabkan oleh rudapaksa. Kasus AFP non polio adalah kasus AFP yang pada pemeriksaan spesimennya tidak ditemukan virus polio liar atau AFP yang ditetapkan oleh tim ahli sebagai kasus AFP non polio dengan kriteria tertentu.

Penemuan pasien baru TB BTA positif adalah penemuan pasien TB melalui pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobati di unit pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah kerja pada waktu tertentu. Pasien baru adalah pasien yang belum pernah diobati dengan OAT atau sudah pernah menelan OAT kurang dari satu bulan (30 dosis) harian. Diobati adalah pemberian pengobatan pada pasien TB BTA positif dengan OAT selama 6 bulan.

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang ditandai dengan panas mendadak berlansung terus menerus selama 2 – 7 hari tanpa sebab yang jelas, tanda – tanda perdarahan (sekurang – kurangnya uji Torniquet positif) yang disertai dengan pembesaran hati (hepatomegali), trombosit ≤100.000/µ1 dan peningkatan hematokrit ≥20%.

Berikut perkembangan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit di kabupaten Aceh Jaya pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40 Perkembangan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2018

No.	Jenis Penyakit	2014	2015	2016	2017	2018
1	TBC BTA	-	-	-	-	-
	1. Jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati.	54	55	57	52	53
	2. Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA.	140	141	141	122	247
2	1. Jumlah penderita DBD yang ditemukan dan diobati	2	2	5	44	18
	2. Jumlah Perkiraan Penderita baru DBD	2	2	5	44	45
3	1. Jumlah penderita AFP yang ditemukan dan diobati	1	-	1	1	1
	2. Jumlah Perkiraan Penderita baru AFP	1	1	1	1	1
4	Penyakit lainnya	-	-	-	-	-
	1. Jumlah penderita lainnya yang ditemukan dan diobati	258	157	96	136	-
	2. Jumlah Perkiraan Penderita baru lainnya.	-	-	-	-	-

Sumber : DINKES Aceh Jaya, 2019 (Diolah)

Perkembangan penyakit TB BTA dan DBD di kabupaten Aceh Jaya cenderung meningkat, dan menurun untuk kasus AFP. Pada tahun 2014

jumlah penderita DBD dilaporkan 2 orang, dan meningkat pada tahun 2018 yaitu 18 orang. Jumlah penderita TB BTA dilaporkan 54 orang, dan meningkat pada tahun 2018 yaitu 53 orang. Sementara jumlah penderita AFP dilaporkan 1 tahun 2018. Sementara untuk penyakit tidak menular, dimana pada tahun 2015, hipertensi (3.890 kasus) dan diabetes melitus (913 kasus) termasuk 10 kasus yang banyak ditemui di Kabupaten Aceh Jaya dan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, hipertensi meningkat menjadi 4.314 kasus dan diabetes melitus menjadi 1.368 kasus.

Terkait penderita sakit jiwa di Kabupaten Aceh Jaya terus meningkat, dimana pada tahun 2014 berjumlah 356 orang, 2015 berjumlah 415 orang, dan pada tahun 2018 berjumlah 420 orang.

G. Status Gizi Ibu Hamil dan Balita

Status gizi sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan penduduk terutama bagi ibu hamil dan balita. Ibu hamil dengan status gizi buruk dapat memicu meningkatnya AKI dan AKB. Demikian pula status gizi balita yang buruk dapat menyebabkan penyakit akibat kekurangan gizi dan meningkatkan angka kematian balita. Tahun 2018 terdapat kasus kurang gizi pada balita sebanyak 363 jiwa. Angka ini mengalami kenikan dibandingkan dengan kondisi tahun 2017 yang mencapai 540 jiwa. Jumlah balita gizi buruk 10 jiwa pada tahun 2017 dan mengalami penurunan hungga 40 persen adalah 6 kasus pada tahun 2018. Persentase kurang gizi, gizi buruk pada ibu hamil dan balita dapat dilihat pada tabel 2.41.

Tabel 2.41 Persentase Ibu Hamil dan Balita Kurang Gizi dan Gizi Buruk Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 – 2018

No.	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Balita kurang gizi	127	488	140	1.190	207	540	636
	Jumlah Balita	5.816	6.648	7.025	6.856	6,911	6,984	8539
	Persentase	2,18	7,34	1,99	17,4	3,00	7,73	7,45
2	Jumlah ibu hamil kurang gizi	-	30	77	184	194	171	188

No.	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Jumlah Ibu hamil	1.901	2.016	2.076	2.482	2,497	2,503	2,495
	Persentase	-	1,49	3,71	7,41	7,77	6,83	7,54
3	Jumlah Balita gizi buruk	15	22	18	1	10	10	6
	Jumlah Balita	5.816	6.648	7.025	6.856	6,911	6,984	8,539
	Persentase	0,26	0,33	0,26	0,01	0,14	0,14	0,07
4	Jumlah Ibu hamil gizi buruk	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Ibu hamil	1.901	2.016	2.076	2.482	2,497	2,503	2,495
	Persentase	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinkes Aceh Jaya, 2019(diolah)

Permasalahan gizi kurang dan gizi buruk untuk memerlukan penanganan yang menyeluruh. Tidak hanya memperhatikan cara – cara penanganan yang bersifat kuratif, tapi juga penanganan preventif melalui gerakan penyadaran kepada masyarakat agar sadar gizi. Pendampingan ibu dalam mengelola kehamilan dan pola pengasuhan balita perlu dilakukan secara berkelanjutan melaui lembaga/mitra kesehatan di desa seperti PKD, posyandu dan kader yang jumlahnya sudah cukup memadai.

H. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskindan lansia

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Sedangkan sarana kesehatan strata pertama adalah tempat pelayanan kesehatan yang meliputi antara lain puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek bersama dan perorangan. Realisasi cakupan pelayanan dasar masyarakat miskin tahun 2018 yaitu sebesar 69 persen (23.176 orang). Adapun cakupan layanan lansia Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2018 sudah mencapai 82,09 persen (5.066 orang) dari total lansia sebanyak 6.098 orang.

I. Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Cakupan puskesmas hingga tahun 2018 sudah mencapai 111 persen, artinya jumlah puskesmas di Kabupaten Aceh Jaya sudah memadai, karena disetiap kecamatan sudah adanya Puskesmas, namun kualitas dan kuantitas pelayanan yang masih perlu ditingkatkan baik sumberdaya manusia maupun peralatan pendukung yang dibutuhkan. Adapun cakupan puskesmas pembantu, hingga tahun 2018 sudah mencapai 16,86 % (29 Pustu dibagi dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Aceh Jaya dikalikan 100). Cakupan puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Aceh Jaya disajikan pada tabel 2.42.

Tabel 2.42 Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Puskesmas	10	10	10	10	10
	Jumlah Kecamatan	9	9	9	9	9
	Cakupan Puskesmas (%)	111	111	111	111	111
2	Jumlah Puskesmas pembantu	29	29	29	29	29
	Jumlah Desa	172	172	172	172	172
	Cakupan Puskesmas Pembantu (%)	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86

Sumber : Dinkes Aceh Jaya, 2019 (diolah)

J. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Aceh Jaya masih belum memadai, dimana dari 12 puskesmas yang terakreditasi 6 sementara hingga 2018 Rumah Sakit Umum Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya memiliki akreditasi tipe C Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, upaya pemerintah Kabupaten Aceh jaya dapat ditempuh melalui : a) meningkatkan klarifikasi RSU Teuku Umar dari tipe C menjadi tipe B; b) peningkatan fasilitas puskesmas dan puskesmas pembantu; c)

menyediakan polindes/poskesdes sesuai kebutuhan; dan d) Penambahan dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, tenaga medis dan para medis serta distribusi yang merata. Selain itu, terkait penyediaan obat pada tahun 2018 sudah mencapai 90 persen, dan diharapkan dapat terus meningkat untuk tahun berikutnya.

2.3.2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum yang harus di tangani sesuai kewenangan kabupaten meliputi sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, pembangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa kontruksi, dan penataan ruang.

1. Pekerjaan Umum
A. Jalan
A.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Panjang jalan di Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa. kondisi panjang jalan berdasarkan kondisi di Kabupaten Aceh Jaya dapat di lihat pada gambar 2.19 dan tabel 2.43.

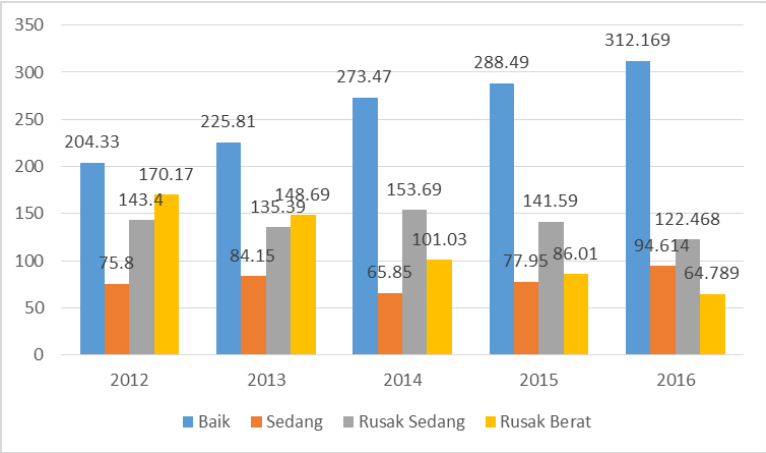

Sumber : Dinas PUPR Aceh Jaya, 2017(diolah)

Gambar 2.19 Kondisi Panjang Jalan Menurut Tingkat Kerusakan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 – 2016

Tabel 2.43 Kondisi Panjang Jalan menurut tingkat kerusakan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2018

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km) / Tahun						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Baik	204,33	225,81	273,47	288,49	312,169		
2	Sedang	75,8	84,15	65,85	77,95	94,614		
3	Rusak Sedang	143,4	135,39	153,69	141,59	122,468		
4	Rusak Berat	170,17	148,69	101,03	86,01	64,789		
5	Total	450,3	59,04	594,04	594,04	594,04		
6	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	45,38	38,01	46,04	48,56	52,55		

Sumber : Dinas PUPR Aceh Jaya, 2019(diolah)

Dari gambar dan tabel di atas terlihat peningkatan untuk kondisi jalan baik dari tahun ke tahun dan penurunan yang cukup signifikan untuk kondisi jalan berat. Adapun Kondisi Jalan menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat pada tabel 2.44.

Tabel 2.44 Kondisi Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 – 2018

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km) / Tahun						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Aspal	-	-	-	-	-	-	
2	Berbatu	-	-	-	-	-	-	
3	Hotmix	17,8	44,26	12,21	49,19	23,68	9,23	
4	Cor Beton	-	1,13	2	1,33	1	0,10	
5	Kerikil	3,68	2,27	0,81	11,25	2	27,82	
6	Tanah	35,48	46,76	45,48	41,2	25	7,08	

Sumber : Dinas PUPR Aceh Jaya, 2018 (diolah)

Dari tabel di atas terlihat untuk jenis permukaan hotmix baru 156,37 km (2012-2018), sementara untuk jenis permukaan tanah dan kerikil sebesar 248,83 km. Jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2013 sebanyak 13 Unit dan meningkat pada tahun 2017yaitu

sebanyak 39 Unit. Jembatan yang ada menghubungkan antar wilayah provinsi, kabupaten, kecamatan dan antar desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Panjang Drainase juga mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan panjang drainase yang sudah dibangun sepanjang 24.95 km, peningkatan pembangunan drainase dan jembatan tiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 2.45.

Tabel 2.45 Kondisi Drainase dan Jembatan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2018

No	Kondisi	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Panjang Drainase (km)	1,11	4,6	15,58	2,86	0,80	
2	Jumlah Jembatan (Unit)	13.00	11.00	9.00	5.00	1.00	
3	Box Culvert	9.00	7.00	12.00	5.00	2.00	

Sumber : Dinas PUPR Aceh Jaya, 2019 (diolah)

B. Pengairan

Sumber daya air di Kabupaten Aceh Jaya di suplai dari berbagai sumber, mulai dari mata air, sungai bendungan, air tanah, air permukaan dan cekungan air tanah baik dalam maupun buatan dan air laut. Pemanfaatan sumberdaya air adalah utamanya untuk air baku yang dimanfaatkan untuk irigasi, air bersih dan air minum.

Daerah irigasi (DI) di Kabupaten Aceh yang menjadi kewenangan Kementrian PU dengan cakupan layanan 5.000 ha dan kewenangan pemerintah kabupaten DI dengan cakupan layanan 15.433 ha. Jaringan irigasi teknis yang ada di Kabupaten Aceh Jaya terdiri atas 2 jenis yaitu primer 21.142meter dan sekunder 325meter dengan luas irigasi mencapai 2.382 Ha. Berikut jenis prasarana irigasi atau pengairan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya dapat di llihat pada tabel 2.47.

Tabel 2.46 Jenis Prasarana Irigasi/Pengairan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2018

No	Jenis Prasarana	2014	2015	2016	2017	2018
1	Irigasi Non Teknis (meter)	6.482	9.507	12.225	6.416,1	
2	Irigasi Teknis (meter)	-	-	-	-	
	- Primer	-	21.142	-	-	
	- Sekunder	325	-	-	-	
	-Tersier	-	-	-	-	
3	Luas Irigasi (Ha)	1145	2382	3.975	1.725	
4	Luas irigasi dalam kondisi baik (m2)	4.776.528	6.089.448	5.962.500	2.587.500	
5	Luas sawah non irigasi (m2)	42.970.000	42.970.000	37.007.500	34.420.000	

Sumber : Dinas PUPR Aceh Jaya, 2019 (diolah)

C. Persentase penduduk berakses air minum dan Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Layanan air minum di Kabupaten Aceh Jaya terbagi menjadi 2 yaitu layanan air minum perkotaan (oleh PDAM) dan perdesaan (oleh masyarakat). Akses air minum perdesaaan tahun 2015 terdiri dari layanan perpipaan sebesar 43,9 persen dan non perpipaan sebesar 56,10 persen (gambar 2.20).

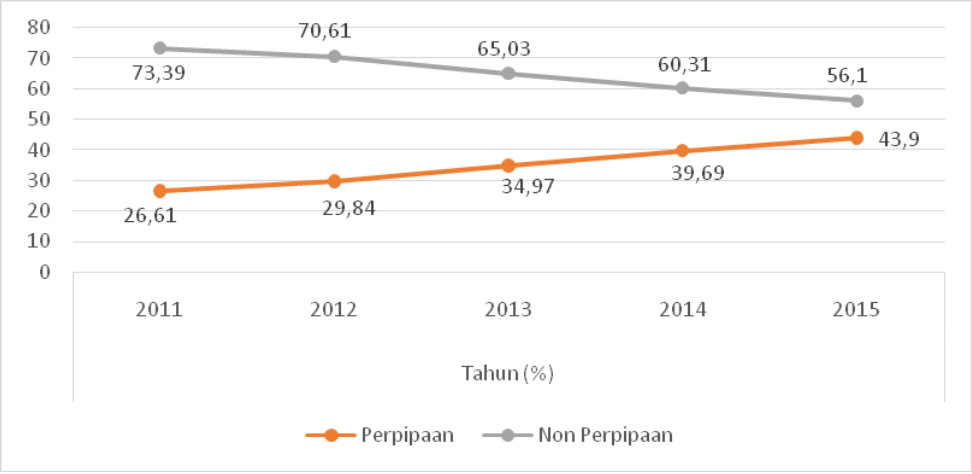

Sumber : Dinas PUPR Aceh Jaya, 2016 (diolah)

Gambar 2.20 Kondisi Layanan air minum diKabupaten Aceh Jaya Tahun 2011 – 2018

Tabel 2.47 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air untuk Minum, Memasak, dan Mandi/Cuci/dll di Aceh Jaya Tahun 2016

Sumber Air	Untuk Minum	Untuk Memasak	Untuk Mandi/Cuci/dll
(1)	(2)	(3)	(4)
Air kemasan bermerk	0,19	0,00*	0,00*
Air isi ulang	36,64	1,81	0,00*
Leding meteran	1,80	9,43	11,48
Sumur bor/pompa/sumur terlindung	40,00	60,50	60,22
Sumur tak terlindung	4,35	4,63	5,40
Mata air terlindung	13,61	19,83	17,21
Mata air tak terlindung	0,44	0,53	0,47
Lainnya	2,97	2,23	5,22

Sumber : Dinas PUPR Aceh Jaya, 2017 (diolah)

Sanitasi merupakan faktor penting yang cukup menentukan dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan kesehatan. Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan lingkungan karena banyak penyakit yang timbul akibat dari kesehatan lingkungan yang buruk. Akses sanitasi (jamban) yang layak dan berkelanjutan perdesaan di kabupaten Aceh Jaya sampai dengan tahun 2015 tercapai sebesar 64,90% dari jumlah penduduk, sebagaimana terlihat pada gambar 2.21.

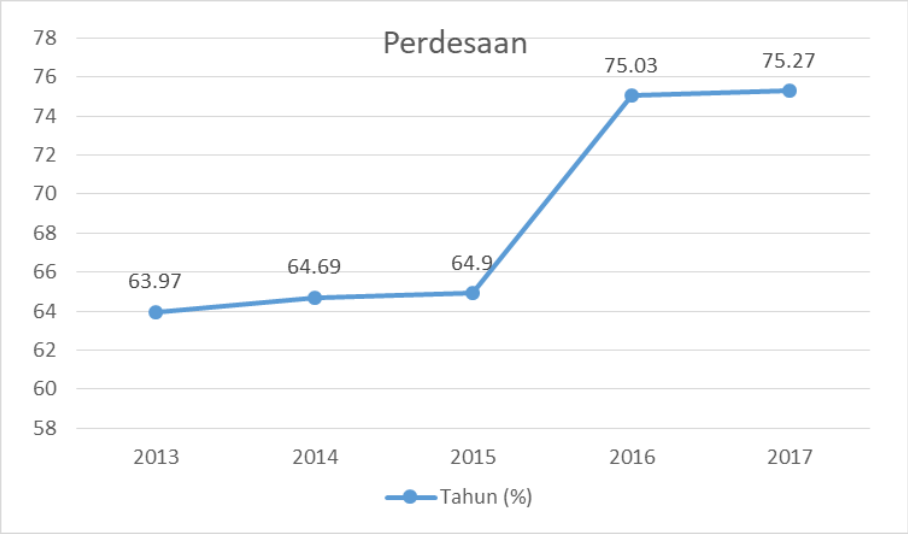

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Jaya, 2018 (Diolah)

Gambar 2.21 Kondisi Rumah Tinggal bersanitasi di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 – 2017

Tabel 2.48 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2017

No	Uraian	% Rumah Tinggal Bersanitasi				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Rumah tinggal Berakses sanitasi	15.390	15.566	15.643	-	-
2	Jumlah Rumah tinggal	24.057	24.061	24.104	-	-
3	Persentase	63,97	64,69	64,90	75,03	75,27

Sumber : Badan Pusat Statistik(BPS) Aceh Jaya, 2018 (Diolah)

Dari kedua tabel di atas, terlihat peningkatan persentase rumah tanggal bersanitasi di Kabupaten Aceh Jaya yang sudah mencapai 75,27 persen di tahun 2017.

D. Penataan Ruang

Aspek pelayanan umum pada urusan penataan ruang dapat diindikasikan dengan telah terbitnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 – 2034, yang selanjutnya di jabarkan dalam rencana rinci berupa rencana tata ruang kawasan

strategis kabupaten, yang akan di jadikan pedoman oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam implementasi rencana pembangunan, termasuk untuk pengendalian pemafaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.

Adapun perlaksanaanya qanun RTRW di koordinasikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang merupakan badan adhoc dalam memfalitasi pemangku kepentingan dalam melaksanakan kebijakan penataan ruang. BKPRD bekerja terutama memberi rekomendasi kebijakan kepada kepala daerah dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dari aspek perencanaan, sampai dengan tahun ke empat pelaksanaan Qanun RTRW, belum ada satupun Qanun RDTR ditetapkan. Jumlah rancangan Qanun RDTR yag sudah tersusun baru untuk 3 kota dan belum di ajukan persetujuan substansi kepada Gubernur.

2.3.2.1.4 Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, memiliki fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga. Persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejatahan jati diri. Kebutuhan perumahan di kawasan perkotaan cenderung meningkat dengan pesat karena semakin meningkatnya jumlah penduduk. Kebutuhan masyarakat akan perumahan dan permukiman semakin tinggi sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan dan tuntutan – tuntutan sosial ekonomi yang semakin berkembang.

Adapun rekapitulasi Data RTLH per kecamatan menurut klasifikasi kerusakan dapat dilihat pada tabel 2.50.

Tabel 2.49 Rekapitulasi Data RTLH Per Kecamatan menurut Klasifikasi Kerusakan

NO	KECAMATAN	KLASIFIKASI			JUMLAH
		Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	
1	Teunom	102	198	186	486
2	KruengSabee	52	23	13	88
3	SetiaBakti	31	158	120	309
4	Samponiet	50	134	2	186
5	Jaya	115	344	30	489
6	Panga	67	179	43	289
7	IndraJaya	33	278	155	466
8	Darul Hikmah	22	123	3	148
9	PasieRaya	54	214	94	362
JUMLAH TOTAL		526	1.651	646	2.823

Sumber:SistemInformasiPendataanRTLHKementerianPUPRDirektoratJenderalPenyediaanPerumahanTahun 2017

Dalam rangka penyehatan lingkungan permukiman yang berkelanjutan, perlu dilakukan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan. Permukiman yang sehat dengan lingkungan yang bersih sangat diperlukan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia sehingga masyarakat dapat menjadi lebih produktif.

Jumlah tempat pembuangan sampah menurun dari 55 unit (tahun 2017) menjadi 29 unit (tahun 2018). Untuk jumlah daya tampung TPS meningkat walaupun tidak terlalu besar dari 275 menjadi 410 ton/m³, Volume sampah yang di tangani 33.707 ton/m³. Berikut gambaran persampahan di Aceh Jaya.

Tabel 2.50 Kondisi Indikator Persampahan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah TPS (Kontrainer)	Unit	40	45	45	55	29
2	Jumlah Daya Tampung TPS	Ton/m3	200	180	225	275	410
3	Tempat Pembuangan akhir	Unit	2	2	2	2	2
4	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Unit	0	0	0	0	0
5	Volume Sampah yang di tangani	Ton/m3	n/a	27.740	31.944	36.062	33,707

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Aceh Jaya, 2019

2.3.2.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Perkembangan jumlah aparat yang menangani ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan kasus pelanggaran K3 dan kondisi ketertiban umum di Kabupaten Aceh Jaya di sajikan pada tabel 2.51 dan tabel 2.52.

Tabel 2.51 Perkembangan Jumlah Aparatur Pamong Praja, Jumlah Aparat Linmas dan Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013– 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Aparat PP	12	12	12	51	14	14
2	Jumlah Aparat WH	12	12	12	33	14	14
3	Jumlah Aparat Linmas	12	12	12	344	-	-

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4	Jumlah Patroli Petugas Satpol PP dan WH	-	-	-	-	47	-
	- Pemantauan	12	12	12	12	-	14
	- Penyelesaian	4	4	4	4	-	14
	- Pelanggaran K3 dalam 24 jam	-	-	-	-	-	14
5	Jumlah Pelaggaran K3 (kasus)	-	-	-	-	-	2

Sumber:Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Jaya, 2019

Tabel 2.52 Kondisi Keamanan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 – 2018 (Kasus)

No	Kasus Kriminalitas	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Kriminalitas	-	-	-	-	-	-
2	Pertikaian Antar Warga	-	-	-	-	-	-
	1) Antar Etnis	-	-	-	-	-	-
	2) Antar Wilayah	-	-	-	-	-	-
	3) Antar Agama	-	-	-	-	-	-
	4) Antar Simpatisan Parpol	-	-	-	1	-	-
	5) Antar Pelajar	-	-	-	-	-	-
3	Jumlah Unjuk Rasa	-	-	-	1	-	-

Sumber:Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Jaya, 2019

Efektifitas pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai wujud MoU Helsinki yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di Aceh Jaya pada khususnya, serta untuk mendukung terlaksananya perdamaian melalui kerja sama dan koordinasi antar instansi serta pelibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan. Rendahnya pendidikan politik dikalangan masyarakat Aceh Jaya menyebabkan kurangnya wawasan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berpolitik.

2.3.2.1.6 Sosial

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijkan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti teknologi dan sumber daya ekonomi. Target pembangunan social diarahkan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial mencakup 2 (dua) komponen penting yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Perkembangan PMKS dan PSKS disajikan pada tabel 2.53 dan tabel 2.54.

Tabel 2.53 Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Sosial dan Jumlah PMKS Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015– 2018

No.	Penduduk Penyandang Masalah Sosial (jiwa/orang)	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Penduduk Rawan Sosial dan Sarana	2015	2016	2017	2017
	1) Anak Jalanan	0	0	0	0
	2) Penderita Sakit Jiwa	0	0	0	0
	3) Gepeng	1	0	0	2
	4) Jumlah Penderita HIV/AIDS	0	0	0	0
	5) Jumlah Pecandu Narkoba	0	0	1	1
	6) Sarana Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
	7) Fakir Miskin	7.037	8.341	11.893	8.438
	8) Bayi Terlantar	0	0	0	0
	9) Anak Terlantar	0	103	22	0
	10) Lanjut Usia Terlantar	207	0	126	129
	11) Komunitas Adat Terpencil	0	260	35	61
	12) Penyandang Cacat	820	672	26	30
	21) Pengungsi dan Korban Bencana	667	666	684	426
	22) Tuna Susila	19.433	737	0	0
	23) Bekas Narapidana	0	0	0	0
	24) Pengidap HIV/AIDS	0	0	0	0
	25) Korban Penyalahgunaan NAPZA	0	0	0	1
	26) eks penyakit kronis	0	34	0	0

No.	Penduduk Penyandang Masalah Sosial (jiwa/orang)	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
	27)Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	26	49	41	26
	28) Wanita Rawan Sosial Ekonomi	1.041	1.869	1.294	534
2	Jumlah Panti Asuhan				
	1) Panti Asuhan Anak	0	1	1	1
	2) Panti Tresna Werda	4	4	0	0
	3) Panti Rehabilitasi	0	0	0	0
	4) Pusat Rehabilitasi Sosial Narkoba	0	0	0	0
	5) Rumah Singgah	0	0	0	0
		0	0	0	0

Sumber : DINSOS Aceh Jaya , 2019

Penanganan PMKS tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Dalam kaitan ini panti sosial milik pemerintah memiliki peran strategis sebagai ujung tombak yang bersentuhan dalam penanganan PMKS melalui sistem kelembagaan serta mendorong munculnya produk-produk operasional pelayanan kesejahteraan sosial.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Aceh Jaya selama kurun waktu 2015-2018 mengalami peningkatan walaupun tidak begitu signifikan dan ada yang cenderung stabil. organisasi sosial pada tahun 2018 tercatat 1 unit, sementara tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) berjumlah 9 orang. Berikut gambaran perkembangan PSKS diKabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 - 2017.

Tabel 2.54 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015– 2018

NO	PSKS	Satuan	Tahun			
			2015	2016	2017	2018
1	Karang Taruna	Unit	-	-	-	-
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)	Orang	-	-	-	-

NO	PSKS	Satuan	Tahun			
			2015	2016	2017	2018
3	Organisasi Sosial	Unit	-	-	-	1
4	Lembaga Swadaya Masyarakat	Unit	-	-	-	-
5	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	6	9	9	9
6	Perintis Pahlawan Kejuangan Kemerdekaan		-	-	-	-

Sumber : DINSOS Aceh Jaya,2019

2.3.2.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

Analisis Kinerja atas layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dilakukan terhadap indicator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu bidang urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, perpustakaan dan kearsipan.

2.3.2.2.1 Ketenagakerjaan

Berdasarkan data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Jaya diperoleh informasi bahwa jumlah angkatan kerja pada tahun 2018 sebanyak 42.497 orang, Berikut perkembangan ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Aceh Jaya yang dapat dilihat pada tabel 2.55 di bawah ini

Tabel 2.55 Angkatan Kerja, Bukan Angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2018

Kegiatan Utama	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Angkatan Kerja	-	-	43.212	42.497	45.770
Bekerja	-	-	41.089	39.484	43.505
Pengagguran Terbuka	-	-	2.123	2.649	2.265
Bukan Angkatan Kerja	-	-	17.612	21.006	16.001
Sekolah	-	-	5.638	6.618	5.102
Mengurus Rumah Tangga	-	-	10.530	12.702	11.899
Lainnya	-	-	1.444	1.686	1.938
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-	-	71.04	66,92	70,73
Tingkat Pengangguran Terbuka	-	-	4.91	6.23	4.95

Sumber : BPS Aceh Jaya, 2019

Tabel 2.56 Angkatan Kerja, Bukan Angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 menurut jenis kelamin

Kegiatan Utama	2018		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	29491	16279	**45770**
Bekerja	28.078	15.427	**43505**
Pengangguran Terbuka	1413	852	**2265**
Bukan Angkatan Kerja	3283	13718	**16001**
Sekolah	3058	2044	**5102**
Mengurus Rumah Tangga	225	11674	**10899**
Lainnya	1385	553	**1938**
Jumlah	**34159**	**30550**	**64,709**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	**86,33**	**53,29**	**70,73**
Tingkat Pengangguran Terbuka	**4,79**	**5,23**	**4,95**

Sumber : BPS Aceh Jaya, 2019

Jika dilihat dari jumlah pencari kerja yang terdaftar menurut tingkat pendidikan pada tahun 2017 berjumlah 6.618 orang yang terdiri dari dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh pencari kerja dari perguruan tinggi sebesar 45,28 persen. Hal tersebut terus meningkat dimana pada tahun 2018 tercatat 49 pencari kerja dengan pencari kerja dari perguruan tinggi sebesar 57,14 persen. Pada tahun 2016, Bila dilihat menurut lapangan usaha, sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan merupakan sektor yang paling menyerap tenaga kerja yaitu 25.707 orang (62,56 persen).

2.3.2.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender mengambarkan kualitas pembangunan manusia yang dilihat dari komponen yang sama dengan IPM yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan LamaSekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran per Kapita. Jika dilihat dari perkembangan

indeks pembangunan gender dari tahun ke tahun (2012-2015) menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan (83,31 pada tahun 2012 menjadi 88,08 pada tahun 2015), sebagaimana terlihat pada tabel 2.58.

Tabel 2.57 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2018

	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aceh Jaya	85,59	88,06	88,08	-	88,46	89,26
Aceh	90,61	91,5	92,07	-	91,67	91,67
Nasional	90.19	90,34	91,03	-	90,96	90,99

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2019

Meskipun IPG meningkat dari tahun ke tahun, namun IPG Kabupaten Aceh Jaya masih dibawah IPG Provinsi Aceh dan Nasional.

B. Proporsi Perempuan di Parlemen

Keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan rakyat masih terlihat jelas terdapat ketimpangan dibandingkan dengan laki-laki. Namun terus mengalami peningkatan, terbukti pada periode 2014-2019 terdapat 2 kursi dari 20 kursi DPRK Aceh Jaya yang diduduki perempuan (10 persen) dari yang sebelumnya tidak ada keterwakilan perempuan. Namun pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 1 kursi dari 20 kursi parlemen (5 persen), sementara bila dibandingkan tingkat Provinsi Aceh masih jauh bila dibandingkan secara persentase yaitu hanya mencapai 0,17 persen.

C. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Perlindungan anak di Kabupaten Aceh Jaya menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari beberapa penurunan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan anak, sebagaimana terlihat pada gambar 2.18. Mungkin masih banyak lagi kasus yang belum terungkap dikarenakan keengganan para korban tindak kekerasan untuk melapor karena

pertimbangan antara pelaku dan korban masih ada hubungan keluarga. Sebagian besar penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dikarenakan faktor ekonomi.

Sumber : DPMPKB Aceh Jaya, 2019 (diolah)

Gambar 2.22 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak tahun 2014-2018

2.3.2.2.3 Pangan

Pembangunan pangan pada dasarnya merupakan bagian dari ketahanan bangsa. Sesuai dengan kesepakatan global yang dituangkan dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang terdiri atas 17 tujuan dan 232 indikator menegaskan bahwa pada tahun 2030, setiap negara telah menurunkan kemiskinan dan kelaparan separuh dari kondisi tahun 2015. Untuk mencapai tujuan tersebut, Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi merekomendasikan perlunya mengoptimalkan bahan pangan lokal yang memenuhi kebutuhan gizi penduduk setempat dengan mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) didukung oleh cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kualitas dan kemampuan daya beli (*affordability*). Untuk menjaga ketersediaan pangan telah dilakukan upaya untuk mempertahankan luas lahan sawah sebagaimana yang tertera pada tabel 2.58 dan tabel 2.59.

Tabel 2.58 Jumlah Lahan Persawahan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 – 2018

No	Luas Lahan Persawahan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Sawah Irigasi	2.725	2.678	2.724	2.954	-	3.020
2	Sawah Tadah Hujan / Non Irigasi	10.881	11.146	10.193	9.988	-	10.322
3	Sawah Pasang Surut	-	-	-	-	-	-
4	Sawah Lainnya	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pangan Aceh Jaya, 2019

Tabel 2.59 Regulasi Ketahanan Pangan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Qanun						
	- Ada				√	√	
	- Tidak Ada	√	√	√			√

Sumber : Dinas Pangan Aceh Jaya, 2019

2.3.2.2.4 Pertanahan

Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Pembangunan urusan pertanahan mencakup administrasi pertanahan, penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyelesaian konflik-konflik pertanahan, dan pengembangan sistem informasi pertanahan. Pembangunan pertanahan diarahkan untuk menjamin kepastian hukum akan penggunaan tanah untuk berbagai kepentingan, baik yang bersifat kepentingan pribadi, keperluan usaha, maupun kepentingan masyarakat umum. Jumlah hak milik (sertifikat) dari tahun ke tahun sangat fluktuatif, dimana berdasarkan data BPN, pada tahun 2014 terdapat 1.515 sertifikat, tahun 2015 sebanyak 1.732 sertifikat, tahun 2016 sebanyak 2.264 sertifikat, tahun 2017 sebanyak 2.508 sertifikat, dan pada tahun 2018 sebanyak 3.065 sertifikat.

2.3.2.2.5 Lingkungan Hidup

A. Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten

Hingga tahun 2017, Kabupaten Aceh Jaya belum memiliki dokumen RPPLH, dimana direncanakan akan disusun pada tahun 2018. Adapan tujuan penyusunan RPPLH, yakni:

1) Mengharmonisasikan pembangunan nasional dengan kemampuan data dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
2) Mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
3) Mempertahankan dan/atau menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup;
4) Mempertahankan dan/atau meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim.

Mengingat pentingnya dokumen RPPLH ini, percepatan penyelesaian dokumen ini sangat dibutuhkan.

B. Tersedianya dokumen KLHS Kabupaten

Landasan hukum KLHS tercantum dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah.

Terkait Jumlah kawasan lindung berupa, hutan lindung 165.253,51 Ha. Berikut perkembangan jumlah kawasan lindung, plasma nutfah dilindungi dan endemik, hutan bakau dan kerusakan lingkungan hidup.

Tabel 2.60 Jumlah Kawasan Lindung, Plasma Nutfah Dilindungi dan Endemik, HutanBakau dan Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Aceh JayaTahun 2013 – 2018

No.	Lingkungan Hidup dan Kerusakan Lingkungan Hidup	TAHUN					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Lingkungan Hidup						
	a. Hutan Lindung (Ha)	165.253,51	165.253,51	165.253,51	165.253,51	165.253,51	165.253,51
	b. Cagar Budaya (bh)	1	1	1	1	1	1
2	a. Hewan (jenis)	1	1	1	1	1	1

Sumber : DLH Aceh Jaya (Diolah)

2.3.2.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil menjadi salah satu sasaran utama dalam pembangunan. Keberadaan penduduk yang merupakan salah satu modal utama pembangunan perlu mendapatkan perhatian agar penerapan administrasi kependudukan berjalan sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku.

Penerapan sistem informasi administrasi kependudukan seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional, memerlukan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang kependudukan dan catatan sipil yang baik antara pemerintah pusat, provinsi dengan Kabupaten/ Kota.

Implementasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)*on line*perlu mendapatkan dukungan dengan peningkatan kapasitas

SDM dalam rangka pengoperasiannya termasuk pelatihan pemeliharaan peralatan jaringan SIAK on line.

Pelayanan administrasi kependudukandiKabupaten Aceh Jaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain pelayanan KTP, KK, Akta kelahiran, akta perkawinandan perceraian. Pelayanan ini harus diberikan kepada semua masyarakat dan juga ada beberapa jenis pelayanan yang telah mempunyai standar pelayanan minimal (SPM) yang harus dicapai.

Persentase kepemilikan KTP pada penduduk wajib KTP mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Sampai tahun 2016 data dari Dinas Disdukcapil Kabupaten Aceh Jaya menunjukkan total penduduk yang wajib KTP mencapai 61.842 jiwa. Sedangkan kondisi tahun 2014, jumlah penduduk yang memiliki KTP baru mencapai 60.001 jiwa.

Meskipun sudah menerapkan penerbitan KTP berbasis NIK namun angka ini masih jauh dibawah target SPM tentang kepemilikan KTP. Data kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61 Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015-2018.

No.	Jenis Data	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Penduduk Wajib KTP	61.383	61.842	60.707	62.006
2	Jumlah Penduduk yang memiliki KTP	53.881	60.001	59.358	59.984
3	Jumlah pasangan nikah berakta nikah	39.489	39.739	9.120	11.262
4	Jumlah penduduk yang telah memiliki KK	26.895	26.992	26.764	27.645
5	Jumlah penduduk yang telah memiliki akta kelahiran	55.688	58.568	31.820	39.866
6	Jumlah penduduk yang telah memiliki akta kematian	32	55	137	296

Sumber : Disdukcapil Aceh Jaya, 2018

Jika dilihat dari tabel di atas, penduduk yang telah memiliki KTP-Elektronik terus menurun hingga pada tahun 2017 yang belum memiliki KTP sebesar 1,02 persen dan pada tahun 2018 1,03 persen.

2.3.2.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat desa, dengan pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat terwujud masyarakat desa yang berdayadari aspek kualitas SDM, berdaya dari aspek ekonomi dan berdaya dari aspek lingkungan yang berkualitas. Dengan 3 aspek tersebut terwujud dapat tumbuh kemandirian masyarakat desa dalam menggali potensi untukmemecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Pelaksanaan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat desa bertumpu pada beberapa tujuan yaitu: 1). meningkatkan keberdayaan masyarakat desa, 2). Mengembangkan lembaga-lembaga ekonomi desa, 3). meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan saranaprasarana wilayah, proses kelurahan dan institusi kemasyarakatan lainnya agar mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat yang ada dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik, serta mampu menjawab permasalahan yang berkembang dalam lingkungannya. 4). meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan 5). Meningkatkan peran serta perempuan kegiatan usaha ekonomi profuktif dan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

2.3.2.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Menurut data dari DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya selama tahun 2018 jumlah peserta program KB aktif mencapai 8.938 jiwa yang terdiri dari laki laki mencapai 221 jiwa sedangkan untuk perempuan 8.717 jiwa. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 9.505

jiwa. Sedangkan untuk jumlah peserta akseptor KB laki-laki pada tahun 2017 mencapai 621 jiwa dan perempuan mencapai 8.884 jiwa. Jumlah tersebut juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 12.484 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2016, jumlah akseptor KB laki-laki mencapai 625 jiwa dan perempuan mencapai 11.859 jiwa.

Jumlah Pasangan Usia subur pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu mencapai angka 14.259 pasang, sedangkan tahun 2017 sebesar 14.896 pasang. Sedangkan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) ber KB pada tahun 2018 mencapai 8.938 pasang dan tahun 2017 juga mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 76% persen yaitu menjadi 9.505 pasang. Dari 14.259 PUS, masih terdapat 5.321 PUS yang belum KB (63 persen), 6.309 PUS (66 persen) dari 18.820 PUS pada tahun 2016, sehingga dapat dilihat bahwa terjadi Penurunan PUS yang belum KB pada dua tahun terakhir. Berikut jumlah peserta program KB aktif, jumlah akseptor KB, jumlah pasangan usia subur dan jumlah pasangan usia subur ber KB. Adapun jumlah sarana pelayanan KB hingga tahun 2018, terdapat 41 unit Klinik KB yang tersebar di 9 Kecamatan, dengan jumlah PLKB sebanyak 16 orang.

Tabel 2.62 Jumlah peserta program KB aktif, jumlah akseptor KB, jumlah pasangan usia subur dan jumlah pasangan usia subur ber KB di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2018.

No.	Jenis	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Peserta Program KB Aktif (Jiwa)	9.436	11.527	12.484	9.505	8.938
	1) Laki-laki	362	468	625	621	221
	2) Perempuan	9.071	11.059	11.859	8.884	8.717
2	Jumlah Akseptor KB (jiwa)	9.436	11.527	12.511	9.505	8.938
	1) Laki-laki	362	468	652	621	221
	2) Perempuan	9.071	11.059	11.859	8.884	8.717
3	Jumlah Pasangan Usia Subur (pasang)	14370	16.445	18.820	14.896	14.259

No.	Jenis	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
4	Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB (pasang)	9.436	11.527	12.511	9.505	8.938

Sumber: DPMPKB Aceh Jaya, 2019

Pada tahun 2016 untuk jumlah remaja usia 15-24 tahun yang mendapat penyuluhan tentang kesehatan reproduksi (Kespro), HIV/AIDS, dan keluarga berencana di Kabupaten Aceh Jaya berturut-turut hanya 10 orang, 14 orang, dan 10 orang (meningkat dari tahun 2015, yang masing-masing hanya berjumlah 9 orang).

2.3.2.2.9 Perhubungan

Wilayah Kabupaten Aceh Jaya secara keseluruhan adalah daratan sehingga moda transportasi darat merupakan moda utama dalam rangka mendukung kelancaran arus lalu lintas penumpang, barang dan jasa. Kabupaten Aceh Jaya memiliki terminal tipe C untuk mendukung pengaturan sarana transportasi darat khususnya jasa penumpang orang, yang terletak di kecamatan krueng sabee.

Transportasi laut di Kabupaten Aceh Jaya memiliki 1 pelabuhan yang berada di Kecamatan Krueng sabee.

A. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat dan laut. Faktor aksesibilitas daerah menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai keberhasilan pelayanan transportasi. Pada tahun 2016 terdapat 4 perusahaan pengangkutan penumpang di Kabupaten Aceh Jaya dengan jumlah armada mencapai 40 unit mobil yang beroperasi di ruas jalan Kabupaten Aceh Jaya. Jumlah arus penumpang yang melalui dermaga/terminal di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 2.64.

Tabel 2.63 Jumlah orang melalui Dermaga/Terminal di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2018

Jumlah Orang melalui dermaga/terminal	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Terminal	1000	1100	1200	1500	0	0
Dermaga	-	12	14	15	5500	5959

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Jaya, 2019

B. Jumlah uji kir angkutan umum

Jumlah uji kir angkutan umum di Kabupaten Aceh Jaya sejak tahun 2012-2018 sebanyak 183 unit kendaraan dengan lamanya proses pengujian kendaraan bermotor untuk 1 unit kendaraan lebih kurang 45 menit per kendaraan.

C. Persentase layanan angkutan darat

Jumlah Pelayanan Angkatun Darat mengalami penurunan secara drastis disebabnya karena tidak berfungsinya terminal di Kabupaten Aceh Jaya. Sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.64 Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Layanan Angkutan Darat	82	86	90	90	0	0
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	-	-	-	50	65	68

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Jaya

D. Pemasangan rambu-rambu

Perlengkapan jalan merupakan prasarana jalan yang diharuskan dipasang pada ruas jalan yang bertujuan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Perlengkapan jalan terdiri dari beberapa jenis, yaitu: Rambu-rambu lalu lintas, Rambu pendahulu petunjuk jurusan, *Delineator*, *Guard Rail* (Pagar pengaman jalan), *Traffic Light*, cermin tikungan, *speed*

bumb, lampu penerangan jalan umum dan marka jalan. Hingga Tahun 2016, persentase pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Aceh Jaya sudah mencapai 80 persen. Banyaknya halte bus dan rambu lalu lintas menurut di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.65 Banyaknya Halte Bus dan Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015-2018.

Uraian	2015	2016	2017	2018
Halte Bus	2	2	2	2
Rambu Jalan	108	108	108	108
Penunjuk Jalan	111	125	130	143
Lampu Lalu Lintas	10	16	16	16
Pagar Pengaman Jalan	450	545	560	576
Cermin Cembung	3	3	6	8

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Jaya, 2019

2.3.2.2.10 Komunikasi dan Informatika

Salah satu media yang semakin mempermudah komunikasi di masyarakat adalah telepon. Kepemilikan hand phone saat ini tidak semata-mata untuk memenuhi gaya hidup namun lebih dari itu sudah merupakan suatu kebutuhan. Hampir sebagian besar keluarga pasti memiliki peralatan tersebut dengan kuantitas lebih dari satu.

Keterbukaan informasi di bidang pemerintahan saat ini menjadi salah satu indikator dari tata pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk menjamin ketersediaan dan kemudahan akses lembaga yakni Komisi Informasi Daerah yang mempunyai fungsi mengawal keterbukaan informasi sektor publik di daerah. Hal tersebut seperti yang diatur dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU tersebut jelas disebutkan bahwa semua orang mempunyai hak untuk mengakses dan mendapatkan informasi publik yang tidak dikecualikan.

Pemerintah daerah juga diwajibkan untuk mencapai target-target

yang yang ada dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Komunikasi dan informasi seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, maka setiap Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan kegiatan Diseminasi Informasi Nasional. Kegiatan Diseminasi Informasi ini harus dilakukan paling tidak 12 kali dalam satu tahun melalui media massa (cetak maupun elektronik), website, media tradisional (pertunjukan kesenian rakyat), media interpersonal (sarasehan, ceramah, workshop, dll), dan melalui media luar ruang seperti brosur, spanduk baliho, dll. Satu hal lain yang juga menjadi indikator dalam SPM bidang komunikasi dan Informasi adalah pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan yang ada. Sampai tahun 2016 belum ada satupun kecamatan yang telah mempunyai kelompok informasi masyarakat ini, padahal menurut SPM pada tahun 2014 sekurang-kurangnya 50% dari seluruh kecamatan harus sudah memiliki KIM.

Untuk menjembatani hubungan antara pemerintah dengan masyarakat luas saat ini pemerintah Kabupaten Aceh Jaya juga telah mempunyai website resmi yaitu www.acehjayakab.go.id. Melalui website ini masyarakat luas dapat memperoleh semua informasi mengenai Kabupaten Aceh Jaya yang sifatnya publik. Keberadaan website tersebut memang masih belum optimal karena belum semua SKPK yang ada mempunyai website yang resmi. Selain website tersebut, Kabupaten Aceh Jaya juga telah memiliki website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang juga merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik di Kabupaten Aceh Jaya, dengan PPID SKPK yang aktif berkisar 51 persen.

2.3.2.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

A. Koperasi

Koperasi memiliki peran yang penting dalam perekonomian Kabupaten Aceh Jaya. Kinerja koperasi dapat diukur dari tingkat keaktifan koperasi, dan tingkat kesehatan koperasi khususnya pada unit Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Secara umum tingkat keaktifan koperasi dipengaruhi oleh keaktifan pengurus dalam melakukan pengelolaan koperasi. Perkembangan Koperasi Unit Desa di Kabupaten Aceh Jaya secara umum tidak begitu menggembirakan. Pada tahun 2016 terdapat 134 koperasi dengan 11 unit KUD, 19 unit KPR, 2 unit KOPKAR, dan 102 unit jenis koperasi lainnya.

Jumlah koperasi yang aktif di Kabupaten Aceh Jaya dalam kurun waktu 2012 – 2018 cenderung menurun, dari 92 unit pada Tahun 2012 menjadi 42 unit pada Tahun 2018. Perkembangan koperasi dan Jumlah Pengusaha Kecil serta Menengah di Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.67.

Tabel 2.66 Perkembangan Koperasi dan Jumlah Pengusaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 – 2018

No	Jenis Koperasi (Jumlah)	Tahun						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Koperasi aktif	92	45	41	49	49	49	42
2	Koperasi tidak aktif	47	100	102	102	102	102	89
3	Koperasi Induk	-	-	-	-	-	-	-
4	Koperasi Primer	137	143	141	149	149	149	131
5	KUD	11	11	11	11	11	11	11
6	Non KUD	128	134	132	140	140	140	120
7	Jumlah Pengusaha Kecil	547	368	465	465	465	465	521
8	Jumlah Pengusaha Menengah	10	14	12	12	12	12	15

Sumber : DISPERINDAG Aceh Jaya,2019

Untuk jumlah pengusaha kecil di Kabupaten Aceh Jaya mengalami

penurunan yaitu pada Tahun 2012 mencapai 547 orang naik menjadi 521 orang pada tahun 2018. Berbanding terbalik untuk kategori pengusaha menengah. Pada Tahun 2012 mencapai 10 orang meningkat menjadi 15 orang pada tahun 2018.

B. UMKM

Meskipun dari segi jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Jaya terus meningkat, namun demikian sektor ini dirasakan belum berkembang secara optimal dari segi produktivitasnya. Adapun jumlah UMKM dapat dilihat pada tabel 2.67 berikut:

Tabel 2.67 UMKM Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2018

KRITERIA UMKM	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mikro	459	596	601	765	765	879
Kecil	368	465	465	525	525	631
Menengah	14	12	12	10	10	23
Jumlah Tenaga Kerja UMKM	4050	4515	3225	5276	5276	6132

Sumber : DISPERINDAG Aceh Jaya, 2019

2.3.1.2.12 Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengamanatkan kepada Kabupaten/Kota dalam hal penanaman modal untuk (1) Menyusun perencanaan penanaman modal; (2) Meningkatkan fasilitasi bagi peningkatan penanaman modal di kab/kota; dan (3) Meningkatkan kinerja perijinan dan pelayanan penanaman modal. Selanjutnya dalamPerpres 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Satu Pintu Penanaman Modal mengamanatkan kepada Kabupaten/Kota untuk: (1) mengurangi hambatan dalam pelayanan publik dan perijinan usaha bagi penanaman modal di kab/kota; (2) Mekanisme pelayanan perijinan dan penanaman modal di daerah; dan (3) Mengurangi hambatan struktural dan ekonomi biaya tinggi dalam penanaman modal di daerah. Perkembangan investasi di Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat pada tabel

2.69.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari amanat Undang- Undang 25 tahun 2007 dan Perpres 27 tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berupaya untuk meningkatkan investasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan antara lain kegiatan promosi kerjasama investasi, meningkatkan mutu pelayanan pelayanan perizinan yang yang berorientasi pada kebutuhan klien/pemohon, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pelayanan perizinan dan mendorong minat investor menginvestasikan usahanya di Kabupaten Aceh Jaya.Dengan berfluktuatifnya angka jumlah investor tersebut menunjukkan bahwa iklim investasi di Aceh masih sangat minim dan belum stabil, sehingga dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk mendatangkan investor untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Aceh Jaya.

Tabel 2.68 Jumlah Proyek PMA, PMDN dan Investasi di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013–2018 (Juta Rupiah)

No	Jumlah Proyek PMA, Proyek PMDN, dan Investasi	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	**Jumlah Proyek PMA**						
	1) Pertambangan dan pengalian	3	3	3	3	3	3
2	**Jumlah Proyek PMDN**						4
	1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	3	3	4	4	4	
	2) Pertambangan dan pengalian	11	11	11	11	11	24
3	**Investasi**						
	1) Total investasi pemerintah pusat	1.212.564.3	1.212.564.3	1.243.545,4	6.929.09	7.519.000	11.035.774

Sumber : DPMP2TSP Aceh Jaya

Sasaran pembangunan pada urusan penanaman modal adalah untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Aceh Jaya. Keberhasilan pembangunan di bidang penanaman modal memberikan dampak yang

cukup besar terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Jaya. Peningkatan jumlah investor di Kabupaten Aceh Jaya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta dapat meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah.

2.3.2.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

A. Jumlah Organisasi pemuda

Pembangunan dan pembinaan generasi muda dilakukan melalui organisasi kepemudaan yang ada. Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2015 sebanyak 17 organisasi pemuda, sedangkan organisasi pemuda dibawah koordinasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Jaya.

B. Jumlah Organisasi Olahraga

Pada bidang olahraga jumlah klub olahraga sampai tahun 2018 menurut data Dispora Kabupaten Aceh Jaya mencapai 193 klub, jumlah tersebut cenderung tetap dari tahun sebelumnya. Sarana dan prasarana olahraga masih diperlukan peningkatan baik jumlah maupun kualitasnya. Sarana olahraga yang ada di Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2018 tercatat 127 unit yang tersebar di seluruh kecamatan se- Kabupaten Aceh Jaya. Berikut jumlah klub olahraga, sarana olahraga dan organisasi kepemudaan di kabupaten Aceh Jaya, untuk organisasi kepemudaan terjadi peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya 17 organisasi menjadi 67 organisasi. Sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.69 Jumlah Klub Olahraga, Sarana Olahraga dan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 – 2018

Tahun	Jumlah Klub Olahraga	Jumlah Sarana Olahraga	Jumlah Organisasi Kepemudaan
2013	161	125	17
2014	187	125	17
2015	193	127	17

Tahun	Jumlah Klub Olahraga	Jumlah Sarana Olahraga	Jumlah Organisasi Kepemudaan
2016	193	127	17
2017	193	127	17
2018	193	127	67

Sumber : Dispora Aceh Jaya, 2019

2.3.2.2.14 Statistik

Statistik menurut Undang-undang nomor 16 Tahun 2007 adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Dalam pemanfaatannya, statistik dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: 1) statistik dasar, 2) statistik sektoral, 3) statistik khusus. Upaya penyediaan, penyebarluasan data serta upaya pengembangan ilmu statistik memiliki peranan yang cukup signifikan terhadap Kegiatan perencanaan pembangunan dimana keterkaitan keputusan terhadap suatu kebijakan, program, dan kegiatan sangat bergantung kepada ketersediaan data.Beberapa dokumen statistik yang disusun oleh Badan Pusat Statistik yang bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Jaya antara lain, Aceh Jaya Dalam Angka, PDRB dan IPM. Berbagai jenis data statistik tersebut digunakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam mengkaji kemajuan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya dan menyusun perencanaan pembangunan.

2.3.2.2.15 Persandian

Keutuhan dan kedaulatan NKRI perlu didukung oleh sistem pengamanan informasi negara yang aman. Untuk itu sistem pengamanan dimaksud perlu ditunjang dengan sistem persandian yang memadai. Tujuan persandian di pemerintahan termasuk juga pemerintah daerah (pemda) sangat penting. Namun demikian permasalahan pengelolaan persandian berdasarkan jenis resiko dan ancaman yang dapat

ditimbulkannya. Diantaranya, jenis resiko yang paling dominan yaitu ketersediaan sumber daya manusia (SDM) sandi berkualifikasi ahli sandi yang terbatas. Hal ini terjadi karena regenerasi SDM sandi kurang berjalan dengan baik, minat menjadi SDM sandi yang kurang, dan kualitas calon peserta diklat sandi yang kurang. Hal ini menyebabkan potensi ancaman berupa operasional persandian terganggu sementara.

Petugas persandian di Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2018 masih sangat terbatas, yaitu hanya 1 orang. Jumlah tersebut belum ada yang mempunyai kualifikasi persandian. Dengan luas wilayah Kabupaten Aceh Jaya dengan 9 kecamatan dan 172 desa, artinya dengan jumlah petugas 1 orang masih sangat kurang. Untuk petugas persandian di tingkat kecamatan masih dibantu oleh petugas Satpol PP atau satpam. Belum adanya peralatan persandian lengkap yang ada di Kabupaten Aceh Jaya menjadi kendala utama yang harus segera di tangani.

2.3.2.2.16 Kebudayaan

Kabupaten Aceh Jaya dalam proses pembangunan tidak lepas dari pengaruh budaya dimana asset budaya dapat dijadikan sebagai modal dalam proses pembangunan. Kebudayaan merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur dari akal dan budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Akar budaya masyarakat Aceh Jaya berasal dari tradisi/adat dan agama. Letak geografis Kabupaten Aceh Jaya yang berada di perbatasan, ikut berpengaruh terhadap berkembangnya budaya dan seni masyarakat. Kesenian merupakan salah satu peninggalan kebudayaan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya. Kesenian yang berkembang di Kabupaten Aceh Jaya banyak dipengaruhi oleh beberapa unsur budaya daerah, seperti pengaruh budaya dari luar Kabupaten Aceh Jaya.

Kegiatan berkesenian di Kabupaten Aceh Jaya mengalami peningkatan, tergambarkan dari jumlah Penyelenggaraan Festival Seni

dan Budaya, maksud dan tujuan dari kegiatan festival ini adalah untuk meningkatkan dan melestarikan budaya kesenian yang ada di kabupaten Aceh Jaya. Ketersediaan sarana dan prasarana berkesenian bagi masyarakat tergambarkan dari indikator jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang memadai. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan daerah juga tergambarkan dengan semakin meningkatnya jumlah grup kesenian tradisional dan jumlah seniman yang ada di Kabupaten Aceh Jaya. Di Kabupaten Aceh Jaya hingga tahun 2017 tercatat 32 orang seniman, sastrawan, dan budayawan yang menggeluti berbagai jenis kesenian. Selain itu juga terdapat 13 Sanggar dengan jenis kesenian berupa tari kreasi, musik kolaborasi, tari tradisional, teater, rapa'i saman, zikir maulid, rapa'i geleng, musik tradisional, sastra, dan musik etnik modern.

2.3.2.2.17 Perpustakaan

Perkembangan jumlah perpustakaan kurun waktu Tahun 2013-2016 sesuai standar sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengalami perkembangan yang fluktuatif. Demikian juga untuk jumlah koleksi perpustakaan pada kurun waktu yang sama senantiasa meningkat. Peningkatan tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan dari 643 orang pada Tahun 2015 menjadi 1356 orang pada Tahun 2018.

Disisi lain meningkatnya jumlah pengunjung juga dikarenakan meningkatnya minat baca masyarakat, meskipun peningkatan tersebut belum optimal jika dikaitkan dengan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani.

Tabel 2.70. Perkembangan Perpustakaan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 – 2018

No.	Uraian Data	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Perpustakaan	-	-	-	-	-	
	a. Perpustakaan Umum Kab. Aceh Jaya	-	-	1	1	1	1
	b. Perpustakaan Keliling	-	-	-	-	-	-
	c. Perpustakaan Sekolah	135	135	135	135	135	135
	d. Perpustakaan Desa	16	13	12	8	8	8
2	Jumlah Koleksi Perpustakaan	-	-	2.416	13.327	13.777	14.125
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	-	-	643	1126	1231	1356

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Jaya 2019

2.3.2.2.18 Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di lingkungan SKPD Kabupaten Aceh Jaya pada kurun waktu Tahun 2012 – 2018 sudah dilakukan secara baku dengan norma dan standar yang ada namun belum optimal. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kendala antara lain tidak semua SKPK mempunyai tenaga arsiparis/tenaga pengelola kearsipan, belum tersedianya tempat/ruang penyimpanan arsip sesuai dengan standar, dari 44 SKPK, baru 5 SKPK yang mengelola arsip secara baku.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1 Pariwisata

Perkembangan jumlah objek wisata di Kabupaten Aceh Jaya cenderung meningkat, dari 38 objek wisata pada tahun 2013 meningkat pada tahun 2018 menjadi 59 objek wisata. Sehubungan wisata di Kabupaten Aceh Jaya belum berkembang dengan baik maka sangat berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan dan juga masih belum dikenal oleh wisatawan mancanegara. Jumlah kunjungan wisata juga dipengaruhi oleh penyediaan akomodasi dan makan minum, dimana kontribusi keduanya terhadap PDRB masih rendah, bahkan konstan

untuk tahun 2014 dan 2015 (0,78 persen). Pada tahun 2016, tercatat sebanyak 5 tempat penginapan (penurunan dari tahun 2012 dan 2013 yang berjumlah 7 tempat, dan 2014 yang berjumlah 6 tempat), yang semuanya masuk dalam klasifikasi akomodasi lainnya. Ini menandakan bahwa tidak ada satupun hotel berbintang. Jumlah tamu asing dan tamu domestik pada tahun 2018 berturut-turut 50 orang. Selain itu tercatat 50 unit restoran/rumah makan, dengan jumlah tersebar di Kecamatan Krueng Sabee sebanyak 10 unit. Jumlah pengunjung wisata pada tahun 2012 hanya 93.182 orang dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 174.917 Orang.

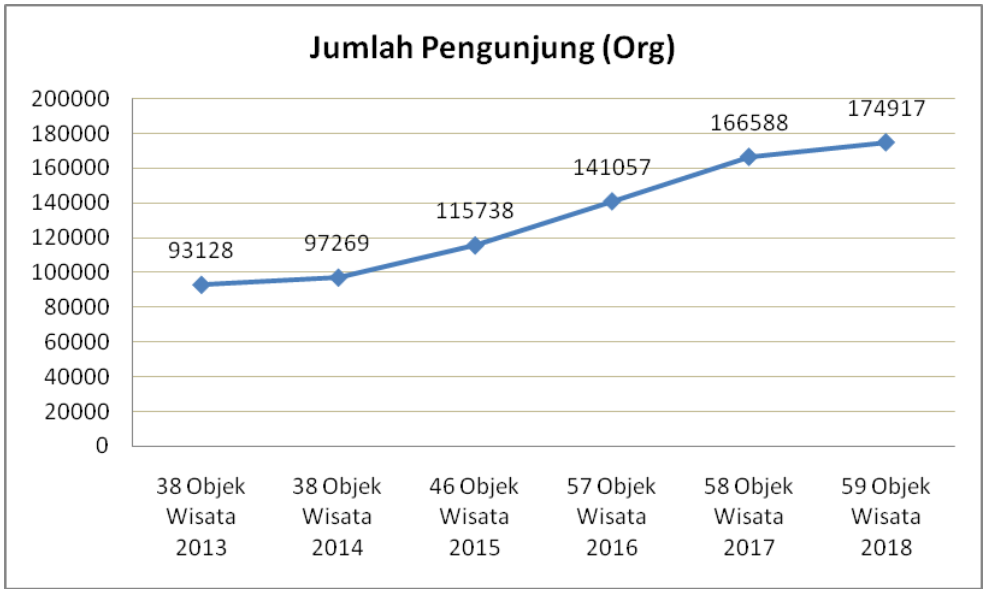

Sumber : DISPORA Aceh Jaya, 2019 (Diolah)

Gambar 2.23 Jumlah Pengunjung Wisata di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2018

2.3.3.2 Pertanian

Pembangunan urusan pertanian mencakup sektor pertanian

tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan. Dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 berdasarkan harga konstan menunjukan bahwa sektor pertanian sampai saat ini masih merupakan sektor dominan. Walaupun terjadi penurunan dari tahun ke tahun namun sektor pertanian masih sebagai penyumbang terbesar dari total nilai PDRB Kabupaten Aceh Jaya yaitu sebesar 31,65 persen pada tahun 2016.

Produk sektor pertanian yang dominan di Kabupaten Aceh Jaya adalah padi sawah. Dari dinas pertanian kabupaten Aceh Jaya diperoleh data tahun semester 1 (satu) Tahun 2016, untuk padi sawah produktivitasnya mencapai 4,6 ton/ha dan produksi padi mencapai 95.364 ton. Sedangkan untuk padi ladang produktivitasnya sebesar 3,7 ton/ha dengan produksi padi ladang mencapai 881,3 ton.

Disamping padi sawah, komoditas lain yang memiliki produktivitas yang cukup tinggi adalah Jagung. Untuk Jagung produktivitasnya mencapai 3,7 ton/ha dengan produksi mencapai 6.624 ton. Sedangkan untuk komoditas komoditas lain seperti kacang kedele, kacang hijau, kacamg tanah, ubi kayu, ubi jalar jumlah produksinya tidak begitu tinggi tapi memiliki nilai produktivitas cukup tinggi seperti ubi jalar dan ubi kayu. Namun demikian tetap memberikan manfaat bagi para petani sebagai hasil tambahan sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

Kabupaten Aceh Jaya juga menghasilkan tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kopi, kelapa dalam, nilam, kakao, tebu dan lainnya. Hingga tahun 2016, tercatat dua komoditas perkebunan yang menjadi andalan yaitu kepala sawit dan karet. Untuk tanaman kelapa sawit tercatat 14.458 Ha ditanami sawit dan 13.963 Ha ditanami karet dengan produksi kelapa sawit dan karet berturut-turut sebesar 85.091 ton dan 5.394 ton. Secara keseluruhan produksi Hasil Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.71, sementara Produktivitas hasil pertanian dapat dilihat pada tabel 2.72.

Tabel 2.71 Produksi Hasil Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 – 2018

No.	Jenis	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Padi Sawah (ton)	48.354	48.176	89.192	95.364	85.534	104.231
2	Padi Ladang (ton)	3.314,10	116,7	175	881,3	306,8	0
3	Jagung (ton)	398	1646	5036	6.264	18.884	14.540
4	Kedelai (ton)	426,3	318,1	1088	609	355	1.748
5	Kacang Hijau (ton)	23	23,8	75	14,6	6	5,0
6	Ubi Kayu (ton)	772,9	425,7	287,8	366,7	277	267,9
7	Ubi Jalar (ton)	320,5	156	116,3	125,6	90	98,7
8	Kacang Tanah (ton)	320,5	336,3	108	185	3,6	99
9	Karet (ton)	8.702	8.537	7.551	5.394	5.440	5.471
10	Kelapa Sawit (ton)	134.946	13.934	122.762	85.091	88.517	100.279
11	Kelapa (ton)	1.395	1.379	1.378	2.277	2.610	2.677
12	Kopi (ton)	205	203	247	350	357	449
13	Nilam (ton)	35	16	19	76	43	30

Sumber : DISTAN Aceh Jaya

Tabel 2.72 Produktivitas Hasil Pertanian Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 – 2018

No.	Jenis	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Padi Sawah (ton/ha)	4,6	4,6	5	4,8	4,7	5,3
2	Padi Ladang (ton/ha)	3,1	3.2	3.5	3,7	2,6	0
3	Jagung (ton/ha)	2,9	3,5	3,6	3,7	5,0	5,1
4	Kedelai (ton/ha)	1,1	1,1	1,2	1,3	1,6	1,61
5	Kacang Hijau (ton/ha)	1,3	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
6	Ubi Kayu (ton/ha)	11,1	11,2	11,1	11,2	12,6	11,7
7	Ubi Jalar (ton/ha)	12,1	9,8	9,7	9,7	10,0	9,8
8	Kacang Tanah (ton/ha)	1,3	1,1	1,4	1,3	1,2	1,3

Sumber : DISTAN Aceh Jaya, 2019

Meskipun secara produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perkebunan sudah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun belum terlihat nilai tambah dari masing-masing produk pertanian ataupun perkebunan yang dihasilkan.

Sesuai dengan NAWA CITA atau agen daprioritas Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo mengarahkan pembangunan pertanian kedepan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangandari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta(3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan katalain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Terkait hal tersebut, masih terdapat lahan-lahan yang sementara tidak digunakan hingga mencapai 9.189 ha, Luas lahan tegal/kebun, ladang/huma, dan lahan yang sementara tidak diusahakan menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.73 Luas lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma, dan Ladang yang Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya (ha) Tahun 2018

Kecamatan	Tegal/Kebun	Ladang/Huma	Sementara tidak diusahakan
Teunom	680	312	2371
Pasie Raya	970	352	1900
Panga	850	421	1849
Krueng Sabee	1063	1845	345
Setia Bakti	1151	615	100
Sampoiniet	132	180	85
Darul Hikmah	133	180	323
Jaya	2842	305	1543
Indra Jaya	1431	245	673
Aceh Jaya	**9252**	**4455**	**9189**

Sumber : BPS, Aceh Jaya 2019

Sarana dan prasarana pertanian yang telah ada di Kabupaten Aceh Jaya, berdasarkan data dari dinas pertanian, tercatat pada tahun 2016 terdapat 216 unit alat pertanian, embung dan dam parit sebanyak 17 unit, pompanisasi dan pipanisasi sebanyak 17 unit, dengan jalan usaha tani sepanjang 2 meter, jaringan irigasi pertanian sepanjang 25.000 meter dan perluasan areal luas baku lahan sawah seluas 12.842 ha. Sementara untuk jumlah penyuluh pertanian lapangan di Kabupaten Aceh Jaya hingga tahun 2016 sudah berjumlah 80 orang yang tersebar di 9 kecamatan.

Jumlah populasi ternak tertinggi di Kabupaten Aceh Jaya adalah ayam baik ayam petelur maupun ayam pedaging. Populasi ternak lain yang cukup besar adalah itik, sapi potong, kambing dan domba. Sedangkan ternak dalam populasi kecil meliputi sapi perah, kuda, kerbau, kelinci dll.

Menurut data dari Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016, jumlah populasi ayam petelur mencapai 674 ekor dan ayam pedaging sebesar 247.067 ekor sebagaimana terlihat pada tabel 2.75.

Tabel 2.74. Populasi Ternak di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 – 2018

No	Jenis Ternak (ekor)	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Sapi Potong	13.084	15.370	17.768	6.160	25.082	5318
2	Ayam Petelur	6.500	321	9.644	674	967	-
3	Ayam Pedaging	211.235	23.226	253.125	247.067	159.777	166.096
4	Kambing	34.784	36.290	37.213	38.955	37.104	32.393
5	Itik	116.135	119.265	122.844	124.069	101.251	106.073

Sumber : DISTAN Aceh Jaya, 2019

Terdapat beberapa penemuan kasus penyakit pada hewan ternak di Kabupaten Aceh Jaya,dimana pada tahun 2016 tercatat 1.960 Kasus untuk parasit dan virus, dan 297 kasus untuk bakteri. Secara keseluruhan, kontribusi sektor pertaniandan peternakan menunjukkan peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan peningkatan dari tahun 2013-2017 sebesar 1,6 persen sebagaimana terlihat pada gambar 2.24 dibawah ini

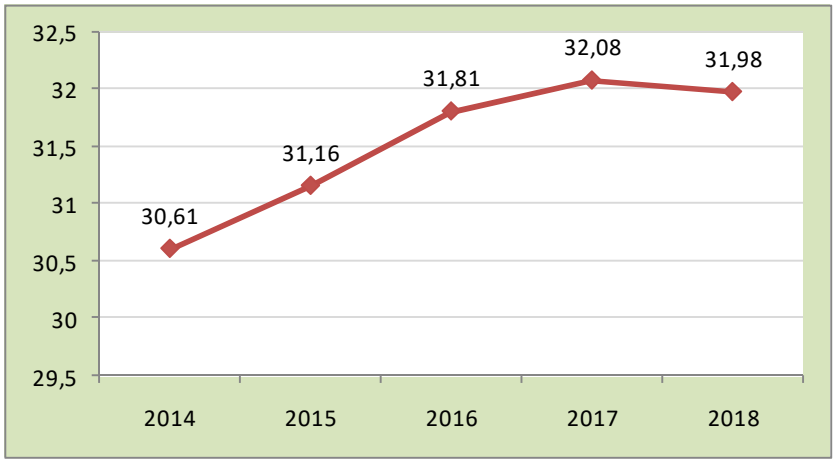

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Jaya, 2018

Gambar 2.24 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2018

2.3.3.3 Energi dan Sumber Daya Mineral

Kebutuhan listrik di Kabupaten Aceh Jaya dipenuhi oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Data tahun 2016 dari BPS, Rumah Tangga yang menggunakan PLN sebanyak 98,72 persen, dengan daya terpasang sebesar 19.257.950 kVA. Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak untuk kendaraan, di Kabupaten Aceh Jaya terdapat 5 buah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Keberadaan SPBU belum tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Jaya, karena ada beberapa kecamatan yang belum terdapat SPBU. Keberadaan SPBU akan mudah dijumpai pada wilayah kecamatan yang dilalui oleh jalan utama antar kabupaten.

Sedangkan untuk memenuhi permintaan masyarakat akan gas elpiji, di Kabupapen Aceh Jaya belum ada Stasiun Pengisian Bahan bakar Elpiji (SPBE). Pendistribusiannya ke konsumen dilaksanakan oleh 17 agen gas elpiji yang tersebar di 6 kecamatan.

Persentase rumah tangga (2016) yang menggunakan elpiji 3 kg sebanyak 69,64 persen, 12 kg sebanyak 8,91 persen dan 5,5 kg sebanyak 0,13 persen. Sementara jumlah pelanggan air pada tahun 2016 tercatat sebanyak 7.022 (5.462 aktif dan 1.560 non aktif), meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 5.733 (4.942 aktif dan 831 non aktif).

2.3.3.4 Perdagangan

Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 82 pedagang adalah pedagang besar, 404 pedagang menengah, dan 486 pedagang kecil. Jumlah pedagang tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya dimana hanya 20 pedagang besar, 49 pedagang menengah dan 124 pedagang kecil.

Jumlah pasar tradisional sebagai salah satu sarana untuk menunjang berlangsungnya usaha perdagangan dari tahun ke tahun jumlahnya tidak mengalami kenaikan yang begitu signifikan terdiri atas 22 pasar tradisional dan 1 swalayan sebagaimana terlihat pada tabel 2.76. Secara keseluruhan, kontribusi perdagangan terhadap PDRB sejak tahun 2014-2018 cenderung meningkat, tahun 2018 juga terjadi peningkatan sebesar 0,39 persen seperti terlihat pada gambar 2.25. berikut ini.

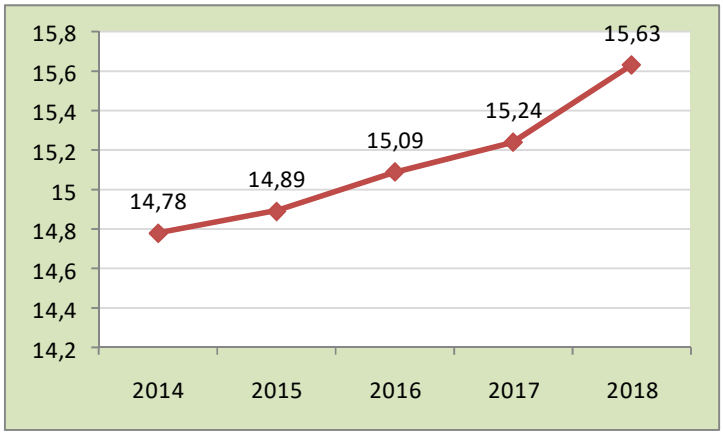

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Jaya, 2019 (diolah)

Gambar 2.25 Kontribus Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2018 (dalam persen)

Tabel 2.75 Perkembangan Sarana Perdagangan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 – 2018

No.	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Sarana Perdagangan						
	a) Pasar Tradisional	14	14	20	22	24	26
	b) Pasar Lokal	-	-	-	-	-	-
	c) Pasar swalayan / supermarket/ toserba	-	-	-	1	2	3

Sumber : DISPERINDAG Aceh Jaya

2.3.3.5 Perindustrian

Industri yang ada di Kabupaten Aceh Jaya dikelompokkan menjadi industri logam, mesin, elektronika dan aneka (LMEA) serta industri kimia agro dan hasil hutan (KAH). Masing-masing dibedakan menjadi industri formal dan non formal, serta digolongkan berdasarkan aset menjadi skala besar, menengah, kecil dan rumah tangga. Jumlah industri kecil di Kabupaten Aceh Jaya selalu mengalami kenaikan baik dari sisi jumlah pengusaha, unit usaha, permodalan maupun jumlah penyerapan tenaga kerja.

Jumlah industri mikro dan kecil di wilayah Kabupapaten Aceh Jaya sesuai dengan data dari Disperindag Kabupaten Aceh Jaya hingga tahun 2018 mencapai 695 unit usaha, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 602 industri mikro dan kecil. Industri tersebut diklasifikasikan dalam industri pangan, sandang, kimia dan bahan bangunan, logam, dan elektronika dan industri kerajinan tangan. Jumlah industri terbanyak berada di industri pangan yang mencapai 302 unit usaha (nilai produksi mencapai 23,24 Milyar), sedangkan yang paling sedikit unit usahanya adalah industri kerajinan rumah tangga dengan jumlah unit usaha adalah 65 (nilai produksinya hanya 2,38 Milyar). Keseluruhan industri tersebut dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 1.579 orang sebagaimana terlihat pada tabel 2.77 dibawah ini. Secara keseluruhan, kontribusi industri terhadap PDRB pada tahun 2016 sebesar 3,45 persen., dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,86 persen, sebagaimana terlihat pada gambar 2.26.

Tabel 2.76 Perkembangan Perindustrian di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 – 2018

No.	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	**Industri Kecil**						
	a) Unit Kerja	493	534	602	695	968	2.043
	b) Tenaga Kerja	1216	1378	1.468	1.579	1.918	4.366
2	**Industri Menengah**						

No.	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	a) Unit Kerja	3	3	4	4	4	4
	b) Tenaga Kerja	25	30	46	52	57	67
3	**Industri Besar**						
	a) Unit Kerja	-	-	-	-	-	-
	b) Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-

Sumber : DISPERINDAG Aceh Jaya

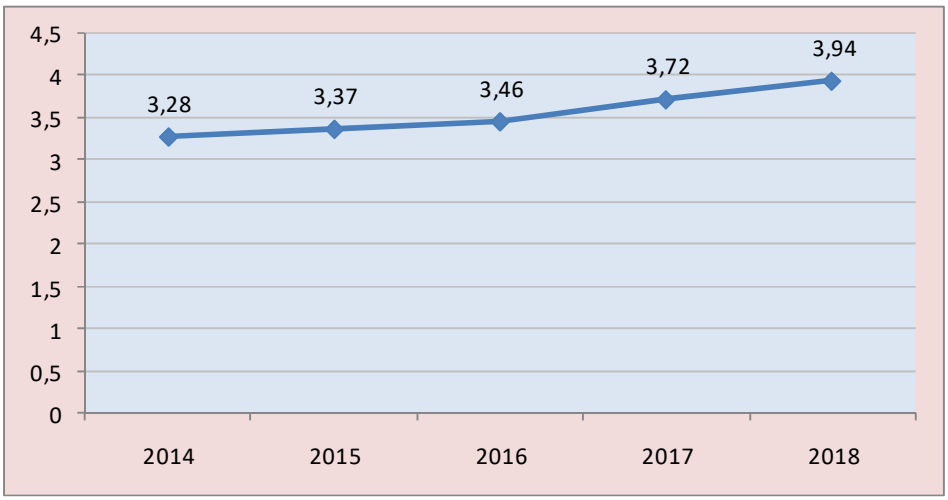

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Jaya, 2018 (diolah)

Gambar 2.26 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap Pertumbuhan PDRB Aceh Jaya

2.3.3.6 Transmigrasi

Terdapat 2 lokasi transmigrasi di Kabupaten Aceh Jaya tepatnya Gampong Gunong Meunasah di Kecamatan Setia Bakti dan di Gampong Paya Seumantok di Kecamatan Krueng Sabee. Sampai tahun 2016 belum ada transmigran swakarsa di Kabupaten Aceh Jaya.

2.3.3.7 Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan tambak tersebar di 9 kecamatan, dalam kurun waktu dua tahun jumlah tangkapan ikan meningkat dari sebanyak 189,8 ton pada tahun 2015 menjadi sebanyak 236,8 ton pada tahun 2016. Secara keseluruhan, kontribusi sektor pertanian dan peternakan menunjukkan peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan peningkatan

dari tahun 2014-2018 sebesar 0.56 persen sebagaimana terlihat pada gambar 2.28. Jumlah kelompok nelayan yang telah terbina, berdasarkan data dari dinas perikanan dan kelautan tercatat pada tahun 2016 sebanyak 5 kelompok. Adapun konsumsi ikan pada tahun 2016 tercatat sebanyak 42 kg/kap/thn.

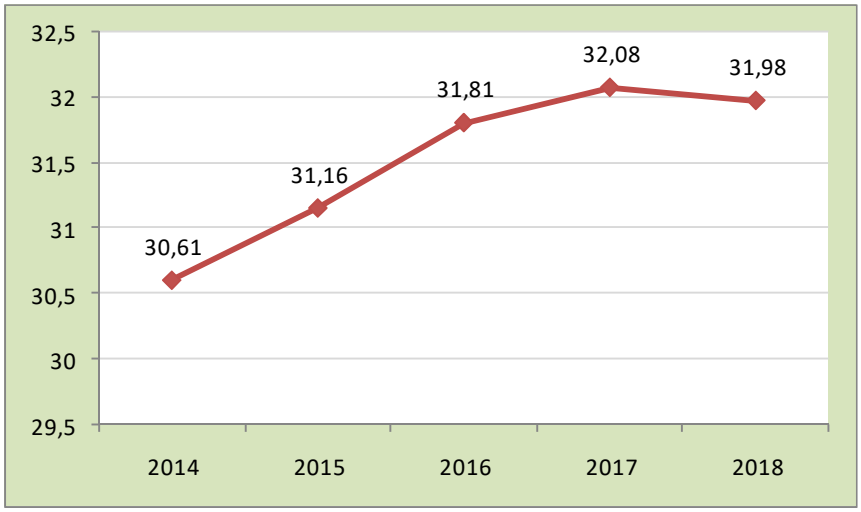

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Jaya, 2019 (diolah)

Gambar 2.27 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Aceh Jaya Tahun 2014-2018

Tabel 2.77 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Produksi Jenis Ikan (Ton)								
		Udang Windu	Ikan Lele	Ikan Bandeng	Lobster	Kepiting	Ikan Kakap	Ikan Kerapu	Rumput Laut	Total
1	Jaya	88	-	2	14,3	-	45	46,5	-	196,7
2	Indra Jaya	28,5	0,3	-	50	-	46	60,2	-	186,2
3	Samponiet	19,5	-	-	18,5	-	49	47	300	435
4	Darul Hikmah	49	-	1	10	-	46	55	-	162
5	Setia Bakti	19	0,54	1	34	-	45	53	-	153,14
6	Krueng Sabee	0,5	7	-	5	-	70	40	-	124,5
7	Panga	10	-	-	3	980	2	6	-	1002
8	Teunom	4	-	-	3	-	21	26	-	60
9	Pasie Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	0

No	Kecamatan	Jumlah Produksi Jenis Ikan (Ton)								
		Udang Windu	Ikan Lele	Ikan Bandeng	Lobster	Kepiting	Ikan Kakap	Ikan Kerapu	Rumput Laut	Total
Jumlah		218,5	7,84	4	139,8	980	324	333,7	-	2319,54

Sumber : DKP Aceh Jaya, 2019

Tabel 2.78 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Produksi Jenis Ikan (Ton)								
		Udang Windu	Ikan Lele	Ikan Bandeng	Lobster	Kepiting	Ikan Kakap	Ikan Kerapu	Rumput Laut	Total
1	Jaya	15	-	2	14	-	45	46	-	123
2	Indra Jaya	40	0,3	-	50	-	46	60	-	197,3
3	Samponiet	14	-	-	18	-	49	47	-	129
4	Darul Hikmah	20	-	2	10	-	46	55	-	134
5	Setia Bakti	14	0,5	2	34	-	45	53	-	149,5
6	Krueng Sabee	20	7	-	5	-	70	40	-	144
7	Panga	10	-	-	3	1038,07	2	6	-	1061,07
8	Teunom	4	-	-	5		21	26	-	60
9	Pasie Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Jumlah		137	7,8	6	139	1038,07	324	333	-	2004,87

Sumber : DKP Aceh Jaya, 2019

Hingga tahun 2018 Jumlah nelayan dari sub sektor perikanan laut tercatat sebanyak 1010 nelayan, perikanan umum sebanyak 603 nelayan. Sebaran jumlah nelayan menurut kecamatan dan sub sektor tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.79 Jumlah Nelayan Per Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Nelayan (org)	
		Perikanan Laut	Perikanan Umum
1	Jaya	110	72
2	Indra Jaya	204	56
3	Samponiet	189	23
4	Darul Hikmah	85	25

No	Kecamatan	Jumlah Nelayan (org)	
		Perikanan Laut	Perikanan Umum
5	Setia Bakti	126	99
6	Krueng Sabee	153	35
7	Panga	26	91
8	Teunom	117	125
9	Pasie Raya	-	77
Jumlah		**1010**	**603**

Sumber : DKP Aceh Jaya, 2019

2.3.4 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

Penunjang Pemerintahan yaitu bidang urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.3.4.1 Perencanaan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Beberapa kewenangan BAPPEDA adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); melakukan koordinasi penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten; melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang); melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK), berdasarkan rumusan hasil musrenbang, mengkoordinasikann perencanaan tahunan kedalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan menghimpun serta menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan kerja perangkat kabupaten.

Ketersedian dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2016 bisa dilihat pada tabel 2.80 berikut ini:

Tabel 2.80 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	SATUAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah di tetapkan dengan Qanun	Ada/Tidak	√	√	√	√	√	√
2	Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Qanun	Ada/Tidak	√	√	√	√	√	√
3	Dokumen Renstra yang telah ditetapkan dengan Perbup	Ada/Tidak	√	√	√	√	√	√
4	Dokumen Perencanaan RKPK yang telah ditetapkan dengan Perbup	Ada/Tidak	√	√	√	√	√	√
5	Dokumen Renja yang telah ditetapkan dengan Perbup	Ada/Tidak	√	√	√	√	√	√

Sumber : BAPPEDA Aceh Jaya

2.3.4.2 Keuangan

Pengelolaan keuangan dan aset di Kabupaten Aceh Jaya sudah berjalan cukup efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini tergambar dari opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan, dimana Kabupaten Aceh Jaya telah mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018. Adapun kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dari tahun 2014-2018 bisa dilihat pada tabel 2.80 berikut ini.

Tabel 2.81 Kontribusi PAD terhadap total pendapatan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2018

Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	
Pendapatan	672.288.352.850,32	898.456.385.906,15	980.617.251.206,24	1.025.166.267.471,83	827.345.173.924,03	7,01
PAD	36.406.713.759,23	40.385.794.988,59	45.774.374.212,02	62.425.121.489,99	58.624.901.408,09	13,64
Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan	5,42	4,50	4,67	6,09	7,09	8,41

Sumber Data : BPKK Aceh Jaya 2019

Dari tabel di atas terlihat peningkatan kontribusi PAD terhadap total pendapatan, meskipun persentasenya masih sangat rendah. Adapun rata-rata perumbuhan Pendapatan, PAD, dan Kontribusi PAD terhadap total pendapatan Kabupaten Aceh Jaya berturut-turut sebesar 7,01 persen, 13,64 persen dan 8,41 persen.

2.3.4.3 Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya masih belum maksimal yang terlihat dari adanya tumpang tindih tupoksi kelembagaan dan beban kerja instansi pemerintah yang belum seimbang. Tata kelola kepegawaian pemerintahan belum dilaksanakan secara baik yang tergambar dari distribusi aparatur yang tidak merata dan penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan keahliannya, belum efisien dan efektifnya pelaksanaan tugas karena terbatasnya sarana dan prasarana pendukung. Selanjutnya, sumber daya aparatur yang masih lemah, hal ini tergambar dari belum optimalnya kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hingga 2017 tercatat 23 orang Esselon II, 133 orang esselon III, dan 295 Esselon IV. Selain itu juga terdapat 2.340 non esselon. Dari keseluruhan pegawai negeri yang ada, terlihat ada penurunan jumlah pegawai negeri sipil dimana pada tahun 2018

sebanyak 2.719 orang (laki-laki sebanyak 49,76 persen, perempuan sebanyak 50,24 persen).

2.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan serta dapat dijadikan indikator kemajuan dari suatu daerah. Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan persentase implementasi rencana kelitbangan, presentase pemanfaatan hasil kelitbangan, dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang diukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Pada tahun 2018 terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sehingga melahirkan satu bidang baru yang khusus membidangi Penelitian yaitu Bidang Penelitian dan Pengembangan. Ini membuktikan keseriusan pemerintah daerah dalam memberi ruang untuk berinovasi pada bidang penelitian dan pengembangan sehingga bisa diharapakan bisa menjadi solusi dan menjawab semua permasalahan yang ada selama ini.

2.3.4.5 Pengawasan

Pelayanan bidang urusan pengawasan memberikan informasi seperti persentase tindak lanjut temuan, jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik administrasi maupun keuangan, serta jumlah APIP dan dari 16 jumlah temuan BPK semua ditindaklanjutin dan terselesaikan dengan tepat waktu. Adapun data jumlah temuan dan tindaklanjut serta APIP di Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.82 Jumlah temuan BPK, Jumlah temuan yang ditindaklanjuti, dan Jumlah APIP

No.	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Temuan BPK	14	13	26	20	16
2	Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti	8	12	26	39	16
3	Jumlah APIP	-	-	3	6	6

Sumber : Inspektorat Aceh Jaya, 2019

2.3.4.6 Sekretariat Dewan

Layanan bidang urusan sekretariat dewan meliputi beberapa pelayanan antara lain yaitu tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya, tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) termasuk Reviu RPJM maupun dokumen rencana tahunan (RKPA) dan terintegrasinya program-program DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekwan DPRK. Adanya Anggota Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) yang baru dilantik periode 2019-2024 dapat memicu semangat baru dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan propinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional, atau internasional. Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta

terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing.

Salah satu upaya dalam rangka peningkatan daya saing daerah adalah penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) yang merupakan pondasi dalam perencanaan pembangunan di daerah. Elemen kerangka kebijakan inovasi yaitu mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis, memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptekin serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi, mendorong budaya inovasi, menumbuhkembangkan keterpaduan atau koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah dan klaster industri daerah, serta penyelarasan dengan perkembangan global. Dimana aspek daya saing daerah untuk memperkuat sistem inovasi daerah seperti tercantum di bawah ini.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah pengeluaran konsumsi per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menunjukkan derajat daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa. Rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2018 sebesar Rp 511,221. Adapun rata- rata pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 – 2018 adalah sebagai berikut.

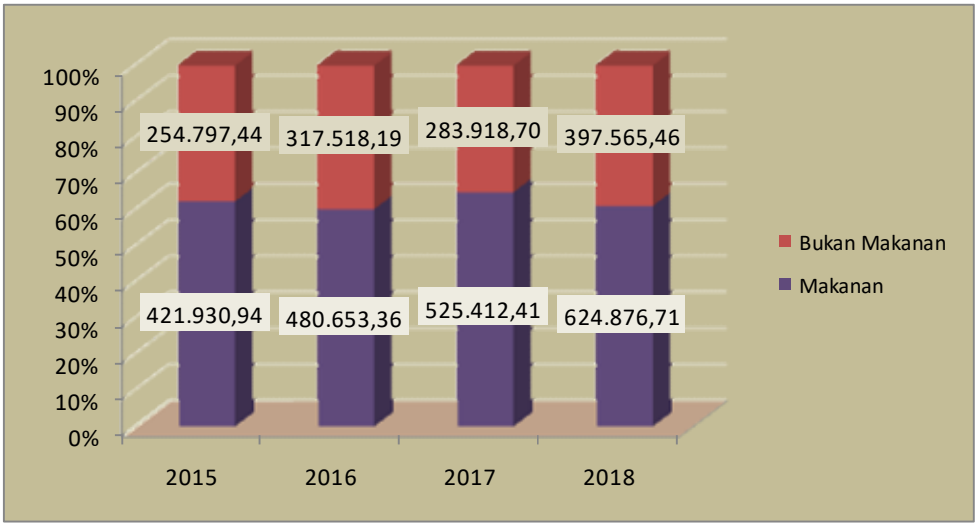

Sumber : BPS Aceh Jaya (diolah)

Gambar 2.28. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015- 2018

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Dalam peningkatan pelayanan angkutan umum bagi masyarakat, sampai dengan tahun 2015 Kabupaten Aceh Jaya memiliki 1 unit terminal tipe C yang berada di Kecamatan Krueng Sabee yang diperuntukkan bagi angkutan kota dan angkutan desa. Fasilitas untuk menunjang aktivitas bisnis dan wisata di Kabupaten Aceh Jaya diantaranya adalah Hotel sebanyak 2 unit. Terdapat pula fasilitas perbankan sebanyak 6 Unit.

Faktor aksesibilitas daerah menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai keberhasilan pelayanan transportasi. Implikasi logis dari kondisi prasarana jaringan jalan dari suatu wilayah adalah kemudahan mobilitas masyarakatnya dan juga kemudahan mencapai suatu tujuan. Parameter yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan indeks aksesibilitas dan indeks mobilitas. Indeks aksesibilitas dan indeks mobilitas Kabupaten Aceh Jaya berturut-turut sebesar 0,13 km/km^2 dan 6,55 km/1000 penduduk.

2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Jaya, menunjukan bahwa untuk tahun 2018 nilai IPM Kabupaten Aceh Jaya adalah 68,83 poin meningkat 0,76 poin dibanding nilai IPM tahun 2017 yang sebesar 68,07 poin sebagaimana terlihat pada gambar 2.30 di bawah ini:

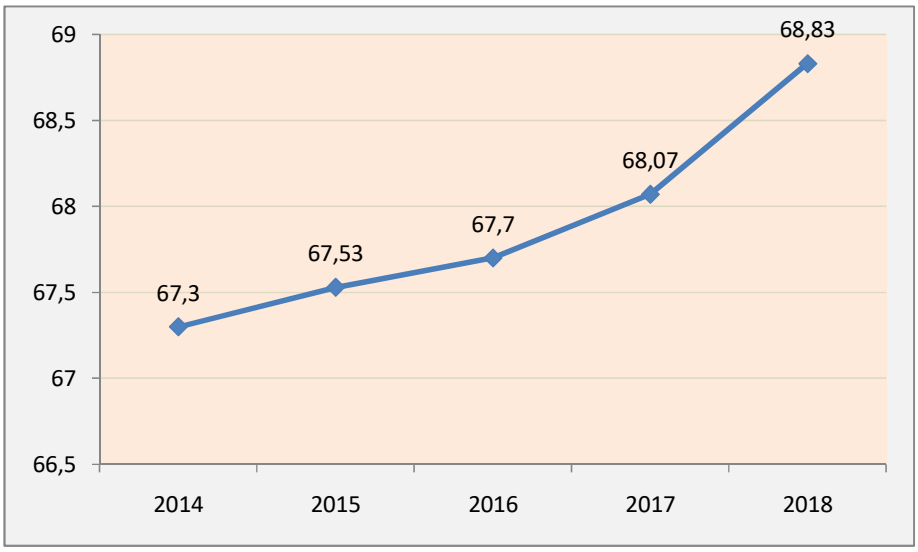

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Jaya, 2018 (Diolah)

Gambar 2.29perkembangan IPM Aceh Jaya tahun 2014-2018

2.4.4. Fokus Iklim Berinvestasi

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terus berupaya untuk meningkatkan investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan. Peningkatan investasi di Kabupaten Aceh Jaya didorong oleh adanya peningkatan iklim investasi diantaranya kondusifitas daerah, semakin gencarnya promosi dan kerjasama investasi dan kemudahan pelayanan investasi.

Selain dari segi pelayanan perizinan investasi dan kemudahan penanaman modal, indikator yang dapat menarik investasi adalah segi

kemanan. Dimana kondisi keamanan relatif cukup stabil dan terkendali sehingga tidak mengganggu kondusifitas iklim berinvestasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang bekerjasama dengan pihak terkait sangat optimal dalam menekan dan menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana serta unjuk rasa.

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH JAYA

Gambaran pengelolaan keuangan kabupaten mencakup gambaran kinerja dan pengelolaan keuangan daerah masa lalu (2013-2018), serta kerangka pendanaan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah memberikan gambaran mengenai kemampuan anggaran daerah untuk membiayai belanja daerah, kemampuan belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung akan menjadi acuan pengalokasian anggaran pada masing-masing program yang akan dilaksanakan pada 5 (lima) tahun mendatang (2018-2022).

3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2014-2018

Analisis kinerja keuanganTahun 2014-2018 masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dimasa lalu. Dari analisis kinerja beberapa tahun ke belakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi keuangan melalui berbagai macam metode analisa misalnya dengan melihat rata-rata pertumbuhan ekonomi,menggunakan asumsi makro ekonomi (PDRB/laju pertubuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain) dan dapat juga dengan dasar kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta dapat melalui kebijakan bidang keuangan daerah.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah kabupaten**.**

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBK

Pengukuran kinerja keuangan daerah dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Analisis pendapatan daerah memberikan gambaran kondisi daerah yang tercermin dalam APBK, meliputi gambaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kinerja pendapatan daerah diukur dengan indikator derajat kemandirian keuangan daerah (desentralisasi fiskal). Indikator ini dihitung dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini akan diketahui seberapa besar *local taxing power* suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berikut ini disajikan proporsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2014-2018.

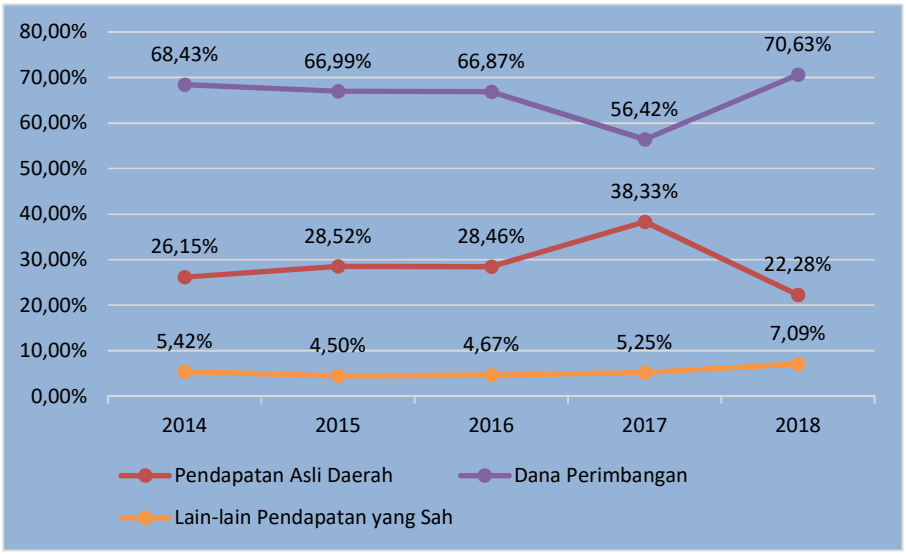

Sumber : BPKK Aceh Jaya, 2019 (Diolah)

Gambar 3.1: Proporsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Total Pendapatan Daerah (dalam persen)

Berdasarkan gambar 3.1 diketahui bahwa selama kurun waktu 2014-2018 rata-rata rasio Dana Perimbangan memberikan kontribusi yang cukup tinggi yaitu sebesar 70,63 persen, disusul Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 7,09 persen.

Dilihat dari perkembangannya, proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan tren yang fluktuatif. Diharapkan tingkat ketergantungan terhadap dana transfer menjadi semakin berkurang atau dengan kata lain derajat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Aceh Jaya masuk dalam kategori sedang.

Pada pos Pendapatan Asli Daerah tahun 2018, kontribusi retribusi daerah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, diikuti lain-lain PAD yang sah, Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan, Pajak daerah dan Zakat.

Perbandingan proporsi unsur-unsur PAD tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.2.

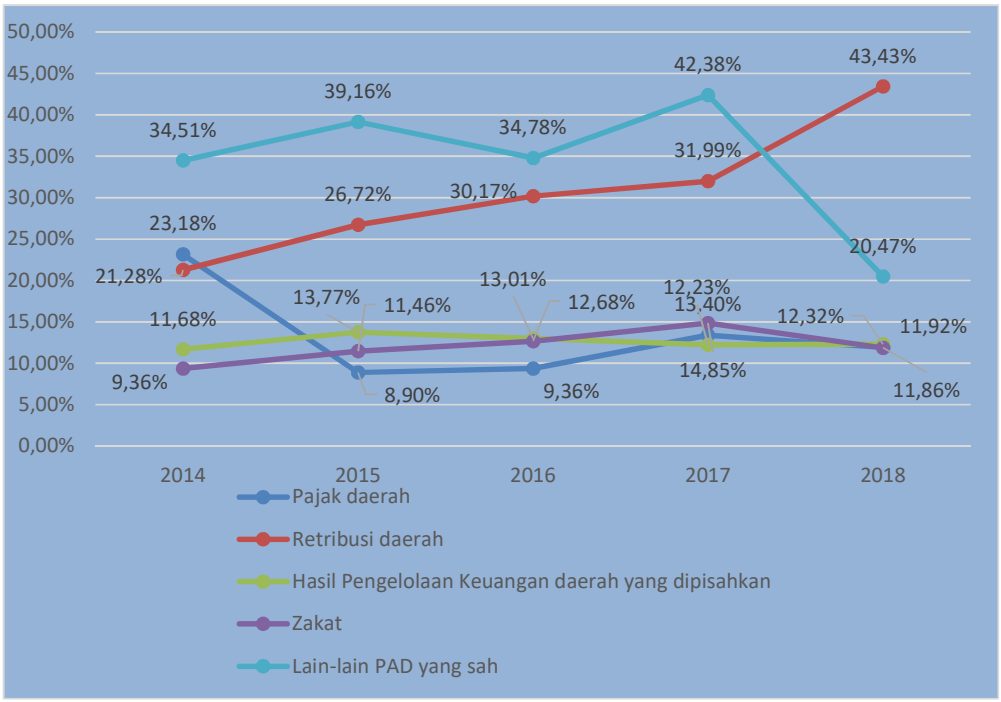

Sumber : BPKK Aceh Jaya, 2019 (Diolah)

Gambar 3.2 Proporsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yangdipisahkan, Zakat dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap Total PAD (dalam persentase)

Sementara itu, rata-rata pertumbuhan realisasi dari pos-pos Pendapatan Daerah di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2018, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berserta pos-pos yang menyertainya dapat dlihat pada Tabel 3.1 .

Tabel 3.1. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2018

No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	**PENDAPATAN**	**672.288.352.850,32**	**898.456.385.906,15**	**980.617.251.206,24**	**1.001.681.949.412,78**	**827.345.173.924,03**	**3,65**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**36.406.713.759,23**	**40.385.794.988,59**	**45.774.374.212,02**	**52.599.500.273,85**	**58.624.901.408,09**	**11,22**
1.1.1	Pajak daerah	8.439.324.173,00	3.592.734.291,00	4.285.424.510,00	7.046.243.726,00	6.988.701.482,00	**(20,09)**
1.1.2	Retribusi daerah	7.746.821.182,00	10.790.738.205,00	13.810.237.460,00	16.827.463.860,88	25.462.539.330,00	**25,48**
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan	4.251.129.519,79	5.560.173.049,00	5.955.121.530,68	6.431.673.688,49	7.221.963.671,00	**12,13**
1.1.4	Zakat	3.405.927.343,00	4.627.882.207,65	5.805.453.964,45	7.809.983.302,42	6.952.584.084,40	**15,01**
1.1.5	Lain-lain PAD yang sah	12.563.511.541,44	15.814.267.235,94	15.918.136.746,89	22.294.118.998,48	11.999.112.840,69	**(9,00)**
1.2	**Dana Perimbangan**	**460.065.588.112,00**	**601.861.839.640,00**	**655.719.358.282,00**	**565.133.361.976,00**	**584.376.272.078,00**	**4,76**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22.951.360.112,00	18.036.116.640,00	15.590.951.898,00	22.294.118.998,48	12.946.992.616,00	**(21,27)**
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	382.101.138.000,00	400.638.553.000,00	422.268.332.000,00	418.435.863.000,00	421.315.269.000,00	**2,38**
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	55.013.090.000,00	183.187.170.000,00	217.860.074.384,00	132.370.912.039,00	150.114.010.462,00	**8,28**
1.3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**175.816.050.979,09**	**256.208.751.277,56**	**279.123.518.712,22**	**383.949.087.162,93**	**184.344.000.437,94**	**(10,35)**
1.3.1	Pendapatan Hibah	12.690.862,21	2.622.925,47	1.673.937,00	20.348.324.458,03	11.262.846.532,00	**(105,30)**
1.3.2	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah Daerah lainya	10.692.934.594,88	17.182.977.789,09	20.894.985.472,22	18.677.965.315,90	19.770.165.905,94	**12,30**
1.3.3	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	12.366.005.000,00	70.597.235.000,00	102.669.637.000,00	181.090.801.000,00	153.310.988.000,00	**34,73**
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	152.744.420.522,00	168.425.915.563,00	155.557.222.303,00	163.831.996.389,00	-	**1,52**
1.3.5	Lain-lain Penerimaan (pendapatan lainnya)	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPKK Aceh Jaya, 2019 (Diolah)

Dari sinkronisasi Tabel 3.1, Gambar 3.1 dan Gambar 3.2 terlihat bahwa Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi rata-rata pertumbuhan sebesar 11,22 persen. Trend rasio Pendapatan cenderung meningkat sebesar 3,65 persen.

3.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Total belanja Kabupaten Aceh Jaya dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan. Proporsi belanja tidak langsung cenderung mengalami peningkatan dari sebesar 264,03 (Milyar Rupiah) pada tahun 2014 menjadi 462,98 (Milyar Rupiah) pada tahun 2018, sedangkan belanja langsung mengalami penurunan dari sebesar 403,15 (Milyar Rupiah) pada tahun 2014 menjadi 329,02 (Milyar Rupiah) pada tahun 2018. Penurunan proporsi belanja langsung pada tahun 2018 terjadi disebabkan oleh beralihnya kewenangan penggunaan dana otonomi khusus Aceh yang semula dalam bentuk dana transfer dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, namun pada Tahun 2018 dikelola kembali oleh Pemerintah Aceh, hal ini menyebabkan berkurangnya persentase belanja langsung Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

Gambar 3.3 dan Gambar 3.4 menyajikan realisasi belanja daerah serta proporsi belanja langsung dan tidak langsung kabupaten Aceh Jaya dalam kurun waktu tahun 2014 - 2018, sedangkan realisasi belanja Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.2.

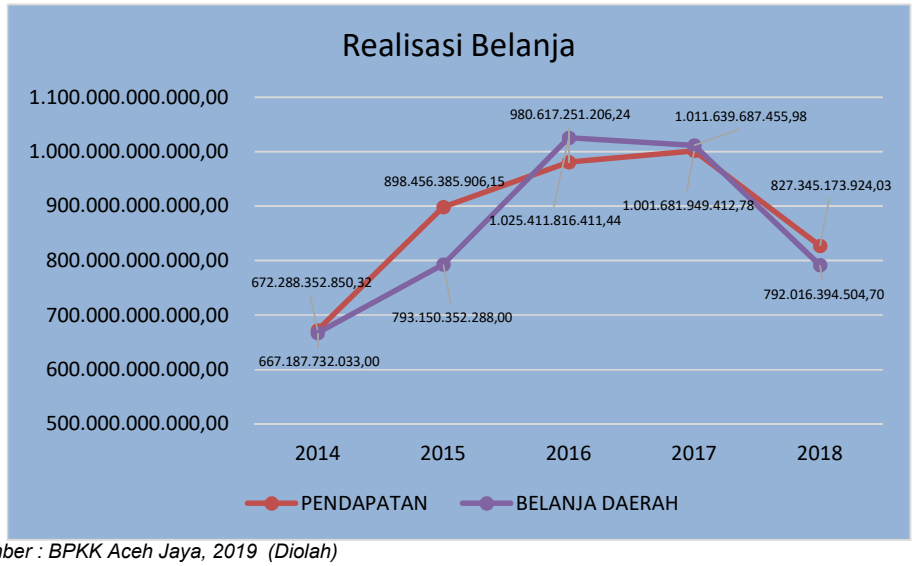

Sumber : BPKK Aceh Jaya, 2019 (Diolah)

Gambar 3.3: Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2018

Sumber : BPKK Aceh Jaya, 2018 (Diolah)

Gambar 3.4: Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 -2018 (dalam milyar rupiah)

Tabel 3.2.Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun (Rupiah)				
		2014	2015	2016	2017	2018
	BELANJA DAERAH	**667,187,732,033.00**	**793,150,352,288.00**	**1,025,411,816,411.44**	**1,011,639,687,455.98**	**792.016.394.504,70**
A	**Belanja Tidak Langsung**	**264,030,194,714.00**	**372,727,429,130.00**	**461,801,211,666.52**	**474,727,921,998.48**	**462.987.263.490,10**
1	Belanja Pegawai	219,414,111,749.00	245,818,816,500.00	260,920,259,878.00	240,201,973,536.00	254.955.362.116,00
2	Belanja Subsidi					-
3	Belanja Hibah	3,395,524,600.00	5,482,420,000.00	16,419,604,000.00	15,111,182,918.48	6.741.424.800,00
4	Belanja Bantuan Sosial	33,059,857,231.00	30,383,205,230.00	32,518,785,359.02	39,976,303,964.00	35.767.615.807,10
5	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	1,649,326,129.00	2,072,070,886.00	2,722,906,509.00	561.249.315,00
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7,547,319,754.00	88,628,086,771.00	147,708,573,952.00	174,734,555,071.00	162.692.901.471,00
7	Belanja Tak Terduga	613,381,380.00	765,574,500.00	2,161,917,591.50	1,981,000,000.00	2.268.709.981,00
B	**Belanja Langsung**	**403,157,537,319.00**	**510,700,336,058.00**	**563,610,604,744.92**	**536,911,765,457.50**	**329.029.131.014,60**
	Belanja Pegawai	68,975,081,549.00	68,113,965,264.00	79,266,341,493.00	80,742,395,584.00	83.351.969.497,00
	Belanja Barang dan Jasa	132,107,385,893.00	178,701,052,606.00	142,735,390,356.00	177,400,316,220.00	118.376.685.926,00
	Belanja Modal	202,075,069,877.00	263,885,318,188.00	341,608,872,895.92	278,769,053,653.50	127.300.475.591,60

Sumber : BPKK Aceh Jaya, 2019 (Diolah)

3.1.1.3.Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2012 yang dimaksud dengan pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. *Trend* penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Aceh Jaya dari tahun 2014 - 2018 cenderung menurun yaitu pada tahun 2014 sebesar 72,371 (Milyar Rupiah), sementara pada tahun 2018 menjadi sebesar 29,141 (Milyar Rupiah) yang bersumber dari perhitungan sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah cenderung stabil sebesar 1,5 (Milyar Rupiah) dari tahun 2014 demikian pula tahun 2018 berupa penyertaan modal pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada Bank Aceh. Kinerja pembiayaan daerah Kabupaten Aceh Jaya dalam kurun waktu tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3. Perincian Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun (Rp)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	**PENDAPATAN**	**672,288,352,850.32**	**898,456,385,906.15**	**980,617,251,206.24**	**1,001,681,949,412.78**	**827.345.173.924,03**
2	**BELANJA DAERAH**	**667,187,732,033.00**	**793,150,352,288.00**	**1,025,411,816,411.44**	**52,599,500,273.85**	**792.016.394.504,70**
	Surplus/Defisit	5,100,620,817.32	105,306,033,618.15	(44,794,565,205.20)	949,082,449,139.93	35.328.779.419,33
3	**PEMBIAYAAN**	**70,871,749,278.98**	**74,465,778,136.30**	**85,494,398,854.45**	**39,099,833,649.25**	**27.641.735.606,05**
	Penerimaan Pembiayaan	72,371,749,278.98	75,965,778,136.30	89,494,398,854.45	40,699,833,649.25	29.141.735.606,05
	Pengeluaran Pembiayaan	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	4,000,000,000.00	1,600,000,000.00	1.500.000.000,00
4	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)**	**75,972,370,096.30**	**179,771,811,754.45**	**40,699,833,649.25**	**29,142,095,606.05**	**62.970.515.025,38**

Sumber : BPKK Aceh Jaya, 2019 (Diolah)

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah memberikan Informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.Laporan Neraca Daerah menjadi salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah yang mempunyai fungsi sebagai alat manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengembalian keputuasan yang terarah,dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Secara rinci perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Aceh Jaya terdapat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Neraca Daerah Kabupaten Aceh Jaya 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
ASET	**1.577.778.232.132,67**	**1.641.012.138.687,43**	**1.961.566.730.997,66**	**2.180.510.819.057,04**	**2.278.943.397.243,36**
Aset Lancar	**89.364.572.532,00**	**107.417.703.780,76**	**62.143.381.712,99**	**57.004.936.963,54**	**96.503.743.248,59**
Kas	**30.972.370.096,30**	**89.508.729.026,45**	**40.174.127.936,61**	**29.143.933.949,05**	**62.971.150.550,38**
Investasi Jangka Pendek	**45.000.000.000,00**	-	-	-	-
Piutang	**8.191.745.942,23**	**12.586.722.534,60**	**13.017.614.159,71**	**16.916.420.580,96**	**27.723.809.878,02**
Belanja Dibayar Dimuka	**23.890.411,12**	-	-	-	
Persediaan	**5.176.566.082,35**	**5.322.252.219,71**	**8.951.639.616,67**	**16.153.933.940,90**	**13.633.740.090,37**
Aset Tidak Lancar		-			
Investasi Jangka Panjang	**22.900.000.000,00**	**24.400.000.000,00**	**28.400.000.000,00**	**30.000.000.000,00**	**31.500.000.000,00**
Aset Tetap	**1.464.555.109.442,67**	**1.509.138.300.462,67**	**1.870.829.494.396,67**	**2.047.600.864.740,50**	**2.104.965.228.344,77**
Dana Cadangan					
Aset Lainnya	**958.550.158,00**	**56.134.444,00**	**193.854.888,00**	**45.905.017.353,00**	**45.974.425.650,00**
KEWAJIBAN	**173.413.000,00**	**3.624.112.734,00**	**11.531.104.508,00**	**3.292.354.976,00**	**6.333.140.877,00**
Kewajiban Jangka Pendek	**173.413.000,00**	**3.624.112.734,00**	**11.531.104.508,00**	3.292.354.976,00	6.333.140.877,00
Kewajiban Jangka Panjang	-	-			
EKUITAS DANA	**1.577.604.819.132,67**	**1.637.388.025.953,43**	**1.950.035.625.489,66**	**2.272.610.256.366,36**	**2.177.218.464.081,04**
Ekuitas Dana Lancar	**89.191.159.532,00**	-	**11.531.104.508,00**		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**75.972.370.096,30**	-	**11.531.104.508,00**		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) BLUD					
Pendapatan yang Ditangguhkan					
Cadangan Piutang	**8.191.745.942,23**				
Cadangan Persediaan	**5.176.566.082,35**				
Cadangan Belanja Dibayar Dimuka	**23.890.411,12**				
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	**-173.413.000,00**				
Ekuitas Dana Investasi	**1.488.413.659.600,67**	-	**11.531.104.508,00**		
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	**22.900.000.000,00**				
Diinvestasikan dalam Investasi Aset Tetap	**1.464.555.109.442,67**				
Diinvestasikan dalam Investasi Aset Lainnya	**958.550.158,00**				
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		-	**11.531.104.508,00**		
Ekuitas Dana Cadangan					
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan					
Ekuitas		**1.637.388.025.953,43**		**2.177.218.464.081,04**	**2.272.610.256.366,36**
TOTAL KEWAJIBAN DAN AKUITAS DANA	**1.577.778.232.132,67**	**1.641.012.138.687,43**	**1.961.566.729.997,66**	**2.180.510.819.057,04**	**2.278.943.397.243,36**

Sumber : BPKK Aceh Jaya, 2019

Kondisi Neraca Daerah Kabupaten Aceh Jaya dapa diketahui mengunakan beberapa perhitungan rasio berikut :

a. Rasio Lancar

Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mngukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya.

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Kas}}{\text{Hutang Jangka Pendek}}$$

b. Rasio Cair

Rasio Cair *(Quick Ratio)* dihitung dengan mengurangkan persediaan dari aset lancar,dan hasilnya di bagi dengan hutang jangka pendek.Biasanya asetlancar terdiri atas kas dikas daerah, kas dipemegang kas bagian lancar tagihan penjualan /penerimaan,bagaian lancar pinjaman,bagian lancar TPGR,piutang pajak, piutang lain-lain dan persedian. Persedian merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan.

$$\text{Rasio Lancar } (QuickRatio) = \frac{(\text{ Aset Lancar} - \text{ persediaan })}{\text{Hutang Jangka Pendek}}$$

c. Rasio Hutang terhadap aset (*Debt Rasio*)

Rasio hutang terhadap aset adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan aset yang dimilikinya. Rasio hutang terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan total aset. Kewajiban tersebut terdiri dari hutang pada pihak ketiga, hutang luar negeri, hutang pada Pemerintah Pusat dan hutang bunga, analisis ini bertujuan mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan .

d. Rasio Ekuitas Dana terhadap Total Aset.

Rasio ekuitas dana terhadap Total Aset dihitung dengan menbandingkan total ekuitas dana dengan total aset yang dikuasai Pemerintah. Ekuitas dana tersebut terdiri atas Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dan ekuitas Dana Cadangan. Rasio ini merupakan kebalikan dari rasio hutang terhadap total Aset, sehingga yang diukur adalah jumlah yang disediakan dalam membiayai pembangunan.

$$\text{Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset} = \frac{\text{Total Ekuitas Dana}}{\text{Total Aset}}$$

Hasil perhitungan Neraca Daerah Kabupaten Aceh Jaya dalam kurun waktu tahun 2014- 2018 dapat di lihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5. Perhitungan Neraca Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014- 2018

Balance Sheet Ratios		Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Liquidity	*Current Ratio*	0	0	0	0	0
	Quick Ratio	0	0	0	0	0
Solvability	*Debt to Assets Ratio*	0.00011	0.002208	0.005879	0	0
	Total Debt Equity Ratio	1.00	1.00	0.994121	1,042	0,955

Dari Tabel 3.5 di atas secara ringkas dapat dilakukan analisis atas kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sebagai Berikut:

a. Rasio Lancar (*current ratio)* dari tahun 2014-2018 bernilai 0, dikarenakan Kabupaten Aceh Jaya tidak memiliki hutang jangka pendek.
b. Rasio Cair *(Quick Ratio)* dari tahun 2014-2018 bernilai 0. Hal ini dikarenakan Kabupaten Aceh Jaya tidak memiliki hutang jangka pendek.
c. Rasio Hutang terhadap Aset *(Debt Ratio)* Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya cenderung menurun dari tahun 2014 hingga tahun 2018 yaitu

sebesar 0,000011 pada tahun 2014 menjadi 0 pada tahun 2018,hal ini menunjukan bahwa solvabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam keadaan yang sehat, yaitu persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan adalah rendah.

d. Rasio Ekuitas Dana terhadap Total Aset *(Total Debt Eguity Ratio)* pemerintah Kabupaten Aceh Jaya selama 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 100 persen. Hal tersebut berarti bahwa jumlah dana yang disediakan dalam membiayai pembangunan sebagian besar bersumber dari kemampuan keuangan sendiri, bukan berasal dari pinjaman kreditor /donatur/ pihak ketiga.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan 2014-2018

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu juga dapat dilihat dari proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah. Data belanja pegawai disini merupakan penjumlahan antara belanja pegawai langsung dan belanja pegawai tidak langsung. Rasio ini mengambarkan bahwa semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsinya APBK yang dialokasikan untuk belanja pegawai.

Perkembangan proporsinya belanja pegawai terhadap total belanja daerah menunjukan kecenderungan menurun dari sebesar 43,22 persen pada tahun 2014 menjadi sebesar 42,71 persen pada tahun 2018. Perkembangan proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah dapat dilihat pada Gambar 3.5.

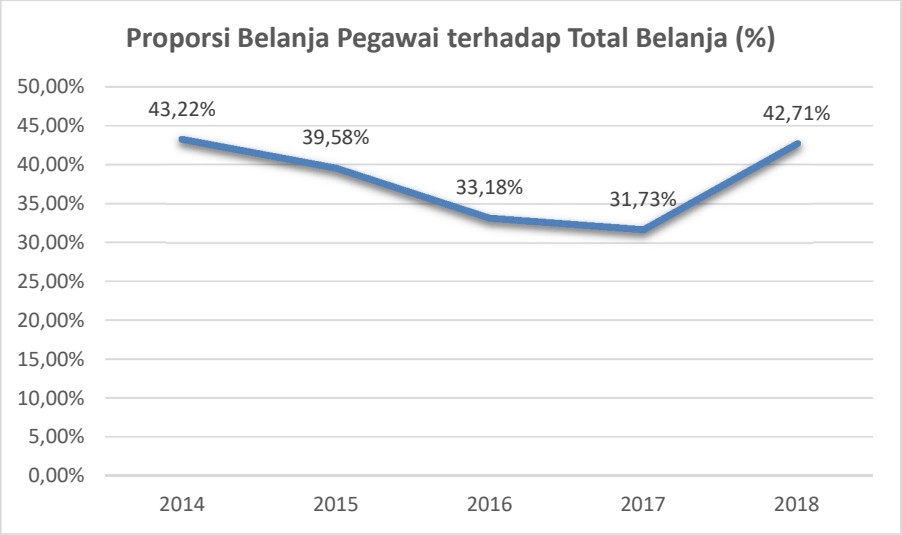

Sumber : BPKK Aceh Jaya, 2019 (Diolah)

Gambar 3.5. Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu juga dapat di lihat dari ruang fiskal. Ruang fiskal merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasi APBK untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki maka akan semakin besar pula fleksibiltas yang dimiliki untuk mengalokasikan belanja pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah. Perhitungan ruang fiskal daerah dihitung dengan mengurangi total Pendapatan Daerah dengan pendapatan hibah, pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya dan yang sifatnya mengikat, yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Bunga, kemudian belanja dibagi dengan total pendapatannya.

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa ruang fiskal daerah Kabupaten Aceh Jaya saat ini tidak begitu tinggi (kisaran 31,63 persen dari pendapatan). Hal ini karena sebagian besar anggaran telah digunakan untuk mendanai pos-pos belanja daerah dalam ABPK,k hususnya untuk pos belanja modal, karena idealnya proporsi belanja rutin lebih kecil dari belanja modal. Memperbesarkan ruangan fiskal daerah

untuk belanja sangat penting karena dapat menjadi stimulus perekonomian daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat membuat kebijakan yang mampu menciptakan iklim perekonomian yang kondusif. Selain itu efektifitas dan efisiensi pengunaan anggaran di daerah juga dapat mendukung terciptanya ruang fiskal. Hasil perhitungan kapasitas fiskal Kabupaten Aceh Jaya dapat di lihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Kapasitas Ruang Fiskal Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 - 2018

Uraian	Tahun (Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Total Pendapatan	**672.288.352.850,32**	**898.456.385.906,15**	**980.617.251.206,24**	**1.001.681.949.412,78**	**827.345.173.924,03**
Belanja Pegawai	288.389.193.298,00	313.932.781.764,00	340.186.601.371,00	240.201.193.536,00	254.955.362.116,00
Belanja Bantuan Sosial, Bagi hasil, Belanja Tak terduga dan Bantuan Keuangan	41.220.558.365,00	119.776.866.501,00	182.389.276.902,52	19.414.765.544,00	201.290.476.574,10
Hibah	3.395.524.600,00	5.482.420.000,00	16.419.604.000,00	15.111.182.918,48	6.741.424.800,00
Kapasitas Ruang Fiskal	**50,47**	**51,12**	**45,04**	**52,61**	**44,04**

Sumber : BPKK Aceh Jaya, 2019 (Diolah)

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pendanaan pembangunan daerah diluar kapasitas pendapatan daerah serta kewajiban-kewajiban yang menjadi beban pemrintah daerah. Analisis pembiayaan daerah tidak dapat terlepas dari kondisi defisit yang terjadi dalam APBK sehingga diperlukan pendanaan dari penerimaan pembiayaan daerah. Defisit riil dalam APBK terjadi apabila pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah menimbulkan adanya defisit dalam APBK. Kondisi defisit riil APBK kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2018 sebagamana terlihat pada Tabel 3.7. Defisit riil yang terjadi ditutup dengan penerimaan pembiayaan sebagaimana terlihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.7. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014- 2018

NO	Uraian	Tahun (Rupiah)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Realisasi Pendapatan daerah	**672.288.352.850,32**	**898.456.385.906,15**	**980.617.251.206,24**	**1.001.681.949.412,78**	**827.345.173.924,03**
2	Realisasi Belanja Daerah	667.187.732.033,00	883.427.765.188,00	1.025.411.816.411,44	1.011.639.687.455,98	792.016.394.504,70
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	4.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
	Defisit Riil	3.600.620.817,32	13.528.620.718,15	(48.794.565.205,20)	(11.457.738.043,20)	33.828.779.419,33

Sumber : BPKK Aceh Jaya, 2019 (Diolah)

Besarnya SILPA pada akhir tahun menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Rasio SILPA terhadap total belanja daerah diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya SILPA yang terjadi bisa menunjukan rendahnya penyerapan belanja daerah. Namun demikian, besarnya SILPA juga disebabkan adanya dana dari Pusat yang bersifat *earmark* dan tidak dapat terserap pada akhir tahun anggaran. Rasio SILPA terhadap total belanja di kabupaten aceh Jaya Tahun 2014- 2018 mencapai rasio tertinggi pada tahun 2014,dengan kontribusi sebesar 10,85 persen. Secara umum rasio dan kontribusi SiLPA terhadap Total Belanja Daerah trendnya menurun sebagaimana terlihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Rasio /Kontribusi SILPA terhadap Belanja Daerah

No	Uraian	Tahun (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Belanja Daerah	**667.187.732.033,00**	**883.427.765.188,00**	**1.025.411.816.411,44**	**1.011.639.687.455,98**	**792.016.394.504,70**
2	SiLPA	72.371.749.278,98	75.965.778.136,30	89.494.398.854,45	40.699.833.649,25	29.142.095.606,05
	Rasio SiLPA terhadap Belanja Daerah	10,85	8,60	8,73	4,02	3,68

Sumber : BPKK Aceh Jaya, 2019 (Diolah)

3.3 Kerangka Pendanaan Tahun 2017-2022

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

3.3.1.1 Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2022

Melihat capaian kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2012-2016, kedepan Pendapatan Daerah diharapkan dapat lebih meningkat, yang diikuti dengan berbagai upaya. Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan Pendapatan daerah selama tahun 2017-2022, yaitu sebagai berikut:

1) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui penertiban dan pengembangan sumber-sumber potensi pendapatan asli daerah;
2) Mengupayakan pendirian BUMD dalam upaya peningkatan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah melalui pendapatan deviden;
3) Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan aset daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah;
4) Pemantapan sistem operasional pemungutan pendapatan asli Daerah melalui pengembangan sistem sewa bersama secara terpadu (sisbermadu) yang terintegrasi oleh Bidang Pendapatan BPKK;
5) Memberikan kemudahan perizinan usaha dalam rangka peningkatan pendapatan pada sektor pajak dan retribusi daerah.
6) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan pencapaian target kinerja daerah dalam upaya perolehan dan peningkatan Dana Insentif Daerah; dan
7) Mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana alokasi khusus dan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak;

Berdasarkan kebijakan tersebut dan dengan mempertimbangkan laju capaian kinerja ekonomi makro daerah, maka proyeksi perubahan pendapatan daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 disusun

dengan berbasis pada asumsi:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan kinerja realisasi PAD Tahun 2013-2018 dan perilaku dari potensi masing-masing objek pajak dan objek retribusi daerah, kinerja, dan rencana bisnis BUMD serta trend pendapatan PAD lainnya;
2) Menyesuaikan kebijakan dana transfer dari pemerintah;
3) Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah, utamanya terkait dengan kebijakan hibah dari pemerintah, dana penyesuaian/DID serta kebijakan bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi Aceh.

Proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah selama Tahun 2017-2022 diformulasikan secara rinci sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9 Proyeksi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022

No	URAIAN	SETELAH PERUBAHAN				
		TAHUN				
		REALISASI 2018	RAPBK-P 2019	2020	2021	2022
1	**PENDAPATAN**	**827.345.173.924,03**	**951.509.459.508,90**	**953.983.315.207,18**	**968.020.562.434,47**	**982.287.909.972,86**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**58.624.901.408,09**	**81.380.813.185,53**	**82.144.899.638,48**	**84.569.380.373,49**	**85.814.976.078,89**
1.1.1	Pajak daerah	6.988.701.482,00	5.391.400.021,40	5.643.430.505,00	5.832.909.825,40	6.130.189.643,60
1.1.2	Retribusi daerah	25.462.539.330,00	47.288.400.992,00	48.287.978.200,00	48.449.947.550,00	48.566.049.227,50
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan	7.221.963.671,00	7.567.515.004,00	8.131.830.973,40	8.567.515.004,00	9.067.515.004,00
1.1.4	Zakat	6.952.584.084,40	7.459.289.702,81	7.832.254.187,95	8.223.866.897,35	8.635.060.242,22
1.1.5	Lain-lain PAD yang sah	11.999.112.840,69	13.674.207.465,32	12.249.405.772,13	13.495.141.096,74	13.416.161.961,58
1.2	**Dana Perimbangan**	**584.376.272.078,00**	**572.337.494.000,00**	**581.833.456.215,00**	**599.221.758.778,47**	**617.963.665.150,55**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	12.946.992.616,00	14.456.188.000,00	14.463.416.094,00	14.470.647.802,05	14.832.413.997,10
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	421.315.269.000,00	437.094.042.000,00	437.312.589.021,00	446.058.840.801,42	454.980.017.617,45
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	150.114.010.462,00	120.787.264.000,00	130.057.451.100,00	138.692.270.175,00	148.151.233.536,00
1.3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**184.344.000.437,94**	**297.791.152.323,37**	**290.004.959.353,70**	**284.229.423.282,51**	**278.509.268.743,42**
1.3.1	Pendapatan Hibah	11.262.846.532,00	10.672.432.495,37	10.672.400.000,00	10.672.400.000,00	10.672.400.000,00
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah Daerah lainya	19.770.165.905,94	21.097.726.514,00	22.152.612.839,70	23.260.243.481,69	24.423.255.655,77
1.3.4	Dana Penyesuaian	153.310.988.000,00	144.276.774.000,00	141.571.262.000,00	141.571.262.000,00	141.571.262.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		121.744.219.314,00	115.608.684.514,00	108.725.517.800,83	101.842.351.087,66

*Realisasi Anggaran *APBK 2019

3.3.1.2.Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2017-2022

Belanja daerah sebagai *fiscal tool* dapat digunakan pemerintah daerah untuk memberikan pemerataan belanja daerah dan menggerakan perekonomian daerah. Kebijakan belanja daerah Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1) Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan publik;
2) Belanja yang bersifat wajib dan mengikat diutamakan dengan berprinsip pada asas efisien, efektif, dan akuntabel;
3) Belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sesuai kewenangan daerah yang diatur dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4) Belanja pegawai dianggarkan sesuai regulasi yang berlaku dan tunjangan pegawai diarahkan pada kinerja Aparat Sipil Negara (ASN);
5) Belanja Daerah didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, dengan demikian semua belanja daerah harus mempunyai tolok ukur kinerja ynag jelas dan terukur;
6) Proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung secara bertahap
7) diupayakan mencapai komposisi yang ideal dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku;
8) Belanja operasional SKPK dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayan publik dan belanja pembangunan daerah secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah;
9) Pendanaan pembangunan daerah sesuai dengan penyerahan urusan/kewenangan kepada kabupaten/kota;
10) Pendanaan program/kegiatan berdasarkan pada prioritas

pembagunan sebagai penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih;

11) Pemenuhan alokasi anggaran yang bersifat mengikat, diutamakan mendanai belanja aparatur, belanja operasional, dan belanja yang bersifat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.

Secara lengkap, proyeksi kebutuhan Belanja Daerah Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10 Proyeksi Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022

No	URAIAN	SETELAH PERUBAHAN				
		TAHUN				
		REALISASI 2018	RAPBK-P 2019	2020	2021	2022
A	**Belanja Tidak Langsung**	**462.987.263.490,10**	**547.959.055.768,28**	**531.526.774.857,45**	**556.758.696.815,54**	**577.536.415.328,19**
1	Belanja Pegawai	254.955.362.116,00	302.149.600.838,00	299.339.194.260,00	311.022.623.312,74	316.613.794.628,64
2	belanja hibah	6.741.424.800,00	8.680.100.000,00	8.680.100.000,00	8.680.100.000,00	8.680.100.000,00
3	belanja bantuan sosial	35.767.615.807,10	48.858.951.339,28	35.779.084.703,45	37.335.704.673,30	39.636.494.906,97
4	belanja bagi hasil kepada provinsi / kabupaten /kota dan pemerintah desa	561.249.315,00	5.267.980.101,00	4.411.673.781,00	4.411.673.781,00	4.411.673.781,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah desa	162.692.901.471,00	179.721.580.176,00	179.679.083.871,00	190.943.429.158,10	202.956.152.943,10
6	Belanja Tak terduga	2.268.709.981,00	3.280.843.314,00	3.637.638.242,00	4.365.165.890,40	5.238.199.068,48
B	**Belanja Langsung**	**329.029.131.014,60**	**460.937.161.264,00**	**437.256.540.349,73**	**425.261.865.618,93**	**419.751.494.644,68**
1	Belanja Pegawai	83.351.969.497,00	95.872.304.363,00	123.000.242.119,28	108.710.303.217,33	108.108.888.823,67
2	Belanja Barang dan Jasa	118.376.685.926,00	188.587.407.654,00	176.066.733.398,74	174.045.195.450,94	110.919.719.933,08
3	Belanja Modal	127.300.475.591,60	176.477.449.247,00	138.189.564.831,71	142.506.366.950,66	200.722.885.887,92
	JUMLAH	**792.016.394.504,70**	**1.008.896.217.032,28**	**968.783.315.207,18**	**982.020.562.434,47**	**997.287.909.972,86**

3.3.1.3. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Tahun 2017-2022

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah direncanakan secara selektif dan berimbang antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kapasitas keuangan daerah. Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) diproyeksikan sebagai salah satusumber penerimaan pembiayaan berdasarkan analisa realisasi SiLPA lima tahun sebelumnya. Dalam lima tahun kedepan direncanakan adanya pinjaman daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah jangka menengah yang direncanakan untuk membiayai infrastruktur pelayanan publik.

Kebijakan pengeluaran pembiayan adalah:

1. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran;
2. Sisa lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBK tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten;
3. Penyertaan modal BUMD dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil kajian dan tindak lanjut revitalisasi dan restrukturbilitaskinerja BUMDserta pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.

Gambaran proyeksi pembiayaan daerah tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.11 Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2017-2022

No	URAIAN	SETELAH PERUBAHAN				
		TAHUN				
		REALISASI 2018	RAPBK-P 2019	2020	2021	2022
1	**PEMBIAYAAN**	**27.641.735.606,05**	**57.386.757.523,38**	**14.800.000.000,00**	**14.000.000.000,00**	**15.000.000.000,00**
1,1	**Penerimaan Pembiayaan**	**29.141.735.606,05**	**62.970.515.025,38**	**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**
1.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	29.141.735.606,05	62.970.515.025,38	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
1,2	**Pengeluaran Daerah**	**1.500.000.000,00**	**5.583.757.502,00**	**5.200.000.000,00**	**6.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**
1.1.1	Penyertaaan Modal (Investasi)	1.500.000.000,00	5.583.757.502,00	5.200.000.000,00	6.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Bank Aceh	1.500.000.000,00	3.783.757.502,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.000.000.000,00
	BPRS GERBANG RAJA SEJATI	-	1.800.000.000,00	1.700.000.000,00	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas rill keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas rill keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan 2017-2022 dalam Rencana Kerja Kabupaten Aceh Jaya. Berikut ini disajikan Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut :

Tabel 3.12 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022

No	URAIAN	SETELAH PERUBAHAN				
		TAHUN				
		REALISASI 2018	RAPBK-P 2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan	827.345.173.924,03	951.509.459.508,90	953.983.315.207,18	968.020.562.434,47	982.287.909.972,86
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Qanun)					
3	Sisa lebih Riil Perhitungan Anggaran	29.141.735.606,05	62.970.515.025,38	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
	Total Penerimaan	**856.486.909.530,08**	**1.014.479.974.534,28**	**973.983.315.207,18**	**988.020.562.434,47**	**1.002.287.909.972,86**
	Dikurangi :					
4	Belanja Tidak Langsung	462.987.263.490,10	547.959.055.768,28	531.526.774.857,45	556.758.696.815,54	577.536.415.328,19
5	Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00	5.583.757.502,00	5.200.000.000,00	6.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**391.999.646.039,98**	**460.937.161.264,00**	**437.256.540.349,73**	**425.261.865.618,93**	**419.751.494.644,68**

Berdasarkan proyeksi kapasitas rill kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah agar dalam mengalokasikan anggaran benar-benar sesuai dengan prioritas daerah. Selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam 3 kelompok Prioritas, yaitu Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III, yaitu sebagai berikut:

Prioritas I, merupakan program pembangunan daerah dalam rangka pemenuhan urusan wajib baik pelayanan dasar maupun bukan pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan dalam RPJMK dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk memenuhi prioritas bidang pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dan kesehatan 10% (sepuluh persen) termasuk Pelaksanaan Keistimewaan Aceh. Program pembangunan prioritas I bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Prioritas II, Program Prioritas II merupakan program pembangunan prioritas dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah yang menjadi urusan pilihan sesuai dengan kondisi dan potensi Kabupaten Aceh Jaya. Prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPK yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK. Alokasi belanja prioritas II diperuntukkan untuk mendanai program pembangunan sektoral meliputi pertanian, perindustrian, kelautan dan perikanan, pariwisata, dan sektor riil lainnya dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk membiayai belanja program penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya

diantaranya : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi, Pengawasan, Perencanaan dan Keuangan pemerintahan.

Rencana alokasi penggunaan kapasitas rill kemampuan keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 menurut kelompok prioritas disajikan melalui Tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.13 proyeksi Alokasi Pendanaan Kapasitas Riil Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022

PRIORITAS	SETELAH PERUBAHAN									
	TAHUN									
	2018		2019		2020		2021		2022	
Kapasitas Riil	**391.999.646.039,98**	**100%**	**460.937.161.264,00**	**100%**	**437.256.540.349,73**	**100%**	**425.261.865.618,93**	**100%**	**419.751.494.644,68**	**100%**
Prioritas I	268.231.309.720,29	68%	294.999.783.208,96	64%	284.216.751.227,32	65%	267.914.975.339,92	63%	272.838.471.519,04	65%
Prioritas II	54.376.508.950,53	14%	76.054.631.608,57	17%	74.333.611.859,45	17%	71.443.993.423,98	17%	67.160.239.143,14	16%
Prioritas III	69.391.827.369,16	18%	89.882.746.446,47	19%	78.706.177.262,95	18%	85.902.896.855,03	20%	79.752.783.982,49	19%

3.3.2.1 Kerangka Regulasi

Keterbatasan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan daerah menyebabkan tidak semua rencana program/kegiatan dapat dibiayai dari kerangka pendanaan APBK. Guna mendukung pengelolaan keuangan daerah dan pendanaan pembangunan, maka perlu adanya kerangka regulasi yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan, yaitu:

1) Melakukan evaluasi atas qanun tentang pajak daerah, qanun tentang retribusi daerah, qanun tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pendesaan serta qanun tentang bea perolehan hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) serta melakukan peyesuaian atas qanun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah sesuai regulasi yang baru dan kebijakan nasional;
2) Meningkatkan manajemen aset daerah dan mengoptimalkan pemakaian kekayaan daerah melalui inovasi-inovasi pengolaan akset daerah dan kerjasama dengan pihak ke tiga/investasi;
3) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Aceh untuk melakukan pendanaan program/kegiatan sumber dana APBA, dana dekonsentrasi dan APBA;
4) Pendanaan dari APBN diharapkan untuk mendanai program dan kegiatan yang singkron dengan kebijakan pemerintah pusat. Pendanaan dari APBA diharapkan mendanai program dan kegiatan yang menjadi komitmen Strategi penanggulangan Kemiskinan Daerah Aceh Jaya;
5) Kebijakan pembiayaan pembangunan melalui hutang kepada pemerintah, utamanya terhadap prioritas pembangunan yang membutuhkan dana besar, seperti bidang infrastruktur dan sarana prasarana layanan dasar kepada masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta melalui program *corporate social Responsibility (CSR)* untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KABUPATEN ACEH JAYA

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2013–2018 telah membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi untuk pembangunan kedepan masih terdapat persoalan dan tantangan dari berbagai aspek yang dihadapi. Permasalahan pembangunan merupakan suatu kondisi yang masih perlu ditingkatkan atau dikembangkan karena hasilnya belum optimal. Pada bagian atau tahap perumusan isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan pembangunan prioritas saja yang menjadi agenda utama rencana pembangunan Kabupaten dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya masih ditandai dengan besarnya angka kemiskinan, tingginya pengangguran, dan ketimpangan antar kecamatan. Akibatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Aceh Jaya masih rendah, bahkan dibawah Provinsi Aceh dan Nasional. Angka IPM tersebut yang jika dikaji lebih dalam itu diakibatkan rendahnya sektor pendidikan dan masih lemahnya di sektor kesehatan dan kesejahteraan ekonomi.

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya secara umum meliputi:

1. Urusan pemerintahan daerah yang masih lemahnya koordinasi antar lembaga/sektor disebabkan oleh perbedaan nomenklatur antara pusat, propinsi, dan kabupaten; Lemahnya kualitas SDM aparatur pemerintah sesuai dengan keahliannya; Terbatasnya prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan; perencanaan yang belum berbasis data, informasi dan kajian; serta lemahnya sistem pembinaan dan pengawasan aparatur

2. Urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana masih rendahnya kualitas pendidikan dasar; Belum optimalnya penggalian dan pelestarian budaya, seni, adat istiadat Kabupaten Aceh Jaya; Masih rendahnya pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, dan lanjut usia; Masih rendahnya angka harapan hidup; Masih sedikitnya jumlah desa siaga aktif; Belum terlaksananya program seribu hari kehidupan dan mal nutrisi yang menyebabkan stunting; Belum maksimalnya pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; Kurangnya jumlah dan distrbusi tenaga kesehatan; Kurang terintegrasinya infrastruktur, sarana prasarana publik, penataan bangunan dan lingkungannya dengan sentra perekonomian dan pusat-pusat kegiatan masyarakat; Masih rendahnya sistem jaringan air bersih dan air baku terutama pada kawasan-kawasan pedalaman; Masih rendahnya akses masyarakat terhadap hunian layak huni, aman, dan terjangkau; Masih minimnya dukungan fasilitas sanitasi lingkungan yang sesuai standar kesehatan; Masih rendahnya penanganan PMKS dan masyarakat pedalaman; Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan eks kombatan dan korban konflik; serta belum optimalnya pelaksanaan siskamling dan penegakan qanun peraturan daerah.
3. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana masih rendahnya tingkat daya saing dan prestasi olahraga Terbatasnya jumlah fasilitas dan infrastruktur pendukung untuk menunjang destinasi wisata unggulan daerah; Belum tersedianya Sarana dan Prasarana Permukiman Trasmigrasi yang layak; Kapasitas aparatur pemerintah gampong yang masih rendah; Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan hak dasar anak; Belum optimalnya perlindungan anak dan perempuan; Belum maksimalnya usaha diversifikasi bahan pangan pengganti; Kurang memadainya prasarana dan sarana dalam upaya

pengelolaan dan pengolahan limbah domestik dan industri rumah tangga; Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terutama masyarakat miskin tentang pentingnya dokumen kependudukan; Sarana dan prasarana infrastruktur Angkutan Darat yang belum memadai; Belum tersedianya sistem pelayanan administrasi publik yang berbasis TIK; Belum adanya sarana dan prasarana pendukung persandian; Belum terkoneksinya dan terintegrasinya data dan informasi pembangunan; Belum maksimalnya pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu; Prasarana perpustakaan yang belum memadai; serta penataan sarana dan prasarana Arsip yang belum memadai.

4. Urusan Pilihan dimana masih rendahnya daya saing komoditas perikanan; Rendahnya daya saing komoditas pertanian, perkebunan, Energi Sumber Daya Mineral, dan peternakan; Tidak adanya industri pengolahan bahan baku unggulan; Terbatasnya akses pasar regional, nasional, dan intermasional; Belum terbinanya serta masih lemahnya manajemen usaha koperasi, usaha kecil dan menengah.
5. Urusan Pemerintahan Wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan Kekhususan dimana masih rendahnya pengarustamaan syariat islam dalam pembangunan; Terbatasnya sarana dan prasarana layanan pendidikan dayah; Belum optimalnya standarisasi dan akreditasi pendidikan dayah; Masih kurangnya peran kader ulama muda dalam penerapan Syariat Islam secara kaffah di Kabupaten Aceh Jaya; Kurangnya pembinaan para pemangku adat gampong untuk menerapkan hukum adat dan kearifan lokal; Kurang berperannya komite sekolah sesuai dengan fungsinya; Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Zakat, Infaq, Sadakah, dan Wakaf (ZISWAF); Kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya status kepemilikan serta

sertifikat kepemilikan lahan.

6. Perangkat daerah lainnya, dimana masih rendahnya upaya mitigasi dan adaptasi bencana; Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat; Belum optimalnya peran Kopri sebagai lembaga pengayom ASN; Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem pelayanan yang terpadu, efektif dan efisien.

Perumusan permasalahan pembangunan bagian demi bagian dengan sistematika berurut sesuai urusan adalah sebagai berikut:

4.1.1 Penunjang Urusan Pemerintahan

4.1.1.1 Bidang Sekretariat Daerah

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Masih kurang optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik termasuk penataan Struktur Organisasi Tata Kerja Satuan Perangkat Daerah.

4.1.1.2 Bidang Sekretariat DPRK

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK.

4.1.1.3 Bidang Pengawasan

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Terbatasnya jumlah SDM Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang bersertifikat auditor;
- ✓ Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan aparatur pemerintah;
- ✓ Belum Optimalnya koordinasi APIP dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

4.1.1.4 Bidang Perencanaan

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Konsistensi antar dokumen perencanaan yang masih

rendah;

- ✓ Belum terintegrasinya data untuk perencanaan.

4.1.1.5 Bidang Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Belum optimalnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran.

4.1.1.6 Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah dan komposisi pegawai sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
- ✓ Belum tertatanya sistem penempatan ASN berdasarkan jenjang kepangkatan dan professionalisme;
- ✓ Belum optimalnya sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah.

4.1.1.7 Bidang Keuangan

Permasalahan utamanya adalah

- ✓ Belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
- ✓ Belum optimalnya tata kelola pengelolaan aset daerah.

4.1.2 Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

4.1.2.7 Bidang Pendidikan

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Kompetensi pendidik dan pengelola Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar umumnya masih rendah;
- ✓ Sarana dan Prasarana Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar belum seluruhnya memenuhi SPM.

4.1.2.8 Bidang Kebudayaan

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Belum optimalnya pelestarian budaya, seni, dan adat istiadat Kabupaten Aceh Jaya.

4.1.2.9 Bidang Kesehatan

Permasalahan utama adalah:

- ✓ Masih tingginya Angka kematian ibu/Maternal Mortality Rate (MMR);
- ✓ Masih rendahnya Angka usia harapan hidup;
- ✓ Masih tingginya Angka Kematian Bayi;
- ✓ Masih dijumpai Kasus Gizi Buruk, Gizi Kurang Bayi dan stunting;
- ✓ Kuantitas dan kualitas SDM kesehatan berdasarkan spesifikasi profesi masih kurang;
- ✓ Kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk pelayanan kesehatan masyarakat;
- ✓ Masih rendahnya jumlah desa siaga aktif;
- ✓ Belum semua kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya yang menggalakkan GERMAS;
- ✓ Meningkatnya kasus penyakit menular dan tidak menular.

4.1.2.10 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Kurang terintegrasinya infrastruktur, sarana/prasarana publik, penataan bangunan dan lingkungannya dengan rencana tata ruang kota;
- ✓ Peningkatan sistem pengairan teknis untuk lahan pertanian belum optimal.

4.1.2.11 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Masih rendahnya sistem jaringan air bersih dan air baku terutama pada kawasan-kawasan pedalaman;
- ✓ Masih rendahnya akses masyarakat terhadap hunian layak huni, aman, dan terjangkau;

- ✓ Masih minimnya dukungan fasilitas sanitasi lingkungan yang sesuai standar kesehatan.

4.1.2.12 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Belum optimalnya penyelesaian konflik terkait ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

4.1.2.13 Bidang Sosial

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Kurangnya tingkat kemandirian para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- ✓ Masih rendahnya penanganan rehabilitasi sosial dalam masyarakat;
- ✓ Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan eks kombatan dan korban konflik.

4.1.3 Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

4.1.3.7 Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Belum maksimalnya keterlibatan pemuda dalam pembangunan;
- ✓ Tingginya kerentanan pemuda terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang serta pergaulan bebas;
- ✓ Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga;
- ✓ Rendahnya tingkat daya saing dan prestasi olahraga.

4.1.3.8 Bidang Pariwisata

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Rendahnya animo dan peran serta masyarakat dalam pengembangan kawasan kepariwisataan;

- ✓ Terbatasnya jumlah fasilitas dan infrastruktur pendukung untuk menunjang destinasi wisata unggulan daerah;
- ✓ Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata.

4.1.3.9 Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Belum tersedianya Sarana dan Prasarana Permukiman Trasmigrasi yang layak.
- ✓ Terbatasnya aparatur teknis bidang transmigrasi dan ketenagakerjaan;
- ✓ Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

4.1.3.10 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Masih lemahnya peran lembaga pemberdaya masyarakat dalam mengorganisir masyarakat gampong;
- ✓ Kapasitas aparatur pemerintah gampong yang masih rendah.

4.1.3.11 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender Islami di Kabupaten Aceh Jaya;
- ✓ Belum optimalnya perlindungan anak dan perempuan.

4.1.3.12 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk;
- ✓ Masih banyaknya pasangan usia subur yang belum menjadi peserta KB aktif.

4.1.3.13 Bidang Pangan

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Belum maksimalnya usaha diversifikasi bahan pangan pengganti;
- ✓ Minimnya pengawasan akan kualitas pangan dan bahan

pokok yang aman dan banyak dikonsumsi masyarakat;

- ✓ Belum tersedianya peta rawan pangan.

4.1.3.14 Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Masih tingginya potensi bencana alam, banjir/genangan, dan abrasi pantai;
- ✓ Kurang memadainya prasarana dan sarana dalam upaya pengelolaan dan pengolahan limbah domestik dan industri rumah;
- ✓ Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk berpatisipasi aktif dalam upaya melestarikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup;

4.1.3.15 Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terutama masyarakat miskin tentang pentingnya dokumen kependudukan;

4.1.3.16 Bidang Perhubungan

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Sarana dan prasarana infrastruktur Angkutan Darat yang belum memadai;
- ✓ Masih minimnya sosialisasi peraturan berlalu lintas dalam mewujudkan tata tertib berlalu lintas dijalan raya;
- ✓ Belum tersedianya rambu-rambu lalu lintas dalam jumlah yang memadai.

4.1.3.17 Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Masih minimnya sarana dan prasarana infrastruktur teknologi dan informatika;
- ✓ Belum optimalnya sistem pelayanan administrasi publik yang berbasis TIK.

4.1.3.18 Bidang Persandian

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung persandian;
- ✓ Masih rendahnya SDM yang memiliki kapasitas dalam bidang persandian.

4.1.3.19 Bidang Statistik

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Belum terintegrasinya data dan informasi pembangunan.

4.1.3.20 Bidang Penanaman Modal

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Belum maksimalnya pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu;
- ✓ Masih rendahnya iklim investasi dan dunia usaha.

4.1.3.21 Bidang Perpustakaan

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Prasarana perpustakaan dan yang belum memadai;
- ✓ Masih rendah minat baca dan antusias dari masyarakat.

4.1.3.22 Bidang Kearsipan

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Kurangnya sumber daya manusia yang profesional dibidang kearsipan;
- ✓ Sarana dan Prasarana Arsip yang belum memadai.

4.1.4 Pemerintahan Pilihan

4.1.4.7 Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya;
- ✓ Belum merata dan memadainya pembangunan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan;
- ✓ Rendahnya daya saing komoditas perikanan.

4.1.4.8 Bidang Pertanian

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Belum optimalnya produktivitas dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan;
- ✓ Rendahnya daya saing komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan;
- ✓ Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, dan peternakan;
- ✓ Rasio jumlah penyuluh petani dengan lembaga petani belum berimbang.

4.1.4.9 Bidang Perindustrian

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Masih rendahnya konstribusi sektor industri terhadap PDRB;
- ✓ Tidak adanya industri pengolahan bahan baku unggulan.

4.1.4.10 Bidang Perdagangan

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Terbatasnya akses pasar regional, nasional, dan internasional;
- ✓ Masih rendahnya Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB
- ✓ Terjadinya fluktuasi produksi dan harga.

4.1.4.11 Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Masih lemahnya manajemen usaha koperasi, usaha kecil dan menengah;
- ✓ Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha koperasi, usaha kecil dan menengah;
- ✓ Peran koperasi dalam sistem dan struktur perekonomian kabupaten masih sangat minim.

4.1.5 Pemerintahan Wajib Lainnya yang Bersifat Keistimewaan dan Kekhususan

4.1.5.7 Bidang Syariat Islam

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Masih rendahnya pengarustamaan syariat islam dalam pembangunan;
- ✓ Ketersedian sarana dan prasarana peribadatan yang belum representatif;
- ✓ Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan syariat islam.

4.1.5.8 Bidang Pendidikan Dayah

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Terbatasnya sarana dan prasarana layanan pendidikan dayah;
- ✓ Lemahnya kompetensi tenaga pendidik dilingkungan dayah;
- ✓ Belum optimalnya standarisasi pendidikan dayah.

4.1.5.9 Bidang Pertanahan Kabupaten

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya status kepemilikan serta sertifikat kepemilikan lahan.

4.1.5.10 Bidang Sekretariat MPU

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Masih kurangnya peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam menghasilkan fatwa terkait dengan penerapan syariat islam secara kaffah;
- ✓ Masih kurangnya peran kader ulama muda dalam penerapan Syariat Islam secara kaffah di Kabupaten Aceh Jaya.

4.1.5.11 Bidang Sekretariat MAA

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Kurangnya pembinaan para pemangku adat gampong untuk menerapkan hukum adat dan kearifan lokal;
- ✓ Lemahnya sosialisasi dan pembinaan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat.

4.1.5.5 Bidang MPD

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Kurang berperannya komite sekolah sesuai dengan fungsinya;
- ✓ Masih lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan.

4.1.5.12 Bidang Sekretariat Baitul Mal

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Zakat, Infaq, Sadakah, dan Wakaf (ZISWAF).

4.1.6 Perangkat Daerah Lainnya

4.1.6.7 Bidang Penanggulangan Bencana

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Masih rendahnya upaya mitigasi dan adaptasi bencana.

4.1.6.8 Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi;
- ✓ Masih rendahnya kader partai politik dari kalangan perempuan.

4.1.6.9 Bidang Sekretariat Kopri

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Kurangnya pembinaan etika birokrasi pada ASN;

- ✓ Belum optimalnya peran Kopri sebagai lembaga pengayom ASN.

4.1.6.10 Bidang Rumah Sakit Umum Daerah

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Kurangnya ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas peralatan medik, keperawatan, dan non medik dari standar pelayanan;
- ✓ Kurangnya jumlah tenaga medis dan non medis sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

4.1.6.11 Kecamatan

Permasalahan utamanya adalah:

- ✓ Sarana dan prasarana sekretariat kecamatan yang belum memadai;
- ✓ Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem pelayanan yang terpadu, efektif dan efisien.

4.2 Capaian SPM di Kabupaten Aceh Jaya

Dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa penyelenggaraan yang bersifat Wajib berpedoman pada Strandar Pelayan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ini disebutkan bahwa SPM adalah ketentuan tentang Jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada ayat ke 2 huruf d diamanatkan bahwa SPM yang telah ditetapkan Pemerintah terintegrasi kedalam dokumen perencanaan termasuk pembinaan umum dan teknisnya.

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 2 untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar;
3. Pendidikan kesetaraan;
4. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
5. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
6. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
7. Pelayanan kesehatan balita;
8. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
9. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
10. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
11. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
12. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
13. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
14. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
15. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus)*
16. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
17. Penyediaaan pelayanan pengelolaan air limbah domestic;
18. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
19. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
20. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
21. Pelayanan informasi rawan bencana;

22. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
23. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
24. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
25. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
26. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
27. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
28. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
29. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

4.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Isu-isu strategis yang telah diuraikan di atas menurunkan tujuan, sasaran dan program RPJMK. Program-program tersebut akan dinilai kelayakannya dengan menggunakan isu-isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan Pengangguran
2. Pelayanan dasar dan infrastruktur
3. Kelembagaan dan tata kelola
4. Konflik dan kesenjangan sosial
5. Kerentanan dan pelestarian sosial budaya
6. Penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan
7. Alih fungsi lahan

4.4 Isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi, berdasarkan peraturan perundangan yang telah ditetapkan mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) merupakan penjabaran dari Visi,

Misi Bupati yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi dan Nasional serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Selain mendasarkan diri pada evaluasi kinerja pembangunan daerah pada tahun-tahun sebelumnya, perlu juga diperhatikan beberapa hal yang harus mendapatkan fokus dan dikategorikan sebagai permasalahan/hambatan mendesak yang dihadapi dalam pembangunan daerah, sehingga penetapan rencana kerja pembangunan itu dapat tepat sasaran serta mampu menjawab permasalahan yang nyata.

Setelah mencermati pelaksanaan pembangunan dan permasalahan yang ditemui daerah selama 5 tahun 2012-2017, isu strategis pembangunan Kabupaten Aceh Jaya, yaitu:

4.4.1 Isu-isu Global

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dapat ditemukan beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan ditempuh. Kondisi tersebut bersifat eksternal atau kondisi dari luar yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya, namun dapat diantisipasi dampaknya ataupun dapat dioptimalkan peluang yang ditimbulkannya. Kondisi eksternal tersebut umumnya berlaku secara nasional maupun internasional dan berdampak secara langsung dan berdimensi waktu yang panjang yang akan mempengaruhi perjalanan pelaksanaan pembangunan, sehingga memerlukan perhatian khusus. Berikut beberapa kondisi ataupun isu global yang dipandang dapat mempengaruhi perjalanan kebijakan pembangunan di daerah.

1. Tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals*) yang mulai dijalankan sejak tahun 2000, telah berakhir pada tahun 2015. Sejak 2016 *Sustainable Development Goals* (SDGs) dicetuskan untuk meneruskan MDGs agar lebih terarah dan berkelanjutan. SDGs diharapkan dapat dicapai pada tahun 2031 dan memiliki 5 pondasi utama meliputi: manusia, planet, kesejahteraan,

perdamaian dan kemitraan dengan 17 target sasaran utama, yaitu:

1. **Tanpa Kemiskinan**

   Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.

2. **Tanpa Kelaparan**

   Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.

3. **Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan**

   Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.

4. **Pendidikan Berkualitas**

   Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

5. **Kesetaraan Gender**

   Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.

6. **Air Bersih dan Sanitasi**

   Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.

7. **Energi Bersih dan Terjangkau**

   Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.

8. **Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak**

   Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.

9. **Industri, Inovasi dan Infrastruktur**

   Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.

10. **Mengurangi Kesenjangan**

Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.

11. **Keberlanjutan Kota dan Komunitas**

    Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan bekelanjutan.

12. **Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab**

    Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.

13. **Aksi Terhadap Iklim**

    Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

14. **Kehidupan Bawah Laut**

    Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.

15. **Kehidupan di Darat**

    Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

16. **Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian**

    Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

17. **Kemitraan untuk Mencapai Tujuan**

    Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

2. **Pemberlakuan ASEAN Economic Community (AEC) Tahun 2015.**

   Ekonomi di kawasan ASEAN memberikan nilai postif tersendiri

khususnya dalam hubungan ekonomi politik antara Negara Anggota ASEAN dengan seluruh ekonomi di dunia. Indonesia sekarang ini berada didalam kondisi yang sangat terbuka dan sangat bersaing. Dengan diberlakukannya AEC banyak memberi dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Hal ini memerlukan kerja keras pemerintah dalam perbaikan ekonomi sekaligus melakukan reformasi terhadap masalah-masalah sosial.

Kondisi sosial ekonomi serta semua potensi yang ada pada masyarakat Kabupaten Aceh Jaya, diharapkan pemerintah dapat menempuh suatu kebijakan yang rasional untuk mengantar masuk dalam kancah perekonomian global terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, mengatasi kemiskinan, dan mengurangi angka pengangguran.

4.4.2 Isu-isu Nasional

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Nasional 2014-2019, **TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG,** banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah. Dalam RPJMN 2014-2019, beberapa isu-isu strategis nasional yang harus diselesaikan diantaranya adalah:

1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan mendukung kedaulatan pangan;
2. Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas kesempatan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan per kapita;
3. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan;
4. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Sumatera, khususnya diwilayah barat Sumatera.

4.4.3 Isu-isu Strategis Aceh

Selain merupakan hasil penelaahan terhadap dinamika pembangunan yang terjadi di skala global dan nasional, penetapan isu

strategis Kabupaten Aceh Jaya juga mengacu kepada isu-isu yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Aceh serta mempunyai relevansi dengan kondisi dan pengembangan kabupaten Aceh Jaya. Adapun yang menjadi Isu strategis pembangunan Aceh 2017-2022 adalah:

1. Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik
2. Penguatan nilai-nilai keislaman dan budaya ke-Acehan
3. Penguatan perdamaian secara berkelanjutan
4. Pemenuhan ketahanan dan kemandirian pangan
5. Pengembangan pertanian dan perikanan
6. Pengembangan industri, koperasi dan UKM
7. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah
8. Pengembangan pariwisata
9. Ketenagakerjaan
10. Ketersediaan dan ketahanan energi
11. Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat, dan terintegrasi
12. Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah
13. Pemenuhan perumahan dan permukiman layak huni
14. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan
15. Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga
16. Peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan
17. Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
18. Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumberdaya alam, dan lingkungan hidup.

4.4.4 Isu-isu Strategis Kabupaten Aceh Jaya

Memperhatikan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Aceh Jaya seiring dengan dinamika dan pengembangan Kabupaten Aceh Jaya serta menelaah isu-isu di lingkup Propinsi Aceh, Nasional dan global, maka dirumuskan 8 (delapan) isu strategis Kabupaten Aceh Jaya

sebagai berikut:

1. **Peningkatan daya saing, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang inklusif**
   - ✓ Peningkatan daya saing sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan menjadi sektor basis dalam struktur perekonomian di Kabupaten Aceh Jaya dan masih menjadi sektor andalan dengan penyerapan tenaga kerja yang sangat banyak. Peningkatan daya saing perkebunan terutama pada komoditi nilam, kopi, dan kelapa. Tidak stabilnya harga produk pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan dan dukungan infrastruktur yang belum optimal serta menurunnya angkatan kerja disektor pertanian menjadi permasalahan yang dihadapi dalam mempertahankan serta meningkatkan kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kelautan.
   - ✓ Sektor Pariwisata menjadi salah satu sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Aceh Jaya sebagai daerah dengan anugerah alam yang sangat bervariasi. membuka kesempatan bagi Aceh Jaya untuk menarik wisatawan (nusantara dan mancanegara) melalui wisata alam (ekowisata) maupun budaya. Banyak potensi parawisata yang sampai sekarang belum tersentuh dan dikelola dengan baik, harus dioptimalkan melalui dukungan infrastruktur, manajemen maupun promosi yang intens.
   - ✓ Mendorong sektor industri, UMKM, perdagangan, dan koperasi serta pendirian Badan Usaha Milik Daerah agar dapat berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penyediaan lapangan kerja.

2. **Kedaulatan Pangan**
   - ✓ Kedaulatan pangan menjadi isu penting dalam pembangunan kabupaten Aceh Jaya ke depan. Kedaulatan pangan adalah hak rakyat dan pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk menentukan

sendiri kebijakan dan strategi produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang sehat dan sesuai dengan sumber daya dan budaya lokal, dengan memperhatikan metode yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memberikan perlindungan serta dukungan terutama untuk mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil dan rakyat miskin yang rawan pangan. Kedaulatan pangan ini akan menjadi strategi alternatif untuk mencapai ketahanan dan keamanan pangan sejati.

3. Peningkatan mutu dan akses pendidikan

- ✓ Kualitas dan kuantitas SDM menjadi salah satu *vocal point* dalam keberhasilan pembangunan daerah. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas SDM yang menjadi subjek dan objek pembangunan melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi tenaga kerja. Untuk itu akses layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan capaian indeks pendidikan.
- ✓ Rendahnya mutu pelayanan pendidikan, belum optimalnya tata kelola lembaga pelayanan pendidikan juga rendahnya kualitas dan metode pembelajaran, masih menjadi persoalan penting untuk pencapaian target urusan pendidikan.

4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang menyeluruh

- ✓ Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan SDM yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu daerah. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting mengingat bahwa pada pelaksanaannya upaya penanganan kesehatan disamping upaya kuratif berupa pengobatan setelah masyarakat terkena penyakit, ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkit penyakit. Upaya

peningkatan kualitas kesehatan lingkungan menjadi penting mengingat bahwa beberapa penyakit yang berjangkit luas pada warga masyarakat berawal dari rendahnya kualitas kesehatan lingkungan.

- ✓ Disamping upaya promotif dan preventif tersebut diatas, upaya penting lain yang menjadi lini terdepan dalam isu kesehatan adalah upaya kuratif dan rehabilitatif, yaitu pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan. Bentuk pelayanan kutatif tersedia melalui puskesmas dan rumah sakit. Untuk itu diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga metode pengelolaan dan pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus dijalankan lintas sektoral. Upaya preventif juga promosi dalam konsep penanganan kesehatan adalah melalui kegiatan posyandu yang menitikberatkan kepada penanganan kesehatan ibu hamil.

5. **Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran**

- ✓ Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Jaya masih cukup banyak dan proses penurunannya cenderung lambat, maka upaya penanggulangan kemiskinan perlu lebih di pacu melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan. Sejalan dengan hal tersebut perlu dilakukan pula pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan pendayagunaan sumber daya potensial, pengembangan jejaring kemitraan. serta peningkatan kemampuan dan keterampilan agar penduduk miskin mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri.

Mengubah *mindset* masyarakat untuk mau keluar dari kemiskinan juga merupakan tantangan yang berat, ini dikarenakan masyarakat telah terbiasa berharap/menerima bantuan dari pihak Pemerintah, mengakibatkan angka kemiskinan turun dengan lamban dan mungkin semakin meningkat. Diperlukan peran dari ulama dalam menanamkan nilai aqidah pada masyarakat tentang kemiskinan. Kondisi daerah yang rentan terhadap dampak bencana alam, baik yang bersifat alamiah seperti: gempa bumi dan tsunami, maupun bencana alam yang bersifat kesalahan pembangunan seperti: banjir, lonsor dan kebakaran hutan memberikan dampak yang signifikan dalam penciptaan kondisi kemiskinan yang baru sebagai dampak dari bencana yang terjadi seperti: kehilangan asset, sumber pekerjaan maupun akses terhadap jaminan sosial yang disediakan oleh Negara.

- ✓ Pengangguran sangat berkorelasi dengan kemiskinan dan kualitas serta daya saing sumber daya manusia. penanganan pengangguran di kekuatan Aceh Jaya berfokus pada upaya perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangan kelompok tani, Nelayan, anak putus sekolah, korban konflik dan sektor UMKM. Selain itu perlu diupayakan perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha, peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas prasarana sarana dan pengelola balai latihan kerja (BLK), Pendidikan yang berorientasi pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja, serta pengembangan wirausaha baru berbasis sumber daya lokal termasuk kewirausahaan di kalangan pemuda. Upaya penanganan pengangguran dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dia pada akhirnya aspek-aspek produktif tersebut diharapkan mampu menjamin keberlanjutan pasar tenaga kerja.

6. Penguatan nilai-nilai keislaman dan kebudayaan

- ✓ Memperkuat pendidikan yang berbasis nilai-nilai moral dalam setiap jenjang pendidikan, peningkatan tipe, dan penguatan budaya masyarakat adat, penguatan peran ulama dan tokoh adat yang berdampak pada penurunan pelanggaran syariah islam serta membangun kembali penerapan nilai-nilai budaya yang islami.

7. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur yang terintegrasi

- ✓ Belum optimalnya kondisi infrastruktur dasar yang terintegrasi di kabupaten Aceh Jaya dalam mengimbangi dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta wilayah, berimplikasi pada beban masyarakat dalam penyediaan produksi dan mobilisasi sumber daya. Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang harus disediakan oleh pemerintah. Termasuk dalam penyediaan infrastruktur adalah jalan, jembatan, drainase, penyediaan air bersih irigasi, persampahan, pengelolaan limbah dan lain – lain. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas dapat dilakukan melalui beberapa strategi kebijakan diantaranya pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas dan umur pakai panjang.
- ✓ Pemenuhan perumahan dan permukinan layak huni terutama bagi kaum dhuafa.
- ✓ Infrastruktur lain yang sangat krusial adalah infrastruktur sumber daya air. Dengan sektor pertanian menjadi sektor basis di kabupaten Aceh Jaya, dukungan irigasi menjadi sangat penting. Permasalahan yang dihadapi adalah ketersediaan sumber air baku yang semakin menurun yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan hidup. Penurunan kualitas lingkungan pemukiman juga

menjadi satu permasalahan yang sangat penting karena sangat erat kaitannya dengan derajat kesehatan dan kenyamanan berkehidupan. Penurunan kualitas lingkungan permukiman juga menjadi satu permasalahan yang sangat penting karena sangat erat kaitannya dengan derajat kesehatan dan kenyamanan berkehidupan. Permasalahan penyediaan air bersih yang aman dan berkelanjutan, pengurangan luasan permukiman kumuh serta perbaikan layanan sanitasi adalah tiga masalah pokok yang tidak hanya menjadi perhatian pemerintah kabupaten tetapi juga menjadi salah satu target utama yang ditetapkan dalam RPJMN 2014 – 2019 melalui gerakan 100 – 0 – 100 (gerakan *universal acces*). Dari sisi penyediaan air minum, walaupun secara persentase cakupan layanan di Kabupaten Aceh Jaya sudah cukup baik, namun pelayanan air minum melalui sistem jaringan perpipaan masih kecil rasionya dibanding dengan sistem jaringan non perpipaan.

8. Penciptaan tata kelola dan pemerintahan yang baik.

- ✓ Pemerintah yang bersih dan baik saat ini menjadi isu nasional dan pemerintah Aceh yang juga terjadi dikabupaten Aceh Jaya. Sebagai salah satu upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik menjadi syarat utama yang harus dipenuhi. Berkenaan dengan disahkannya undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka dalam rangka reformasi birokrasi sebagai bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, daerah perlu mengantisipasi dengan melakukan langka – langkah konkrit, utamanya terkait pemantapan sistem manajemen kepegawaian meliputi sistem perencanaan, pengembangan karier, penggajian dan batas usia pensiun pegawai aparatur sipil negara.

- ✓ Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam mewujudkan demokrasi bernegara yang baik. Namun tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan peran aktif masyarakat termasuk dalam perencanaan/pelaksanaan dan pengawasan termasuk kemudahan dalam akses informasi pelayanan kepada masyarakat.
- ✓ Kondusivitas daerah juga masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga mampu membuka peluang investasi diwilayah kabupaten Aceh Jaya dan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

9. Peningkatan kehidupan sosial serta peran pemuda dan olahraga

- ✓ Isu perlindungan perempuan dan anak diharapkan dapat menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak, dan pemberdayaan ekonomi bagi kepala rumah tangga perempuan
- ✓ Menurunkan jumlah PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif.
- ✓ Meningkatkan kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan agar terhindar dari resiko penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif dan pergaulan bebas.
- ✓ Peningkatan prestasi olahraga dengan menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang merata serta meningkatkan semangat olahraga sejak usia dini.

10. Penanggulangan bencana alam serta pengendalian lingkungan hidup.

- ✓ Kabupaten Aceh jaya merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Aceh yang mempunyai potensi terjadinya bencana alam. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis.
- ✓ Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana

dan pemahaman berbagai pihak terhadap kesigapsiagaan dalam menghadapi bencana, dan belum terintegrasinya sistem kebencanaan, menjadi fokus dalam penanggulangan bencana alam serta pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Jaya.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Hasil analisa hubungan menunjukkan adanya konsistensi Perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 terhadap RPJM Kabupaten/Kota lain yang berbatasan dalam hal visi dan misi pembangunan. Meskipun dalam rumusan detail di setiap visi dan misi terkadang berbeda, akan tetapi secara substansi dan makna tetap terdapat hubungan atau kesamaan. Hal yang perlu diperhatikan meskipun visi misi tersebut memiliki kesamaan, namun bisa berbeda dalam penjabarannya ke dalam tujuan, sasaran dan program karena tiap daerah memiliki ciri khas potensi dan permasalahan yang berbeda. Perbedaan potensi dan masalah ini juga menjadi dasar untuk menentukan fungsi khusus suatu daerah dalam sebuah sistem pembangunan wilayah/regional yang lebih makro. Fungsi khusus berpengaruh pada program yang akan dilaksanakan oleh daerah tersebut. Berikut adalah tabel yang menjelaskan Hubungan antara Visi dan Misi RPJM Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 dengan Visi Misi RPJM Kabupaten sekitar.

Tabel 5.1 Hubungan antara Visi dan Misi RPJM Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 dengan Visi dan Misi RPJM Kabupaten Sekitar.

Visi Kabupaten Aceh Jaya GERAKAN PEMBANGUNAN RAKYAT ACEH JAYA: SEHAT, EKONOMI, KEJAYAAN AGAMA, TANGGUH INFRASTRUKTUR DAN INFORMATIF DENGAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETITIF (GERBANG RAJA SEJATI)		
Misi Kabupaten Aceh Jaya 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat. 3. Kejayaan nilai-nilai agama islam dalam kehidupan masyarakat. 4. Mewujudkan infrastruktur daerah yang tangguh, Informatif dan merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar. 5. Mewujudkan pendidikan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing. 6. Meningkatkan kehidupan sosial, serta peran pemuda dan olahraga. 7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.		
Visi Kabupaten Aceh Besar TERWUJUDNYA ACEH BESAR YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DALAM SYARIAH ISLAM	Visi Kabupaten Aceh Barat TERWUJUDNYA ACEH BARAT YANG ISLAMI DENGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG TRANSPARAN, KREDIBEL, AKUNTABEL DAN TERINTEGRITAS	Visi Kabupaten Pidie TERWUJUDNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN PIDIE YANG MULIA, BERKUALITAS, SEJAHTERA, DAN MEMILIKI MASA DEPAN
Misi Kabupaten Aceh Besar 1. Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam. 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dibidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Pemberayaan Komunitas. 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance). 4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur disegala bidang. 5. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang berbasis Mukim dan Gampong.	Misi Kabupaten Aceh Barat 1. Melaksanakan Syariat Islam secara Kaffah. 2. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. 3. Mewujudkan Perdamaian Aceh yang Abadi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, MoU Helsinki. 4. Membangun Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal dan Pemantapan Ketahanan Pangan. 5. Meningkatkan Kualitas SDM yang Profesional dan Berdaya Saing.	Misi Kabupaten Pidie 1. Meningkatkan Pengamalan Ibadah Dan Penerapan Nilai-nilai Keislaman Dalam Bermasyarakat Dan Bernegara Keislaman Dalam Bermasyarakat dan Bernegara. 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Cerdas Serta Meningkatkan Pelayanan Publik yang Melayani Rakyat Dengan Sepenuh Hati 3. Meningkatkan Pembinaaan Kualitas SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan yang Unggul dan Berkualitas.

6. Meningkatkan Percepatan Laju Pembangunan Masyarakat Pesisir, Terisolir dan Tertinggal.	6. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya dan Adat Istiadat. 7. Membangun Infrastruktur dan Sarana Pendukung Berbasis Tata Ruang dan Mitigasi Bencana. 8. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. 9. Meningkatkan Kualitas Pendidikan.	4. Meningkatkan Pelayanan dan Derajat Kesehatan yang Terintegrasi Hingga Ke Gampong-gampong. 5. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi di Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kelautan dan Ketahananan Pangan. 6. Mewujudkan Penataan Daerah Potensi Wisata Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Indeks Kebahagiaan Masyarakat. 7. Menumbuhkan Semangat Masyarakat Melalui Konsep Hidup Kabupaten Pidie : Hudep Sare, Matee Sadjan, Ibadat, Harekat, Meusapat. 8. Mewujudkan Masyarakat dan Pemerintahan yang Memiliki Kualitas Baik, Memeperbaiki Metalitas dan Moral Serta Akhlak Masyarakat yang Sesuai Dengan Syariat dan Ajaran Islam. 9. Mewujudkan Keberlangsungan Perdamaian di Kabupaten Pidie dan Provinsi Aceh. .

5.1. Visi

RPJMK Kabupaten Aceh Jaya 2017-2022 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK) 2005-2025 yaitu *tahap* Meningkatkan pertahanan ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, pemberdayaan dan penyediaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan mengembangkan muatan lokal serta penggerak kegiatan investasi untuk pertumbuhan PDRB, memelihara dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam rangka perbaikan sarana dan prasarana termasuk daerah terpencil dan tertinggal untuk mengurangi resiko bencana dan potensi konflik akibat pembangunan yang dijalankan, Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya diselenggarakan secara menyeluruh berdasarkan dukungan partisipatif masyarakat sebagai perencana awal dan berperan dalam pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi sebagai penerima manfaat, Memberi kesempatan pendidikan, pelayanan akses kesehatan, mendorong kesempatan kerja, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Aceh Jaya, maka Visi Tahun 2017-2022 yaitu:

"**Gerakan Pembangunan Rakyat Aceh Jaya: Sehat, Ekonomi, Kejayaan Agama, Tangguh Infrastruktur dan Informatif dengan Potensi Sumber Daya Manusia yang Kompetitif (GERBANG RAJA SEJATI)**"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan pada tabel 5.1

Tabel 5.2 Perumusan Penjelasan Visi

NO.	VISI	POKOK - POKOK VISI	PENJELASAN VISI
1	Gerakan Pembangunan Rakyat Aceh Jaya: Sehat, Ekonomi, Kejayaan Agama, Tangguh Infrastruktur dan Informatif dengan Potensi Sumber Daya Manusia yang Kompetitif (GERBANG RAJA SEJATI)	Sehat	Sehat adalah kondisi yang menggambarkan Aceh Jaya sebagai kabupaten yang menjamin seluruh masya-rakatnya dalam keadaan sehat melalui gerakan pem-bangunan rakyat Aceh Jaya.
		Ekonomi	Ekonomi adalah kondisi yang menggambarkan gerakan pembangunan rakyat Aceh Jaya yang menjamin eko-nomi warganya dalam keadaan mapan, yang mampu memantapkan usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri kreatif yang berdaya saing.
2		Kejayaan Agama	Kejayaan agama adalah kondisi yang menggambar-kan gerakan pembangunan rakyat Aceh Jaya yang men-jamin masyarakatnya dalam keadaan makmur, aman,

NO.	VISI	POKOK - POKOK VISI	PENJELASAN VISI
			agamais, berbudaya dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi diri dengan didukung tata kelola pemerintahan yang baik serta kabupaten yang memiliki watak, kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin dalam perilaku warga kabupaten yang berlan-daskan Syariat Islam.
4		Tangguh Infrastruktur dan Informatif	Tangguh infrastruktur dan informatif menggambarkan gerakan pembangunan rakyat Aceh Jaya sebagai kabupaten yang penataan ruangnya mampu meng-integrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mampu mengantisipasi resiko bencana, mampu meles-tarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan

NO.	VISI	POKOK - POKOK VISI	PENJELASAN VISI
			daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta akses informasi yang seluas-luasnya.
5		Potensi Sumber Daya Manusia yang Kompetitif	Pondasi sumber daya manusia yang kompetitif menggambarkan gerakan pembangunan rakyat Aceh Jaya sebagai kabupaten yang memiliki sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter, menguasai iptek, dan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan.

5.2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

Misi Pertama : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Misi Kedua : Mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat.

Misi Ketiga : Kejayaan nilai-nilai agama islam dalam kehidupan masyarakat.

Misi Keempat : Mewujudkan infrastruktur daerah yang tangguh, Informatif dan merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.

Misi Kelima : Mewujudkan pendidikan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.

Misi Keenam : Meningkatkan kehidupan sosial, serta peran pemuda dan olahraga.

Misi Ketujuh : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 5.3 Perumusan penjelasan Misi

NO	POKOK-POKOK VISI		MISI	PENJELASAN MISI
1	Sehat	1	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat.	Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Aceh Jaya, yang ditunjang dengan layanan kesehatan yang baik, Jaminan kesehatan diberikan bagi semua penduduk Kabupaten Aceh Jaya terutama bagi masyarakat miskin, dengan prosedur yang cepat dan mudah dan langsung ke rumah-rumah. Selain itu juga akan dilakukan pening-katan kualitas dan kuan-titas tenaga kesehatan di masing-masing puskesmas dan puskesmas pembantu, pemerataan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan mutu manajemen pelayanan kesehatan, serta ketersediaan obat-obatan yang cukup bagi masyarakat miskin. Misi ini juga diarahkan untuk peningkatan kualitas lingkungan sehat dan meningkatkan

NO	POKOK-POKOK VISI		MISI	PENJELASAN MISI
				perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari lingkup masyarakat terkecil, yakni keluarga dengan suasana kondisi keluarga yang sehat, produktifitas masyarakat di segala bidang akan meningkat.
2	Ekonomi	2	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi	Misi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan produksi perekonomian di sektor pertanian, UMKM, serta sektor-sektor pertum-buhan PDRB Ketahanan Pangan guna mendorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Misi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) guna peningkatan pen-dapatan per kapita masyarakat, menurunkan laju inflasi, peningkatan investasi melalui PMA dan PMDN serta pendirian Badan Usaha Milik Daerah.
3	Kejayaan Agama	3	Kejayaan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan masyarakat	Misi ini akan menghantarkan pada masyarakat dengan kondisi yang semakin bertambah nilai-nilai religius dengan menjalankan syariat islam secara kaffah yang ditandai dengan semakin meningkatnya pendidikan agama, meningkatkan sarana dan prasarana ibadah dan dayah, meningkatkan pemberdayaan ekonomi melalui ZISWAF, peningkatan peran ulama,pengkajian dan pengembangan Islam sesuai dengan ahlus sunnah waljamaah.

NO	POKOK-POKOK VISI		MISI	PENJELASAN MISI
4	Tangguh Infrastruktur dan Informatif	4	Mewujudkan infrastruktur daerah yang tangguh, informatif dan merata guna mendukung peningkatan kua-litas pelayanan dasar.	Misi ini mendorong tersedianya sistem infrastruktur yang baik dan teritegrasi yang antara lain ditandai dengan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang terintergrasi dan fungsional. Misi ini diharapkan dapat men-dorong penyediaan infrastruktur yang memadai dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat terutama sebagai modal dasar dalam menfasilitasi interaksi dan komunikasi diantara kelompok masyarakat, serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah seperti jalan, jembatan, prasarana dan sarana pemukiman yang merupakan modal esensial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial-ekonominya. Pada misi ini juga diharapkan penyediaan infrastruktur sebagai roda peggerak pertumbuhan ekonomi ditujukan pada peran transportasi yang dapat memungkinkan orang, barang dan jasa diangkut dari satu tempat ketempat lain, serta peran jaringan komunikasi dan informatika yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat. Perannya sangat penting baik dari sisi produksi maupun menunjang komoditi ekonomi. Telekomunikasi, listrik, dan airpun merupakan elemen yang sangat penting dalam proses produksi, dari sektor-sektor ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian.

NO	POKOK-POKOK VISI		MISI	PENJELASAN MISI
5	Potensi Sumber Daya Manusia yang Kompetitif	5	Mewujudkan pendidikan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.	Misi ini secara spesifik memberikan prioritas kepada peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Aceh Jaya. Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau semua kalangan menjadi target dalam misi ini akan didorong pula ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk pendidikan formal dan informal. Segala bentuk pendidikan yang mencerdaskan masyarakat, baik yang dikelola pemerintah daerah, maupun kelompok-kelompok masyarakat, akan didukung perkembangannya. Melalui misi ini diharapkan mampu diwujudkan iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan, serta menguasai ilmu pengeta-huan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya. Selain itu, Misi ini juga akan mendorong terpeli-haranya seni dan warisan budaya dan pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal.
		6	Meningkatkan kehidupan sosial, serta peran pemuda dan olahraga.	Misi ini berupaya mewujudkan Aceh Jaya dengan Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan me-ningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah PMKS, meningkatnya kesejahteraan PMKS dan disabilitas, mencegah dan

NO	POKOK-POKOK VISI		MISI	PENJELASAN MISI
				merehabilitasi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, Miras, AIDS, meningkatnya prestasi olah raga, menjaga kesatuan dan perdamaian dengan pemberdayaan ekonomi bagi mantan kombatan GAM.
		7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Misi ini akan memberikan prioritas pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Aceh Jaya, terutama pelayanan dasar, pelayanan umum, dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Pelayanan Kabupaten Aceh Jaya yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya serta ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) serta senantiasa mengedepankan konsep adil, efektif, dan efisien sebagai landasan etik dalam melakukan setiap pelayanan dalam masyarakat.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan Kabupaten baik urusan pemerintahan wajib, urusan pilihan, penunjang, keistimewaan dan kekhususan dalam

mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam Tabel 5.4 berikut ini:

Tabel 5.4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target tahun ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK
						2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Visi : Gerakan Pembangunan Rakyat Aceh Jaya : Sehat, ekonomi, kejayaan agama, tangguh infrastruktur dan informatif dengan sumber daya manusia yang kompetitif (Gerbang Raja Sejati)											
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat											
1.1		**Meningkatkan Derajat Kesehatan**	**Angka Usia Harapan Hidup**	**tahun**	**66,70**	**67,08**	**67,46**	**67,84**	**68,72**	**68,60**	**68,60**
1.1.1		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	46,51	2,91	2,91	15,70	15,70	16,28	53,49
			Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Misi 2: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Rakyat											
2.1		**Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**	**Laju pertumbuhan ekonomi Aceh Jaya**	**Persen**	**4,06**	**4,70**	**5,02**	**5,34**	**5,66**	**5,98**	**5,98**
			Tingkat Kemiskinan Aceh Jaya	**Persen**	**15,01**	**14,41**	**13,81**	**13,21**	**12,61**	**12,01**	**12,01**
			Tingkat Pengangguran Terbuka Aceh Jaya	**Persen**	**NA**	**3,86**	**3,51**	**3,16**	**2,81**	**2,46**	**2,46**
2.1.1		Meningkatnya Daya Saing Usaha Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Koperasi dan UKM, dan BUMD	Pertumbuhan PDRB	Persen	4,06	4,70	5,02	5,34	5,66	5,98	5,98
2.1.2		Meningkatnya Pemenuhan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka Aceh Jaya	Persen	NA	3,86	3,51	3,16	2,81	2,46	2,46
2.1.3		Meningkatkan Daya Tarik dan Daya Saing Investasi	Nilai Investasi berskala nasional (PMA-PMDN)	Juta	1.334.968	1.468.465	1.615.311	1.776.842	1.954.527	2.149.979	2.149.979
2.1.4		Meningkatkan Ketahanan Pangan	Pola Pangan Harapan	Indeks	61	77	81	82,82	84,48	86,17	86,17
Misi 3 : Kejayaan nilai-nilai agama islam dalam kehidupan masyarakat											
3.1		**Peningkatan Kualitas Masyarakat Berbasis Al-Qur'an dan Hadist**	**Jumlah Hafidzh/hafidzah**	**Jumlah**	**29**	**39**	**44**	**49**	**54**	**60**	**60**
			Jumlah Qari/qariah	**Jumlah**	**72**	**78**	**81**	**84**	**87**	**90**	**90**
			Angka Melek Al-Qur'an	**Persen**	**NA**	**75**	**78**	**81**	**84**	**87**	**87**

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target tahun ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK
						2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3.1.1		Meningkatnya sarana dan Prasarana Peribadatan	Persentase Mesjid yang memenuhi standar Ri'ayah	Persen	70	75	78	81	84	87	87
			Persentase Mesjid yang memenuhi standar Imarah	Persen	66	70	73	76	79	82	82
			Persentase Mesjid yang memenuhi standar Idarah	Persen	20	25	30	35	40	45	45
3.1.2		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Masyarakat yang Memahami Al-Qur'an	Angka Melek Al-Qur'an	Persen	NA	75	78	81	84	87	87
3.1.3		Meningkatnya Daya Saing Dayah	Persentase Dayah yang memenuhi standarisasi dayah	Persen	25,81	25,81	32,26	38,71	45,16	51,61	58,06
3.2		**Penguatan Tatanan Ekonomi Syariah**	**Persentase ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan**	**Persen**	**98,88**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**99,00**
3.3.1		**Meningkatnya Jumlah dana yang terhimpun dan efektifnya pendayagunaan ZISWAF**	**Jumlah Dana ZISWAF yang terhimpun**	**Jumlah**	**5.800.000.000**	**6.380.000.000**	**6.699.000.000**	**7.033.950.000**	**7.385.647.500**	**7.754.929.875**	**7.754.929.875**
Misi 4 : Mewujudkan infrastruktur daerah yang tangguh, Informatif dan merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar											
4.1		**Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan merata**	**Indeks Aksesibilitas (KM/KM²)**	**Poin**	**0,0638**	**0,0638**	**0,0677**	**0,0716**	**0,0754**	**0,0793**	**0,0793**
4.1.1		Terpenuhinya RUAS TUNTAS	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	247,11	247,11	262,11	277,11	292,11	307,11	307,11
4.1.2		Meningkatkan tatakelola kebencanaan	Indeks resiko bencana	Poin	0,68	0,65	0,62	140/sedang	137,5/sedang	135/sedang	135/sedang
4.1.3		Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6
4.1.4		Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang	Persentase kepatuhan terhadap peraturan tentang pemanfaatan ruang	Persen	20	20	20	20	20	20	100
Misi 5 : Mewujudkan pendidikan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing											
5.1		**Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berbudaya**	**Angka Melek Huruf**	**Angka**	**96,99**	**96,99**	**97,08**	**97,17**	**97,26**	**97,35**	**97,35**
5.1.1		Terwujudnya pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Angka	8,01	8,01	8,07	8,13	8,19	8,25	8,25
5.1.2		Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, nilai-nilai tradisi bagi pengembangan budaya daerah	Penyelamatan Seni Budaya Tradisional dan Pengembangan Seni Kreatif	Persen	53,33	60	66,67	73,33	80,00	86,67	86,67

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target tahun ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK
						2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Misi 6 : Meningkatkan kehidupan sosial, serta peran pemuda dan olahraga											
6.1		**Meningkatkan aksebilitas dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial**	**Persentase PMKS yang ditangani**	**Persen**	**50**	**60**	**65**	**70**	**75**	**80**	**80**
6.1.1		Menurunnya Jumlah PMKS Melalui Pemberdayaan PMKS Usia Produktif Dalam Kelompok-Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi lainnya	Persen	13,93	14,14	20,41	26,67	32,93	39,19	39,19
6.1.2		Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan gender (IPG)	Poin	88,08	88,28	88,48	88,68	88,88	89,08	89,08
6.1.3		Meningkatnya daya saing olahraga	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	Jumlah	P : 12 N : 4	P : 12 N : 4	P : 13 N : 4	P : 13 N : 5	P : 14 N : 6	P : 15 N : 7	P : 15 N : 7
7	**Misi 7**	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**									
7.1		**Meningkatkan pemerintahan yang demokratis, transparan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, pengganggaran dan pelaksanaan pembangunan**	**Nilai SAKIP**	**Poin**	**54,72**	**58,24**	**62**	**66**	**69,52**	**74**	**74**
7.1.1		Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	70	71	73	75	77	78	78
7.1.2		Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.1.3		Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan lintas sektor dan wilayah	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan	Persen	80	100	100	100	100	100	100
7.1.4		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas SPIP	Level	1	3	3	3	4	4	4

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH JAYA

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas dengan bagaimana upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun (2017 – 2022) sebagaimana tabel 6.1, 6.2, dan 6.3 berikut:

Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022

Visi :	Gerakan Pembangunan Rakyat Aceh Jaya: Sehat, Ekonomi, Kejayaan Agama, Tangguh Infrastruktur dan Informatif dengan Potensi Sumber Daya Manusia yang Kompetitif (Gerbang Raja Sejati)			
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1	**Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat**			
1.1	**Meningkatkan Derajat kesehatan**	**Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat**	Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan	Pemerataan dan Rekrutmen tenaga kesehatan (Non PNS)
			Meningkatkan Cakupan Desa Siaga Aktif	Meningkatkan Gerakan Masyarakat Sehat melalui Peningkatan Kapasitas Kader Siaga serta Meningkatkan Fungsi Monev Terintegrasi
			Penguatan informasi kesehatan terutama terkait penurunan angka prevalensi anak pendek *(stunting)*	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak.
			Mendorong pola hidup bersih dan sehat di masyarakat	Promosi hidup sehat di masyarakat, rumah sakit dan puskesmas
			Pemantapan Manajemen terpadu Neonatal dan bayi baru lahir	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak.
			Pengendalian penyakit Menular dan Tidak Menular	Eliminasi Penyakit Menular dan Tidak Menular
			Mengoptimalisasi pelayanan kesehatan dasar	Penyederhanaan birokrasi pelayanan kesehatan dasar
			Mewujudkan kualitas pelayanan paripurna yang prima dengan mengutamakan keselamatan pasien	Penetapan regulasi terkait kunjungan kesehatan rutin bagi masyarakat miskin dan lansia
				Peningkatan pelayanan sesuai standar prosedur
			Meningkatkan standar pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan sarana prasarana dan mutu pelayanan rumah sakit, Puskesmas dan Pustu
			Manjemen pengelolaan dan pendistribusi obat	Peningkatan mutu dan akses penyediaan kefarmasian
				Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan di Masyarakat
			Mengoptimalisasi pelayanan kesehatan jiwa	Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sesuai standar
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB	Peningkatan partisipasi peserta KB Pasangan Usia Subur (PUS)
				Peningkatan kesadaran masyarakat peduli keluarga berencana
2	**Misi 2: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Rakyat**			
		Meningkatnya Daya Saing Usaha Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Industri, Perdagangan, Pariwisata, koperasi, UKM dan BUMD.	Meningkatkan produksi, inovasi, dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi dan Produktivitas komoditas pertanian, peternakan, dan perkebunan
			Mendirikan Badan Usaha Milik Daerah	Fasilitasi Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariàh (BPRS) BUMD Umum Milik Pemerintah Kabupaten
			Meningkatkan daya tarik wisata	Mempermudah Perizinan serta Menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait parawisata dalam upaya pengembangan objek wisata unggulan berbasis islami
			Meningkatkan Infrastruktur dan daya serap tenaga kerja Pariwisata	Peningkatan Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Kepariwisataan yang Terintegrasi
			Peningkatan PAD Sektor Pariwisata	Meningkatkan image/branding/ikon pariwisata melalui strategi promosi yang efektif
			Meningkatnya daya saing industri kecil dan menengah	Peningkatan pengelolaan industri kecil melalui pendataan, pembinaan dan pelatihan
			Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam perekonomian daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana, promosi, keamanan perdagangan serta perlindungan konsumen	Melakukan revitalisasi pasar daerah, meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi produk unggulan daerah, melaksanakan pengawasan peredaran barang dan jasa serta alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya
			Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Peningkatan kapasitas SDM pengelola dan pengurus koperasi pada aspek kelembagaan
			Menumbuhkan UMKM, pemberdayaan kelembagaan UMKM, pembinaan, pelatihan dan pengawasan	Peningkatan jumlah UMKM melalui pembinaan, pelatihan, pengawasan

Visi :	Gerakan Pembangunan Rakyat Aceh Jaya: Sehat, Ekonomi, Kejayaan Agama, Tangguh Infrastruktur dan Informatif dengan Potensi Sumber Daya Manusia yang Kompetitif (Gerbang Raja Sejati)			
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
2.1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Kesempatan Kerja	Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
			Perluasan Lapangan Kerja	Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja
			Mendampingi dan Menguatkan Usaha Peningkatkan Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam Manajemen Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Pemerintah
			Menata Persebaran Penduduk	Pengembangan Kawasan Transmigrasi
			Meningkatkan kemampuan translok yang dibina	Peningkatan Kemampuan dan Kemandirian Calon Transmigran Lokal
			Menciptakan Lapangan Kerja bagi Masyarakat Miskin guna Terciptanya Ekonomi Mandiri	Peningkatan ekonomi produktif masyarakat miskin
		Meningkatkan Daya Tarik dan Daya Saing Investasi	Meningkatkan iklim investasi dan usaha dengan memberikan kepastian usaha dan mengembangkan daya tarik investasi	Pemberian kepastian usaha melalui regulasi penanaman modal dan usaha
				Pengembangan strategi promosi investasi
				Mengupayakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan/atau Kawasan Industri Terpadu (KIT)
			Sinergisitas Lintas Sektor dalam menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif dan Pemerataan Investasi	Fasilitasi dan mediasi antar pelaku usaha Aceh Jaya dengan investor
			Optimalisasi kinerja pelayanan Perijinan Investasi	Penyederhanaan Prosedur Perijinan serta Optimalisasi Pemamfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam pelayanan perijinan
		Meningkatkan Ketahanan Pangan	Meningkatkan Ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses pangan masyarakat, kualitas,serta keragaman konsumsi pangan masyarakat dan penanganan daerah rawan pangan	Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
				Membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang
3	Misi 3 : Kejayaan nilai-nilai agama islam dalam kehidupan masyarakat			
3.1	Peningkatan Kualitas Masyarakat Berbasis Al-Qur'an dan Hadist	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Peribadatan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana keagamaan dan budaya berbasis islami	Tersedianya sarana dan prasarana peribadatan yang memenuhi standar
		Meningkatnya Kualitas dan Kuatitas masyarakat yang memahami Al-Qur'an	Memantapkan kemampuan baca Al-Qur'an sesuai kaidah ilmu tajwid	Meningkatkan kompetensi ustad/ustadzah di semua lembaga pengajian
			Meningkatkan Jumlah Hafidzh/Hafizah dan Qari/Qariah	Meningkatkan Kapasitas Lembaga Tahfidz dan Meingkatkan Kapasitas Hafidz dan Hafizah
			Meningkatkan pelaksanaan tahapan penyelesaian norma hukum syariat islam	Meningkatkan sosialisasi qanun tentang norma hukum syariat islam
			Meningkatkan peran Ulama dalam memberikan masukan terhadap penentuan kebijakan daerah	Terbinanya hubungan yang harmonis antara ulama dan pemerintah
		Meningkatnya Daya Saing Dayah	Meningkatkan Kualitas Dayah dan SDM Dayah	Peningkatan sarana dan prasarana dayah
				Pelatihan dan peningkatan mutu tenaga pendidik dayah
				Mengembangkan kurikulum pendidikan dayah dan regulasi terkait standarisasi lembaga pendidikan keagamaan di Kabupaten
				Penyediaan Beasiswa dan Subsidi Biaya Konsumsi Santri
			Meningkatkan Kemandirian Dayah	Meningkatkan Keterampilan Santri terkait membangun perekonomian mandiri di dayah
3.2	Penguatan Tatanan Ekonomi Syariah	Meningkatnya Jumlah dana yang terhimpun dan efektifnya pendayagunaan ZISWAF	Meningkatkan fungsi dan pemberdayaan zakat, harta waqaf dan harta agama lainnya dalam meningkatakan kualitas dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan kapasitas kinerja manajemen kelembagaan Baitul Mal
4	Misi 4 : Mewujudkan infrastruktur daerah yang tangguh, Informatif dan merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar			
		Terpenuhinya RUAS TUNTAS	Penyelenggaraan jalan kabupaten dalam kondisi baik dengan mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan	Penanganan ruas jalan kabupaten yang belum tuntas dan mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah dibangun
			Tersedianya jaringan irigasi dan drainase	Melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan
				Rehabilitasi drainase perkotaan dan pengendalian banjir
			Peningkatan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas

Visi :	Gerakan Pembangunan Rakyat Aceh Jaya: Sehat, Ekonomi, Kejayaan Agama, Tangguh Infrastruktur dan Informatif dengan Potensi Sumber Daya Manusia yang Kompetitif (Gerbang Raja Sejati)			
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
4.1	**Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan merata**		Penguatan kepastian hukum terhadap hak - hak tanah	Penataan administrasi pertanahan terhadap lahan-lahan aset negara sebagai salah satu sumber daya pembangunan
			Inventarisasi rumah tinggal yang belum menggunakan listrik	Memberikan stimulan rumah tangga miskin untuk mendapatkan listrik
			Peningkatan dan Pemerataan Pelayanan PJU	Membangun, menata, dan meterisasi, serta meningkatkan pelayanan pemeliharaan PJU
			Peningkatan dan Pengembangan Konektivitas Perhubungan Laut dan Darat	Menyediakan sarana dan prasarana transportasi
		Meningkatkan tatakelola kebencanaan	Peningkatan Kemampuan Adaptasi dan Upaya Mitigasi Bencana	Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana (mitigasi/pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi rekonstruksi)
		Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan	Penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan	Pembangunan dan Pemeliharaan RTH
			Peningkatan Kinerja Persampahan	Meningkatkan cakupan pelayanan sampah dengan membangun TPA baru, teknologi pengolahan sampah dan peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran
			Peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, dan kawasan lindung	Mengendalikan kerusakan lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup
		Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang	Penyusunan dokumen tata ruang yang berkualitas dan aplikatif	Penyusunan dokumen rencana tata ruang yang bersifat komprehensif multi sektor melalui pengkajian secara teknokratris dan partisipatif
5	**Misi 5 : Mewujudkan pendidikan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing**			
5.1	**Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berbudaya**	**Terwujudnya pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan**	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan usia dini dan pendidikan dasar	Memberikan beasiswa pendidikan bagi siswa dan mahasiswa dengan skema *universal coverage*
			Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik
			Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan searah nilai-nilai lokal	Peningkatan sikap, minat, bakat dan prestasi siswa
			Meningkatkan kualitas pendidikan non formal	Peningkatan Kegiatan ekstrakurikuler
			Meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam wadah Team Koordinasi Pembangunan Pendidikan Aceh Jaya untuk meningkatkan kinerja pendidikan	Mendorong peningkatan akuntabilitas publik dalam kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan
		Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, nilai-nilai tradisi bagi pengembangan budaya daerah	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan tentang Nilai-nilai Adat Istiadat yang Sesuai dengan Syariat Islam	Peningkatan penghargaan dan pembinaan kepada komunitas seni, budaya, dan pariwisata
				Peningkatan kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya di Kecamatan
				Pelestarian Budaya Lokal
				Peningkatan kapasitas lembaga dan SDM dalam mengembangkan dan mengawasi adat istiadat sesuai syariat islam
				Peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya lokal
6	**Misi 6: Meningkatkan kehidupan sosial, serta peran pemuda dan olahraga**			
6.1	**Meningkatkan aksebilitas dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial**	**Menurunnya Jumlah PMKS Melalui Pemberdayaan PMKS Usia Produktif Dalam Kelompok-Kelompok Usaha Ekonomi Produktif**	Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen untuk penanganan PMKS dan Lansia	Peningkatan Jaminan Pelayanan Sosial bagi PMKS dan Lansia
			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Lembaga Perlindungan Kesejahteraan Sosial (LPKS)	Peningkatan Pelayanan Lembaga Perlindungan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sesuai standar
			Membentuk kelompok Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat dan memantau serta mengembangkannya secara berkelanjutan; Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Korban Konflik	Pengembangan hasil usaha kelompok
				Peningkatan pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi PMKS dan korban konflik
			Menfasilitasi masyarakat yang terkena dampak bencana	Pemantapan sosialisasi dan pengelolaan sarana dan prasana kebencanaan
		Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Memperkuat peran dan fungsi pengarustamaan gender (PUG)	Penguatan kelembagaan dan jaringan PUG dan PUHA
				Pemberian bantuan hukum bagi perempuan dan anak yang terlibat tindak kekerasan

Visi :	Gerakan Pembangunan Rakyat Aceh Jaya: Sehat, Ekonomi, Kejayaan Agama, Tangguh Infrastruktur dan Informatif dengan Potensi Sumber Daya Manusia yang Kompetitif (Gerbang Raja Sejati)			
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
		Meningkatnya daya saing olahraga	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Olahraga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
			Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Olahragawan Berprestasi secara Berkelanjutan	Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi pelatih
			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga	Peningkatan semangat masyarakat dalam berolahraga
			Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan	Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan
			Meningkatkan Pembinaan Karakter Pemuda	Peningkatan pembinaan dan pengawasan
7	**Misi 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**			
7.1	**Meningkatkan pemerintahan yang demokratis, transparan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, pengganggaran dan pelaksanaan pembangunan**	**Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat**	Meningkatkan efektifitas dan kinerja lembaga pemerintahan melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi, kerjasama, penyediaan sarana dan prasarana,serta regulasi untuk mendukung pelayanan publik yang baik	Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur
				Penyelenggaraan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan perumusan kebijakan, pelayanan administrasi pemerintahan yang baik dan koordinasi perangkat daerah
			Meningkatkan fungsi camat dengan peningkatan kualitas koordinasi tingkat kecamatan, pembinaan desa/kelurahan dan pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan kualitas koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, trantibum dan pemberdayaan masyarakat pada semua wiayah kerjanya, serta meningkatkan kualitas pelayanan terpadu dalam kewenangannya
			Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan daerah	Peningkatan fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi dengan peningkatan kualitas fasilitasi terhadap alat kelengkapan dewan
			Mewujudkan tata kelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang baik	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan pencatatan sipil dan kualitas data kependudukan
			Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana IT	Pembangunan sarana dan prasarana jaringan komunikasi dan informasi menuju Aceh Jaya *Cyber City*
			Mengembangkan layanan publik yang interaktif sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Pengembangan sistem informasi pelayanan publik
			Meningkatkan kompetensi aparatur	Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian daerah dengan perbaikan pola penempatan pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta pelayanan administrasi kepegawaian
			Penguatan kapasitas pemerintahan gampong	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan penguatan kemandirian gampong
			Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan politik sebagai warga negara	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu
				Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara
			Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Peningkatan kerjasama dan pengendalian di bidang keamanan
			Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kearsipan dan perpustakaan	Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan berbasis IT serta peningkatan koleksi bahan perpustakaan
				Peningkatan pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Meningkatnya akuntabilitas dan kemandirian keuangan pemerintah daerah	Penatausahaan pengelolaan keuangan secara tertib, akuntable, dan transparan
		Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan lintas sektor dan wilayah	Meningkatkan perencanaan yang partisipatif dan akuntabel	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah, Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Perumusan Kebijakan, Meningkatkan Kualitas Perencanaan Berbasis Data, Peningkatan kualitas penelitian untuk perencanaan
				Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Perumusan Kebijakan
				Meningkatkan Kualitas Perencanaan Berbasis Data
			Optimalisasi hasil penelitian dan pengembangan	Peningkatan kualitas penelitian untuk perencanaan
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan	Peningkatkan kapasitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan melalui pengawasan internal secara berkala, pengendalian manajemen kebijakan, penanganan pengaduan, dan meningkatkan persentase pengembalian kerugian negara

Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya 2018-2022

Tahun	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya 2018-2022
2018	Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2018 difokuskan pada kesejahteraan ekonomi masyarakat (Gerbang Emas) dan tata kelola pemerintahan yang baik. Arah kebijakan meliputi : Peningkatan Produksi dan Produktivitas Sektor-sektor PDRB, Peningkatan pengelolaan industri kecil melalui pendataan, pembinaan dan pelatihan, peningkatan jumlah UMKM melalui pembinaan, pelatihan, pengawasan, Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Peningkatan Kemampuan dan Kemandirian Calon Transmigran Lokal, Peningkatan ekonomi produktif masyarakat miskin, Pemberian kepastian usaha melalui regulasi penanaman modal dan usaha, Pengembangan strategi promosi investasi, Fasilitasi dan mediasi antar pelaku usaha Aceh Jaya dengan investor, Penyederhanaan Prosedur Perijinan serta Optimalisasi Pemamfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam pelayanan perijinan, Membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang, Pengembangan hasil usaha kelompok, Peningkatan pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi PMKS, Penyelenggaraan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan perumusan kebijakan, pelayanan administrasi pemerintahan yang baik dan koordinasi perangkat daerah, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu, Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara. Tema : “Masyarakat Aceh Jaya yang Mapan melalui Pertumbuhan Sektor-sektor PDRB”
2019	Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2019 difokuskan pada kesejahteraan ekonomi masyarakat (Gerbang Emas) dengan tetap melanjutkan tata kelola pemerintahan yang baik. Arah kebijakan meliputi : Peningkatan Produksi dan Produktivitas komoditas pertanian, peternakan, dan perkebunan, Mempertahankan dan Mengganti Luas Baku Lahan Sawah yang beralih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian, Memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan perkebunan/Peternakan/Kelautan dan Perikanan, Peningkatan kuantitas pencegahan dan pengendalian penyakit ternak, Peningkatan kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian, peternakan, perkebunan, Kelautan dan Perikanan, Peningkatan Produksi dan Produktivitas komoditas kelautan dan perikanan, Mempermudah Perizinan serta Menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait parawisata dalam upaya pengembangan objek wisata unggulan berbasis islami, Peningkatan Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Kepariwisataan yang Terintegrasi, Meningkatkan image/branding/ikon pariwisata melalui strategi promosi yang efektif, Peningkatan pengelolaan industri kecil melalui pendataan, pembinaan dan pelatihan, Melakukan revitalisasi pasar daerah, meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi produk unggulan daerah, melaksanakan pengawasan peredaran barang dan jasa serta alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya, Peningkatan kapasitas SDM pengelola dan pengurus koperasi pada aspek kelembagaan, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Peningkatan jumlah UMKM melalui pembinaan, pelatihan, pengawasan, Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja, Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja, Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam Manajemen Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Pemerintah, Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Peningkatan Kemampuan dan Kemandirian Calon Transmigran Lokal, Peningkatan ekonomi produktif masyarakat miskin, Pemberian kepastian usaha melalui regulasi penanaman modal dan usaha, Pengembangan strategi promosi investasi, Fasilitasi dan mediasi antar pelaku usaha Aceh Jaya dengan investor, Penyederhanaan Prosedur Perijinan serta Optimalisasi Pemamfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam pelayanan perijinan, Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang, Pengembangan hasil usaha kelompok, Peningkatan pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi PMKS dan korban konflik, Penyelenggaraan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan perumusan kebijakan, pelayanan administrasi pemerintahan yang baik dan koordinasi perangkat daerah, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu, Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara, Peningkatan kerjasama dan pengendalian di bidang keamanan. Tema : “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Aceh Jaya Secara Inklusif”

Tahun	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya 2018-2022
2020	Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2020 difokuskan pada peningkatan daya saing pendidikan dan kualitas kesehatan Jasmani dan Rohani (Gerbang Perak dan Gerbang Seroja) dengan tetap melanjutkan pembangunan ekonomi secara inklusif (Gerbang Emas) dan tata kelola pemerintahan yang baik. Arah kebijakan meliputi : Memberikan beasiswa/subsidi pendidikan bagi siswa yang tidak mampu atau berprestasi dan subsidi pendidikan bagi sekolah dan tenaga pendidik, Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik, Peningkatan sikap, minat, bakat dan prestasi siswa, Peningkatan Kegiatan ekstrakurikuler, Mendorong peningkatan akuntabilitas publik dalam kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan, Peningkatan penghargaan dan pembinaan kepada komunitas seni, budaya, dan pariwisata, Peningkatan kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya di Kecamatan, Pelestarian Budaya Lokal, Peningkatan kapasitas lembaga dan SDM dalam mengembangkan dan mengawasi adat istiadat sesuai syariat islam, Peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya lokal, Pemerataan dan Rekrutmen tenaga kesehatan (Non PNS), Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak, Promosi hidup sehat di masyarakat, rumah sakit dan puskesmas, Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak, Eliminasi Penyakit Menular dan Tidak Menular, Penyederhanaan birokrasi pelayanan kesehatan dasar,Penetapan regulasi terkait kunjungan kesehatan rutin bagi masyarakat miskin dan lansia, Peningkatan pelayanan sesuai standar prosedur, Meningkatkan sarana prasarana dan mutu pelayanan rumah sakit, Puskesmas dan Pustu, Peningkatan mutu dan akses penyediaan kefarmasian, Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan di Masyarakat, Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sesuai standar, Peningkatan partisipasi peserta KB Pasangan Usia Subur (PUS), dan Peningkatan kesadaran masyarakat peduli keluarga berencana, Memperluas partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pelayanan sosial bagi PMKS, Peningkatan Pelayanan Panti Asuhan sesuai standar, Penguatan kelembagaan dan jaringan PUG dan PUHA,Pemberian bantuan hukum bagi perempuan dan anak yang terlibat tindak kekerasan, Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi pelatih, Peningkatan semangat masyarakat dalam berolahraga, Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan, Peningkatan pembinaan dan pengawasan pemuda. Tema : “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Derajat Kesehatan Masyarakat”
2021	Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2021 difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan berbasis keagamaan bagi terlaksananya syiar agama islam (Gerbang Permata) dengan tetap melanjutkan pembangunan ekonomi, peningkatan daya saing pendidikan dan kualitas kesehatan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Arah kebijakan meliputi : Tersedianya sarana dan prasarana peribadatan yang memenuhi standar, Meningkatkan kompetensi ustad/ustadzah di semua lembaga pengajian, Meningkatkan sosialisasi qanun tentang norma hukum syariat islam, Terbinanya hubungan yang harmonis antara ulama dan pemerintah, Peningkatan sarana dan prasarana dayah, Pelatihan dan peningkatan mutu tenaga pendidik dayah, Mengembangkan kurikulum pendidikan dayah dan regulasi terkait standarisasi lembaga pendidikan keagamaan di Kabupaten, Meningkatkan Keterampilan Santri terkait membangun perekonomian mandiri di dayah, dan Meningkatkan kapasitas kinerja manajemen kelembagaan Baitul Mal, Peningkatan kualitas koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, trantibum dan pemberdayaan masyarakat pada semua wiayah kerjanya, serta meningkatkan kualitas pelayanan terpadu dalam kewenangannya, Peningkatan fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi dengan peningkatan kualitas fasilitasi terhadap alat kelengkapan dewan, Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan pencatatan sipil dan kualitas data kependudukan, Tema : “Mewujudkan pendidikan rakyat yang berdaya saing”

Tahun	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya 2018-2022
2022	Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2022 difokuskan pada pemantapan infrastruktur dan informasi daerah (Gerbang Intan) pada setiap kecamatan dan Gampong, dengan tetap melanjutkan pembangunan pendidikan berbasis keagamaan bagi terlaksananya syiar agama islam, pembangunan ekonomi, peningkatan daya saing pendidikan dan kualitas kesehatan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Arah kebijakan meliputi : Penanganan ruas jalan kabupaten yang belum tuntas dan mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah dibangun, Melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan, Rehabilitasi drainase perkotaan dan pengendalian banjir, Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas, Penataan administrasi pertanahan terhadap lahan-lahan aset negara sebagai salah satu sumber daya pembangunan, Memberikan stimulan rumah tangga miskin untuk mendapatkan listrik, Membangun, menata, dan meterisasi, serta meningkatkan pelayanan pemeliharaan PJU, Menyediakan sarana dan prasarana transportasi, Pemantapan sosialisasi dan pengelolaan sarana dan prasana kebencanaan, dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga, Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur, Pembangunan sarana dan prasarana jaringan komunikasi dan informasi menuju Aceh Jaya Cyber City, Pengembangan sistem informasi pelayanan publik, Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian daerah dengan perbaikan pola penempatan pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta pelayanan administrasi kepegawaian, Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan penguatan kemandirian gampong, Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan berbasis IT serta peningkatan koleksi bahan perpustakaan, Peningkatan pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, Penatausahaan pengelolaan keuangan secara tertib, akuntable, dan transparan, Peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah, Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Perumusan Kebijakan, Meningkatkan Kualitas Perencanaan Berbasis Data, Peningkatan kualitas penelitian untuk perencanaan, Peningkatkan kapasitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan melalui pengawasan internal secara berkala, pengendalian manajemen kebijakan, penanganan pengaduan, dan meningkatkan persentase pengembalian kerugian negara. Tema : “Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang tangguh dan terintegrasi”

Dalam Rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sampai dengan tahun 2022 secara lebih fokus dan terarah, Pelaksanaan Program pembangunan dikemas dalam **5 (Lima) gerakan pembangunan (GERBANG), yaitu:**

1. Gerbang Seroja (Gerakan Pembangunan Sehat Rohani dan Jasmani) untuk mewujudkan Misi Pertama dengan indikator kinerja yang ingin dicapai :
   - ✓ Angka Usia Harapan Hidup pada tahun 2022 sudah mencapai 68,60 tahun
   - ✓ Cakupan Desa Siaga Aktif pada tahun 2022 sudah mencapai 53,49 persen
   - ✓ Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Tahun 2022 sudah mencapai 100 persen

   Terdapat 27 (Dua Puluh Tujuh) Program Prioritas untuk mendukung ketercapaian indikator Gerbang Seroja

2. Gerbang Emas (Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sejahtera) untuk mewujudkan Misi Kedua dan Keenam dengan indikator kinerja yang ingin dicapai:
   - ✓ Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh Jaya pada tahun 2022 sudah mencapai 5,98 persen
   - ✓ Tingkat Kemiskinan Aceh Jaya pada tahun 2022 menurun hingga 12,01 persen
   - ✓ Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2022 mencapai 5,98 Persen
   - ✓ Tingkat Pengangguran Terbuka Aceh Jaya pada tahun 2022 menurun hingga 2,46 persen

- ✓ Nilai Investasi berskala nasional (PMA-PMDN) pada tahun 2022 mencapai Rp 2.149.979,-
- ✓ Peningkatan indeks Pola Pangan Harapan pada tahun 2022 yang mencapai 86,17 poin
- ✓ Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mencapai 80 Persen pada tahun 2022
- ✓ Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi lainnya pada tahun 2022 yang mencapai 39,19 persen
- ✓ Indeks Pembangunan gender (IPG) pada tahun 2022 yang mencapai 89,08 persen

Terdapat 60 (Enam Puluh) Program Prioritas untuk mendukung ketercapaian indikator Gerbang Emas

3. Gerbang Permata (Gerakan Pembangunan Pendidikan Agama dan Fasilitas Ibadah) untuk mewujudkan Misi Ketiga dengan Indikator Kinerja yang ingin dicapai:
   - ✓ Jumlah Hafidzh/hafidzah pada tahun 2022 yang mencapai 60 orang
   - ✓ Jumlah Qari-Qariah pada tahun 2022 yang mencapai 90 orang
   - ✓ Peningkatan Persentase Angka Melek Al-quràn pada tahun 2022 yang mencapai 87 persen
   - ✓ Persentase Mesjid yang memenuhi standar dengan kriteria Ri`ayah 87 persen, Imarah 82 persen dan Idarah 45 persen pada akhir tahun 2022
   - ✓ Persentase angka melek al-quràn pada tahun 2022 yang mencapai 87 persen

- ✓ Dayah yang memenuhi standarisasi dayah pada tahun 2022 yang mencapai 58,06 persen
- ✓ Persentase Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS) yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan mencapai 99,00 persen
- ✓ Terkumpulnya Dana Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf (ZISWAF) pada tahun 2022 mencapai Rp. 7.754.929.875, -

Terdapat 18 (Delapan Belas) Program Prioritas untuk mendukung ketercapaian indikator Gerbang Permata

4. Gerbang Intan (Gerakan Pembangunan Infrastruktur – Informatika) untuk mewujudkan Misi Keempat dengan indikator kinerja yang dicapai:
   - ✓ Indeks Aksesibilitas (KM/KM²) pada tahun 2022 mencapai 0,0793 poin
   - ✓ Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2022 yang mencapai 307,11 Km
   - ✓ Indeks resiko bencana pada tahun 2022 yang mencapai 135 poin
   - ✓ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 yang mencapai 86,6 poin
   - ✓ Persentase kepatuhan terhadap peraturan tentang pemanfaatan ruang pada tahun 2022 yang mencapai 100 persen

   Terdapat 41 (Empat Puluh Satu) Program Prioritas untuk mendukung ketercapaian indikator Gerbang Intan

5. Gerbang Perak (Gerakan Pembangunan Pendidikan Rakyat yang Kompetitif) untuk mewujudkan Misi Kelima dan Misi Enam dengan Indikator Kinerja yang ingin dicapai:
   - ✓ Angka Melek Huruf pada tahun 2022 sudah mencapai 97,35 persen

- ✓ Angka Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2022 mencapai 8 tahun 2 bulan
- ✓ Penyelamatan Seni Budaya Tradisional dan Pengembangan Seni Kreatif pada tahun 2022 sudah mencapai 86,67 persen
- ✓ Jumlah cabang olahraga yang berprestasi pada tahun 2022 ditingkat provinsi 15 cabang dan di tingkat nasional mencapai 7 cabang

Terdapat 28 (Dua Puluh Delapan) Program Prioritas untuk mendukung ketercapaian indikator Gerbang Perak

Tabel 6.3. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Aceh Jaya

Kode	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK		SKPK Penanggung Jawab
					2018*		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
VISI : GERAKAN PEMBANGUNAN RAKYAT ACEH JAYA : SEHAT, EKONOMI, KEJAYAAN AGAMA, TANGGUH INFRASTRUKTUR DAN INFORMATIF DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETITIF (GERBANG RAJA SEJATI)																	
MISI 1: MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT																	
1.1	**Meningkatkan Derajat Kesehatan**	**Angka Usia Harapan Hidup**	**Tahun**	**66,70**	**67,08**	**54.871.555.842**	**67,46**	**96.363.628.090**	**67,84**	**94.663.844.508**	**68,72**	**94.312.594.508**	**68,60**	**94.304.344.508**	**68,60**	**436.173.049.956**	
1.1.1	**Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**	**Persen**	**46,51**	**52,33**	**54.871.555.842**	**52,33**	**96.363.628.090**	**55,23**	**94.663.844.508**	**58,14**	**94.312.594.508**	**61,05**	**94.304.344.508**	**61,05**	**436.173.049.956**	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	**Persen**	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
	Program Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kesehatan	Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kesehatan	Persen	-	-	-	100,00	560.000.000,00	100,00	200.000.000,00	80,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	2.817.082.500,00	DINKES
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Gizi Buruk yang mendapat Perawatan	Persen	100	100	47.560.000	100	789.158.000	100	1.631.000.000	100	1.700.000.000	100	1.700.000.000	100	5.867.718.000	DINKES
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Kecamatan yang melaksanakan GERMAS hidup sehat	Persen	0	55,56	48.020.200	66,67	75.000.000	77,78	437.000.000	80	437.000.000	100	437.000.000	100	1.434.020.200	DINKES
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	100	100	13.047.481.901	100	19.342.429.046	100	17.799.853.935	100	17.799.853.935	100	17.799.853.935	100	85.789.472.752	DINKES
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Pelayanan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	Persen	100	100	392.091.500	100	355.000.000	100	420.000.000	80	420.000.000	100	420.000.000	100	2.007.091.500	DINKES
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas yang terakreditasi	Persen	25	50	780.295.400	66,67	579.980.000	83,33	950.254.000	80	950.254.000	100	950.254.000	100	4.211.037.400	DINKES
	Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas pembantu dan Jaringannya	Persentase Kelengkapan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pusekesmas Pembantu dan Jaringannya	Persen	100	100	3.629.817.520	100	11.154.778.724	100	14.070.778.724	80	14.070.778.724	100	14.070.778.724	100	56.996.932.416	DINKES
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Peserta KB Aktif Terhadap Pasangan Usia Subur (PUS)	Persen	61,55	0	-	63	35.000.000	64	65.000.000	80	65.000.000	65	65.000.000	65	230.000.000	DPMPKB
	Program Pengembangan Lingkungan sehat	Cakupan Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	Persen	60	70	331.226.430	80	125.759.570	100	305.000.000	80	305.000.000	100	305.000.000	100	1.371.986.000	DINKES
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka	322	280	798.785.193	250	1.373.000.000	220	1.147.000.000	80	1.147.000.000	150	1.147.000.000	150	5.612.785.193	DINKES
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup	Angka	12	11,8	64.000.000	11,5	70.000.000	11	124.660.000	80	124.660.000	10	124.660.000	10	507.980.000	DINKES
	Program pencegahan dan penangulangan penyakit menular	Persentase Kasus Penyakit Menular yang di Tangani	Persen	100	100	468.889.830	100	861.600.000	100	840.000.000	0	840.000.000	100	840.000.000	100	3.850.489.830	DINKES
		Persentase orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	Persen	0	100		100		100		0		100		100		
		Persentase orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai	Persen	100	100		100		100		0		100		100		
		Cakupan Imunisasi / Desa UCI	Persen	41,28	43,6		100		100		0		100		88,72		
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Cakupan Penyakit Tidak Menular	Persen	100	100	102.295.800	0	-	0	-	0	-	0	-	100	102.295.800	DINKES
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar	Persen	0	0	0	24,46	70000000	22	222900000	0	222900000	22	222900000	100,55	738700000	DINKES
		Persentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persen	0	0		1,69		2,4		0		2,4		9,81		

Kode	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK		SKPK Penanggung Jawab
					2018*		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
		Persentase orang usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	0	0		100		100		0		100		100		
	Program Peningkatan Penaggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/Aids	Persentase Peningkatan Penanggulangan Resiko Bahaya Narkoba, PMS, dan HIV/AIDS	Persen	62	62	25.500.000	70	85.000.000	74	60.000.000	78	60.000.000	82	60.000.000	82	290.500.000	DPMPKB
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat	Persen	90	92	3.599.817.098	95	2.749.524.000	96	3.306.297.700	0	3.306.297.700	100	3.306.297.700	100	16.268.234.198	DINKES
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan pelayanan umum kesehatan dan tempat-tempat umum yang memenuhi standar kesehatan	Persen	30	35	11.166.750	40	22.000.000	45	210.000.000	50	210.000.000	60	210.000.000	60	663.166.750	DINKES
	Program peningkatan Kesehatan jiwa	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	90	100	27.000.000	100	25.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	100	307.000.000	DINKES
	Program peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persen	82,1	85	40.000.000	90	40.000.000	96	390.000.000	98	390.000.000	100	390.000.000	65	1.250.000.000	DINKES
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupann terlayaninya pasien yang berkunjung	Persen	100	100	14.850.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	74.850.000	RSUD
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan masyaakat	Persen	100	100	21.551.980.434	100	28.223.434.648	100	27.800.000.000	100	27.800.000.000	100	27.800.000.000	100	133.175.415.082	RSUD
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tipe RSUD	Tipe	D	C	-	C	387.480.000	C	493.840.000	C	65.340.000	C	65.340.000	C	1.012.000.000	RSUD
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana RSUD	Persen	10	20	9.796.141.986	30	28.557.984.102	50	23.345.260.149	70	23.345.260.149	90	23.345.260.149	90,00	108.389.906.535	RSUD
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Presentase pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD	Persen	100	100	94.635.800	100	150.000.000	100	165.000.000	100	173.250.000	100	165.000.000	100,00	747.885.800	RSUD
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase evaluasi Pelaporan RSUD	Persen	100	0	-	100	16.500.000	0	-	0	-	0	-	0,00	16.500.000	RSUD
	Program Pengembangan Sumberdaya Tenaga Kesehatan	Persentase realisasi tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	100	0	-	100	700.000.000	100	580.000.000	100	580.000.000	100	580.000.000	0,00	2.440.000.000	RSUD
Misi 2: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Rakyat																	
2.1	**Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**	**Laju pertumbuhan ekonomi Aceh Jaya**	**Persen**	**4,06**	**4,70**	**31.358.125.917**	**5,02**	**56.726.987.177**	**5,34**	**53.144.932.898**	**5,66**	**51.155.659.213**	**5,98**	**47.964.564.910**	**5,98**	**228.572.634.991**	
		Tingkat Kemiskinan Aceh Jaya	**Persen**	**15,01**	**14,41**		**13,81**		**13,21**		**12,61**		**12,01**		**12,01**		
		Tingkat Pengangguran Terbuka Aceh Jaya	**Persen**	**0,00**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		**1,00**		**1,00**		**1,00**		
2.1.1	**Meningkatnya Daya Saing Usaha Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Industri, Perdagangan, Pariwisata, koperasi, UKM dan BUMD.**	**Pertumbuhan PDRB**	**Persen**	**4,06**	**5,98**	**30.483.669.731**	**5,03**	**49.512.871.041**	**5,34**	**49.263.556.770**	**5,66**	**48.953.471.167**	**5,98**	**46.176.552.712**	**5,98**	**213.473.923.251**	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah luas areal tanaman Perkebunan yang dikembangkan	Ha	5429	800	62.930.000	1000	18.000.000	0	-	1400	150.000.000	1600	240.000.000	16.000	470.930.000	DISTAN
	Program Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Produksi Padi	Ton	95364	100132,2	11.799.563.851	105138,81	23.671.655.000	85500	18.020.000.000	89775	18.020.000.000	94263,75	18.020.000.000	94.264	89.531.218.851	DISTAN
		Produksi Jagung	Ton	6.264	6.577		6.906		7.251		7.614		7.995		7.995		

Kode	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK		SKPK Penanggung Jawab
					2018*		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
		Produksi Kedelai	Ton	609	639		671		705		740		777		777		
		Produksi Kelapa Sawit	Ton	83.779	87.968		92.366		96.985		101.834,0		106.926		106.926		
		Produksi Karet	Ton	5.369	5.637		5.919		6.215		6.526		6.852		6.852		
		Produksi Kopi	Ton	301	316		332		348		366		384		384		
		Produksi Kelapa Dalam	Ton	2.274	2.388		2.507		2.632		2.764		2.902		2.902		
		Produksi Nilam	Ton	76	80		84		88		92		97		97		
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Produktifitas Padi	Ton/Ha	4,8	5,7	457.767.400	5,8	150.000.000	5,9	1.446.000.000	6	1.548.000.000	6,1	1.146.000.000	6,1	4.747.767.400	DISTAN
		Produktifitas Jagung	Ton/Ha	3,7	4		4,1		4,2		4,3		4,4		4,4		
		Produktifitas Kedelai	Ton/Ha	1,3	1,6		1,7		1,8		1,9		2		2		
	Program Peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah peningkatan populasi ternak	Ekor	483.784	821.230	3.096.100.300	982.600	5.848.955.000	1.214.601	5.635.000.000	1.340.676	5.635.000.000	1.513.131	5.635.000.000	1.513.131	25.850.055.300	DISTAN
		Ternak Besar	Ekor						33.917		36.891		40.030		1.513.131		
		Ternak Kecil	Ekor						44.754		46.630		48.201		1.513.131		
		Unggas	Ekor						1.135.930		1.257.155		1.424.900		1.513.131		
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase status kesehatan hewan terhadap agent penyakit	0	0	0	312.587.271	0	650.000.000	0	600.000.000	0	750.000.000	0	770.000.000			DISTAN
		Parasit	Persen	46	44		42		41		40		33		33	-	
		Virus		46	44		42		41		40		38		38		
		Bakteri		8	7		6		5		4		4		4		
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah komoditi Peternakan yang dipasarkan	Jenis	3	7	126.878.600	7	133.000.000	7	150.000.000	7	180.000.000	7	180.000.000	7	769.878.600	DISTAN
	Program Peningkatan SDM Sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan	Penerapan teknologi melalui Demplot	Demplot	9	9	16.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	9	16.000.000	DISTAN
	Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	Persentase cakupan pelaksanaan sistem LAKUSI secara berkelanjutan	Persen	100	216	145.941.000	0	-	216	91.000.000	216	91.000.000	216	91.000.000	216	418.941.000	DISTAN
	Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan	Persentase Penyuluh Pertanian Lapangan yang ditingkatkan pengetahuannya	Persen	15	20	903.358.673	20	2.221.785.000	20	2.030.000.000	20	2.030.000.000	20	2.030.000.000	100	9.215.143.673	DISTAN
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah komoditi Pertanian/Perkebunan yang dipasarkan	Komoditi	4	0	-	0	-	7	284.000.000	8	284.000.000	9	284.000.000	9	852.000.000	DISTAN
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Persentase Kelompok yang Menerapkan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persen	10	10	85.729.700	10	580.200.000	10	207.000.000	10	207.000.000	10	207.000.000	50	1.286.929.700	DISTAN
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produktivitas sektor Perikanan budidaya	Ton	60	80	654.014.600	80	3.353.888.436	80	2.573.000.000	80	2.573.000.000	80	2.573.000.000	80	11.726.903.036	DKP
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produktifitas sektor Perikanan Tangkap	Ton	8152	12730	2.805.028.835	12735	4.764.122.799	12740	5.565.000.000	12750	5.565.000.000	12760	5.565.000.000	63715	16.430.540.735	DKP
	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan	Jumlah kawasan perikanan yag diawasi	LHOK	9	9	47.100.000	9	60.000.000	9	60.000.000	9	60.000.000	9	60.000.000	9	287.100.000	DKP
	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	Jumlah konsumsi ikan (Kg/Kap/Thn)	kg/kap/thn	42	44	29.000.000	46	60.000.000	48	75.000.000	50	75.000.000	53	75.000.000	53	314.000.000	DKP
	Program Optimalisasi PengembanganSumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase tersedianya data ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil	Ha	3038,77	4000	45.000.000	5000	20.000.000	0	-	0	-	0	-	5000	65.000.000	DKP
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya jumlah kelompok pengolah yang mempunyai skill bidang pengolahan produk hasil perikanan	Klp	2	3	39.991.000	3	25.815.217	3	80.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	9	345.806.217	DKP
	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Cakupan anggota kelompok pengolah dan pemasar yang terbina	Persen	40	20	109.144.500	20	65.000.000	20	30.000.000	20	80.000.000	20	80.000.000	100	364.144.500	DKP

Kode	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK		SKPK Penanggung Jawab
					2018*		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase Peningkatan jumlah realisasi kerjasama bidang kepariwisataan	Persen	6	10	49.457.000	20	50.000.000	30	80.000.000	40	80.000.000	50	80.000.000	50	339.457.000	DISPORA
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Pengembangan lokasi objek wisata unggulan berbasis islami	Lokasi	1	2	841.602.569	20	247.792.000	30	2.291.054.770	40	2.224.969.167	50	2.099.938.335	50	7.705.356.841	DISPORA
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan PAD sektor pariwisata	Persen	0	5	89.794.900	7	165.000.000	9	65.000.000	11	65.000.000	14	65.000.000	14	449.794.900	DISPORA
	Program Pengelolaan Pasar	Cakupan Pasar yang fungsional	Persen	18,18181818	27,27272727	5.176.834.330	36,36363636	1.723.240.000	45,45454545	694.702.000	54,54545455	694.702.000	63,63636364	694.702.000	63,64	8.984.180.330	DISPERINDAG
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Sarana dan Prasarana Kemetrologian	Persen	0	0	-	25	1.629.750.000	50	50.000.000	75	50.000.000	100	50.000.000	100,00	1.779.750.000	DISPERINDAG
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	2,02	2,14	329.997.000	2,2	330.000.000	2,22	196.500.000	2,36	196.500.000	2,4	196.500.000	2,40	1.249.497.000	DISPERINDAG
	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Cakupan Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang difasilitasi	Persen	1,6	0	-	2,4	275.350.000	0	-	0	-	0	-	4,80	275.350.000	DISPERINDAG
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase IKM yang difasilitasi	Persen	49,06	5,32	2.545.621.620	5,58	2.252.405.000	5,86	4.095.000.000	6,15	4.095.000.000	6,48	4.095.000.000	78,43	17.083.026.620	DISPERINDAG
	Program Penataan Struktur Industri	Cakupan bina Kelompok pengrajin	Persen	1,74	2,33	204.605.000	2,33	270.745.000	2,33	1.300.000.000	2,33	1.300.000.000	2,33	1.300.000.000	2,33	4.375.350.000	DISPERINDAG
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Tingkat pertumbuhan usaha ekonomi kreatif	Persen	5	0	5	7	11.108.000	0	240.000.000	9	240.000.000	10	240.000.000	10,00	731.108.005	DISPERINDAG
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Pendapatan UKM	Milyar	198015152	2002965532	219.412.377	208039670	72.000.000	202965532	2.509.300.000	202965532	2.509.300.000	224035970	219.412.377	224035970	5.529.424.754	DISPERINDAG
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan wirausahawan yang dilatih	Persen	4,67	6,33	34.700.000	8,17	25.000.000	10,5	25.000.000	11,83	25.000.000	13,67	25.000.000	13,67	134.700.000	DISPERINDAG
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Cakupan UMKM yang difasilitasi	Persen	0,38	0,92	46.159.200	0	-	0	-	0	-	0	-	2,38	46.159.200	DISPERINDAG
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	Persen	4,42	7,53	74.020.000	9,68	25.000.000	15,02	25.000.000	15,8	25.000.000	16,13	25.000.000	16,13	174.020.000	DISPERINDAG
	Program Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Terbentuknya BUMD dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gerbang Raja	Unit	0	1	135.330.000	1	813.059.589	100	846.000.000	100	100.000.000	100	30.000.000	1	1.924.389.589	SETDAKAB (BAGIAN EKONOMI ESDM)
2.1.2	**Meningkatnya Pemenuhan Kesempatan Kerja**	**Tingkat Pengangguran Terbuka Aceh Jaya**	**Persen**	**0,00**	**4,95**	**423.751.786**	**3,51**	**4.805.340.008**	**3,16**	**2.300.000.000**	**2,81**	**600.000.000**	**2,46**	**321.011.034**	**2,46**	**8.450.102.828**	
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat Menuju Kompetensi	Persen	28	28,73	146.174.486	29,46	273.937.034	30,19	2.200.000.000	30,92	500.000.000	31,65	221.011.034	31,65	3.341.122.554	DISTRANSNAKER
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Terdaftar Dapat Ditempatkan dan Terciptanya Wirausahawan	Persen	40,73	40,73	49.865.000	0	-	0	-	0	-	0	-	43,59	49.865.000	DISTRANSNAKER
	Program Peningkatan, Pengawasan, Perlindungan, Penegakan Hukum terhadap Keselamatan Kerja	Persentase pengawasan, perlindungan, penegakan hukum terhadap keselamatan kerja	Persen	55	65	28.860.000	0	-	0	-	0	-	0	-	85	28.860.000	DISTRANSNAKER
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persen	100	0	-	100	10.000.000	0	-	0	-	0	-	100	10.000.000	DISTRANSNAKER
	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi	Persentase Kawasan Pemukiman Transmigrasi yang Dibangun	Persen	10	20	150.830.700	40	100.000.000	0	-	0	-	0	-	80	250.830.700	DISTRANSNAKER

Kode	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK		SKPK Penanggung Jawab
					2018*		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
	Program Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran Yang Dibina	Persen	38,1	47,62	48.021.600	57,14	53.002.974	66,67	100.000.000	76,19	100.000.000	85,71	100.000.000	85,71	401.024.574	DISTRANSNAKER
	Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi	Persen	NA	0	-	10	2.668.400.000	0	-	0	-	0	-	10	2.668.400.000	DISTRANSNAKER
	Program Transmigrasi Lokal	Presentase pembangunan pemukiman transmigrasi	Persen	NA	0	-	10	1.700.000.000	0	-	0	-	0	-	10	1.700.000.000	DISTRANSNAKER
2.1.3	**Meningkatkan Daya Tarik dan Daya Saing Investasi**	**Nilai Investasi berskala nasional (PMA-PMDN)**	**Juta**	**38,10**	**1.807.065**	**362.589.000**	**1.615.311**	**143.676.128**	**1.776.842**	**143.376.128**	**1.954.527**	**143.376.128**	**2.149.979**	**143.376.128**	**2.149.979**	**936.393.512**	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor PMA-PMDN	Investor	7	11	112.715.000	14	80.000.000	17	109.476.128	21	109.476.128	25	109.476.128	25	521.143.384	DPMP2TSP
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA-PMDN)	Juta	1334968	1468464,8	19.874.000	1615311,28	20.000.000	1776842,408	33.900.000	1954526,649	33.900.000	2149979,314	33.900.000	2.149.979	141.574.000	DPMP2TSP
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Persentase Pelayanan Perizinan	Persen	100	100	230.000.000	100	43.676.128	0	-	0	-	0	-	100	273.676.128	DPMP2TSP
2.1.4	**Meningkatkan Ketahanan Pangan**	**Pola Pangan Harapan**	**Indeks**	**60,90**	**77,00**	**88.115.400**	**81,00**	**2.265.100.000**	**82,82**	**1.438.000.000**	**84,48**	**1.458.811.918**	**86,17**	**1.323.625.036**	**86,17**	**5.712.215.400**	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Presentase Peningkatan Pola Pangan Harapan	Persen	7	0	-	8	1.679.000.000	8,5	118.000.000	9	118.000.000	9,5	118.000.000	9,50	2.033.000.000	DINAS PANGAN
	Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi dan Protein Per kapita (Kg kalori perhari)	Kkal	1900	1925	88.115.400	1950	636.100.000	1975	985.000.000	2000	985.000.000	2100	985.000.000	2100	3.679.215.400	DINAS PANGAN
MISI 3 : KEJAYAAN NILAI-NILAI AGAMA ISLAM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT																	
3.1	**Peningkatan kualitas dan efektifitas tatanan aqidah, akhlak dan pelaksanaan syariah**	**Angka Melek Al-Qur'an**	**Persen**	**NA**	**75,00**	**7.371.130.718**	**78,00**	**18.866.969.114**	**81,00**	**19.779.353.556**	**84,00**	**17.268.784.122**	**87,00**	**18.899.907.268**	**87,00**	**82.186.144.778**	
3.1.1	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana keagamaan dan budaya berbasis islami**	**Persentase Mesjid yang memenuhi standar Ri'ayah**	**Persen**	**70,00**	**75,00**		**78,00**		**81,00**		**84,00**		**87,00**		**87,00**		
		Persentase Mesjid yang memenuhi standar Imarah	**Persen**	**66,00**	**70,00**	**3.204.805.142**	**73,00**	**3.950.006.000**	**76,00**	**4.300.000.000**	**79,00**	**4.300.000.000**	**82,00**	**4.300.000.000**	**82,00**	**20.054.811.142**	
		Persentase Mesjid yang memenuhi standar Idarah	**Persen**	**20,00**	**25,00**		**30,00**		**35,00**		**40,00**		**45,00**		**45,00**		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan	Masjid yang memenuhi standar : Imarah, Ri'ayah dan Idarah	Persen	28,57	40	3.204.805.142	45,71	3.950.006.000	51,43	4.300.000.000	57,14	4.300.000.000	62,86	4.300.000.000	62,86	20.054.811.142	DINAS SYARIAT ISLAM
3.1.2	**Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Masyarakat yang Memahami Al-Qur'an**	**Angka Melek Al-Qur'an**	**Persen**	**NA**	**75**	**1.107.669.000**	**78,00**	**2.395.938.192**	**81,00**	**2.700.446.288**	**84,00**	**1.711.496.288**	**87,00**	**1.761.000.000**	**87,00**	**9.676.549.768**	
	Program Pengembangan Syiar Islam	Meningkatnya Dakwah dan Syiar Islam	Persen	100	100	725.414.000	100	742.000.000	0	-	0	-	0	-	100,00	1.467.414.000	DINAS SYARIAT ISLAM
	Program Peningkatan Kualitas Peribadatan Umat Islam	Persentase Meningkatnya Pengamalan dan Akhlaq dalam Kehidupan Bermasyarakat	Persen	100	100	165.965.000	100	187.120.692	100	365.000.000	100	365.000.000	100	365.000.000	100,00	1.448.085.692	DINAS SYARIAT ISLAM
	Program Pemberdayaan Syariat Islam	Meningkatnya Pelaksanaan Syariat Islam serta Pemahamannya	Persen	100	100	44.000.000	100	397.517.500	100	536.446.288	100	548.496.288	100	566.000.000	100,00	2.092.460.076	DINAS SYARIAT ISLAM
	Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah	Selesainya Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung dan Infrastruktumya	Persen	100	100	48.800.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	0	-	0	-	100,00	2.048.800.000	DINAS SYARIAT ISLAM
	Program peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Al Quran	Angka Melek Al-Quran	Persen	NA	-	-	-	-	85	720.000.000	90	710.000.000	90	720.000.000	100,00	2.150.000.000	DINAS SYARIAT ISLAM
	Program Peningkatan Sumberdaya dan Peran Ulama	Persentase Keputusan/Rekomendasi Ulama Yang diterapkan	Persen	16	20	54.500.000	24	69.300.000	28	33.000.000	32	42.000.000	36	64.000.000	36	262.800.000	SEKRETARIAT MPU
	Program Pembinaan Syariat Islam	Jumlah Kader Ulama Muda	Jumlah	20	22	30.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	79	30.000.000	SEKRETARIAT MPU
	Program Penguatan Aqidah Ahlusunnah Wal Jamaah	Persentase Penguatan Aqidah di Masyarakat	Persen	70	75	38.990.000	0	-	100	46.000.000	100	46.000.000	100	46.000.000	95	176.990.000	SEKRETARIAT MPU

Kode	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK		SKPK Penanggung Jawab
					2018*		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
3.1.3	**Meningkatnya Daya Saing Dayah**	**Persentase Dayah yang memenuhi standarisasi dayah**	**Persen**	**26**	**26**	**3.058.656.576**	**38,71**	**12.521.024.922**	**45,16**	**12.778.907.268**	**51,61**	**11.257.287.834**	**58,06**	**12.838.907.268**	**58,06**	**52.454.783.868**	
	Program Pendidikan Dayah	Persentase Santri yang mampu membaca kitab kuning	Persen	10	0	-	15	90.000.000	20	600.000.000	25	560.000.000	30	660.000.000	30,00	1.910.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAYAH
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah	Persentase Dayah dengan Sarana prasarana telah memenuhi standar	Persen	22,85714286	28,57	884.311.576	34,29	9.711.629.278	40,00	8.920.767.268	45,71	7.439.147.834	51,43	8.920.767.268	51,43	35.876.623.224	DINAS PENDIDIKAN DAYAH
	Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah	Persentase Tenaga Pendidikan Dayah yang memiliki kompetensi	Persen	NA	48,05	1.840.445.000	50,75	1.942.390.000	60,30	2.320.140.000	65,30	2.320.140.000	70,00	2.320.140.000	70,00	10.743.255.000	DINAS PENDIDIKAN DAYAH
	Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah	Persentase Dayah yang berkualitas	Persen	22,85714286	28,57142857	49.750.000	34,28571429	48.941.644	0	-	0	-	0	-	51,43	98.691.644	DINAS PENDIDIKAN DAYAH
	Program Pemberdayaan Santri	Cakupan Santri yang mendapat pendidikan dan fasilitas yang memadai	Persen	3,777335984	4,37	184.500.000	4,76	228.064.000	5,16	873.000.000	5,56	873.000.000	5,95	873.000.000	5,95	3.031.564.000	DINAS PENDIDIKAN DAYAH
	Program Penelitian dan Pengembangan Dayah	Persentase Dayah yang Terakreditasi	Persen	77,42	83,87	99.650.000	87,15	500.000.000	90,32	65.000.000	93,55	65.000.000	100	65.000.000	100,00	794.650.000	DINAS PENDIDIKAN DAYAH
3.2	**Penguatan Tatanan Ekonomi Syariah**	**Meningkatnya Jumlah dana yang terhimpun dan efektifnya pendayagunaan ZISWAF**	**Persen**	**98,88**	**99,00**	**121.500.000**	**99,00**	**141.070.341**	**99,00**	**105.000.000**	**99,00**	**110.000.000**	**99,00**	**115.000.000**	**99,00**	**592.570.341**	
3.2.1	**Meningkatnya Jumlah dana yang terhimpun dan efektifnya pendayagunaan ZISWAF**	**Meningkatnya Jumlah dana yang terhimpun dan efektifnya pendayagunaan ZISWAF**	**Persen**	**98,88**	**99,00**	**121.500.000**	**99,00**	**141.070.341**	**99,00**	**105.000.000**	**99,00**	**110.000.000**	**99,00**	**115.000.000**	**99,00**	**592.570.341**	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah dana ZISWAF yg terhimpun	Milyar	5800000000	6380000000	44.000.000	6699000000	60.000.000	7033950000	75.000.000	7385647500	75.000.000	7754929875	75.000.000	7.754.929.875	329.000.000	SEKRETARIAT BAITUL MAL
	Program Peningkatan Sumberdaya Manusia, Masyarakat dan Ulama	Jumlah Peningkatan SDM dalam Pengelolaan Zakat	0rg	120	200	77.500.000	200	81.070.341	200	30.000.000	200	35.000.000	200	40.000.000	200	263.570.341	SEKRETARIAT BAITUL MAL
MISI 4 : MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG TANGGUH, INFORMATIF DAN MERATA GUNA MENDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DASAR																	
4.1	**Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan merata**	**Indeks Aksesibilitas (KM/KM²)**	**Poin**	**0,08**	**0,086**	**103.205.599.977**	**0,091**	**124.124.380.256**	**0,096**	**97.871.510.403**	**0,101**	**98.405.589.157**	**0,106**	**98.058.960.904**	**0,106**	**521.666.040.697**	
4.1.1	**Terpenuhinya RUAS TUNTAS**	**Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik**	**Km**	**312,17**	**247,11**	**95.101.865.236**	**262,11**	**111.087.101.702**	**277,11**	**86.883.814.403**	**292,11**	**87.335.341.498**	**307,11**	**87.290.816.498**	**307,11**	**467.698.939.337**	
	Program pembangunan jalan dan jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	Persen	42,10688629	44,82802409	33.652.307.077	47,54916189	39.591.439.524	50,27029969	40.450.000.000	52,99143749	40.450.000.000	55,71257528	40.450.000.000	55,71	194.593.746.601	DPUPR
	Program pembangunan saluran drainase/gorong- gorong	Jumlah Panjang drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (m')	Meter	138966	138978	139.080.400	139732	500.000.000	140487	1.700.000.000	141245	1.700.000.000	142503	1.700.000.000	142.503	5.739.080.400	DPUPR
	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Persentase peningkatan jumlah panjang turap/ talud dalam kondisi baik	Persen	22,28	0	-	0	-	0,27	302.241.500	0,27	317.691.500	0,29	302.241.500	23,12	922.174.500	DPUPR
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase jumlah sarana dan prasarana Kebinamargaan dalam kondisi baik	Persen	91,3	95,7	165.992.000	91,3	124.936.888	95,7	125.784.000	95,7	126.284.000	95,7	126.584.000	95,7	669.580.888	DPUPR
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Persen	51,01003461	55,1386584	34.981.060.557	59,27248046	13.037.257.748	63,42109759	7.170.694.500	67,5530536	7.170.694.500	71,71833185	7.170.694.500	71,72	69.530.401.805	DPUPR
	Program Pengendalian Banjir	Panjang tanggul/ turap yang dibangun di wilayah jalan penghubung dan wilayah aliran sungai rawan longsor dan banjir (m)	Meter	25168	150	630.592.200	450	1.762.664.540	1550	513.592.000	3800	513.592.000	2725	513.592.000	33.843	3.934.032.740	DPUPR
	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih (SR)	SR	5656	7620	3.545.597.174	8020	3.965.393.801	8380	3.982.000.000	8602	3.849.449.412	8827	3.849.449.412	8.827	19.191.889.799	DPUPR

Kode	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK		SKPK Penanggung Jawab
					2018*		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	Persen	70	71	2.187.767.400	76	6.343.049.100	83	-	91	300.000.000	98	320.000.000	98,32	9.150.816.500	DPUPR
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	68	68	2.215.800.000	68	-	68	-	68	-	68	-	67,89	2.215.800.000	DPUPR
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase rumah tangga berakses air minum	Rasio	22,27648681	30,01181568	6.300.926.500	31,58723907	3.173.715.000	33,00512013	1.825.870.000	33,87948011	1.825.870.000	34,76565577	1.825.870.000	34,77	14.952.251.500	DPUPR
	Program pengembangan perumahan	Persentase jumlah rumah layak huni	Persen	0,772193777	0,772272548	155.591.646	0,776211107	276.875.673	0,776289878	167.521.600	0,776408035	247.521.600	0,776526191	247.521.600	0,78	1.095.032.119	DPUPR
	Program pengelolaan areal pemakaman	Peningkatan rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Meter	0,777852594	0,779	558.149.400	0,78	30.000.000	0,781	790.000.000	0,782	68.096.200	0,783	75.096.200	0,783	1.521.341.800	DPUPR
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Panjang jalan kabupaten yang terpelihara (Km)	Km	232,11	247,11	99.372.000	262,11	1.080.000.000	277,11	2.318.984.000	292,11	2.318.984.000	307,11	2.318.984.000	307,11	8.136.324.000	DPUPR
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah sarana/ fasilitas publik yang terbangun	Persen	107	14	1.507.131.800	133	26.983.370.305	0	22.050.000.000	0	22.050.000.000	0	22.050.000.000	254	94.640.502.105	DPUPR
	Program perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan Kualitas Dokumen Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	Dok	0	-	100	792.090.000	0	-	0	-	0	-	100	792.090.000	DPUPR
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Panjang jalan terpasang PJU	Meter	105250	14000	2.401.327.162	8800	2.407.552.911	8800	400.000.000	8800	760.000.000	8800	760.000.000	49.200	6.728.880.073	SETDAKAB (BAGIAN EKONOMI ESDM)
	Program Pemerataan Pelayanan Energi Bagi Masyarakat	Jumlah SR/IR	Rumah	14470	10000	4.081.756.000	9800	4.930.000.000	7500	4.860.000.000	7450	4.860.000.000	7400	4.860.000.000	7400	23.591.756.000	SETDAKAB (BAGIAN EKONOMI ESDM)
	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Kasus Pertanahan yang di tangani	Persen	100	0	-	0	-	0	-	100	275.625.000	100	250.000.000	100,00	525.625.000	DINAS PERTANAHAN
	Program Penataan, Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Penataan, Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persen	100	0	-	0	-	0	-	100	330.750.000	100	300.000.000	100,00	630.750.000	DINAS PERTANAHAN
	Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah	Persentase penyediaan tanah pemerintah	Persen	na	20	42.979.920	20	170.273.892	20	57.126.803	20	50.000.000	20	50.000.000	100	370.380.615	SETDAKAB (BAGIAN TAPEM)
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase layanan angkutan	Persen	50	55	2.436.434.000	60	2.866.772.320	65	120.000.000	70	70.783.286	75	70.783.286	75,00	5.564.772.892	DISHUB
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Presentase Kondisi sara na, prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar	Persen	35	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	41,00	-	DISHUB
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase penurunan angka kasus kecelakaan lalu lintas	Persen	100	0	-	100	540.000.000	0	-	0	-	0	-	76,00	540.000.000	DISHUB
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persen	100	0	-	100	2.511.710.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100,00	2.661.710.000	DISHUB
4.1.2	**Meningkatkan tatakelola kebencanaan**	**Indeks resiko bencana**	**Poin**	**0,69**	**0,65**	**2.037.621.905**	**0,62**	**2.830.479.000**	**0,59**	**3.486.426.000**	**0,56**	**3.513.800.000**	**0,53**	**3.513.800.000**	**0,53**	**15.382.126.905**	
	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah daerah yang mendapat fasilitasi pencegahan dini dan kesiapsiagaan bencana	Lokasi	36	0	-	9	24.000.000	9	50.000.000	9	50.000.000	9	50.000.000	36	174.000.000	BPBK
	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana yang dieavakuasi selama tanggap darurat	Persen	75	75	39.275.000	75	75.750.000	75	41.000.000	75	42.750.000	75	38.750.000	75	237.525.000	BPBK
	Program Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Lokasi Bencana Yang Dapat Di Rehabilitasi dan Di Rekonstruksi Pasca Bencana	Lokasi	6	6	1.492.569.839	0	-	6	20.376.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	1.572.945.839	BPBK
	Program Pemenuhan standar logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Tanggap Darurat	Persen	100	100	274.158.000	100	2.391.897.160	100	175.050.000	100	175.050.000	100	175.050.000	100	3.191.205.160	BPBK

Kode	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK		SKPK Penanggung Jawab
					2018*		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	Persen	100	100	231.619.066	100	338.831.840	100	200.000.000	100	216.000.000	100	220.000.000	100	1.206.450.906	BPBK
	Program Penanggulangan Bencana	Indeks pengurangan risiko bencana	Sedang	135	0	-	0	-	140	3.000.000.000	135	3.000.000.000	137,5	3.000.000.000	135	9.000.000.000	BPBK
4.1.3	**Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Poin**	**61,00**	**86,60**	**5.536.494.335**	**86,60**	**9.302.470.554**	**86,60**	**6.682.356.000**	**86,60**	**6.781.533.659**	**86,60**	**6.521.430.406**	**86,60**	**34.824.284.954**	
	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau	Persen	7	7,6	83.130.000	8,3	2.085.438.268	8,9	474.250.000	9,6	470.000.000	10,2	474.250.000	10,2	3.587.068.268	DLH
	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase volume sampah yang ditangani	Persen	38,35	41	5.009.066.955	45	6.744.175.441	48	4.949.600.000	52	5.036.606.000	55	5.043.606.000	55	26.783.054.396	DLH
	Program pengembangan kinerja pengelolaan Air Limbah	Volume lumpur tinja yang dilah diinstalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)]	M3	NA	0	-	0	-	750	30.000.000	800	30.000.000	850	30.000.000	850	90.000.000	DLH
	Program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persen	100	0	-	0	-	100	1.100.000.000	100	1.034.507.659	100	769.015.318	100	2.903.522.977	DLH
	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Status mutu air dan udara	IKLH	60	62	320.463.000	62	42.000.000	63	44.420.000	64	44.420.000	65	44.420.000	65	495.723.000	DLH
	Pogram Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persentase luas kawasan yang ditangani	Persen	0,05	0,16	118.839.380	0,26	399.717.757	0,37	34.000.000	0,48	114.000.000	0,58	114.000.000	0,58	780.557.137	DLH
	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Ketersedian Akses informasi Sumber Daya Alam	Ada/Tidak	Ada	0	4.995.000	Ada	31.139.088	Ada	35.086.000	Ada	37.000.000	Ada	31.139.088	Ada	139.359.176	DLH
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Persen	0	0	-	-	-	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	45.000.000	SETDAKAB (BAGIAN EKONOMI ESDM)
4.1.4	**Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang**	**Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang**	**Persen**	**25,00**	**35,00**	**529.618.500**	**45,00**	**904.329.000**	**50,00**	**818.914.000**	**75,00**	**774.914.000**	**90,00**	**732.914.000**	**90,00**	**3.760.689.500**	
	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketersedian dokumen perencanaan tata ruang dan turunannya	Dok	0	0	-	0	50.000.000	2	76.800.000	2	76.800.000	2	76.800.000	6	280.400.000	DPUPR
	Program Pemanfaatan Ruang	Tersusunnya Perbub/ Qanun tentang IMB	Dok	0	0	-	0	-	1 Dok	97.750.000	1 Dok	97.750.000	1 Dok	97.750.000	3	293.250.000	DPUPR
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan	Keg	0	0	-	0	-	1	40.000.000	1	40.000.000	1	42.000.000	3	122.000.000	DPUPR
	Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah	Jumlah pengadaan tanah untuk bangunan gedung dan infrastruktur lainnya (Paket)	Paket	18	1	529.618.500	2	854.329.000	1	604.364.000	1	560.364.000	1	516.364.000	24,00	3.065.039.500	DPUPR
MISI 5 : MEWUJUDKAN PENDIDIKAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING																	
5.1	**Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berbudaya**	**Angka Melek Huruf**	**Persen**	**96,90**	**96,990**	**20.593.824.566**	**97,080**	**59.536.063.020**	**97,170**	**47.488.616.427**	**97,260**	**41.842.897.750**	**97,350**	**41.896.897.750**	**97,350**	**200.162.662.647**	
5.1.1	**Terwujudnya pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan**	**Angka Rata-rata Lama Sekolah**	**Angka**	**7,95**	**8,63**	**9.105.622.787**	**8,07**	**47.441.304.664**	**8,13**	**41.028.357.000**	**8,19**	**39.864.897.750**	**8,25**	**39.864.897.750**	**8,25**	**177.305.079.951**	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	78,55	81,55	574.559.905	84,55	4.530.525.192	87,55	7.000.000.000	90,55	7.000.000.000	93,55	7.000.000.000	93,55	26.105.085.097	DISDIK
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka partisipasi Murni (APM): SD/MI/Paket A	Persen	97,67	97,75	7.434.385.450	97,83	27.569.778.800	97,71	22.000.000.000	97,99	22.000.000.000	98,08	22.000.000.000	98,15	101.004.164.250	DISDIK
		Angka partisipasi Murni (APM): SMP/MTs/Paket B		92,29	93,3		94,4		95,5		96,6		97,7		97,7		0
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi Klasifikasi S1/ D4	Persen	85,12	0	-	75,12	70.000.000	80,12	5.630.000.000	85,12	5.650.000.000	90,12	5.650.000.000	90,12	17.000.000.000	DISDIK
	Program Pengembangan Sikap, Minat, Bakat dan Prestasi Siswa	Persentase Jumlah Siswa yang berprestasi dalam seni dan olahraga	Persen	30	0	-	40	180.000.000	45	2.300.000.000	50	2.300.000.000	55	2.300.000.000	225	7.080.000.000	DISDIK
	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf	Persen	96,90	96,99	25.606.000	97,08	2.831.225.912	97,17	1.100.000.000	97,26	1.100.000.000	97,35	1.100.000.000	486	6.156.831.912	DISDIK

Kode	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK		SKPK Penanggung Jawab
					2018*		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
	Program Falisitasi Biaya Siswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	Angka	100	100	838.546.000	100	452.500.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	3.091.046.000	DISDIK
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	Angka	98,39	98,45		98,51		98,57		98,63		98,69		98,69		0
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Guru yang memiliki kompetensi	Persen	86,80	100	175.410.432	100	155.664.000	100	160.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	100	811.074.432	DISDIK
	Program pengunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS)	Presentase pemenuhan Operasional Sekolah	Persen	100	0	-	100	10.672.000.000	0	-	0	-	0	-	0	10.672.000.000	0
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Presentase pengembangan minat dan budaya baca	Persen	65,12	0	-	0	-	80,12	1.115.000.000	85,12	500.000.000	90,12	500.000.000	90,12	2.115.000.000	DISDIK
	Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah	Persentase Guru yang memiliki kompetensi	Persen	86,80	0	-	100	909.280.000	100	1.070.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.979.280.000	DISDIK
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Pengawasan terhadap kebijakan dan program-program pendidikan yang diterapkan	Persen	70	70	57.115.000	80	50.330.760	90	53.357.000	95	54.897.750	100	54.897.750	100	270.598.260	SEKRETARIAT MPD
	Program Partisipasi Masyarakat	Persentase Forum Komite Sekolah	Persen	70	0	-	70	20.000.000	0	-	0	-	0	-	100	20.000.000	SEKRETARIAT MPD
5.1.2	**Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, nilai-nilai tradisi bagi pengembangan budaya daerah**	**Penyelamatan Seni Budaya Tradisional dan Pengembangan Seni Kreatif**	**Persen**	**53,33**	**62,00**	**11.488.201.779**	**66,60**	**12.094.758.356**	**73,33**	**6.460.259.427**	**80,00**	**1.978.000.000**	**86,67**	**2.032.000.000**	**86,67**	**22.857.582.696**	
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Nilai-Nilai Budaya	Persen	100	0	-	100	190.181.800	100	380.000.000	100	380.000.000	100	380.000.000	100	1.330.181.800	DISDIK
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Karya budaya yang di Revitalisasi dan diinventarisasi	Persen	11,11	11,11	49.354.913	33,33	719.600.000	55,56	2.368.009.427	77,78	200.000.000	88,89	200.000.000	88,89	3.536.964.340	DISDIK
	Program pengunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS)	Presentase pemenuhan Operasional Sekolah	Persen	100,00	100,00	11.195.636.866	100,00	10.734.930.556	-	-	-	-	-	-	-	10.734.930.556	DISDIK
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Persen	85,37	85,37	50.710.000	87,80	321.046.000	92,68	3.074.250.000	95,12	700.000.000	97,56	800.000.000	97,56	4.946.006.000	DISDIK
	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan	Persen	78,05	0	-	0	-	88	500.000.000	93	500.000.000	95	500.000.000	95,12	1.500.000.000	DISDIK
	Program Pembinaan Hukum Adat	Persentase Hukum Adat yang Terselesaikan	Persen	20,93	20,93	142.500.000	23,26	66.000.000	24,42	18.000.000	25,78	78.000.000	26,74	72.000.000	26,74	376.500.000	SEKRETARIAT MAA
	Program Pelestarian Adat dan istiadat	Persentase Pelestarian Adat	Persen	16,67	0	-	41,67	63.000.000	50	40.000.000	66,67	40.000.000	0	-	0,00	143.000.000	SEKRETARIAT MAA
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Penerapan budaya keacehan dalam kehidupan bermasyarakat	Persen	37,56	0	-	0	-	40,34	80.000.000	75,6	80.000.000	82,33	80.000.000	82,33	240.000.000	SEKRETARIAT MAA
	Program Pusaka/Pembinaan Khasanah Adat	Persentase Pembinaan Khasanah Adat	Persen	100	100	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	100,00	50.000.000	SEKRETARIAT MAA
MISI 6 : MENINGKATKAN KEHIDUPAN SOSIAL, SERTA PERAN PEMUDA DAN OLAHRAGA																	
6.1	**Meningkatkan aksebilitas dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial**	**PMKS yang ditangani**	**Persen**	**50,00**	**60,00**	**8.563.098.989**	**65,00**	**12.555.050.000**	**70,00**	**16.742.613.559**	**75,00**	**16.751.072.988**	**80,00**	**14.543.482.206**	**80,00**	**69.155.317.741**	
6.1.1	**Menurunnya Jumlah PMKS Melalui Pemberdayaan PMKS Usia Produktif Dalam Kelompok-Kelompok Usaha Ekonomi Produktif**	**Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi lainnya**	**Persen**	**13,93**	**18,70**	**2.465.582.687**	**20,41**	**4.403.608.000**	**26,67**	**4.759.613.559**	**32,93**	**5.145.057.399**	**39,19**	**5.485.152.665**	**39,19**	**22.259.014.309**	
	Program pemberdayaan Fakir miskin, komoditas adat terpencil dan penyandang masalah kesejateraan sosial (PMKS) lainnya	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui UEP dan bansos	PMKS	2640	14,14331194	1.159.808.000	20,40603309	1.416.500.000	26,66875424	1.457.036.160	32,93147539	1.850.000.000	39,19419655	2.182.575.266	39,19	8.065.919.426	DINSOS

Kode	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK		SKPK Penanggung Jawab
					2018*		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemenuhan operasional Kelembagaan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	Persen	47	100	305.323.000	100	412.720.000	100	312.720.000	100	305.200.000	100	312.720.000	100,00	1.648.683.000	DINSOS
	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial	PMKS	9625	50,34705913	136.514.660	51,49522468	2.065.732.000	52,64339022	2.289.857.399	53,79155576	2.289.857.399	54,93972131	2.289.857.399	54,94	9.071.818.856	DINSOS
	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	3,2	3,73	188.178.400	0	-	4,770105944	100.000.000	5,291999374	100.000.000	5,813892803	100.000.000	5,81	488.178.400	DINSOS
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Panti jompo	Persen	75	100	675.758.627	100	508.656.000	0	-	0	-	0	-	100,00	1.184.414.627	DINSOS
	Program Pembinaan LPKS	Persentase Anak berhadapan dengan Hukum yang dibina dalam LPKS (Lembaga pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Persen	75	0	-	0	-	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100,00	1.800.000.000	DINSOS
6.1.2	**Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak**	**Indeks Pembangunan gender (IPG)**	**Poin**	**88,08**	**89,00**	**3.704.206.576**	**88,48**	**5.009.142.000**	**88,68**	**5.483.000.000**	**88,88**	**5.535.846.500**	**89,08**	**5.608.049.225**	**89,28**	**25.340.244.301**	
	Program Penigkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase Keikutsertaan Perempuan dalam Pembangunan	Persen	100	100	528.242.000	100	125.000.000	100	340.000.000	100	670.000.000	100	670.000.000	100,00	2.333.242.000	DPMPKB
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rasio KDRT	Persen	35	30	99.500.000	25	240.000.000	20	280.000.000	15	275.000.000	10	275.000.000	100,00	1.169.500.000	DPMPKB
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pengaduan terpadu	Persen	70	75	31.780.000	80	209.550.000	80	30.000.000	85	30.000.000	85	30.000.000	85,00	331.330.000	DPMPKB
	Program Keluarga Berencana	Cakupan PKB / PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	100	100	3.044.684.576	100	4.344.592.000	100	4.730.000.000	100	4.457.846.500	100	4.530.049.225	500	21.107.172.301	DPMPKB
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja	Persen	53	0	-	64	90.000.000	68	103.000.000	72	103.000.000	76	103.000.000	76	399.000.000	DPMPKB
6.1.3	**Meningkatnya daya saing olahraga**	**Jumlah cabang olahraga yang berprestasi**	**Jumlah**	**P : 12 N : 3**	**P : 2 N : 0**	**2.393.309.726**	**P : 13 N : 4**	**3.142.300.000**	**P : 14 N : 5**	**6.500.000.000**	**P : 15 N : 6**	**6.070.169.089**	**P : 16 N : 7**	**3.450.280.316**	**P : 16 N : 7**	**21.556.059.131**	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Cakupan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persen	35	40	1.300.280.316	55	1.862.000.000	65	3.850.000.000	75	2.920.169.089	85	1.300.280.316	90,00	11.232.729.721	DISPORA
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	Persen	15	0	-	0	-	45	200.000.000	55	200.000.000	65	200.000.000	75,00	600.000.000	DISPORA
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	25	2	598.950.000	15	795.300.000	25	1.200.000.000	35	1.200.000.000	45	1.200.000.000	70	4.994.250.000	DISPORA
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase partisipasi Kepemudaan dalam Pembangunan	Persen	100	100	494.079.410	100	485.000.000	100	615.000.000	100	615.000.000	100	615.000.000	100	2.824.079.410	DISPORA
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase Kewirausahaan dan Kepeloporan Kepemudaan dalam Pembangunan	Persen	100	0	-	0	-	100	135.000.000	100	135.000.000	100	135.000.000	100	405.000.000	DISPORA

Kode	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK		SKPK Penanggung Jawab
					2018*		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
	Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah	Jumlah pengadaan tanah untuk bangunan gedung dan infrastruktur lainnya (Paket)	Paket	0	0	-	0	-	1	500.000.000	1	1.000.000.000	0	-	2	1.500.000.000	DISPORA
MISI 7 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK																	
7.1	**Meningkatkan pemerintahan yang demokratis, transparan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, pengganggaran dan pelaksanaan pembangunan**	**Nilai SAKIP**	**Poin**	**54,72**	**58,24**	**17.396.677.164**	**62,00**	**22.332.251.618**	**66,00**	**20.160.541.935**	**69,52**	**20.264.328.844**	**74,00**	**21.415.702.162**	**74,00**	**101.073.301.723**	
7.1.1	**Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Poin**	**70,00**	**73,00**	**10.644.816.550**	**73,00**	**14.049.614.618**	**75,00**	**12.679.504.935**	**77,00**	**12.189.518.844**	**78,00**	**13.230.603.162**	**78,00**	**62.794.058.109**	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Persen	na	100	516.636.500	100	858.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	2.724.636.500	SETDAKAB (BAGIAN HUMAS)
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Lancarnya pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persen	100	100	306.172.000	100	328.000.000	100	367.000.000	100	363.000.000	100	363.000.000	100	1.727.172.000	SETDAKAB (BAGIAN HUMAS DAN TAPEM)
	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen	80	70	191.257.000	75	343.500.000	80	239.500.000	85	239.500.000	90	239.500.000	100	1.253.257.000	SETDAKAB (BAGIAN KESRA)
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Persen	100	100	263.217.000	100	535.956.000	100	470.000.000	100	470.000.000	100	470.000.000	100	2.209.173.000	SETDAKAB (BAGIAN ADPEM DAN ESDM)
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persen	100	100	321.223.000	100	337.000.000	100	314.000.000	100	314.000.000	100	314.000.000	100	1.600.223.000	SETDAKAB (BAGIAN HUKUM)
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase sumber daya aparatur yang memahami aturan hukum	Persen	na	20	46.060.000	20	50.000.000	20	55.000.000	20	55.000.000	20	55.000.000	100	261.060.000	SETDAKAB (BAGIAN HUKUM)
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelayanan pembangunan daerah	Persen	na	100	131.854.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	611.854.000	SETDAKAB (BAGIAN TAPEM)
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Persen	100	100	34.987.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	174.987.000	SETDAKAB (BAGIAN ORGANISASI)
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Produk hukum pemerintah kabupaten yang sesuai peraturan perundang-undangan	Dokumen	na	42	161.465.000	40	254.500.000	40	250.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000	202	1.165.965.000	SETDAKAB (BAGIAN HUKUM)
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Pelaporan Mutu dan Kinerja Pembangunan Daerah	Persen	100	100	40.040.000	100	41.650.000	100	115.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	100	426.690.000	SETDAKAB (BAGIAN TAPEM)
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase pendidikan politik masyarakat	Persen	100	0	-	100	100.000.000	0	-	0	-	100	85.000.000	100	185.000.000	SETDAKAB (BAGIAN TAPEM)
	Program Pengendalian Mutu dan Kinerja Pembangunan Daerah	Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang baik	Persen	100	100	479.748.750	100	511.400.000	100	470.000.000	100	470.000.000	100	470.000.000	100	2.401.148.750	SETDAKAB (BAGIAN BPBJ DAN TAPEM)
	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Penataan Organisasi Perangkat sesuai dengan regulasi	Persen	100	100	199.281.000	100	168.800.000	100	158.800.000	100	158.800.000	100	158.800.000	100	844.481.000	SETDAKAB (BAGIAN ORGANISASI)
	Program Pengembangan Syiar Islam	Persentase Terlaksananya Hari-hari Besar Islam	Persen	100	100	446.600.000	100	640.478.468	100	510.000.000	100	492.150.000	100	492.150.000	100	2.581.378.468	SETDAKAB (BAGIAN KESRA)
	Program Pembinaaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase meningkatnya pengembangan kapasitas aparatur	Persen	na	100	142.000.000	100	155.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	717.000.000	SETDAKAB (BAGIAN KESRA)
	Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah	Persentase penyediaan tanah pemerintah	Persen	na	20	42.979.920	20	170.273.892	20	57.126.803	20	50.000.000	20	50.000.000	100	370.380.615	SETDAKAB (BAGIAN TAPEM DAN ORGANISASI)

Kode	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK		SKPK Penanggung Jawab
					2018*		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase Purna Tugas Yang Difasilitasi	Persen	100	100	22.921.500	100	510.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	375.000.000	100	957.921.500	SEKRETARIAT DPRK
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRK	Persen	100	100	1.177.590.000	100	1.395.314.000	100	1.578.000.000	100	1.578.000.000	100	1.578.000.000	100	7.306.904.000	SEKRETARIAT DPRK
	Program Pemilihan Umum	Persentase Kegiatan Penjaringan Panwaslih dan KIP	Persen	100	100	171.597.900	0	-	0	-	0	-	0	-	100	171.597.900	SEKRETARIAT DPRK
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pribadi	Persen	60	65	963.359.091	70	1.411.919.000	75	663.419.000	80	663.419.000	85	663.419.000	85	4.365.535.091	DISDUKCAPIL
	Program Pengembangan data/informasi/ statistik daerah	Ketersediaan data statistik sektoral	Ada/Tidak	Ada	0	-	Ada	58.192.000	Ada	58.192.000	Ada	58.192.000	Ada	58.192.000	Ada	232.768.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah	Ketersediaan dokumen informasi yang diamankan	Ada/Tidak	n/a	0	-	Ada	100.000.000	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip Daerah	Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	11,36	11,36	99.464.000	22,73	73.818.128	34,09	7.451.392	45,45	8.991.392	56,82	8.000.014	56,82	197.724.926	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Tersedianya sistem aplikasi administrasi kearsipan	Ada/Tidak	tidak	ada	38.800.000	0	-	ada	28.000.000	ada	28.000.000	ada	30.000.000	ada	124.800.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	100	0	-	0	-	100	28.000.000	100	30.000.000	100	26.843.290	100,00	84.843.290	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	Program Pengembangan Budaya Membaca Masyarakat dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengembangan Budaya Membaca Masyarakat dan Pembinaan Perpustakaan	Persen	NA	0	-	0	-	75	250.000.000	75	250.000.000	75	250.000.000	75,00	750.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	Program pengembangan budaya baca dan pengembangan perpustakaan	Pengunjung perpustakaan pertahun	Org	1020	1122	128.581.000	1324	76.110.176	0	-	0	-	0	-	1324,00	204.691.176	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	n/a	80	165.371.850	0	0	80	300.000.000	85	300.000.000	90	300.000.000	90	1.065.371.850	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	Program Pengembangan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	Ketersediaan dokumen informasi yang diamankan	Ada/Tidak	Ada	-	-	-	-	Ada	25.770.000	Ada	37.736.000	Ada	38.814.000	Ada	102.320.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	n/a	0	0	0	0	80	19.480.000	85	53.500.000	90	45.980.000	90	118.960.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Poin	n/a	0	0	0	0	1,8	40.000.000	2,2	40.000.000	2,6	40.000.000	2,6	120.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pembinaan dan pengembangan ASN	Persen	100	100	1.158.085.412	100	1.271.000.000	100	1.174.500.000	100	938.000.000	100	938.000.000	100	5.479.585.412	BKPSDM
	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Terlaksananya Program pendidikan dan pelatihan Aparatur ASN yang berkembang dan terlatih	Persen	100	0	-	0	-	0	-	100	100.000.000	100	150.000.000	100	250.000.000	BKPSDM
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100	100	242.425.170	100	579.920.800	100	115.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	100	1.167.345.970	BKPSDM

Kode	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK		SKPK Penanggung Jawab
					2018*		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Jumlah Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Persen	100	100	183.000.000	100	241.266.376	100	216.457.740	100	216.457.740	100	235.853.514	100	1.093.035.370	SEKRETARIAT KORPRI
	Program Pengembangan Syiar Islam	Pelaksanaan MTQ	Kgt	2	0	-	2	45.000.000	0	-	0	-	0	-	2	45.000.000	SEKRETARIAT KORPRI
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Musrenbang kecamatan	Persen	100	100	71.500.000	100	71.500.000	100	64.000.000	100	64.000.000	100	64.000.000	100	335.000.000	KECAMATAN JAYA
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persen	100	0	-	0	-	0	-	33.33	10.000.000	33.33	10.000.000	100	20.000.000	KECAMATAN JAYA
	Program Pengembangan Syiar Islam	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Syiár Islam	Persen	100	100	57.610.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	97.610.000	KECAMATAN JAYA
	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase pengembangan data base kecamatan	Persen	100	100	4.000.000	100	4.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	23.000.000	KECAMATAN JAYA
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terlaksananya rapat koordinasi lintas vertikal di tingkat kecamatan	Persen	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.500.000	100	10.500.000	100	10.500.000	100	51.500.000	KECAMATAN JAYA
	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Cakupan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kecamatan	Persen	100	100	4.300.000	100	5.000.000	100	5.500.000	100	5.500.000	100	5.500.000	100	25.800.000	KECAMATAN JAYA
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa	Persentase Pelayanan Adinistrasi Gampong	Persen	100	0	-	0	-	33.33	32.000.000	33.33	40.000.000	33.33	40.000.000	100	112.000.000	KECAMATAN JAYA
	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al Quran	Angka Melek Al-Quran	Persen	0	0	-	0	-	85	60.000.000	0	-	90	60.000.000	100	120.000.000	KECAMATAN JAYA
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Persen	100	100	64.654.000	100	71.164.000	100	71.164.000	100	71.664.000	100	72.664.000	100	351.310.000	KECAMATAN INDRA JAYA
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Peningkatan kemanan dan Kenyaman lingkungan	Persen	0	0	-	0	-	0	-	100	10.000.000	100	10.000.000	100	20.000.000	KECAMATAN INDRA JAYA
	Program Pengembangan Syiar Islam	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Syiár Islam	Persen	0	100	60.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	11.000.000	100	10.000.000	100	101.000.000	KECAMATAN INDRA JAYA
	Program Pengembangan Data/Informasi	Pengembangan database kecamatan	Persen	100	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	25.000.000	KECAMATAN INDRA JAYA
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi lintas vertikal tingkat kecamatan	Persen	100	100	7.554.600	100	8.000.000	100	8.000.000	100	8.000.000	100	8.000.000	100	39.554.600	KECAMATAN INDRA JAYA
	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Cakupan pelayanan perizinan dan non perizinan di kecamatan	Persen	100	100	3.175.000	100	3.175.000	100	3.175.000	100	3.175.000	100	3.175.000	100	15.875.000	KECAMATAN INDRA JAYA
	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al Quran	Angka Melek Al-Quran	Persen	0	0	-	0	-	85	60.000.000	0	-	90	61.000.000	100	121.000.000	KECAMATAN INDRA JAYA
	Program Penigkatan Pelayanan Pemerintahan Desa	Persentase Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	0	0	-	0	-	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	120.000.000	KECAMATAN INDRA JAYA
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksa nanya perencanaan pemba ngunan daerah sesuai kebutuhan daerah	Persen	100	100	86.500.000	100	85.000.000	100	78.000.000	100	78.000.000	100	78.000.000	100	405.500.000	KECAMATAN SAMPOINIET
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persen	0	0	-	0	-	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	40	30.000.000	KECAMATAN SAMPOINIET
	Program Pengembangan Syiar Islam	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Syiár Islam	Persen	100	100	60.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	100.000.000	KECAMATAN SAMPOINIET
	Program Pengembangan Data/Informasi	Capaian program pembangunan data base kecamatan	Persen	100	100	4.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	24.000.000	KECAMATAN SAMPOINIET
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi lintas vertikal tingkat kecamatan	Persen	100	100	8.000.000	100	8.000.000	100	8.000.000	100	8.000.000	100	8.000.000	100	40.000.000	KECAMATAN SAMPOINIET

Kode	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK		SKPK Penanggung Jawab
					2018*		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Cakupan pelayanan perizinan dan non perizinan	Persen	100	100	10.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000	100	54.000.000	KECAMATAN SAMPOINIET
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa	Persentase pelayanan adminitrasi pemerintahan Desa	Persen	100	0	-	0	-	33,33	40.000.000	33,33	40.000.000	33,33	40.000.000	67	120.000.000	KECAMATAN SAMPOINIET
	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al Quran	Angka Melek Al-quran	Persen	100	0	-	0	-	85	60.000.000	0	-	90	60.000.000	100	120.000.000	KECAMATAN SAMPOINIET
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	pelaksanaan musrenbang kecamatan	Persen	-	100	76.498.000	100	56.500.000	100	65.000.000	100	73.558.544	100	73.558.544	100	345.115.088	KECAMATAN DARUL HIKMAH
	Program Penigkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase keamanan lingkungan	Persen	100	0	-	0	-	0	-	100	10.000.000	100	10.000.000	100	20.000.000	KECAMATAN DARUL HIKMAH
	Program Pengembangan Syiar Islam	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Syiàr Islam	Persen	0	100	64.770.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	104.770.000	KECAMATAN DARUL HIKMAH
	Program Pengembangan data dan informasi	Tersedianya dokumen data/informasi pembangunan kecamatan	Persen	100	100	4.000.000	100	4.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	23.000.000	KECAMATAN DARUL HIKMAH
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi lintas vertikal di tingkat kecamatan	Persen	-	100	8.000.000	100	8.000.000	100	8.000.000	100	8.000.000	100	8.000.000	100	40.000.000	KECAMATAN DARUL HIKMAH
	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Cakupan pelayanan perizinan dan non perizinan di kecamatan	Persen	-	100	10.000.000	100	4.300.000	100	4.000.000	100	4.300.000	100	4.300.000	100	26.900.000	KECAMATAN DARUL HIKMAH
	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al Quran	Angka Melek Alqur'an	Persen	100	0	-	0	-	85	110.000.000	100	50.000.000	90	110.000.000	100	270.000.000	KECAMATAN DARUL HIKMAH
	Program Penigkatan Pelayanan Pemerintahan Desa	Persentase Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	100	0	-	0	-	100	35.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	115.000.000	KECAMATAN DARUL HIKMAH
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Musrenbang kecamatan	Persen	100	20	76.352.600	20	75.762.000	20	76.000.000	20	76.000.000	20	76.000.000	100	380.114.600	KECAMATAN SETIA BAKTI
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persen	0	0	-	0	-	0	-	25	12.100.000	25	13.310.000	100	25.410.000	KECAMATAN SETIA BAKTI
	Program Pengembangan Syiar Islam	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Syiàr Islam	Persen	100	20	85.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	12.100.000	20	10.000.000	100	127.100.000	KECAMATAN SETIA BAKTI
	Program Pengembangan Data dan Informasi	Pengembangan data base kecamatan	Persen	80	80	5.000.000	80	5.000.000	80	5.000.000	80	6.050.000	80	6.655.000	5	27.705.000	KECAMATAN SETIA BAKTI
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi lintas vertikal di tingkat kecamatan	Persen	100	20	8.000.000	20	8.000.000	20	8.800.000	20	9.680.000	20	9.768.000	100	44.248.000	KECAMATAN SETIA BAKTI
	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Cakupan pelayanan perizinan dan non perizinan di kecamatan	Persen	100	20	3.020.000	20	3.020.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	100	36.040.000	KECAMATAN SETIA BAKTI
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa	Persentase Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	100	0	-	0	-	20	40.000.000	20	38.412.000	20	42.253.200	60	120.665.200	KECAMATAN SETIA BAKTI
	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alqur'an	Angka Melek Alqur'an	Persen	100	0	0	0	0	85	65.000.000	0	-	90	88.310.000	95	153.310.000	KECAMATAN SETIA BAKTI
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksa nanya perencanaan pemba ngunan daerah sesuai kebutuhan daerah	Persen	-	20	86.500.000	20	86.500.000	20	86.500.000	20	86.500.000	20	86.500.000	100	432.500.000	KECAMATAN KRUENG SABEE
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persen	100	0	-	0	-	0	-	100	10.000.000	100	10.000.000	100	20.000.000	KECAMATAN KRUENG SABEE
	Program Pengembangan Syiar Islam	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Syiàr Islam	Persen	-	20	70.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	40	110.000.000	KECAMATAN KRUENG SABEE
	Program Pengembangan Data/Informasi	Capaian program pembangunan data base kecamatan	Persen	20	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	100	25.000.000	KECAMATAN KRUENG SABEE

Kode	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK		SKPK Penanggung Jawab
					2018*		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi lintas vertikal tingkat kecamatan	Persen	0	20	8.000.000	20	8.000.000	20	8.000.000	20	8.000.000	20	8.000.000	100	40.000.000	KECAMATAN KRUENG SABEE
	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Cakupan pelayanan perizinan dan non perizinan	Persen	-	20	10.000.000	20	17.860.184	20	15.000.000	20	17.860.184	20	17.860.184	100	78.580.552	KECAMATAN KRUENG SABEE
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa	Persentase pelayanan adminitrasi pemerintahan desa	Persen	100	0	-	0	-	33,33	35.000.000	33,33	40.000.000	33,33	40.000.000	100	115.000.000	KECAMATAN KRUENG SABEE
	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al Quran	Angka Melek Al-quran	Persen	-	0	-	0	-	85	60.000.000	0	-	90	60.000.000	60	120.000.000	KECAMATAN KRUENG SABEE
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	97	23	95.000.000	19	80.000.000	19	78.000.000	19	80.000.000	21	86.000.000	100	419.000.000	KECAMATAN PANGA
	Program Pengembangan Syiar Islam	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Syiár Islam	Persen	100	100	65.500.000	100	8.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	103.500.000	KECAMATAN PANGA
	Program Pengembangan Data/Informasi	Penyusunan Data BasePembangunan Kecamatan	Persen	5	80	4.500.000	80	5.000.000	80	5.000.000	80	5.000.000	80	5.000.000	5	24.500.000	KECAMATAN PANGA
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya program Rakor Lintas Vertikal	Persen	97	2	8.000.000	2	8.400.000	2	9.000.000	2	9.000.000	2	9.000.000	100	43.400.000	KECAMATAN PANGA
	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	cukupan pelayanan perizinan dan non perizinan	Persen	100	20	10.000.000	20	10.500.000	20	8.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	48.500.000	KECAMATAN PANGA
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa	Persentase Pelayanan administrasi pemerintahan desa	Gampong	100	0	-	0	-	20	35.000.000	20	40.000.000	20	40.000.000	100	115.000.000	KECAMATAN PANGA
	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al Quran	Angka Melek Alqur'an	Persen	100	0	-	0	-	85	60.000.000	0	-	90	60.000.000	60	120.000.000	KECAMATAN PANGA
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kgt	2	2	87.000.000	2	87.000.000	2	87.000.000	2	91.350.000	2	92.740.000	10	445.090.000	KECAMATAN TEUNOM
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kgt	0	0	-	0	-	1	5.500.000	1	10.000.000	1	4.500.000	4	20.000.000	KECAMATAN TEUNOM
	Program Pengembangan Syiar Islam	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Syiár Islam	Kgt	2	2	59.450.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	11.050.000	2	10.000.000	2	100.500.000	KECAMATAN TEUNOM
	Program Pengembangan Data/Informasi	Pengembangan data base kecamatan	Persen	80	80	5.000.000	80	5.000.000	80	5.000.000	80	5.000.000	80	5.000.000	5	25.000.000	KECAMATAN TEUNOM
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi lintas vertikal ditingkat kecamatan	Kgt	1	1	4.210.000	0	-	0	-	1	8.000.000	1	8.000.000	1	20.210.000	KECAMATAN TEUNOM
	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Cakupan pelayanan perizinan dan non perizinan di kecamatan	Kgt	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.150.000	1	11.550.000	1	53.200.000	KECAMATAN TEUNOM
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa	Persentase Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa	Gmpng	100	0	-	0	-	22	35.000.000	22	40.000.000	22	40.000.000	22	115.000.000	KECAMATAN TEUNOM
	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al Quran	Angka Melek Al Qur'an	Persen	2	0	-	0	-	85	60.500.000	0	-	90	61.500.000	1	122.000.000	KECAMATAN TEUNOM
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksa nanya perencanaan pemba ngunan daerah sesuai kebutuhan daerah	Persen	-	20	78.500.000	20	66.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	20	60.000.000	100	324.500.000	KECAMATAN PASIE RAYA
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persen	-	0	-	0	-	20	10.000.000	20	11.000.000	20	11.000.000	80	32.000.000	KECAMATAN PASIE RAYA
	Program Pengembangan Syiar Islam	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Syiár Islam	Kgt	2	2	60.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	100.000.000	KECAMATAN PASIE RAYA

Kode	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK		SKPK Penanggung Jawab
					2018*		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
	Program Pengembangan Data/Informasi	Capaian program pembangunan data base kecamatan	Persen	-	20	5.000.000	20	5.250.000	20	5.250.000	20	5.250.000	20	5.250.000	20	26.000.000	KECAMATAN PASIE RAYA
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	terlaksananya rapat koordinasi lintas vertikal tingkat kecamatan	Persen	-	20	8.000.000	20	10.000.000	20	6.000.000	20	6.000.000	20	6.000.000	20	36.000.000	KECAMATAN PASIE RAYA
	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Cakupan pelayanan perizinan dan non perizinan	Persen	-	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	12.000.000	20	12.000.000	100	54.000.000	KECAMATAN PASIE RAYA
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa	persentase pelayanan adminitrasi pemerintahan desa	Persen	0	0	-	0	-	33,33	35.000.000	33,33	35.000.000	33,33	35.000.000	67	105.000.000	KECAMATAN PASIE RAYA
	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al Quran	Angka Melek Al-quran	Persen	-	0	-	0	-	85	60.000.000	0	-	90	60.000.000	100	120.000.000	KECAMATAN PASIE RAYA
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	n/a	70	283.505.741	75	181.410.000	80	160.000.000	85	160.000.000	90	160.000.000	85	944.915.741	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	Program Kerjasama Informasi dengan mass media	Ketersedian informasi dan ketersedian media informasi yang di gunakan	Ada/Tidak	n/a	0	0	Ada	162.880.000	0	0	0	0	0	0	Ada	162.880.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Kontribusi BUMG terhadap Pendapatan Asli Gampong	Persen	1	0	-	11	85.450.000	12	40.000.000	14	110.000.000	15	40.000.000	62	275.450.000	DPMPKB
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Persen	10	20	306.053.766	25	91.957.006	27	663.419.000	30	663.419.000	50	663.419.000	50	2.388.267.772	DPMPKB
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase aparatur gampong yang terlatih	Persen	100	0	-	100	35.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	185.000.000	DPMPKB
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa	Persentase Pelayanan Adinistrasi Gampong	Persen	80	0	-	100	200.000.000	100	245.000.000	100	110.000.216	100	110.000.648	100	665.000.864	DPMPKB
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase keterlibatan perempuan di lembaga pemerintahan gampong	Persen	100	15	80.807.500	17	130.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	17	375.807.500	DPMPKB
	Program Penunjang Reintegrasi Masyarakat	Persetase Kerjasama Antar Gampong	Persen	77	0	-	100	50.000.000	0	-	0	-	0	-	100	50.000.000	DPMPKB
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Peningkatan Kebedayaan Masyarakat Perdesaan	Persen	85	56	315.385.750	64	235.000.000	68	562.000.000	72	562.000.000	76	562.000.000	76	2.236.385.750	DPMPKB
	Program pengembangan nilai budaya	Persentase Pelestariaan Adat	Persen	-	-	-	-	-	95	20.000.000	98	30.000.000	100	40.000.000	95	90.000.000	DPMPKB
	Program peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Operasional Petugas Penertiban	Persen	100	100	24.980.000	100	25.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	139.980.000	SATPOL PP DAN WH
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	82	91	118.600.500	92	406.375.420	93	170.000.000	94	170.000.000	95	170.000.000	95	1.034.975.920	SATPOL PP DAN WH
	Program Pengawasan Pelaksanaan Syariat	Presentase Program Pengawasan Pelaksanaan Syariat	Persen	100,00	100	25.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	100	25.000.000	
	Program Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Jumlah Masyarakat Per Kecamatan Yang Memperoleh Pendidikan/Pembinaan/Sosialisasi /Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	0	-	0	-	0	-	100	261.780.500	100	261.780.500	500	523.561.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Program Pembarantasan Penyakit Masyarakat P4GN	Persentase Pemberantasan Penyakit P4GN	Persen	100	0	-	0	-	100	240.000.000	100	27.240.768	100	13.000.268	100	280.241.036	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK		SKPK Penanggung Jawab
					2018*		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
	Program Kerjasama Bidang Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat	Persentase Konflik yang Tertangani di Lingkungan Masyarakat	Persen	100	100	84.770.000	100	282.000.000	100	221.000.000	100	207.975.000	100	122.775.000	100	918.520.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Program Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik	Persentase Jumlah Lembaga Parpol yang Terdaftar dalam Pemilu dan Pemilukada	Persen	20,4	20,4	25.088.000	23,01	30.000.000	80	30.000.000	0	-	0	-	23,01	85.088.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Jumlah Masyarakat Per Kecamatan Yang Memperoleh Pendidikan/Pembinaan/Sosialisasi /Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	100	63.135.000	100	75.450.000	0	-	0	-	0	-	100,00	138.585.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Program Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya	Persentase Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya	Persen	10000%	0%	-	0%	-	10000%	20.000.000	10000%	28.607.500	10000%	28.607.000	100,00	77.214.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Program Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik	Persentase Jumlah Lembaga Parpol yang Terdaftar dalam Pemilu dan Pemilukada	Persen	100	100	41.830.000	0	-	0	-	100	60.550.000	100	109.575.000	100,00	211.955.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Program Pemilihan Umum	Terlaksananya Pemilihan Umum	Persen	100	100	81.849.000	100	443.062.168	0	-	100	-	100	80.000.000	100,00	604.911.168	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Program peningkatan pemberantasan penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase Pemberantasan Penyakit P4GN	Persen	100	100	32.500.000	100	250.000.000	0	-	0	-	0	-	100,00	282.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Program Pembinaan Organisasi Partai Politik	Persentase Jumlah Lembaga Parpol yang Terdaftar dalam Pemilu dan Pemilukada	Persen	100	0	-	0	-	0	-	100	30.000.000	100	30.000.000	100,00	60.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7.1.2	**Meningkatnya akuntabilitas keuangan**	**Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah**	**Opini**	**WTP**	**WTP**	**1.572.813.135**	**WTP**	**2.926.103.000**	**WTP**	**2.591.452.000**	**WTP**	**2.593.960.000**	**WTP**	**2.592.249.000**	**WTP**	**11.780.377.135**	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	opini	WTP	WTP	1.451.009.735	WTP	2.564.651.000	WTP	2.120.000.000	WTP	2.120.000.000	WTP	2.120.000.000	WTP	10.375.660.735	BPKK
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase laporan keuangan desa yang sesuai standar	Persen	100	100	94.750.000	0	-	100	80.000.000	100	88.642.000	100	88.943.000	100,00	352.335.000	BPKK
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase peningkatan realisasi administrasi keuangan	Persen	100	100	27.053.400	100	60.000.000	100	64.600.000	100	58.466.000	100	56.454.000	100,00	266.573.400	BPKK
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase terlaksananya keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah	Persen	100	0	-	100	301.452.000	100	161.452.000	100	161.452.000	100	161.452.000	100,00	785.808.000	BPKK
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Tersediannya Sistem Aplikasi administrasi Kearsipan	Ada/Tidak Ada	Tidak	Tidak	0	Tidak	0	Ada	165.400.000	Ada	165.400.000	Ada	165.400.000	Ada	496.200.000	BPKK
7.1.3	**Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan lintas sektor dan wilayah**	**Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan**	**Persen**	**80,00**	**100,00**	**3.748.854.369**	**100,00**	**4.167.534.000**	**100,00**	**3.544.585.000**	**100,00**	**4.335.850.000**	**100,00**	**4.447.850.000**	**100,00**	**20.244.673.369**	
	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	Persen	60	80	386.190.000	80	425.657.000	100	191.675.000	100	797.000.000	100	519.000.000	100,00	2.319.522.000	BAPPEDA
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tahapan Proses Perencanaan tepat waktu	Persen	100	100	2.094.678.000	100	2.050.727.000	100	2.166.310.000	100	2.262.250.000	100	2.702.250.000	100,00	11.276.215.000	BAPPEDA

Kode	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK		SKPK Penanggung Jawab
					2018*		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan tata ruang	Persen	100	100	161.114.699	100	425.000.000	0	-	0	-	0	-	100,00	586.114.699	BAPPEDA
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persentase koordinasi perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Persen	100	100	48.800.000	100	58.000.000	0	-	0	-	0	-	100,00	106.800.000	BAPPEDA
	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase Konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persen	100	100	26.390.000	0	-	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100,00	386.390.000	BAPPEDA
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi	Persen	100	100	311.007.345	100	674.150.000	100	200.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100,00	1.385.157.345	BAPPEDA
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase Konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan sosial budaya	Persen	100	100	427.759.325	100	315.000.000	100	200.000.000	100	210.000.000	100	210.000.000	100,00	1.362.759.325	BAPPEDA
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi Musrenbang	Persen	100	100	48.180.000	100	20.000.000	0	-	0	-	0	-	100,00	68.180.000	BAPPEDA
	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase Sinkronisasi kebijakan pembangunan Aceh Jaya dengan Provinsi Aceh dan Pusat	Persen	100	100	187.680.000	100	149.000.000	100	416.600.000	100	416.600.000	100	416.600.000	100,00	1.586.480.000	BAPPEDA
	Program Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100	0	-	100	50.000.000	30	250.000.000	35	430.000.000	40	380.000.000	40,00	1.110.000.000	BAPPEDA
	Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	Persentase Penelitian yang Dikembangkan	Persen	0	100	57.055.000	0	-	0	-	0	-	0	-	100,00	57.055.000	BAPPEDA
7.1.4	**Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel**	**Tingkat Maturitas SPIP**	**Level**	**1**	**2**	**1.430.193.110**	**3**	**1.189.000.000**	**3**	**1.345.000.000**	**4**	**1.145.000.000**	**4**	**1.145.000.000**	**4**	**6.254.193.110**	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kapasitas APIP	Level	1	2	27.716.000	2	40.000.000	0	200.000.000	0	-	0	-	4	267.716.000	INSPEKTORAT
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tindak Lanjut Temuan	Persen	31,57894737	3	1.402.477.110	0	1.149.000.000	51,57894737	1.145.000.000	56,57894737	1.145.000.000	61,57894737	1.145.000.000	61,58	5.986.477.110	INSPEKTORAT
						243.481.513.173		**390.646.399.616**		**349.956.413.286**		**340.110.926.582**		**337.198.859.708**		**1.639.581.722.874**	

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA

Pada bab ini akan dibahas mengenai rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaannya untuk tahun 2017-2022. Indikasi rencana program dalam Perubahan RPJMK Aceh Jaya 2017-2022, terdiri dari program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih yang dikelompokkan dalam program prioritas 1, serta program Perangkat Daerah yang tidak menunjang secara langsung terhadap pencapaian visi dan misi Bupati /wakil bupati dalam kelompok program prioritas 2.

Penjabaran Program Pembangunan Daerah dibagi berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Penunjang Urusan Pemerintahan. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, di dalamnya memuat program-program penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Urusan Pemerintahan, terdapat urusan yang sifatnya Wajib dan Pilihan. Urusan yang bersifat Wajib, terdiri dari Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar. Pada Penunjang Urusan Pemerintahan, terdapat program-program yang mengambil fungsi sebagai penunjang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diperlukan oleh tiap Perangkat Daerah untuk bisa menjalankan fungsinya. Pembagiannya meliputi Fungsi Manajemen dan Unsur Manajemen. Fungsi Manajemen terdiri dari Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan; Keuangan; Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah; serta Pengawasan. Sedangkan Unsur Manajemen meliputi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; dan Sarana dan Prasarana Perkantoran.

Kerangka indikasi program didapatkan melalui dua cara. Untuk

Program Prioritas Tahun 2017-2022 disusun melalui pendekatan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya. Adapun kerangka pendanaan dilakukan dengan pendekatan estimasi belanja langsung sebagaimana diulas pada Bab III. Penjelasan mengenai kerangka pendanaan pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada Tabel 7.1 dan 7.2 dibawah ini.

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Kabupaten Aceh Jaya
Tahun 2017-2022

URAIAN	SETELAH PERUBAHAN				
	2018	2019	2020	2021	2022
KAPASITAS RIIL	**391.999.646.039,98**	**460.937.161.264,00**	**437.256.540.349,73**	**425.261.865.618,93**	**419.751.494.644,68**
BELANJA	**792.016.394.504,70**	**1.008.896.217.032,28**	**968.783.315.207,18**	**982.020.562.434,47**	**997.287.909.972,86**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**462.987.263.490,10**	**547.959.055.768,28**	**531.526.774.857,45**	**556.758.696.815,54**	**577.536.415.328,19**
Belanja Pegawai	254.955.362.116,00	302.149.600.838,00	299.339.194.260,00	311.022.623.312,74	316.613.794.628,64
Belanja Hibah	6.741.424.800,00	8.680.100.000,00	8.680.100.000,00	8.680.100.000,00	8.680.100.000,00
Belanja Bantuan Sosial	35.767.615.807,10	48.858.951.339,28	35.779.084.703,45	37.335.704.673,30	39.636.494.906,97
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dn Pemerintah Desa	561.249.315,00	5.267.980.101,00	4.411.673.781,00	4.411.673.781,00	4.411.673.781,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	162.692.901.471,00	179.721.580.176,00	179.679.083.871,00	190.943.429.158,10	202.956.152.943,10
Belanja Tidak Terduga	2.268.709.981,00	3.280.843.314,00	3.637.638.242,00	4.365.165.890,40	5.238.199.068,48
BELANJA LANGSUNG	**329.029.131.014,60**	**460.937.161.264,00**	**437.256.540.349,73**	**425.261.865.618,93**	**419.751.494.644,68**
Belanja Pegawai	83.351.969.497,00	95.872.304.363,00	123.000.242.119,28	108.710.303.217,33	108.108.888.823,67
Belanja Barang dan Jasa	118.376.685.926,00	188.587.407.654,00	176.066.733.398,74	174.045.195.450,94	110.919.719.933,08
Belanja Modal	127.300.475.591,60	176.477.449.247,00	138.189.564.831,71	142.506.366.950,66	200.722.885.887,92

Sumber : BPKK Aceh Jaya, 2018

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
1		**Wajib Pelayanan Dasar**														
1	**1**	**Pendidikan**														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	17.772.806.134	100,00	14.865.131.368	100,00	15.400.000.000	100,00	15.400.000.000	100,00	15.400.000.000	DISDIK
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	19.960.705	100,00	47.000.000	100,00	213.000.000	100,00	213.000.000	100,00	213.000.000	DISDIK
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	128.535.000	-	-	DISDIK
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	100,00	100,00	24.000.000	100,00	23.000.000	100,00	93.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	DISDIK
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Pengawasan terhadap kebijakan dan program-program	Persen	70,00	-	-	-	-	90,00	550.000.000	95,00	550.000.000	100,00	550.000.000	DISDIK
		Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	78,55	81,55	574.559.905	84,55	4.530.525.192	87,55	7.000.000.000	90,55	7.000.000.000	93,55	7.000.000.000	DISDIK
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka partisipasi Murni (APM): SD/MI/Paket A	Persen	97,67	97,75	7.434.385.450	97,83	27.569.778.800	97,71	22.000.000.000	97,99	22.000.000.000	98,08	22.000.000.000	DISDIK
			Angka partisipasi Murni (APM): SMP/MTs/Paket B		92,29	93,30		94,40		95,50		96,60		97,70		
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi Klasifikasi S1/ D4	Persen	85,12	-	-	75,12	70.000.000	80,12	5.630.000.000	85,12	5.650.000.000	90,12	5.650.000.000	DISDIK
		Program Pengembangan Sikap, Minat, Bakat dan Prestasi Siswa	Persentase Jumlah Siswa yang berprestasi dalam seni dan olahraga	Persen	30,00	-	-	40,00	180.000.000	45,00	2.300.000.000	50,00	2.300.000.000	55,00	2.300.000.000	DISDIK
		Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf	Persen	96,90	96,99	25.606.000	97,08	2.831.225.912	97,17	1.100.000.000	97,26	1.100.000.000	97,35	1.100.000.000	DISDIK
		Program Falisitasi Biaya Siswa Pendidikan Aceh Jaya Cerdas	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	Angka	100,00	100,00	838.546.000	100,00	452.500.000	100,00	600.000.000	100,00	600.000.000	100,00	600.000.000	DISDIK
			Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	Angka	98,39	98,45		98,51		98,57		98,63		98,69		
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Guru yang memiliki kompetensi	Persen	86,80	100,00	175.410.432	100,00	155.664.000	100,00	160.000.000	100,00	160.000.000	100,00	160.000.000	DISDIK
		Program pengunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS)	Presentase pemenuhan Operasional Sekolah	Persen	100,00	100,00	11.195.636.866	100,00	10.734.930.556	-	-	-		-	-	DISDIK
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Presentase pengembangan minat dan budaya baca	Persen	65,12	-	-	-	-	80,12	1.115.000.000	85,12	500.000.000	90,12	500.000.000	DISDIK
		Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah	Persentase Guru yang memiliki kompetensi	Persen	86,80	-	-	100,00	909.280.000	100,00	1.070.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	DISDIK
1	**2**	**Kebudayaan**														
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Nilai-Nilai Budaya	Persen	100,00	-	-	100,00	190.181.800	100,00	380.000.000	100,00	380.000.000	100,00	380.000.000	DISDIK
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Karya budaya yang di Revitalisasi dan diinventarisasi	Persen	11,11	11,11	49.354.913	33,33	719.600.000	55,56	2.368.009.427	77,78	200.000.000	88,89	200.000.000	DISDIK
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Persen	85,37	85,37	50.710.000	87,80	321.046.000	92,68	3.074.250.000	95,12	700.000.000	97,56	800.000.000	DISDIK
		Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan	Persen	78,05	-	-	-	-	87,80	500.000.000	92,68	500.000.000	95,12	500.000.000	DISDIK
1	**3**	**Kesehatan**														

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	5.702.943.314	100,00	5.377.201.340	100,00	5.933.706.000	100,00	5.933.706.000	100,00	5.933.706.000	DINKES
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	195.626.178	100,00	197.500.000	100,00	259.440.000	100,00	260.000.000	100,00	250.000.000	DINKES
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	352.500.000	-	-	DINKES
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Realisasi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	100,00	44.580.000	100,00	20.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	DINKES
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	73,54	74,94	30.000.000	76,34	10.000.000	-	-	79,14	30.000.000	80,54	30.000.000	DINKES
		Program Pengembangan Data/informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Persen	80,00	-	-	-	-	80,00	7.500.000	80,00	7.500.000	80,00	7.500.000	DINKES
		Program Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kesehatan	Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kesehatan	Persen	0	0	0	100	560.000.000	100	200.000.000	80,00	200.000.000	100	200.000.000	DINKES
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Gizi Buruk yang mendapat Perawatan	Persen	100,00	100,00	47.560.000	100,00	789.158.000	100,00	1.631.000.000	100,00	1.700.000.000	100,00	1.700.000.000	DINKES
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Kecamatan yang melaksanakan GERMAS hidup sehat	Persen	-	55,56	48.020.200	66,67	75.000.000	77,78	437.000.000	80,00	437.000.000	100,00	437.000.000	DINKES
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	100,00	100,00	13.047.481.901	100,00	19.342.429.046	100,00	17.799.853.935	100,00	17.799.853.935	100,00	17.799.853.935	DINKES
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Pelayanan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	Persen	100,00	100,00	392.091.500	100,00	355.000.000	100,00	420.000.000	80,00	420.000.000	100,00	420.000.000	DINKES
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas yang terakreditasi	Persen	25,00	50,00	780.295.400	66,67	579.980.000	83,33	950.254.000	80,00	950.254.000	100,00	950.254.000	DINKES
		Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas pembantu dan Jaringannya	Persentase Kelengkapan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pusekesmas Pembantu dan Jaringannya	Persen	100,00	100,00	3.629.817.520	100,00	11.154.778.724	100,00	14.070.778.724	80,00	14.070.778.724	100,00	14.070.778.724	DINKES
		Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Peserta KB Aktif Terhadap Pasangan Usia Subur (PUS)	Persen	61,55	-	-	63,00	35.000.000	64,00	65.000.000	80,00	65.000.000	65,00	65.000.000	DPMPKB
		Program Pengembangan Lingkungan sehat	Cakupan Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	Persen	60,00	70,00	331.226.430	80,00	125.759.570	100,00	305.000.000	80,00	305.000.000	100,00	305.000.000	DINKES
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka	322,00	280,00	798.785.193	250,00	1.373.000.000	220,00	1.147.000.000	80,00	1.147.000.000	150,00	1.147.000.000	DINKES
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup	Angka	12,00	11,80	64.000.000	11,50	70.000.000	11,00	124.660.000	80,00	124.660.000	10,00	124.660.000	DINKES
		Program pencegahan dan penangulangan penyakit menular	Persentase Kasus Penyakit Menular yang di Tangani	Persen	100	100	468.889.830	100	861.600.000	100	840.000.000		840.000.000	100	840.000.000	DINKES
			Persentase orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	Persen	0	100		100		100				100		

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
		Menular	Persentase orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai	Persen	100	100		100		100				100		
			Cakupan Imunisasi / Desa UCI	Persen	41,28	43,6		100		100				100		
		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Cakupan Penyakit Tidak Menular	Persen	100,00	100,00	102.295.800	-	-	-	-			-	-	DINKES
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar	Persen	0	0	0	24,46	70.000.000	22	222.900.000		222.900.000	22	222.900.000	DINKES
			Persentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persen	0	0		1,69		2,4				2,4		
			Persentase orang usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	0	0		100		100				100		
		Program Peningkatan Penaggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/Aids	Persentase Peningkatan Penanggulangan Resiko Bahaya Narkoba, PMS, dan HIV/AIDS	Persen	62,00	62,00	25.500.000	70,00	85.000.000	74,00	60.000.000	78,00	60.000.000	82,00	60.000.000	DPMPKB
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat	Persen	90,00	92,00	3.599.817.098	95,00	2.749.524.000	96,00	3.306.297.700		3.306.297.700	100,00	3.306.297.700	DINKES
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan pelayanan umum kesehatan dan tempat-tempat umum yang memenuhi standar kesehatan	Persen	30,00	35,00	11.166.750	40,00	22.000.000	45,00	210.000.000	50,00	210.000.000	60,00	210.000.000	DINKES
		Program peningkatan Kesehatan jiwa	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	90,00	100,00	27.000.000	100,00	25.000.000	100,00	85.000.000	100,00	85.000.000	100,00	85.000.000	DINKES
		Program peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persen	82,10	85,00	40.000.000	90,00	40.000.000	96,00	390.000.000	98,00	390.000.000	100,00	390.000.000	DINKES
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	4.496.147.627	100,00	4.116.288.688	100,00	5.053.735.422	100,00	5.053.735.422	100,00	5.053.735.422	RSUD
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	49.820.000	100,00	60.000.000	100,00	66.622.672	100,00	96.622.672	100,00	96.622.672	RSUD
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	100,00	200.446.000	-	-	100,00	165.000.000	-	-	RSUD
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Realisasi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	30,00	11.372.000	-	-	100,00	360.000.000	100,00	360.000.000	100,00	360.000.000	RSUD
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	51,58	52,78	4.957.000	54,78	5.500.000	56,78	22.066.352	58,78	22.066.352	60,00	22.066.352	RSUD
		Program pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Persen	80,00	-	-	-	-	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	RSUD
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupann terlayaninya pasien yang berkunjung	Persen	100,00	100,00	14.850.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	RSUD

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan masyaakat	Persen	100,00	100,00	21.551.980.434	100,00	28.223.434.648	100,00	27.800.000.000	100,00	27.800.000.000	100,00	27.800.000.000	RSUD
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tipe RSUD	Tipe	D	C	-	C	387.480.000	C	493.840.000	C	65.340.000	C	65.340.000	RSUD
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana RSUD	Persen	10,00	20,00	9.796.141.986	30,00	28.557.984.102	50,00	23.345.260.149	70,00	23.345.260.149	90,00	23.345.260.149	RSUD
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Presentase pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD	Persen	100,00	100,00	94.635.800	100,00	150.000.000	100,00	165.000.000	100,00	173.250.000	100,00	165.000.000	RSUD
		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase evaluasi Pelaporan RSUD	Persen	100,00	-	-	100,00	16.500.000	-	-	-	-	-	-	RSUD
		Program Pengembangan Sumberdaya Tenaga Kesehatan	Persentase realisasi tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	100,00	-	-	100,00	700.000.000	100,00	580.000.000	100,00	580.000.000	100,00	580.000.000	RSUD
1	4	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	853.725.333	100,00	758.044.492	100,00	850.000.000	100,00	850.000.000	100,00	850.000.000	Dinas PUPR
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur		84,00	14,00	2.854.940.000	3,00	2.172.116.282	16,00	3.022.000.000	18,00	3.022.000.000	10,00	3.022.000.000	Dinas PUPR
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	76.500.000	-	-	Dinas PUPR
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	67,95	37,98	34.995.000	68,95	50.000.000	69,95	50.000.000	70,95	50.000.000	71,95	50.000.000	Dinas PUPR
		Program pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Persen	80,00	-	-	-	-	80,00	7.500.000	80,00	7.500.000	80,00	7.500.000	Dinas PUPR
		Program pembangunan jalan dan jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	Persen	42,11	44,83	33.652.307.077	47,55	39.591.439.524	50,27	40.450.000.000	52,99	40.450.000.000	55,71	40.450.000.000	Dinas PUPR
		Program pembangunan saluran drainase/gorong gorong	Jumlah Panjang drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (m')	Meter	138.966,00	138.978,00	139.080.400	139.732,00	500.000.000	140.487,00	1.700.000.000	141.245,00	1.700.000.000	142.503,00	1.700.000.000	Dinas PUPR
		Program pembangunan turap/talud/bronjong	Persentase peningkatan jumlah panjang turap/ talud dalam kondisi baik	Persen	22,28	-	-	-	-	0,27	302.241.500	0,27	317.691.500	0,29	302.241.500	Dinas PUPR
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase jumlah sarana dan prasarana Kebinamargaan dalam kondisi baik	Persen	91,30	95,70	165.992.000	91,30	124.936.888	95,70	125.784.000	95,70	126.284.000	95,70	126.584.000	Dinas PUPR
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Persen	51,01	55,14	34.981.060.557	59,27	13.037.257.748	63,42	7.170.694.500	67,55	7.170.694.500	71,72	7.170.694.500	Dinas PUPR
		Program Pengendalian Banjir	Panjang tanggul/ turap yang dibangun di wilayah jalan penghubung dan wilayah aliran sungai rawan longsor dan banjir (m)	Meter	25.168,00	150,00	630.592.200	450,00	1.762.664.540	1.550,00	513.592.000	3.800,00	513.592.000	2.725,00	513.592.000	Dinas PUPR

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
		Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	Persen	70,44	71,47	2.187.767.400	75,69	6.343.049.100	83,37	-	91,16	300.000.000	98,32	320.000.000	Dinas PUPR
			Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	67,65	67,88	2.215.800.000	67,89		67,89	-	67,89	-	67,89	-	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Peningkatan rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Meter	0,78	0,78	558.149.400	0,78	30.000.000	0,78	790.000.000	0,78	68.096.200	0,78	75.096.200	Dinas PUPR
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan kabupaten yang terpelihara (Km)	Km	232,11	247,11	99.372.000	262,11	1.080.000.000	277,11	2.318.984.000	292,11	2.318.984.000	307,11	2.318.984.000	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah sarana/ fasilitas publik yang terbangun	Persen	107,00	14,00	1.507.131.800	133,00	26.983.370.305	-	22.050.000.000	-	22.050.000.000	-	22.050.000.000	Dinas PUPR
		Program perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan Kualitas Dokumen Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	Dok	-	-	100,00	792.090.000	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR
		Program Perencanaan Tata Ruang	Ketersedian dokumen perencanaan tata ruang dan turunannya	Dok	-	-	-	-	50.000.000	2,00	76.800.000	2,00	76.800.000	2,00	76.800.000	Dinas PUPR
		Program Pemanfaatan Ruang	Tersusunnya Perbub/ Qanun tentang IMB	Dok	-	-	-	-	-	1 Dok	97.750.000	1 Dok	97.750.000	1 Dok	97.750.000	Dinas PUPR
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan	Keg	-	-	-	-	-	1,00	40.000.000	1,00	40.000.000	1,00	42.000.000	Dinas PUPR
1	5	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**														
		Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih (SR)	SR	5.656,00	7.620,00	3.545.597.174	8.020,00	3.965.393.801	8.380,00	3.982.000.000	8.602,00	3.849.449.412	8.827,00	3.849.449.412	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase rumah tangga berakses air minum	Rasio	22,28	30,01	6.300.926.500	31,59	3.173.715.000	33,01	1.825.870.000	33,88	1.825.870.000	34,77	1.825.870.000	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase jumlah rumah layak huni	Persen	0,77	0,77	155.591.646	0,78	276.875.673	0,78	167.521.600	0,78	247.521.600	0,78	247.521.600	Dinas PUPR
		Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah	Jumlah pengadaan tanah untuk bangunan gedung dan infrastruktur lainnya (Paket)	Paket	18,00	1,00	529.618.500	2,00	854.329.000	1,00	604.364.000	1,00	560.364.000	1,00	516.364.000	Dinas PUPR
1	6	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	1.960.885.300	100,00	1.660.443.662	100,00	2.114.909.181	100,00	2.114.909.181	100,00	2.114.909.181	SATPOL PP DAN WH
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	54.410.000	100,00	648.800.000	100,00	51.137.087	100,00	12.800.000	100,00	13.560.906	SATPOL PP DAN WH
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	100,00	311.569.443	-	-	100,00	30.788.000	100,00	30.788.000	SATPOL PP DAN WH
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	64,02	65,22	5.000.000	66,42	5.000.000	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP DAN WH
		Program pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Persen	80,00	-	-	-	-	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	100,00	5.000.000	SATPOL PP DAN WH
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Operasional Petugas Penertiban	Persen	100,00	100,00	24.980.000	100,00	25.000.000	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	SATPOL PP DAN WH
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	82,00	91,00	118.600.500	92,00	406.375.420	93,00	170.000.000	94,00	170.000.000	95,00	170.000.000	SATPOL PP DAN WH

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
		Program Pengawasan Pelaksanaan Syariat	Presentase Program Pengawasan Pelaksanaan Syariat	Persen	100,00	100,00	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	SATPOL PP DAN WH
1	7	**Sosial**														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	335.648.539	100,00	372.701.756	100,00	412.881.168	100,00	412.881.168	100,00	424.881.168	DINSOS
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	127.122.500	100,00	220.438.862	100,00	375.938.862	100,00	375.938.862	100,00	195.938.862	DINSOS
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Stel	-	-	-	-	-	-	-	100,00	14.000.000	-	-	DINSOS
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	62,36	63,96	5.000.000	65,56	5.000.000		-	-	-	-	-	DINSOS
		Program pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Persen	80,00	-	-	-	-	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	DINSOS
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui UEP dan bansos	PMKS	2.640,00	14,14	1.159.808.000	20,41	1.416.500.000	26,67	1.457.036.160	32,93	1.850.000.000	39,19	2.182.575.266	DINSOS
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemenuhan operasional Kelembagaan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	Persen	47,00	100,00	305.323.000	100,00	412.720.000	100,00	312.720.000	100,00	305.200.000	100,00	312.720.000	DINSOS
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial	PMKS	9.625,00	50,35	136.514.660	51,50	2.065.732.000	52,64	2.289.857.399	53,79	2.289.857.399	54,94	2.289.857.399	DINSOS
		Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Panti jompo	Persen	75,00	100,00	675.758.627	100,00	508.656.000	-	-	-	-	-	-	DINSOS
		Program Pembinaan Lembaga pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Anak berhadapan dengan Hukum yang dibina dalam LPKS (Lembaga pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Persen	75,00	-	-	-	-	100,00	600.000.000	100,00	600.000.000	100,00	600.000.000	DINSOS
		Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	3,20	3,73	188.178.400	-	-	4,77	100.000.000	5,29	100.000.000	5,81	100.000.000	DINSOS
2		**Wajib Non Pelayanan Dasar**														
2	1	**Tenaga Kerja**														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	318.659.313	100,00	325.400.464	100,00	378.040.846	100,00	378.040.846	100,00	378.040.846	DISTRANSNAKER
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	64.780.000	100,00	76.120.000	100,00	93.020.000	100,00	93.020.000	100,00	93.020.000	DISTRANSNAKER
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	13.500.000	-	-	DISTRANSNAKER
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	62,36	63,96	4.752.000	65,56	2.000.000	-	-	-	-	-	-	DISTRANSNAKER

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
		Program pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Persen	80,00	-	-	-	-	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	DISTRANSNAKER
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat Menuju Kompetensi	Persen	28,00	28,73	146.174.486	29,46	273.937.034	30,19	2.200.000.000	30,92	500.000.000	31,65	221.011.034	DISTRANSNAKER
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Terdaftar Dapat Ditempatkan dan Terciptanya Wirausahawan	Persen	40,73	40,73	49.865.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DISTRANSNAKER
		Program Peningkatan, Pengawasan, Perlindungan, Penegakan Hukum terhadap Keselamatan Kerja	Persentase pengawasan, perlindungan, penegakan hukum terhadap keselamatan kerja	Persen	55,00	65,00	28.860.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DISTRANSNAKER
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persen	100,00	-	-	100,00	10.000.000	-	-	-	-	-	-	DISTRANSNAKER
2	**2**	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	439.098.062	100,00	549.629.506	100,00	614.080.000	100,00	614.080.000	100,00	614.080.000	DPMPKB
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	98,00	100,00	522.386.196	100,00	338.000.000	100,00	203.000.000	100,00	234.000.000	100,00	235.000.000	DPMPKB
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	27.750.000	-	-	DPMPKB
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Realisasi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	98,00	-	-	100,00	15.000.000	-	-	-	-	-	-	DPMPKB
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	58,17	59,27	11.008.800	60,37	18.895.750	-	-	-	-	-	-	DPMPKB
		Program pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Persen	80,00	-	-	-	-	80,00	7.500.000	80,00	7.500.000	80,00	7.500.000	DPMPKB
		Program Penigkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase Keikutsertaan Perempuan dalam Pembangunan	Persen	100,00	100,00	528.242.000	100,00	125.000.000	100,00	340.000.000	100,00	670.000.000	100,00	670.000.000	DPMPKB
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rasio KDRT	Persen	35,00	30,00	99.500.000	25,00	240.000.000	20,00	280.000.000	15,00	275.000.000	10,00	275.000.000	DPMPKB
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pengaduan terpadu	Persen	70,00	75,00	31.780.000	80,00	209.550.000	80,00	30.000.000	85,00	30.000.000	85,00	30.000.000	DPMPKB
2	**3**	**Pangan**														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	596.640.958	100,00	524.542.680	100,00	628.542.680	100,00	628.542.680	100,00	628.542.680	DINAS PANGAN

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	30.246.000	100,00	112.000.000	100,00	88.000.000	100,00	53.300.000	100,00	74.300.000	DINAS PANGAN
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	16.500.000	-	-	DINAS PANGAN
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	60,26	61,56	8.548.500	62,86	10.000.000	64,16	5.000.000	65,46	5.000.000	66,76	5.000.000	DINAS PANGAN
		Program pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Persen	80,00	-	-	-	-	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	DINAS PANGAN
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Presentase Peningkatan Pola Pangan Harapan	Persen	7,00	-	-	8,00	1.679.000.000	8,50	118.000.000	9,00	118.000.000	9,50	118.000.000	DINAS PANGAN
		Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi dan Protein Per kapita (Kg kalori perhari)	Kkal	1.900,00	1.925,00	88.115.400	1.950,00	636.100.000	1.975,00	985.000.000	2.000,00	985.000.000	2.100,00	985.000.000	DINAS PANGAN
2	**4**	**Pertanahan**														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	-	-	-	-	-	-	-	100,00	386.052.811	100,00	386.052.811	DINAS PERTANAHAN
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	62.952.750	100,00	62.952.750	DINAS PERTANAHAN
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	65.000.000	-	-	DINAS PERTANAHAN
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	50,00	-	-	-	-	-	-	60,00	5.239.080	63,00	5.501.034	DINAS PERTANAHAN
		Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Kasus Pertanahan yang di tangani	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	275.625.000	100,00	250.000.000	DINAS PERTANAHAN
		Program Penataan, Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Penataan, Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	330.750.000	100,00	300.000.000	DINAS PERTANAHAN
2	**5**	**Lingkungan Hidup**														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	435.324.670	100,00	378.734.520	100,00	396.010.874	100,00	396.010.874	100,00	396.010.874	DLH
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	17.854.804	100,00	126.140.000	100,00	31.224.000	100,00	132.500.000	100,00	121.440.000	DLH
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	14.250.000	-	-	DLH
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Realisasi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	-	-	-	-	-	-	DLH
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	59,37	60,47	9.394.000	61,57	11.000.000	62,67	7.000.000	63,77	7.000.000	64,87	7.000.000	DLH
		Program pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Persen	80,00	-	-	-	-	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	DLH
		Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau	Persen	7,00	7,60	83.130.000	8,30	2.085.438.268	8,90	474.250.000	9,60	470.000.000	10,20	474.250.000	DLH

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
		Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase volume sampah yang ditangani	Persen	38,35	41,00	5.009.066.955	45,00	6.744.175.441	48,00	4.949.600.000	52,00	5.036.606.000	55,00	5.043.606.000	DLH
		Program pengembangan kinerja pengelolaan Air Limbah	Volume lumpur tinja yang dilah diinstalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)]	M3	NA	-	-	-	-	750,00	30.000.000	800,00	30.000.000	850,00	30.000.000	DLH
		Program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persen	100,00	-	-	-	-	100,00	1.100.000.000	100,00	1.034.507.659	100,00	769.015.318	DLH
		Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Status mutu air dan udara	IKLH	60,00	62,00	320.463.000	62,00	42.000.000	63,00	44.420.000	64,00	44.420.000	65,00	44.420.000	DLH
		Pogram Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persentase luas kawasan yang ditangani	Persen	0,05	0,16	118.839.380	0,26	399.717.757	0,37	34.000.000	0,48	114.000.000	0,58	114.000.000	DLH
		Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Ketersedian Akses informasi Sumber Daya Alam	Ada/Tidak	Ada	-	4.995.000	Ada	31.139.088	Ada	35.086.000	Ada	37.000.000	Ada	31.139.088	DLH
2	**6**	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	475.545.085	100,00	396.949.654	100,00	450.749.654	100,00	450.749.654	100,00	450.749.654	DISDUKCAPIL
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	126.200.000	100,00	59.804.920	100,00	89.254.920	100,00	108.004.920	100,00	108.004.920	DISDUKCAPIL
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Realisasi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	-	-	100,00	5.000.000	-	-	-	-	-	-	DISDUKCAPIL
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	59,37	60,47	5.000.000	61,57	5.000.000		-	-	-	-	-	DISDUKCAPIL
		Program pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Persen	80,00	-	-	-	-	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	DISDUKCAPIL
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	-	-	-	-	-	-	-	100,00	18.750.000	-	-	DISDUKCAPIL
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pribadi	Persen	60,00	65,00	963.359.091	70,00	1.411.919.000	75,00	663.419.000	80,00	663.419.000	85,00	663.419.000	DISDUKCAPIL
2	**7**	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**														
		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Kontribusi BUMG terhadap Pendapatan Asli Gampong	Persen	1,00	-	-	11,00	85.450.000	12,00	40.000.000	14,00	110.000.000	15,00	40.000.000	DPMPKB
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Persen	10,00	20,00	306.053.766	25,00	91.957.006	27,00	663.419.000	30,00	663.419.000	50,00	663.419.000	DPMPKB
		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur gampong yang terlatih	Persen	100,00	-	-	100,00	35.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	DPMPKB
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa	Persentase Pelayanan Adinistrasi Gampong	Persen	80,00	-	-	100,00	200.000.000	100,00	245.000.000	100,00	110.000.216	100,00	110.000.648	DPMPKB
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase keterlibatan perempuan di lembaga pemerintahan gampong	Persen	100,00	15,00	80.807.500	17,00	130.000.000	100,00	55.000.000	100,00	55.000.000	100,00	55.000.000	DPMPKB

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
		Program Penunjang Reintegrasi Masyarakat	Persetase Kerjasama Antar Gampong	Persen	77,00	-	-	100,00	50.000.000	-	-	-	-	-	-	DPMPKB
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Peningkatan Kebedayaan Masyarakat Perdesaan	Persen	85,00	56,00	315.385.750	64,00	235.000.000	68,00	562.000.000	72,00	562.000.000	76,00	562.000.000	DPMPKB
		Program pengembangan nilai budaya	Persentase Pelestariaan Adat	Persen	-	-	-	-	-	95,00	20.000.000	98,00	30.000.000	100,00	40.000.000	DPMPKB
2	8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**														
		Program Keluarga Berencana	Cakupan PKB / PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	100,00	100,00	3.044.684.576	100,00	4.344.592.000	100,00	4.730.000.000	100,00	4.457.846.500	100,00	4.530.049.225	DPMPKB
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja	Persen	53,00	-	-	64,00	90.000.000	68,00	103.000.000	72,00	103.000.000	76,00	103.000.000	DPMPKB
2	9	**Perhubungan**														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	1.042.858.857	100,00	928.245.222	100,00	1.066.000.000	100,00	1.066.000.000	100,00	1.066.000.000	DISHUB
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	745.273.500	100,00	887.607.592	100,00	878.000.000	100,00	878.000.000	100,00	878.000.000	DISHUB
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	-		-	100,00	18.750.000	-	-	DISHUB
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Realisasi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	100,00	9.000.000	100,00	9.000.000	-	-	-	-	-	-	DISHUB
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	63,16	64,56	4.920.000	65,96	10.000.000	-	-	-	-	-	-	DISHUB
		Program pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Persen	80,00	-	-	-	-	80,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	DISHUB
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase layanan angkutan	Persen	50,00	55,00	2.436.434.000	60,00	2.866.772.320	65,00	120.000.000	70,00	70.783.286	75,00	70.783.286	DISHUB
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Presentase Kondisi sara na, prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar	Persen	35,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISHUB
		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	Persentase penurunan angka kasus kecelakaan lalu lintas	Persen	100,00	-	-	100,00	540.000.000	-	-	-	-	-	-	DISHUB
		Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persen	100,00	-	-	100,00	2.511.710.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	DISHUB
2	10	**Komunikasi dan Informatika**														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	377.533.697	100,00	356.133.072	100,00	380.522.114	100,00	380.522.114	100,00	380.522.114	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	133.099.700	100,00	61.240.000	100,00	110.800.000	100,00	110.800.000	100,00	110.800.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisplinan ASN	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	18.750.000	-	-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Realisasi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	100,00	14.767.000	100,00	15.000.000	-	-	-	-	-	-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	63,16	64,36	9.004.400	65,56	10.000.000	-	-	-	-	-	-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		Program pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Persen	80,00	-	-	-	-	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	n/a	70,00	283.505.741	75,00	181.410.000	80,00	160.000.000	85,00	160.000.000	90,00	160.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	n/a	80,00	165.371.850	-	-	80,00	300.000.000	85,00	300.000.000	90,00	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		Program Kerjasama Informasi dengan mass media	Ketersedian informasi dan ketersedian media informasi yang di gunakan	Ada/Tidak	n/a	-	-	Ada	162.880.000	-	-	-	-	-	-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	n/a	-	-	-	-	80,00	19.480.000	85,00	53.500.000	90,00	45.980.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Poin	n/a	-	-	-	-	1,80	40.000.000	2,20	40.000.000	2,60	40.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		Program Pengembangan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	Ketersediaan dokumen informasi yang diamankan	Ada/Tidak	Ada	-	-	-	-	Ada	25.770.000	Ada	37.736.000	Ada	38.814.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	**11**	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**														
		Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Pendapatan UKM	Milyar	198.015.152,00	2.002.965.532,00	219.412.377	208.039.670,00	72.000.000	202.965.532,00	2.509.300.000	202.965.532,00	2.509.300.000	224.035.970,00	219.412.377	DISPERINDAG
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan wirausahawan yang dilatih	Persen	4,67	6,33	34.700.000	8,17	25.000.000	10,50	25.000.000	11,83	25.000.000	13,67	25.000.000	DISPERINDAG
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Cakupan UMKM yang difasilitasi	Persen	0,38	0,92	46.159.200	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPERINDAG
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	Persen	4,42	7,53	74.020.000	9,68	25.000.000	15,02	25.000.000	15,80	25.000.000	16,13	25.000.000	DISPERINDAG
2	**12**	**Penanaman Modal**														

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	90,00	100,00	411.113.109	100,00	446.012.628	100,00	521.312.628	100,00	521.312.628	100,00	521.312.628	DPMP2TSP
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	90,00	100,00	46.197.000	100,00	55.895.000	100,00	35.225.000	100,00	46.197.000	100,00	35.225.000	DPMP2TSP
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	-	100,00	17.850.000	-	-	-	-	100,00	34.100.000	-	-	DPMP2TSP
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	65,55	66,75	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMP2TSP
		Program pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Persen	80,00	-	-	-	-	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	DPMP2TSP
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor PMA-PMDN	Investor	7,00	11,00	112.715.000	14,00	80.000.000	17,00	109.476.128	21,00	109.476.128	25,00	109.476.128	DPMP2TSP
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA-PMDN)	Juta	1.334.968,00	1.468.464,80	19.874.000	1.615.311,28	20.000.000	1.776.842,41	33.900.000	1.954.526,65	33.900.000	2.149.979,31	33.900.000	DPMP2TSP
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Persentase Pelayanan Perizinan	Persen	100,00	100,00	230.000.000	100,00	43.676.128	-	-	-	-	-	-	DPMP2TSP
2	**13**	**Kepemudaan dan Olahraga**														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	386.371.489	100,00	352.552.575	100,00	395.670.889	100,00	395.670.889	100,00	395.670.889	DISPORA
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	154.033.000	100,00	40.700.000	100,00	184.681.686	100,00	702.500.000	100,00	72.500.000	DISPORA
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	12.000.000	-	-	DISPORA
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Realisasi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	100,00	23.800.000	100,00	25.000.000	-	-	-	-	-	-	DISPORA
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	60,64	61,84	9.428.500	62,84	5.000.000	-	-	-	-	-	-	DISPORA
		Program pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Persen	80,00	-	-	-	-	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	DISPORA
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Cakupan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persen	35,00	40,00	1.300.280.316	55,00	1.862.000.000	65,00	3.850.000.000	75,00	2.920.169.089	85,00	1.300.280.316	DISPORA
		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	Persen	15,00	-	-	-	-	45,00	200.000.000	55,00	200.000.000	65,00	200.000.000	DISPORA
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	25,00	2,00	598.950.000	15,00	795.300.000	25,00	1.200.000.000	35,00	1.200.000.000	45,00	1.200.000.000	DISPORA
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase partisipasi Kepemudaan dalam Pembangunan	Persen	100,00	100,00	494.079.410	100,00	485.000.000	100,00	615.000.000	100,00	615.000.000	100,00	615.000.000	DISPORA
		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase Kewirausahaan dan Kepeloporan Kepemudaan dalam Pembangunan	Persen	100,00	-	-	-	-	100,00	135.000.000	100,00	135.000.000	100,00	135.000.000	DISPORA

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
		Program penyelengaraan pengadaan tanah	Jumlah pengadaan tanah untuk bangunan gedung dan infrastruktur lainnya (Paket)	Paket	-	-	-	-	-	1,00	500.000.000	1,00	1.000.000.000	-	-	DISPORA
2	**14**	**Statistik**														
		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Ketersediaan data statistik sektoral	Ada/Tidak	Ada	-	-	Ada	58.192.000	Ada	58.192.000	Ada	58.192.000	Ada	58.192.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	**15**	**Persandian**														
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah	Ketersediaan dokumen informasi yang diamankan	Ada/Tidak	n/a	-	-	Ada	100.000.000	-	-	-	-	-	-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	**16**	**Perpustakaan**														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	264.509.167	100,00	287.032.056	100,00	319.265.478	100,00	319.265.478	100,00	319.265.478	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	72.022.000	100,00	75.657.500	100,00	77.750.000	100,00	87.991.000	100,00	72.491.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	0	-	-	-	-	-	-	-	100,00	11.250.000	100,00	11.250.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	62,58	63,78	5.000.000	64,98	5.000.000	-	-	-	-	-	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		Program pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Persen	80,00	-	-	-	-	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		Program Pengembangan Budaya Membaca Masyarakat dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengembangan Budaya Membaca Masyarakat dan Pembinaan Perpustakaan	Persen	NA	-	-	-	-	75,00	250.000.000	75,00	250.000.000	75,00	250.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		Program pengembangan budaya baca dan pengembangan perpustakaan	Pengunjung perpustakaan pertahun	Org	1.020,00	1.122,00	128.581.000	1.324,00	76.110.176	-	-	-	-	-	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2	**17**	**Kearsipan**														
		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip Daerah	Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	11,36	11,36	99.464.000	22,73	73.818.128	34,09	7.451.392	45,45	8.991.392	56,82	8.000.014	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Tersedianya sistem aplikasi administrasi kearsipan	Ada/Tidak	tidak	ada	38.800.000	-	-	ada	28.000.000	ada	28.000.000	ada	30.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	100,00	-	-	-	-	100,00	28.000.000	100,00	30.000.000	100,00	26.843.290	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
3		**Keistimewaan dan Kekhususan Aceh**														
3	**1**	**Pendidikan**														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	252.245.125	100,00	267.238.620	100,00	283.600.842	100,00	283.600.842	100,00	283.600.842	DINAS PENDIDIKAN DAYAH

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	332.890.673	100,00	260.769.536	100,00	62.626.226	100,00	25.500.000	100,00	56.082.732	DINAS PENDIDIKAN DAYAH
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	18.000.000	-	-	DINAS PENDIDIKAN DAYAH
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Realisasi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	-	-	100,00	13.000.000	-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN DAYAH
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	64,35	65,55	7.500.000	66,75	7.500.000	-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN DAYAH
		Program pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Persen	-	-	-	-	-	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAYAH
		Program Pendidikan Dayah	Persentase Santri yang mampu membaca kitab kuning	Persen	10,00	-	-	15,00	90.000.000	20,00	600.000.000	25,00	560.000.000	30,00	660.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAYAH
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah	Persentase Dayah dengan Sarana prasarana telah memenuhi standar	Persen	22,86	28,57	884.311.576	34,29	9.711.629.278	40,00	8.920.767.268	45,71	7.439.147.834	51,43	8.920.767.268	DINAS PENDIDIKAN DAYAH
		Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah	Persentase Tenaga Pendidikan Dayah yang memiliki kompetensi	Persen	NA	48,05	1.840.445.000	50,75	1.942.390.000	60,30	2.320.140.000	65,30	2.320.140.000	70,00	2.320.140.000	DINAS PENDIDIKAN DAYAH
		Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah	Persentase Dayah yang berkualitas	Persen	22,86	28,57	49.750.000	34,29	48.941.644	-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN DAYAH
		Program Pemberdayaan Santri	Cakupan Santri yang mendapat pendidikan dan fasilitas yang memadai	Persen	3,78	4,37	184.500.000	4,76	228.064.000	5,16	873.000.000	5,56	873.000.000	5,95	873.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAYAH
		Program Penelitian dan Pengembangan Dayah	Persentase Dayah yang Terakreditasi	Persen	77,42	83,87	99.650.000	87,15	500.000.000	90,32	65.000.000	93,55	65.000.000	100,00	65.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAYAH
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	260.765.655	100,00	425.178.365	100,00	452.114.546	100,00	452.114.546	100,00	452.114.546	SEKRETARIAT MPD
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	26.105.082	100,00	46.000.000	100,00	42.690.000	100,00	30.500.000	100,00	50.470.000	SEKRETARIAT MPD
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	5.570.000	-	-	SEKRETARIAT MPD
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	48,43	49,63	4.892.246	50,83	5.000.000	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT MPD
		Program pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Persen	80,00	-	-	-	-	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	SEKRETARIAT MPD
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Pengawasan terhadap kebijakan dan program-program pendidikan yang diterapkan	Persen	70,00	70,00	57.115.000	80,00	50.330.760	90,00	53.357.000	95,00	54.897.750	100,00	54.897.750	SEKRETARIAT MPD
		Program Partisipasi Masyarakat	Persentase Forum Komite Sekolah	Persen	70,00	-	-	70,00	20.000.000	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT MPD
3	2	**Kebudayaan**														

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	533.737.447	100,00	605.504.513	100,00	558.706.352	100,00	558.706.352	100,00	558.706.352	MAA
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	71.300.000	100,00	64.301.868	100,00	74.000.000	100,00	74.000.000	100,00	74.000.000	MAA
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	4.500.000	-	-	MAA
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	56,61	57,41	5.000.000	58,21	5.000.000	-	-	-	-	-	-	MAA
		Program pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Persen	80,00	-	-	-	-	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	MAA
		Program Pembinaan Hukum Adat	Persentase Hukum Adat yang Terselesaikan	Persen	20,93	20,93	142.500.000	23,26	66.000.000	24,42	18.000.000	25,78	78.000.000	26,74	72.000.000	MAA
		Program Pelestarian Adat dan istiadat	Persentase Pelestarian Adat	Persen	16,67	-	-	41,67	63.000.000	50,00	40.000.000	66,67	40.000.000	-	-	MAA
		Program Pengembangan Nilai budaya	Persentase Penerapan budaya keacehan dalam kehidupan bermasyarakat	Persen	37,56	-	-	-	-	40,34	80.000.000	75,60	80.000.000	82,33	80.000.000	MAA
		Program Pusaka/Pembinaan Khasanah Adat	Persentase Pembinaan Khasanah Adat	Persen	100,00	100,00	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	MAA
3	**3**	**Keagamaan**														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	336.893.247	100,00	283.886.800	100,00	307.900.842	100,00	307.900.842	100,00	307.900.842	DINAS SYARIAT ISLAM
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	26.746.936	100,00	34.800.000	100,00	50.000.000	100,00	60.000.000	100,00	70.000.000	DINAS SYARIAT ISLAM
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	13.500.000	-	-	DINAS SYARIAT ISLAM
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	47,14	48,34	5.000.000	49,54	5.000.000	-	-	-	-	-	-	DINAS SYARIAT ISLAM
		Program pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Persen	-	-	-	-	-	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	DINAS SYARIAT ISLAM
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan	Masjid yang memenuhi standar : Imarah, Ri'ayah dan Idarah	Persen	28,57	40,00	3.204.805.142	45,71	3.950.006.000	51,43	4.300.000.000	57,14	4.300.000.000	62,86	4.300.000.000	DINAS SYARIAT ISLAM
		Program Pengembangan Syiar Islam	Meningkatnya Dakwah dan Syiar Islam	Persen	100,00	100,00	725.414.000	100,00	742.000.000	-	-	-	-	-	-	DINAS SYARIAT ISLAM
		Program Peningkatan Kualitas Peribadatan Umat Islam	Persentase Meningkatnya Pengamalan dan Akhlaq dalam Kehidupan Bermasyarakat	Persen	100,00	100,00	165.965.000	100,00	187.120.692	100,00	365.000.000	100,00	365.000.000	100,00	365.000.000	DINAS SYARIAT ISLAM
		Program Pemberdayaan Syariat Islam	Meningkatnya Pelaksanaan Syariat Islam serta Pemahamannya	Persen	100,00	100,00	44.000.000	100,00	397.517.500	100,00	536.446.288	100,00	548.496.288	100,00	566.000.000	DINAS SYARIAT ISLAM
		Program penyelengaraan pengadaan tanah	Selesainya Pelaksanaan Pembangunan Mesjid Agung dan Infrastrukturnya	Persen	100,00	100,00	48.800.000	100,00	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	-	-	-	-	DINAS SYARIAT ISLAM

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
		Program peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Al Quran	Angka Melek Al-Quran	Persen	NA	-	-	-	-	85,00	720.000.000	90,00	710.000.000	90,00	720.000.000	DINAS SYARIAT ISLAM
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	676.277.552	100,00	741.097.644	100,00	774.339.846	100,00	774.339.846	100,00	774.339.846	SEKRETARIAT MPU
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	18.722.244	100,00	62.900.000	100,00	50.400.000	100,00	55.400.000	100,00	31.500.000	SEKRETARIAT MPU
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	16.050.000	-	-	SEKRETARIAT MPU
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	56,97	57,97	5.000.000	58,97	5.000.000	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT MPU
		Program pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Persen	-	-	-	-	-	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	SEKRETARIAT MPU
		Program Peningkatan Sumberdaya dan Peran Ulama	Persentase Keputusan/Rekomendasi Ulama Yang diterapkan	Persen	16,00	20,00	54.500.000	24,00	69.300.000	28,00	33.000.000	32,00	42.000.000	36,00	64.000.000	SEKRETARIAT MPU
		Program Pembinaan Syariat Islam	Jumlah Kader Ulama Muda	Jumlah	20,00	22,00	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT MPU
		Program Penguatan Aqidah Ahlusunnah Wal Jamaah	Persentase Penguatan Aqidah di Masyarakat	Persen	70,00	75,00	38.990.000	-	-	100,00	46.000.000	100,00	46.000.000	100,00	46.000.000	SEKRETARIAT MPU
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	537.262.943	100,00	499.098.518	100,00	523.264.606	100,00	523.264.606	100,00	523.264.606	BAITUL MAL
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Tahun	100,00	100,00	39.991.000	100,00	40.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	BAITUL MAL
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	10,00	-	-	-	-	-	-	100,00	7.500.000	-	-	BAITUL MAL
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	1,00	5,00	9.836.000	6,00	9.500.000	-	5.000.000	6,00	5.000.000	6,00	5.000.000	BAITUL MAL
		Program pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Persen	-	-	-	-	-	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	BAITUL MAL
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah dana ZISWAF yg terhimpun	Milyar	5.800.000.000	6.380.000.000	44.000.000	6.699.000.000	60.000.000	7.033.950.000	75.000.000	7.385.647.500	75.000.000	7.754.929.875	75.000.000	BAITUL MAL
		Program peningkatan Sumber Daya Manusia Peran Pemerintah, Masyarakat dan Ulama	Jumlah Peningkatan SDM dalam Pengelolaan Zakat	0rg	120,00	200,00	77.500.000	200,00	81.070.341	200,00	30.000.000	200,00	35.000.000	200,00	40.000.000	BAITUL MAL
4		**Pilihan**														
4	**1**	**Kelautan dan Perikanan**														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	621.313.701	100,00	519.002.698	100,00	485.211.235	100,00	485.211.235	100,00	485.211.235	DKP
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	46.900.000	100,00	30.500.000	100,00	25.000.000	100,00	36.905.000	100,00	40.595.500	DKP

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	23.000.000	-	-	DKP
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Realisasi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	100,00	13.166.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	61,65	62,85	5.000.000	64,05	7.000.000	-	-	-	-	-	-	DKP
		Program pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Persen	-	-	-	-	-	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	DKP
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produktivitas sektor Perikanan budidaya	Ton	60,00	80,00	654.014.600	80,00	3.353.888.436	80,00	2.573.000.000	80,00	2.573.000.000	80,00	2.573.000.000	DKP
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produktifitas sektor Perikanan Tangkap	Ton	8.152,00	12.730,00	2.805.028.835	12.735,00	4.764.122.799	12.740,00	5.565.000.000	12.750,00	5.565.000.000	12.760,00	5.565.000.000	DKP
		Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan	Jumlah kawasan perikanan yag diawasi	LHOK	9,00	9,00	47.100.000	9,00	60.000.000	9,00	60.000.000	9,00	60.000.000	9,00	60.000.000	DKP
		Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	Jumlah konsumsi ikan (Kg/Kap/Thn)	kg/kap/thn	42,00	44,00	29.000.000	46,00	60.000.000	48,00	75.000.000	50,00	75.000.000	53,00	75.000.000	DKP
		Program Optimalisasi PengembanganSumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase tersedianya data ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil	Ha	3.038,77	4.000,00	45.000.000	5.000,00	20.000.000	-	-	-	-	-	-	DKP
		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya jumlah kelompok pengolah yang mempunyai skill bidang pengolahan produk hasil perikanan	Klp	2,00	3,00	39.991.000	3,00	25.815.217	3,00	80.000.000	3,00	100.000.000	3,00	100.000.000	DKP
		Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Cakupan anggota kelompok pengolah dan pemasar yang terbina	Persen	40,00	20,00	109.144.500	20,00	65.000.000	20,00	30.000.000	20,00	80.000.000	20,00	80.000.000	DKP
4	**2**	**Pariwisata**														
		Program Pengembangan Kemitraan	Persentase Peningkatan jumlah realisasi kerjasama bidang kepariwisataan	Persen	6,00	10,00	49.457.000	20,00	50.000.000	30,00	80.000.000	40,00	80.000.000	50,00	80.000.000	DISPORA
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Pengembangan lokasi objek wisata unggulan berbasis islami	Lokasi	1,00	2,00	841.602.569	20,00	247.792.000	30,00	2.291.054.770	40,00	2.224.969.167	50,00	2.099.938.335	DISPORA
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan PAD sektor pariwisata	Persen	-	5,00	89.794.900	7,00	165.000.000	9,00	65.000.000	11,00	65.000.000	14,00	65.000.000	DISPORA
4	**3**	**Pertanian**														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	1.922.627.921	100,00	1.696.554.781	100,00	2.009.397.166	100,00	2.009.397.166	100,00	2.009.397.166	DISTAN
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	117.997.000	100,00	65.000.000	100,00	135.000.000	100,00	135.000.000	100,00	135.000.000	DISTAN
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	90.000.000	-	-	DISTAN
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Realisasi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	100,00	31.171.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DISTAN

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	61,85	63,85	9.971.300	65,85	12.000.000	62,65	6.000.000	63,55	6.000.000	64,45	6.000.000	DISTAN
		Program pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Persen	-	-	-	-	-	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	DISTAN
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah luas areal tanaman Perkebunan yang dikembangkan	Ha	5.429,00	800,00	62.930.000	1.000,00	18.000.000	-	-	1.400,00	150.000.000	1.600,00	240.000.000	DISTAN
		Program Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Produksi Padi	Ton	95.364,00	100.132,20	11.799.563.851	105.138,81	23.671.655.000	85.500,00	18.020.000.000	89.775,00	18.020.000.000	94.263,75	18.020.000.000	DISTAN
			Produksi Jagung	Ton	6.264,00	6.577,20		6.906,06		7.251,36		7.613,93		7.994,63		
			Produksi Kedelai	Ton	609,00	639,45		671,42		704,99		740,24		777,26		
			Produksi Kelapa Sawit	Ton	83.779,00	87.967,95		92.366,35		96.984,66		101.834,00		106.925,59		
			Produksi Karet	Ton	5.369,00	5.637,45		5.919,32		6.215,29		6.526,05		6.852,36		
			Produksi Kopi	Ton	301,00	316,05		331,85		348,45		365,87		384,16		
			Produksi Kelapa Dalam	Ton	2.274,00	2.387,70		2.507,09		2.632,44		2.764,06		2.902,26		
			Produksi Nilam	Ton	76,00	80,00		83,79		87,98		92,38		97,00		
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Produktifitas Padi	Ton/Ha	4,80	5,70	457.767.400	5,80	150.000.000	5,90	1.446.000.000	6,00	1.548.000.000	6,10	1.146.000.000	DISTAN
			Produktifitas Jagung	Ton/Ha	3,70	4,00		4,10		4,20		4,30		4,40		
			Produktifitas Kedelai	Ton/Ha	1,30	1,60		1,70		1,80		1,90		2,00		
		Program Peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah peningkatan populasi ternak	Ekor	483.784,00	821.230,00	3.096.100.300	982.600,00	5.848.955.000	1.214.601,00	5.635.000.000	1.340.676,00	5.635.000.000	1.513.131,00	5.635.000.000	DISTAN
			Ternak Besar	Ekor						33.917,00		36.891,00		40.030,00		
			Ternak Kecil	Ekor						44.754,00		46.630,00		48.201,00		
			Unggas	Ekor						1.135.930,00		1.257.155,00		1.424.900,00		
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase status kesehatan hewan terhadap agent penyakit				312.587.271		650.000.000		600.000.000		750.000.000		770.000.000	DISTAN
			Parasit	Persen	46,00	44,00		42,00		41,00		40,00		33,00		
			Virus		46,00	44,00		42,00		41,00		40,00		38,00		
			Bakteri		8,00	7,00		6,00		5,00		4,00		4,00		
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah komoditi Peternakan yang dipasarkan	Jenis	3,00	7,00	126.878.600	7,00	133.000.000	7,00	150.000.000	7,00	180.000.000	7,00	180.000.000	DISTAN
		Program Peningkatan SDM Sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan	Penerapan teknologi melalui Demplot	Demplot	9,00	9,00	16.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DISTAN
		Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	Persentase cakupan pelaksanaan sistem LAKUSI secara berkelanjutan	Persen	100,00	216,00	145.941.000	-	-	216,00	91.000.000	216,00	91.000.000	216,00	91.000.000	DISTAN
		Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan	Persentase Penyuluh Pertanian Lapangan yang ditingkatkan pengetahuannya	Persen	15,00	20,00	903.358.673	20,00	2.221.785.000	20,00	2.030.000.000	20,00	2.030.000.000	20,00	2.030.000.000	DISTAN
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah komoditi Pertanian/Perkebunan yang dipasarkan	Komoditi	4,00	-	-	-	-	7,00	284.000.000	8,00	284.000.000	9,00	284.000.000	DISTAN
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Persentase Kelompok yang Menerapkan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persen	10,00	10,00	85.729.700	10,00	580.200.000	10,00	207.000.000	10,00	207.000.000	10,00	207.000.000	DISTAN
4	**4**	**Kehutanan**														
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Persen	-	-	-	-	-	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	Bag. Eko & SDA Setdakab

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
4	5	**Energi dan Sumber Daya Mineral**														
		Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Panjang jalan terpasang PJU	Meter	105.250,00	14.000,00	2.401.327.162	8.800,00	2.407.552.911	8.800,00	400.000.000	8.800,00	760.000.000	8.800,00	760.000.000	Bag. Eko & SDA Setdakab
		Program Pemerataan Pelayanan Energi Bagi Masyarakat	Jumlah SR/IR	Rumah	14.470,00	10.000,00	4.081.756.000	9.800,00	4.930.000.000	7.500,00	4.860.000.000	7.450,00	4.860.000.000	7.400,00	4.860.000.000	Bag. Eko & SDA Setdakab
4	6	**Perdagangan**														
		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Bersih	Persen	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPERINDAG
		Program Pengelolaan Pasar	Cakupan Pasar yang fungsional	Persen	18,18	27,27	5.176.834.330	36,36	1.723.240.000	45,45	694.702.000	54,55	694.702.000	63,64	694.702.000	DISPERINDAG
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Sarana dan Prasarana Kemetrologian	Persen	-	-	-	25,00	1.629.750.000	50,00	50.000.000	75,00	50.000.000	100,00	50.000.000	DISPERINDAG
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	2,02	2,14	329.997.000	2,20	330.000.000	2,22	196.500.000	2,36	196.500.000	2,40	196.500.000	DISPERINDAG
		Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Cakupan Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang difasilitasi	Persen	1,60	-	-	2,40	275.350.000	-	-	-	-	-	-	DISPERINDAG
4	7	**Perindustrian**														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	370.057.410	100,00	340.423.984	100,00	395.798.390	100,00	395.798.390	100,00	395.798.390	DISPERINDAG
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	20.000.000	100,00	41.000.000	100,00	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00	300.000.000	DISPERINDAG
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	15.000.000	-	-	DISPERINDAG
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Realisasi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	100,00	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPERINDAG
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	61,77	-	-	64,17	10.645.712	-	-	-	-	-	-	DISPERINDAG
		Program pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Persen	80,00	-	-	-	-	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	DISPERINDAG
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase IKM yang difasilitasi	Persen	49,06	5,32	2.545.621.620	5,58	2.252.405.000	5,86	4.095.000.000	6,15	4.095.000.000	6,48	4.095.000.000	DISPERINDAG
		Program Penataan Struktur Industri	Cakupan bina Kelompok pengrajin	Persen	1,74	2,33	204.605.000	2,33	270.745.000	2,33	1.300.000.000	2,33	1.300.000.000	2,33	1.300.000.000	DISPERINDAG
		Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Tingkat pertumbuhan usaha ekonomi kreatif	Persen	5,00	-	-	7,00	11.108.000	-	240.000.000	9,00	240.000.000	10,00	240.000.000	DISPERINDAG
4	8	**Transmigrasi**														
		Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi	Persentase Kawasan Pemukiman Transmigrasi yang Dibangun	Persen	10,00	20,00	150.830.700	40,00	100.000.000	-	-	-	-	-	-	DISTRANSNAKER
		Program Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran Yang Dibina	Persen	38,10	47,62	48.021.600	57,14	53.002.974	66,67	100.000.000	76,19	100.000.000	85,71	100.000.000	DISTRANSNAKER
		Program Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi	Persen	NA	-	-	10,00	2.668.400.000	-	-	-	-	-	-	DISTRANSNAKER

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
		Program Transmigrasi Lokal	Presentase pembangunan pemukiman transmigrasi	Persen	NA	-	-	10,00	1.700.000.000	-	-	-	-	-	-	DISTRANSNAKER
5		**Penunjang Urusan Pemerintahan**														
5	1	**Inspektorat**														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	433.383.958	100,00	450.826.436	100,00	819.300.000	100,00	819.300.000	100,00	819.300.000	INSPEKTORAT
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Tahun	100,00	100,00	40.000.000	100,00	120.000.000	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	INSPEKTORAT
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Stel	100,00	-	-	-	-	100,00	87.500.000	100,00	37.500.000	-	-	INSPEKTORAT
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kapasitas APIP	Level	1,00	2,00	27.716.000	2,00	40.000.000	-	200.000.000	-	-	-	-	INSPEKTORAT
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Persen	100,00	100,00	311.824.000	100,00	327.000.000	100,00	417.000.000	100,00	417.000.000	100,00	417.000.000	INSPEKTORAT
		Program pengembangan data/informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Persen	80,00	-	-	-	-	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	INSPEKTORAT
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tindak Lanjut Temuan	Persen	31,58	3,00	1.402.477.110	-	1.149.000.000	51,58	1.145.000.000	56,58	1.145.000.000	61,58	1.145.000.000	INSPEKTORAT
5	2	**Perencanaan**														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	1.269.366.525	100,00	1.137.734.802	100,00	1.058.159.914	100,00	1.058.159.914	100,00	1.058.159.914	BAPPEDA
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	272.418.619	100,00	401.206.000	100,00	1.010.042.888	100,00	440.375.000	100,00	352.375.000	BAPPEDA
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	50.000.000	-	-	BAPPEDA
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Realisasi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	100,00	11.000.000	100,00	20.000.000	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA
		Program pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	Persen	60,00	80,00	386.190.000	80,00	425.657.000	100,00	191.675.000	100,00	797.000.000	100,00	519.000.000	BAPPEDA
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tahapan Proses Perencanaan tepat waktu	Persen	100,00	100,00	2.094.678.000	100,00	2.050.727.000	100,00	2.166.310.000	100,00	2.262.250.000	100,00	2.702.250.000	BAPPEDA
		Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan tata ruang	Persen	100,00	100,00	161.114.699	100,00	425.000.000	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA
		Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Persentase koordinasi perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Persen	100,00	100,00	48.800.000	100,00	58.000.000	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA
		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase Konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persen	100,00	100,00	26.390.000	-	-	100,00	120.000.000	100,00	120.000.000	100,00	120.000.000	BAPPEDA

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi	Persen	100,00	100,00	311.007.345	100,00	674.150.000	100,00	200.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	BAPPEDA
		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase Konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan sosial budaya	Persen	100,00	100,00	427.759.325	100,00	315.000.000	100,00	200.000.000	100,00	210.000.000	100,00	210.000.000	BAPPEDA
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi Musrenbang	Persen	100,00	100,00	48.180.000	100,00	20.000.000	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA
		Program Kerjasama Pembangunan	Persentase Sinkronisasi kebijakan pembangunan Aceh Jaya dengan Provinsi Aceh dan Pusat	Persen	100,00	100,00	187.680.000	100,00	149.000.000	100,00	416.600.000	100,00	416.600.000	100,00	416.600.000	BAPPEDA
5	**3**	**Penelitian dan Pengembangan**														
		Program Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100,00	-	-	100,00	50.000.000	30,00	250.000.000	35,00	430.000.000	40,00	380.000.000	BAPPEDA
		Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	Persentase Penelitian yang Dikembangkan	Persen	-	100,00	57.055.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA
5	**4**	**Keuangan**														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	1.436.598.722	100,00	1.739.583.098	100,00	1.688.123.098	100,00	1.688.123.098	100,00	1.688.123.098	BPKK
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	149.100.000	100,00	70.000.000	BPKK
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Realisasi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	-	-	100,00	76.500.000	-	-	-	-	-	-	BPKK
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	65,10	65,10	46.005.900	65,10	71.000.000	63,90	61.000.000	65,10	61.000.000	66,30	61.000.000	BPKK
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	2.139.401.444	100,00	2.060.297.829	100,00	3.532.000.000	100,00	3.532.000.000	100,00	3.532.000.000	BPKK
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	opini	WTP	WTP	1.451.009.735	WTP	2.564.651.000	WTP	2.120.000.000	WTP	2.120.000.000	WTP	2.120.000.000	BPKK
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase laporan keuangan desa yang sesuai standar	Persen	100,00	100,00	94.750.000	-	-	100,00	80.000.000	100,00	88.642.000	100,00	88.943.000	BPKK
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase peningkatan realisasi administrasi keuangan	Persen	100,00	100,00	27.053.400	100,00	60.000.000	100,00	64.600.000	100,00	58.466.000	100,00	56.454.000	BPKK
		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase terlaksananya keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah	Persen	100,00	-	-	100,00	301.452.000	100,00	161.452.000	100,00	161.452.000	100,00	161.452.000	BPKK
		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Tersediannya Sistem Aplikasi administrasi Kearsipan	Ada/Tidak Ada	Tidak	Tidak	-	Tidak	-	Ada	165.400.000	Ada	165.400.000	Ada	165.400.000	BPKK
5	**5**	**Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**														

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	448.106.117	100,00	483.362.888	100,00	520.000.000	100,00	520.000.000	100,00	520.000.000	BKPSDM
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	100,00	32.604.500	100,00	60.000.000	100,00	55.000.000	100,00	65.000.000	100,00	65.000.000	BKPSDM
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Realisasi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	-	-	100,00	80.000.000	80,00	232.000.000	90,00	332.000.000	100,00	432.000.000	BKPSDM
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	40,90	40,88	7.498.900	42,08	9.800.000	-	-	-	-	-	-	BKPSDM
		Program pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	Persen	60,00	-	-	-	-	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	BKPSDM
		Program Pendidikan Kedinasan	Meningkatnya program pendidikan kedinasan	Persen	100,00	100,00	1.020.882.010	100,00	4.203.662.000	-	2.700.000.000	-	-	-	-	BKPSDM
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pembinaan dan pengembangan ASN	Persen	100,00	100,00	1.158.085.412	100,00	1.271.000.000	100,00	1.174.500.000	100,00	938.000.000	100,00	938.000.000	BKPSDM
		Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Terlaksananya Program pendidikan dan pelatihan Aparatur ASN yang berkembang dan terlatih	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	100.000.000	100,00	150.000.000	BKPSDM
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	242.425.170	100,00	579.920.800	100,00	115.000.000	100,00	115.000.000	100,00	115.000.000	BKPSDM
	7	**Sekretariat Daerah Kabupaten**														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	14.934.153.924	100,00	12.755.959.430	100,00	13.032.000.000	100,00	13.032.000.000	100,00	13.032.000.000	Bag. Umum Setdakab
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	3.664.885.198	100,00	2.233.000.000	100,00	2.402.000.000	100,00	835.000.000	100,00	835.000.000	Bag. Umum Setdakab
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	100,00	48.400.000	100,00	48.400.000	100,00	60.000.000	100,00	110.000.000	100,00	60.000.000	Bag. Umum Setdakab
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Realisasi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	100,00	22.300.000	100,00	50.000.000	100,00	15.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	Bag. Umum, PPBJ, Hukum & Organisasi Setdakab
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	-	100,00	29.130.950	100,00	25.000.000	-	-	-	-	-	-	Bag. Adpemb Setdakab
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Persen	na	100,00	516.636.500	100,00	858.000.000	100,00	450.000.000	100,00	450.000.000	100,00	450.000.000	Bag. Humas Setdakab
		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Lancarnya pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persen	100,00	100,00	306.172.000	100,00	328.000.000	100,00	367.000.000	100,00	363.000.000	100,00	363.000.000	Bag. Humas & Bag. Pemerintahan Setdakab
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen	80,00	70,00	191.257.000	75,00	343.500.000	80,00	239.500.000	85,00	239.500.000	90,00	239.500.000	Bag. Kesra Setdakab
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan	Persen	100,00	100,00	263.217.000	100,00	535.956.000	100,00	470.000.000	100,00	470.000.000	100,00	470.000.000	Bag. AdPemb dan Bag. Eko &SDA Setdakab

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
		Program Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Terbentuknya BUMD dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gerbang Raja	Unit	-	1,00	135.330.000	1,00	813.059.589	100,00	846.000.000	100,00	100.000.000	100,00	30.000.000	Bag. Eko & SDA Setdakab
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persen	100,00	100,00	321.223.000	100,00	337.000.000	100,00	314.000.000	100,00	314.000.000	100,00	314.000.000	Bag. Hukum Setdakab
		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase sumber daya aparatur yang memahami aturan hukum	Persen	na	20,00	46.060.000	20,00	50.000.000	20,00	55.000.000	20,00	55.000.000	20,00	55.000.000	Bag. Hukum Setdakab
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelayanan pembangunan daerah	Persen	na	100,00	131.854.000	100,00	120.000.000	100,00	120.000.000	100,00	120.000.000	100,00	120.000.000	Bag. Pemerintahan Setdakab
		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Persen	100,00	100,00	34.987.000	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	Bag. Organisasi Setdakab
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Produk hukum pemerintah kabupaten yang sesuai peraturan perundang-undangan	Dokumen	na	42,00	161.465.000	40,00	254.500.000	40,00	250.000.000	40,00	250.000.000	40,00	250.000.000	Bag. Hukum dan Pemerintahan Setdakab
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Pelaporan Mutu dan Kinerja Pembangunan Daerah	Persen	100,00	100,00	40.040.000	100,00	41.650.000	100,00	115.000.000	100,00	115.000.000	100,00	115.000.000	Bag. Pemerintahan Setdakab
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase pendidikan politik masyarakat	Persen	100,00	-	-	100,00	100.000.000	-	-	-	-	100,00	85.000.000	Bag. Pemerintahan Setdakab
		Program Pengendalian Mutu dan Kinerja Pembangunan Daerah	Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang baik	Persen	100,00	100,00	479.748.750	100,00	511.400.000	100,00	470.000.000	100,00	470.000.000	100,00	470.000.000	Bag. PPBJ dan Bag. Pemerintahan Setdakab
		Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Penataan Organisasi Perangkat sesuai dengan regulasi	Persen	100,00	100,00	199.281.000	100,00	168.800.000	100,00	158.800.000	100,00	158.800.000	100,00	158.800.000	Bag. Organisasi Setdakab
		Program Pengembangan Syiar Islam	Persentase Terlaksananya Hari-hari Besar Islam	Persen	100,00	100,00	446.600.000	100,00	640.478.468	100,00	510.000.000	100,00	492.150.000	100,00	492.150.000	Bag. Kesra Setdakab
		Program Pembinaaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase meningkatnya pengembangan kapasitas aparatur	Persen	na	100,00	142.000.000	100,00	155.000.000	100,00	140.000.000	100,00	140.000.000	100,00	140.000.000	Bag. Pemerintahan dan Organisasi Setdakab
		Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah	Persentase penyediaan tanah pemerintah	Persen	na	20,00	42.979.920	20,00	170.273.892	20,00	57.126.803	20,00	50.000.000	20,00	50.000.000	Bag. Pemerintahan Setdakab
6	**2**	**Sekretariat DPRK**														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	3.154.943.734	100,00	2.782.340.572	100,00	3.016.000.000	100,00	3.016.000.000	100,00	3.016.000.000	SEKRETARIAT DPRK
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	685.975.478	100,00	189.300.000	100,00	535.000.000	100,00	183.300.000	100,00	183.300.000	SEKRETARIAT DPRK
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	100,00	148.807.000	100,00	611.533.248	100,00	170.000.000	100,00	198.087.520	100,00	198.087.520	SEKRETARIAT DPRK
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Realisasi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	12,00	114.500.000	12,00	666.446.000	-	300.000.000	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRK
		Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase Purna Tugas Yang Difasilitasi	Persen	100,00	100,00	22.921.500	100,00	510.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	375.000.000	SEKRETARIAT DPRK

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRK	Persen	100,00	100,00	1.177.590.000	100,00	1.395.314.000	100,00	1.578.000.000	100,00	1.578.000.000	100,00	1.578.000.000	SEKRETARIAT DPRK
		Program Pemilihan Umum	Persentase Kegiatan Penjaringan Panwaslih dan KIP	Persen	100,00	100,00	171.597.900	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DPRK
6		**Perangkat Daerah Lainnya**														
6	**1**	**Badan Penanggulangan Bencana**														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	2.288.477.101	100,00	2.067.270.114	100,00	2.288.300.764	100,00	2.288.300.764	100,00	2.288.300.764	BPBK
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	15.000.000	100,00	25.000.000	100,00	41.000.000	100,00	41.000.000	100,00	41.000.000	BPBK
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	100,00	22.425.000	-	-	-	-	100,00	79.750.000	-	-	BPBK
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	66,48	67,68	10.000.000	68,88	10.000.000	70,08	5.000.000	71,28	5.000.000	72,48	5.000.000	BPBK
		Program pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	Persen	60,00	-	-	-	-	80,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	BPBK
		Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah daerah yang mendapat fasilitasi pencegahan dini dan kesiapsiagaan bencana	Lokasi	36,00	-	-	9,00	24.000.000	9,00	50.000.000	9,00	50.000.000	9,00	50.000.000	BPBK
		Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana yang dieavakuasi selama tanggap darurat	Persen	75,00	75,00	39.275.000	75,00	75.750.000	75,00	41.000.000	75,00	42.750.000	75,00	38.750.000	BPBK
		Program Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Lokasi Bencana Yang Dapat Di Rehabilitasi dan Di Rekonstruksi Pasca Bencana	Lokasi	6,00	6,00	1.492.569.839	-	-	6,00	20.376.000	6,00	30.000.000	6,00	30.000.000	BPBK
		Program Pemenuhan standar logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Tanggap Darurat	Persen	100,00	100,00	274.158.000	100,00	2.391.897.160	100,00	175.050.000	100,00	175.050.000	100,00	175.050.000	BPBK
		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	Persen	100,00	100,00	231.619.066	100,00	338.831.840	100,00	200.000.000	100,00	216.000.000	100,00	220.000.000	BPBK
		Program Penanggulangan Bencana	Indeks pengurangan risiko bencana	Sedang	135,00	-	-	-	-	140,00	3.000.000.000	135,00	3.000.000.000	137,50	3.000.000.000	BPBK
6	**3**	**Sekretariat Kopri**														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	238.951.750	100,00	225.456.329	100,00	268.084.076	100,00	268.084.076	100,00	268.084.076	SEKRETARIAT KORPRI
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	12.320.000	-	-	SEKRETARIAT KORPRI
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	28,68	30,88	5.000.000	32,08	5.000.000	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT KORPRI
		Program pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	Persen	60,00	-	-	-	-	80,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	SEKRETARIAT KORPRI

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	52.006.700	100,00	66.296.000	100,00	58.373.284	100,00	44.140.000	100,00	16.734.199	SEKRETARIAT KORPRI
		Program Pengembangan Syiar Islam	Pelaksanaan MTQ	Kgt	2,00	-	-	2,00	45.000.000	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT KORPRI
		Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Jumlah Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Persen	100,00	100,00	183.000.000	100,00	241.266.376	100,00	216.457.740	100,00	216.457.740	100,00	235.853.514	SEKRETARIAT KORPRI
6	4	**Seluruh Kecamatan**														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	535.264.859	100,00	461.519.232	100,00	523.264.328	100,00	523.264.328	100,00	523.264.328	KECAMATAN JAYA
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	34.680.910	100,00	93.059.952	100,00	31.000.000	100,00	231.000.000	100,00	31.000.000	KECAMATAN JAYA
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	36.750.000	-	-	KECAMATAN JAYA
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Musrenbang kecamatan	Persen	100,00	100,00	71.500.000	100,00	71.500.000	100,00	64.000.000	100,00	64.000.000	100,00	64.000.000	KECAMATAN JAYA
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	33.33	10.000.000	33.33	10.000.000	KECAMATAN JAYA
		Program Pengembangan Syiar Islam	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Syiàr Islam	Persen	100,00	100,00	57.610.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	KECAMATAN JAYA
		Program pengembangan data/informasi	Persentase pengembangan data base kecamatan	Persen	100,00	100,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	KECAMATAN JAYA
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase terlaksananya rapat koordinasi lintas vertikal di tingkat kecamatan	Persen	100,00	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.500.000	100,00	10.500.000	100,00	10.500.000	KECAMATAN JAYA
		Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Cakupan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kecamatan	Persen	100,00	100,00	4.300.000	100,00	5.000.000	100,00	5.500.000	100,00	5.500.000	100,00	5.500.000	KECAMATAN JAYA
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa	Persentase Pelayanan Adinistrasi Gampong	Persen	100,00	-	-	-	-	33.33	32.000.000	33.33	40.000.000	33.33	40.000.000	KECAMATAN JAYA
		Program peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Al Quran	Angka Melek Al-Quran	Persen	-	-	-	-	-	85,00	60.000.000	-	-	90,00	60.000.000	KECAMATAN JAYA
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	411.071.099	100,00	404.925.286	100,00	450.283.830	100,00	450.283.830	100,00	450.283.830	KECAMATAN INDRA JAYA
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	195.746.000	100,00	45.606.000	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	KECAMATAN INDRA JAYA
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	24.750.000	-	-	KECAMATAN INDRA JAYA
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Persen	100,00	100,00	64.654.000	100,00	71.164.000	100,00	71.164.000	100,00	71.664.000	100,00	72.664.000	KECAMATAN INDRA JAYA
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Peningkatan kemanan dan Kenyaman lingkungan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	KECAMATAN INDRA JAYA
		Program Pengembangan Syiar Islam	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Syiàr Islam	Persen	-	100,00	60.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	11.000.000	100,00	10.000.000	KECAMATAN INDRA JAYA
		Program Pengembangan Data/informasi	Pengembangan database kecamatan	Persen	100,00	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	KECAMATAN INDRA JAYA

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
		Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Terlaksananya rapat koordinasi lintas vertikal tingkat kecamatan	Persen	100,00	100,00	7.554.600	100,00	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00	8.000.000	KECAMATAN INDRA JAYA
		Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Cakupan pelayanan perizinan dan non perizinan di kecamatan	Persen	100,00	100,00	3.175.000	100,00	3.175.000	100,00	3.175.000	100,00	3.175.000	100,00	3.175.000	KECAMATAN INDRA JAYA
		Program peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Al-Quran	Angka Melek Al-Quran	Persen	-	-	-	-	-	85,00	60.000.000	-	-	90,00	61.000.000	KECAMATAN INDRA JAYA
		Program Penigkatan Pelayanan Pemerintahan Desa	Persentase Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	-	-	-	-	-	100,00	40.000.000	100,00	40.000.000	100,00	40.000.000	KECAMATAN INDRA JAYA
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	433.213.280	100,00	362.850.267	100,00	408.250.880	100,00	408.250.880	100,00	408.250.880	KECAMATAN SAMPOINIET
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	15.000.000	-	-	KECAMATAN SAMPOINIET
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	60.000.000	100,00	42.482.000	100,00	20.690.000	100,00	93.000.000	100,00	58.000.000	KECAMATAN SAMPOINIET
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Realisasi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	-	-	-	28,00	15.000.000	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN SAMPOINIET
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	58,54	-	-	60,00	3.000.000	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN SAMPOINIET
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksa nanya perencanaan pemba ngunan daerah sesuai kebutuhan daerah	Persen	100,00	100,00	86.500.000	100,00	85.000.000	100,00	78.000.000	100,00	78.000.000	100,00	78.000.000	KECAMATAN SAMPOINIET
		Program peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persen	-	-	-	-	-	20,00	10.000.000	20,00	10.000.000	20,00	10.000.000	KECAMATAN SAMPOINIET
		Program pengembangan syiar islam	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Syiàr Islam	Persen	100,00	100,00	60.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	KECAMATAN SAMPOINIET
		Program Pengembangan data/informasi	Capaian program pembangunan data base kecamatan	Persen	100,00	100,00	4.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	KECAMATAN SAMPOINIET
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Terlaksananya rapat koordinasi lintas vertikal tingkat kecamatan	Persen	100,00	100,00	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00	8.000.000	KECAMATAN SAMPOINIET
		Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Cakupan pelayanan perizinan dan non perizinan	Persen	100,00	100,00	10.000.000	100,00	11.000.000	100,00	11.000.000	100,00	11.000.000	100,00	11.000.000	KECAMATAN SAMPOINIET
		Program peningkatan pelayanan pemerintahan Desa	Persentase pelayanan adminitrasi pemerintahan Desa	Persen	100,00	-	-	-	-	33,33	40.000.000	33,33	40.000.000	33,33	40.000.000	KECAMATAN SAMPOINIET
		Program peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Al-quran	Angka Melek Al-quran	Persen	100,00	-	-	-	-	85,00	60.000.000	-	-	90,00	60.000.000	KECAMATAN SAMPOINIET
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	343.156.590	100,00	333.133.179	100,00	380.320.383	100,00	380.320.383	100,00	380.320.383	KECAMATAN DARUL HIKMAH

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	34.193.271	100,00	27.492.800	100,00	38.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	KECAMATAN DARUL HIKMAH
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	29.250.000	-	-	KECAMATAN DARUL HIKMAH
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	pelaksanaan musrenbang kecamatan	Persen	-	100,00	76.498.000	100,00	56.500.000	100,00	65.000.000	100,00	73.558.544	100,00	73.558.544	KECAMATAN DARUL HIKMAH
		Program Penigkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase keamanan lingkungan	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	KECAMATAN DARUL HIKMAH
		Program Pengembangan Syiar Islam	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Syiàr Islam	Persen	-	100,00	64.770.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	KECAMATAN DARUL HIKMAH
		Program Pengembangan data/informasi	Tersedianya dokumen data/informasi pembangunan kecamatan	Persen	100,00	100,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	KECAMATAN DARUL HIKMAH
		Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala darah/wakil kelapa daerah	Terlaksananya rapat koordinasi lintas vertikal di tingkat kecamatan	Persen	-	100,00	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00	8.000.000	KECAMATAN DARUL HIKMAH
		Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Cakupan pelayanan perizinan dan non perizinan di kecamatan	Persen	-	100,00	10.000.000	100,00	4.300.000	100,00	4.000.000	100,00	4.300.000	100,00	4.300.000	KECAMATAN DARUL HIKMAH
		Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alqur'an	Angka Melek Alqur'an	Persen	100,00	-	-	-	-	85,00	110.000.000	100,00	50.000.000	90,00	110.000.000	KECAMATAN DARUL HIKMAH
		Program Penigkatan Pelayanan Pemerintahan Desa	Persentase Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	100,00	-	-	-	-	100,00	35.000.000	100,00	40.000.000	100,00	40.000.000	KECAMATAN DARUL HIKMAH
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	401.226.460	100,00	370.527.775	100,00	417.922.858	100,00	417.922.858	100,00	417.922.858	KECAMATAN SETIA BAKTI
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	72.983.400	100,00	41.570.000	100,00	15.000.000	100,00	33.125.000	100,00	33.125.000	KECAMATAN SETIA BAKTI
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	100,00	5.000.000	-	-	-	-	100,00	22.400.000	-	-	KECAMATAN SETIA BAKTI
		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase realisasi ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	100,00	100,00	3.500.000	-	-	-	-	100,00	14.000.000	100,00	21.000.000	KECAMATAN SETIA BAKTI
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Musrenbang kecamatan	Persen	100,00	20,00	76.352.600	20,00	75.762.000	20,00	76.000.000	20,00	76.000.000	20,00	76.000.000	KECAMATAN SETIA BAKTI
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	25,00	12.100.000	25,00	13.310.000	KECAMATAN SETIA BAKTI
		Program Pengembangan Syiar Islam	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Syiàr Islam	Persen	100,00	20,00	85.000.000	20,00	10.000.000	20,00	10.000.000	20,00	12.100.000	20,00	10.000.000	KECAMATAN SETIA BAKTI
		Program Pengembangan Data/Informasi	Pengembangan data base kecamatan	Persen	80,00	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	80,00	6.050.000	80,00	6.655.000	KECAMATAN SETIA BAKTI
		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi lintas vertikal di tingkat kecamatan	Persen	100,00	20,00	8.000.000	20,00	8.000.000	20,00	8.800.000	20,00	9.680.000	20,00	9.768.000	KECAMATAN SETIA BAKTI
		Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Cakupan pelayanan perizinan dan non perizinan di kecamatan	Persen	100,00	20,00	3.020.000	20,00	3.020.000	20,00	10.000.000	20,00	10.000.000	20,00	10.000.000	KECAMATAN SETIA BAKTI

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa	Persentase Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	100,00	-	-	-	-	20,00	40.000.000	20,00	38.412.000	20,00	42.253.200	KECAMATAN SETIA BAKTI
		Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alqur'an	Angka Melek Alqur'an	Persen	100,00	-	-	-	-	85,00	65.000.000	-	-	90,00	88.310.000	KECAMATAN SETIA BAKTI
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	20,00	310.674.437	20,00	277.763.530	20,00	305.000.000	20,00	305.000.000	20,00	305.000.000	KECAMATAN KRUENG SABEE
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	20,00	261.091.600	20,00	57.000.000	20,00	28.000.000	20,00	67.000.000	20,00	67.000.000	KECAMATAN KRUENG SABEE
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	31.836.000	-	-	KECAMATAN KRUENG SABEE
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksa nanya perencanaan pemba ngunan daerah sesuai kebutuhan daerah	Persen	-	20,00	86.500.000	20,00	86.500.000	20,00	86.500.000	20,00	86.500.000	20,00	86.500.000	KECAMATAN KRUENG SABEE
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	KECAMATAN KRUENG SABEE
		Program Pengembangan Syiar Islam	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Syiàr Islam	Persen	-	20,00	70.000.000	20,00	10.000.000	20,00	10.000.000	20,00	10.000.000	20,00	10.000.000	KECAMATAN KRUENG SABEE
		Program Pengembangan data/informasi	Capaian program pembangunan data base kecamatan	Persen	20,00	20,00	5.000.000	20,00	5.000.000	20,00	5.000.000	20,00	5.000.000	20,00	5.000.000	KECAMATAN KRUENG SABEE
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Terlaksananya rapat koordinasi lintas vertikal tingkat kecamatan	Persen	-	20,00	8.000.000	20,00	8.000.000	20,00	8.000.000	20,00	8.000.000	20,00	8.000.000	KECAMATAN KRUENG SABEE
		Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Cakupan pelayanan perizinan dan non perizinan	Persen	-	20,00	10.000.000	20,00	17.860.184	20,00	15.000.000	20,00	17.860.184	20,00	17.860.184	KECAMATAN KRUENG SABEE
		Program peningkatan pelayanan pemerintahan desa	Persentase pelayanan adminitrasi pemerintahan desa	Persen	100,00	-	-	-	-	33,33	35.000.000	33,33	40.000.000	33,33	40.000.000	KECAMATAN KRUENG SABEE
		Program peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Al-quran	Angka Melek Al-quran	Persen	-	-	-	-	-	85,00	60.000.000	-	-	90,00	60.000.000	KECAMATAN KRUENG SABEE
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	445.843.460	100,00	352.735.320	100,00	390.000.000	100,00	390.000.000	100,00	390.000.000	KECAMATAN PANGA
		Progam Peningktan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Progam Peningktan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	76.373.000	100,00	87.000.000	100,00	26.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	KECAMATAN PANGA
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	18.000.000	-	-	KECAMATAN PANGA

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	38,00	-	-	42,00	3.000.000	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN PANGA
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	97,00	23,00	95.000.000	19,00	80.000.000	19,00	78.000.000	19,00	80.000.000	21,00	86.000.000	KECAMATAN PANGA
		Program Pengembangan Syiar Islam	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Syiàr Islam	Persen	100,00	100,00	65.500.000	100,00	8.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	KECAMATAN PANGA
		Program Pengembangan data/informasi	Penyusunan Data BasePembangunan Kecamatan	Persen	5,00	80,00	4.500.000	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	KECAMATAN PANGA
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Terlaksananya program Rakor Lintas Vertikal	Persen	97,00	2,00	8.000.000	2,00	8.400.000	2,00	9.000.000	2,00	9.000.000	2,00	9.000.000	KECAMATAN PANGA
		Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	cukupan pelayanan perizinan dan non perizinan	Persen	100,00	20,00	10.000.000	20,00	10.500.000	20,00	8.000.000	20,00	10.000.000	20,00	10.000.000	KECAMATAN PANGA
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa	Persentase Pelayanan administrasi pemerintahan desa	Gampong	100,00	-	-	-	-	20,00	35.000.000	20,00	40.000.000	20,00	40.000.000	KECAMATAN PANGA
		Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alqur'an	Angka Melek Alqur'an	Persen	100,00	-	-	-	-	85,00	60.000.000	-	-	90,00	60.000.000	KECAMATAN PANGA
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	417.403.293	100,00	360.839.283	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	KECAMATAN TEUNOM
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	65.894.452	100,00	49.000.000	100,00	17.000.000	100,00	26.963.098	100,00	26.204.825	KECAMATAN TEUNOM
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Unit	1,00	-	-	-	-	-	-	100,00	18.000.000	-	-	KECAMATAN TEUNOM
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kgt	2,00	2,00	87.000.000	2,00	87.000.000	2,00	87.000.000	2,00	91.350.000	2,00	92.740.000	KECAMATAN TEUNOM

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kgt	-	-	-	-	-	1,00	5.500.000	1,00	10.000.000	1,00	4.500.000	KECAMATAN TEUNOM
		Program Pengembangan Syiar Islam	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Syiàr Islam	Kgt	2,00	2,00	59.450.000	2,00	10.000.000	2,00	10.000.000	2,00	11.050.000	2,00	10.000.000	KECAMATAN TEUNOM
		Program Pengembangan data/informasi	Pengembangan data base kecamatan	Persen	80,00	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	KECAMATAN TEUNOM
		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi lintas vertikal ditingkat kecamatan	Kgt	1,00	1,00	4.210.000	-	-	-	-	1,00	8.000.000	1,00	8.000.000	KECAMATAN TEUNOM
		Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Cakupan pelayanan perizinan dan non perizinan di kecamatan	Kgt	1,00	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	1,00	10.500.000	1,00	11.150.000	1,00	11.550.000	KECAMATAN TEUNOM
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa	Persentase Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa	Gmpng	100,00	-	-	-	-	22,00	35.000.000	22,00	40.000.000	22,00	40.000.000	KECAMATAN TEUNOM
		Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al Qur'an	Angka Melek Al Qur'an	Persen	2,00	-	-	-	-	85,00	60.500.000	-	-	90,00	61.500.000	KECAMATAN TEUNOM
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	369.626.728	100,00	334.030.727	100,00	370.000.000	100,00	370.000.000	100,00	370.000.000	KECAMATAN PASIE RAYA
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	81.828.300	100,00	244.002.560	100,00	40.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	KECAMATAN PASIE RAYA
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	22.500.000	-	-	KECAMATAN PASIE RAYA
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksa nanya perencanaan pemba ngunan daerah sesuai kebutuhan daerah	Persen	-	20,00	78.500.000	20,00	66.000.000	20,00	60.000.000	20,00	60.000.000	20,00	60.000.000	KECAMATAN PASIE RAYA
		Program peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persen	-	-	-	-	-	20,00	10.000.000	20,00	11.000.000	20,00	11.000.000	KECAMATAN PASIE RAYA
		Program Pengembangan Syiar Islam	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Syiàr Islam	Kgt	2,00	2,00	60.000.000	2,00	10.000.000	2,00	10.000.000	2,00	10.000.000	2,00	10.000.000	KECAMATAN PASIE RAYA
		Program Pengembangan data/informasi	Capaian program pembangunan data base kecamatan	Persen	-	20,00	5.000.000	20,00	5.250.000	20,00	5.250.000	20,00	5.250.000	20,00	5.250.000	KECAMATAN PASIE RAYA

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	terlaksananya rapat koordinasi lintas vertikal tingkat kecamatan	Persen	-	20,00	8.000.000	20,00	10.000.000	20,00	6.000.000	20,00	6.000.000	20,00	6.000.000	KECAMATAN PASIE RAYA
		Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Cakupan pelayanan perizinan dan non perizinan	Persen	-	20,00	10.000.000	20,00	10.000.000	20,00	10.000.000	20,00	12.000.000	20,00	12.000.000	KECAMATAN PASIE RAYA
		Program peningkatan pelayanan pemerintahan desa	persentase pelayanan adminitrasi pemerintahan desa	Persen		-	-	-	-	33,33	35.000.000	33,33	35.000.000	33,33	35.000.000	KECAMATAN PASIE RAYA
		Program peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Al-quran	Angka Melek Al-quran	Persen	-	-	-	-	-	85,00	60.000.000	-	-	90,00	60.000.000	KECAMATAN PASIE RAYA
7		**Kesatuan Bangsa dan Politik**														
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi Pemunuhan terhadap pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	371.065.479	100,00	307.144.812	100,00	352.000.000	100,00	352.000.000	100,00	352.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase realisasi pemenuhan tehadap saran prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	37.183.700	100,00	44.000.000	100,00	48.500.000	100,00	24.000.000	100,00	25.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Realisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	12.000.000	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	61,75	62,95	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Program Pengembangan data/informasi	Pengembangan data base kecamatan	Persen	80,00	-	-	-	-	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	80,00	5.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Program Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Jumlah Masyarakat Per Kecamatan Yang Memperoleh Pendidikan/Pembinaan/Sosialisasi/ Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	261.780.500	100,00	261.780.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Program Pembarantasan Penyakit Masyarakat P4GN	Persentase Pemberantasan Penyakit P4GN	Persen	100,00	-	-	-	-	100,00	240.000.000	100,00	27.240.768	100,00	13.000.268	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Program Kerjasama Bidang Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat	Persentase Konflik yang Tertangani di Lingkungan Masyarakat	Persen	100,00	100,00	84.770.000	100,00	282.000.000	100,00	221.000.000	100,00	207.975.000	100,00	122.775.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Program Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik	Persentase Jumlah Lembaga Parpol yang Terdaftar dalam Pemilu dan Pemilukada	Persen	20,40	20,40	25.088.000	23,01	30.000.000	80,00	30.000.000	-	-	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Jumlah Masyarakat Per Kecamatan Yang Memperoleh Pendidikan/Pembinaan/Sosialisasi/ Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	100,00	100,00	63.135.000	100,00	75.450.000	-	-	-	-	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Program Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya	Persentase Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya	Persen	100,00	-	-	-	-	100,00	20.000.000	100,00	28.607.500	100,00	28.607.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPK penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
		Program Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik	Persentase Jumlah Lembaga Parpol yang Terdaftar dalam Pemilu dan Pemilukada	Persen	100,00	100,00	41.830.000	-	-	-	-	100,00	60.550.000	100,00	109.575.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Program Pemilihan Umum	Terlaksananya Pemilihan Umum	Persen	100,00	100,00	81.849.000	100,00	443.062.168	-	-	100,00	-	100,00	80.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Program peningkatan pemberantasan penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase Pemberantasan Penyakit P4GN	Persen	100,00	100,00	32.500.000	100,00	250.000.000	-	-	-	-	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Program Pembinaan Organisasi Partai Politik	Persentase Jumlah Lembaga Parpol yang Terdaftar dalam Pemilu dan Pemilukada	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Total					**329.029.131.015**		**460.937.161.264**		**437.256.540.350**		**425.261.865.619**		**419.751.494.645**	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH JAYA

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMK.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang diukur setiap tahunnya.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Aceh Jaya terkait pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan

yang berkelanjutan (*sustainable growth*) serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan. Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicators*) berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi, maka indikator kinerja daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah
2. Menggunakan indikator pencapaian program pembangunan yang diharapkan
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, kearifan lokal yang penting dan sinergi dengan pembangunan antar jenjang pemerintahan
4. Terkait dengan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama dan penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat pada tabel 8.1. dan tabel 8.2.

TABEL 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Tahun ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	66,70	67,08	67,46	67,84	68,72	68,60	68,60
2	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	46,51	2,91	2,91	15,70	15,70	16,28	61
3	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Laju pertumbuhan ekonomi Aceh Jaya	Persen	4,06	4,7	5,02	5,34	5,66	5,98	5,98
5	Tingkat Kemiskinan Aceh Jaya	Persen	15,01	14,41	13,81	13,21	12,61	12,01	12
6	Tingkat Pengangguran Terbuka Aceh Jaya	Persen	NA	3,86	3,51	3,16	2,81	2,46	2,46
7	Nilai Investasi berskala nasional (PMA-PMDN)	Juta	1.334.968	1.468.465	1.615.311	1.776.842	1.954.527	2.149.979	2.149.979
8	Indeks Pola Pangan Harapan	Poin	60,9	77	81	83	84	86,17	86,17
9	Jumlah Hafidzh/hafidzah	Orang	29	39	44	49	54	60	60
10	Jumlah Qari/qariah	Orang	72	78	81	84	87	90	90,00
11	Angka Melek Al-Qur'an	Persen	NA	75	78	81	84	87	87
12	Persentase Mesjid yang Memenuhi Standar								
	- Persentase Mesjid yang memenuhi standar Ri'ayah	Persen	70,00	75	78	81	84	87	87
	- Persentase Mesjid yang memenuhi standar Imarah	Persen	66,00	70	73	76	79	82	82
	- Persentase Mesjid yang memenuhi standar Idarah	Persen	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	45
13	Persentase Dayah yang memenuhi standarisasi dayah	Persen	25,81	32,26	38,71	45,16	51,61	58,06	58,06
14	Persentase ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	Persen	98,88	99	99	99	99	99	99
15	Jumlah dana ZISWAF yang terhimpun	Jumlah	5.800.000.000	6.380.000.000	6.699.000.000	7.033.950.000	7.385.647.500	7.754.929.875	7.754.929.875
16	Indeks Aksesibilitas (KM/KM²)	Poin	0,0638	0,0638	0,0677	0,0716	0,0754	0,0793	0,079
17	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	247,11	247,11	262,11	277,11	292,11	307,11	307,11
18	Indeks resiko bencana	Poin	0,68	0,65	0,62	140/sedang	137,5/sedang	135/sedang	135/sedang
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,60
20	Persentase kepatuhan terhadap peraturan tentang pemanfaatan ruang	Persen	20	20	20	20	20	20	20
21	Angka Melek Huruf	Persen	96,99	96,99	97,08	97,17	97,26	97,35	97,35
22	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Angka	8,01	8,01	8,07	8,13	8,19	8,25	8,25
23	Penyelamatan Seni Budaya Tradisional dan Pengembangan Seni Kreatif	Persen	53,33	60	66,67	73,33	80	86,67	86,67
24	PMKS yang ditangani	Persen	50	60	65	70	75	80	80

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Tahun ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
25	PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi lainnya	Persen	13,93	14,14	20,41	26,67	32,93	39,19	39,19
26	Indeks Pembangunan gender (IPG)	Poin	88,08	88,28	88,48	88,68	88,88	89,08	89
27	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	Jumlah	P : 12 N : 3	P : 12 N : 4	P : 13 N : 4	P : 14 N : 5	P : 15 N : 6	P : 16 N : 7	P : 16 N : 7
28	Nilai SAKIP	Poin	54,72	58,24	62	66	69,52	74	74
29	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	70	71	73	75	77	78	78
30	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
31	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan	Persen	80	100	100	100	100	100	100
32	Tingkat Maturitas SPIP	Level	1	3	3	3	4	4	4

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Target Tahun ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,06	4,70	5,02	5,34	5,66	5,98	5,98
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	15,01	14,41	13,81	13,21	12,61	12,01	12,01
3	Indeks Gini	Persen	0,290	0,285	0,280	0,275	0,270	0,265	0,265
4	IPM	Poin	67,70	68,44	68,80	69,17	69,54	69,91	69,91
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,91	3,86	3,51	3,16	2,81	2,46	2,46
6	Angka Harapan Hidup	Tahun	66,70	67,08	67,46	67,84	68,22	68,60	68,60
7	Pola Pangan Harapan	Indeks	60,9	77,00	81,00	82,82	84,48	86,17	86,17
	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Angka Kriminalitas yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Rasio Ketergantungan	Persen	50,32	49,62	48,92	48,22	47,52	46,82	46,12
	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	Layanan Urusan Wajib Dasar								
1	**Pendidikan**								
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Angka	8,01	8,01	8,07	8,13	8,19	8,25	8,25
2	Angka Melek Huruf	Angka	96,99	96,99	97,08	97,17	97,26	97,35	97,35
3	Angka partisipasi Kasar (APK): SD/MI/Paket A	Persen	107,95	108,95	109,95	110,00	111,95	112,95	112,95
4	Angka partisipasi Kasar (APK): SMP/MTs/Paket B	Persen	114	115	116	117	118	119	119,00
5	Angka partisipasi Murni (APM): SD/MI/Paket A	Persen	97,67	97,75	97,83	97,91	97,99	98,07	98,07
6	Angka partisipasi Murni (APM): SMP/MTs/Paket B	Persen	92,29	93,3	94,4	95,5	96,6	97,7	97,70
7	Angka melanjutkan (AM): SD/MI ke jenjang SMP/MTs	Persen	97,7	98,35	98,9	99,35	99,6	99,75	99,75
8	Angka melanjutkan (AM): SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK	Persen	89,95	91,95	93,95	95,95	97,95	99,95	99,95
9	Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 tahun	Angka	100	100	100	100	100	100	100,00
10	Angka Partisipasi Sekolah usia 13-15 tahun	Angka	98,39	98,45	98,51	98,57	98,63	98,69	98,69
11	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	100,00
12	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	99,05	99,15	99,25	99,35	99,45	99,55	99,55
13	Angka Putus Sekolah (APS): SD/MI	Persen	1,4	1,3	1,2	1,1	1	0,9	0,90
14	Angka Putus Sekolah (APS): SMP/MTs	Persen	1,2	1,1	1	0,9	0,8	0,7	0,70
15	Sekolah SD/MI dalam Kondisi Baik	Persen	85,15	88,15	91,15	95,15	97,15	98,15	98,15
16	Sekolah SMP/MTs dalam Kondisi Baik	Persen	88,15	91,15	94,15	96,15	98,15	98,6	98,60
17	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	78,55	81,55	84,55	87,55	90,55	93,55	93,55
18	Guru yang Memenuhi Klasifikasi S1/D4	Persen	65,12	70,12	75,12	80,12	85,12	90,12	90,12
2	**Kebudayaan**								
1	Penyelamatan seni budaya tradisional dan pengembangan seni kreatif	Persen	60	60	66,67	73,33	80	86,67	86,67
3	Pembinaan Nilai-nilai Budaya untuk siswa-siswi	Persen	1,28	1,28	2,13	2,98	3,84	4,69	4,69
4	Karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Persen	11,11	11,11	33,33	55,56	77,78	88,89	88,89
5	Cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Persen	85,37	85,37	87,80	92,68	95,12	97,56	97,56

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Target Tahun ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
6	Benda, Situs, dan Kawasam Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	78,05	78,05	82,93	87,80	92,68	95,12	95,12
3	**Kesehatan**								
1	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	46,51	2,91	2,91	15,70	15,70	16,28	53,49
2	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	Persen	100	100	100	Set	100	100	100
3	Rasio dokter persatuan penduduk	per 100.000 pddk	40/100.000	40/100.000	40/100.000	42/100.000	42/100.000	42/100.000	42/100.000
4	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	per 100.000 pddk	599/100.000	599/100.000	600/100.000	600/100.000	602/100.000	602/100.000	80
5	Persentase Jenis tenaga kesehatan utama (9 jenis) di Puskesmas	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi Kesehatan	Persentase	64,58	65	68	70	75	80	100
7	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	67,08	67	67	68	69	69	100
8	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	6	6	6	6	6	6	100
9	Prevalensi Balita Gizi Kurang	Persen	19,2	19	19,00	18,80	18,70	19	100
10	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka	10,8	11	11	10	10	10	65
11	Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Angka	11,8	12	11,5	11	10,8	10	100
12	Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup	Angka	10,8	10,8	10,6	10,4	10,2	10	6,2
13	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka	280	280	250	220	180	150	10
14	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persentase	90,3	90,3	90,4	90,4	90,5	90,5	82
15	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
16	Cakupan Gizi Buruk yang mendapat Perawatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	60
17	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
18	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
19	Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
20	Cakupan pelayanan nifas	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
21	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persentase	85	85	85	86	86	86	80
22	Cakupan pelayanan anak balita	Persentase	66	66	64	65	66	66	100
23	Cakupan pemberian makan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Persentase	70	70	72	74	76	78	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Target Tahun ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
24	Prevalensi kekurangan gizi (Gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita	Persentase	7	7,0	6,8	6,5	6,3	6,0	100
25	Prevalensi Anak Pendek dan Sangat Pendek (0-59 bln)	Persentase	35	35,0	32,0	29,0	27,0	25,0	100
26	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
27	Malnutrisi Kronis yang ditangani	Persentase	100	100	100	100	100	100	65
28	Cakupan kunjungan neonatus	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
29	Persentase cakupan suplemen untuk ibu nifas	Persentase	79	79	79	80	80	80	6,2
30	Persentase cakupan vitamin A untuk anak balita	Persentase	90	90	90	90	90	90	10
31	Cakupan peserta KB aktif	Persentase	63	63	63	64	65	65	82
32	Bayi lahir berat badan rendah < 2500 gram	Persentase	4,0	4,0	3,8	3,7	3,6	3,5	100
33	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase	100	100	100	100	100	100	60
34	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
35	Cakupan Kunjungan Bayi	Persentase	82	82	83	85	90	90	82
36	Cakupan pelayanan pada usia pendidikan dasar	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
37	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase	100	100	100	100	100	100	60
38	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
39	Cakupan Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	Persentase	60	60	70	80	100	100	100
40	Persentanse Penduduk yang menggunakan fasilitas sanitasi yang memadai sesuai dengan standar	Persentase	90	90	100	100	100	100	100
41	Cakupan Rumah Sehat	Persentase	70	70	80	100	100	100	100
42	Cakupan pelayanan umum kesehatan dan tempat-tempat umum yang memenuhi standar kesehatan	Persentase	35	35	40	45	50	60	60
43	Persetantase Penduduk yang menggunakan sumber air bersih yang terlindung	Persentase	90	90	100	100	100	100	100
44	Jumlah depot air minum isi ulang yang memenuhi syarat dan sesuai standar	unit	10	10	10	15	15	15	15
45	Cakupan Kecamatan yang melaksanakan GERMAS hidup sehat	Persentase	55,56	55,56	66,67	77,78	88,89	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Target Tahun ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
46	Non Polio AFP rate Per 100.000 Penduduk	Orang	1 kasus	1 kasus	1 kasus	1 kasus	1 kasus	1 kasus	1 kasus
47	Persentase Kasus Penyakit Menular yang ditangani	Persentase	7	7	6,8	6,6	6,4	6,2	6
48	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000) Penduduk	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
49	Tingkat Kematian karena Tuberkulosis (Per 100.000) Penduduk	Angka	0	0	0	0	0	0	0
50	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
51	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita penyakit DBD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
52	Penderita Diare yang ditangani	Orang	2468	2.468	2.517	2.570	2.622	2.725	2725
53	Angka kejadian Malaria	Angka	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1
54	Tingkat Kematian Akibat Malaria	Persentase	0	0	0	0	0	0	0
55	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari total populasi	Persentase	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0
56	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai Standar	Persentase	75	75	100	100	100	100	100
57	Cakupan balita pnemonia yang ditangani	Persentase	40	40	60	80	100	120	120
58	Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Kasus	1 kasus	1 kasus	1 kasus	1 kasus	1 kasus	1 kasus	1 kasus
59	Cakupan orang dengan Resiko Ter inveksi HIV mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai standar	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
60	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
61	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
62	Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
63	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	NA	100	100	100	100	100	100	100
64	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas mendapatkan Krining Kesehatan Sesuai Standar	NA	100	100	100	100	100	100	100
65	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Imunization (UCI)	Persentase	90	90,0	92,0	94,0	96,0	98,0	98
66	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang diimunisasi campak	Persentase	92	92	93	93	94	94	94
67	Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat	Persentase	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Target Tahun ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
68	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB Paru	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
69	Rasio Posyandu per satuan balita	Per balita	1/50 Balita	1/50 Balita	1/55 Balita	1/60 Balita	100%	1/40 Balita	1/40 Balita
70	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk	Per 1000 penduduk	12/1000 pddk	12/1000 pddk	12/1000 pddk	12/1000 pddk	12/1000 pddk	12/1000 pddk	12/1000 pddk
71	Pembentukan Posyandu Lansia	Jumlah Posyandu	30 Posyandu	30 Posyandu	30 Posyandu	30 Posyandu	30 Posyandu	30 Posyandu	30 Posyandu
72	Cakupan Puskesmas pembantu	Unit	29	29	29	29	29	29	29
73	Persentase Perbaikan Sarana dan Prasarana Kantor	persentase	100	100	100	100	100	100	100
74	Persentase Kelengkapan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	persentase	100	100	100	100	100	100	100
75	Persentase penduduk menjadi peserta Jaminan Kesehatan	persentase	100	100	100	100	100	100	100
76	Cakupan puskesmas yang terakreditasi	persentase	50	50	66,67	83,33	91,67	100	100
77	Jumlah Puskesmas yang memberi pelayanan sesuai standar	Unit	12	12	12	12	12	12	12
78	Cakupan Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
79	Cakupan Pelayanan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
80	Persentase Ketersediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	persentase	92	92	95	96	98	100	100
81	Jumlah Apotik yang memenuhi syarat dan sesuai standar	Unit	9	9	12	12	12	12	12
82	Industri Rumah Tangga Pangan yang telah memiliki izin produksi pangan	Sarana	37	37	40	40	60	60	60
83	Tipe RSUD	Tipe	D	C	C	C	C	C	C
84	Persentase Kelengkapan sarana dan prasarana RSUD	Persen	10	15	30	50	70	90	90
85	Persentase Peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur (PUS)	Persen	61,55	62	63	64	64,5	65	65
86	Persentase Peningkatan Penanggulangan Resiko Bahaya Narkoba, PMS, dan HIV/AIDS	Persen	62	62	70	74	78	82	82
4	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	44,83	44,83	47,55	50,27	52,99	55,71	55,71
2	Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik	Persen	68,90	68,90	71,68	74,46	77,24	80,02	80,02
3	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	247,11	247,11	262,11	277,11	292,11	307,11	307,11
4	Panjang jalan dilalui Roda 4	Km	551,24	551,2	554,2	557,2	560,2	563,2	563,24
5	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Km/Jam	44,83	44,83	47,55	50,27	52,99	55,71	55,71
6	Panjang jembatan dalam kondisi baik (m)	Meter	2477	2477	2577	2677	2777	2877	2877
7	Jumlah panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (Km)	Meter	6220	6220	7220	8220	9220	10220	10220
8	Persentase luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Persen	55,14	55,14	59,27	63,42	67,55	71,72	71,72

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Target Tahun ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
9	Rasio jaringan irigasi	Persen	9,70	9,7	9,9	10,1	10,3	10,5	10,50
10	Jumlah panjang pembangunan bantaran, tanggul sungai di wilayah aliran sungai rawan banjir dan longsor	Meter	150	150	450	1550	2000	2725	2725
11	Panjang drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Meter	139016	139016	139041	141541	144541	147741	147741
12	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan perubahan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Persen	10	10	0	12	0	15	15
13	Persentase kesesuaian bangunan yang didirikan dengan peraturan yang ditetapkan	Persen	0	0	2	4	6	8	8
14	Persentase kepatuhan terhadap peraturan tentang pemanfaatan ruang	Persen	20	20	20	20	20	20	20
15	Persentase kepatuhan terhadap peraturan tentang pengendalian pemanfaatan ruang	Persen	20	20	20	20	20	20	20
5	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**								
1	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	67,77	67,77	67,90	68,04	68,20	68,36	68,36
2	Rumah tangga ber-Sanitasi (unit)	Unit	17.206	17.206	17.241	17.276	17.316	17.356	17.356
3	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih (SR)	Unit	7.620	7.620	8.420	9.220	10.020	10.820	10.820
4	Persentase rumah tangga berakses air minum	Persen	30,01	30,01	33,16	36,31	39,46	42,62	42,62
5	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	Persen	72,79	72,79	75,38	78,03	80,38	82,99	82,99
6	Lingkungan pemukiman kumuh (Ha)	Ha	132,10	132,10	131,20	130,30	129,40	128,50	128,50
7	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0,81	0,81	0,86	0,91	0,96	1,01	1,01
8	Persentase jumlah rumah layak huni	Persen	77,38	77	78	78	78	78	78
9	Rasio rumah layak huni	Rasio	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0
6	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**								
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	91	91	92	93	94	95	95
2	Indeks Risiko Bencana	Persen	0,68	0,65	0,62	140/sedang	137,5/sedang	135/sedang	132,5/sedang
3	Rasio Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Lokasi				0,35/rndah	0,55/sedang	0,65/sedang	0,65/sedang
4	Jumlah daerah yang mendapatkan fasilitasi pencegahan dini dan kesiapsiagaan bencana	Lokasi	9	9	9	9	9	9	9
5	Persentase korban bencana yang dievakuasi selama tanggap darurat	Persen	75	75	80	80	80	80	80
6	Jumlah lokasi bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi pasca bencana	Lokasi	3	0	6	6	6	6	24
7	Presentase jumlah masyarakat per kecamatan yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaaan	Persen	61,75	61,75	64,15	65,15	66,55	67,75	67,75
8	Presentase pemberantasan penyakit P4GN	Persen	NA	10	20	30	40	50	50
9	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada	Persen	84,1	84,1	85	85	85	85	85
7	**Sosial**								
1	PMKS yang ditangani	Persen	40	60	65	70	75	80	80
2	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui usaha ekonomi produktif dan bantuan sosial	Persen	13,93	14,14	20,41	26,67	32,93	39,19	39,19

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Target Tahun ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial	Persen	50	50,35	50,51	100	100	100	100
4	Persentase Anak berhadapan dengan hukum yang dibina dalam LPKS (Lembaga Pelayanan kesejahteraan Sosial)	Persen	100,000	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Pemenuhan operasional Kelembagaan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	Persen	100,00	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Wajib Non Pelayanan Dasar								
1	**Tenaga Kerja**								
1	Persentase Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat menuju kompetensi	Persen	28,73	28,73	29,46	30,19	30,92	31,65	31,65
2	Persentase Angkatan kerja yang terdaftar dapat ditempatkan dan terciptanya wirausahawan	Persen	40,73	40,73	40,14	42,13	42,86	43,59	43,59
3	Persentase Pengembangan Kewirausahaan Industri Produktivitas	Persen	65	65	70	75	80	85	85
3	Persentase Pengawasan, Perlindungan, Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja	Persen	65	65	70	75	80	85	85
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skor	88,08	88,28	88,48	88,68	88,88	89,08	89,08
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Skor	57	57	58	59	60	61	61
3	Keterlibatan Perempuan di Lembaga Pemerintah	persen	40	40	40	45	45	45	45
4	Rasio KDRT	Persen	35	30	25	20	15	10	10
5	Persentase keikutsertaan perempuan dalam pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pengaduan terpadu	persen	70	75	80	80	85	85	90
3	**Pangan**								
1	Pola Pangan Harapan	Indeks	60,9	77	81	82,82	84,48	86,17	86,17
2	Ketersedian Energi dan Protein Perkapita(Kilo Kalori Perhari)	Kkal	1900 Kkal	1925 Kkal	1950 Kkal	1975 Kkal	2000Kkal	2100 Kkal	2100 Kkal
4	**Pertanahan**								
1	Kasus Pertanahan yang di tangani	Persen	0	0	100	100	100	100	100
2	Penataan, Penguasaan, Kepemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persen	0	0	100	100	100	100	100
5	**Lingkungan Hidup**								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,60
2	Persentase volume sampah yang ditangani	Persen	38,35	38,35	41	45	48	52	52
3	Volume lumpur tinja yang dilah diinstalasi pengolahan lumpur tinja	m3	360	360	360	380	380	400	400
4	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL	Persen	10	10	10	1214	17	65	65
5	Rasio Luas Ruang Terbuka Hijau	Persen	7,6	7,6	8,3	8,9	9,6	10,2	10,20
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
1	Cakupan Masyarakat yang Memiliki Kartu Keluarga	Persen	97	97	98	98	99	99	99

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Target Tahun ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	Cakupan Masyarakat yang memiliki e-KTP	Persen	95	95	96	97	98	99	99
3	Cakupan Masyarakat yang memiliki Akte Kelahiran (0-18 Tahun)	Persen	70	70	80	90	95	99	99
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
1	Persentase Lembaga kemasyarakat gampong yang aktif dalam pembangunan gampong	Persen	80	80	82	86	90	95	95
2	Jumlah gampong yang memiliki PAD dari BUMG	Persen	10	10	11	12	14	15	15
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
1	Persentase Peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS)	Persen	66,55	62	64	64,5	65	65	65
1	Cakupan PKB / PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja	Persen	53	56	64	68	72	76	76
9	**Perhubungan**								
1	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persen	35	35	50	67,5	80	100	100
2	Persentase Kondisi sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar	Persen	35	35	37	39	40	41	41
3	Persentase Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Persen	0	0	50	62	74	76	76
10	**Komunikasi dan Informatika**								
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	0	0	0	1,8	2,2	2,6	2,6
2	Ketersediaan data statistik sektoral	Ada/Tidak	0	0	0	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Cakupan pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong dan lembaga komunikasi lainnya	Persen	30	45	75	90	100	100	100
11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**								
1	Cakupan UMKM yang difasilitasi	Persen	0.92	0.92	1.31	1.62	2.38	2.38	2,38
2	Cakupan Wirausahawan yang dilatih	Persen	6.33	6.33	8.17	10.00	11.83	13.67	13,67
3	Pendapatan UKM	Milyar	202.965.532	202.965.532	208.039.670	213.240.662	218.571.678	224.035.970	224.035.970
4	Cakupan Koperasi dan UKM yang difasilitasi	Persen	2589	2589	2894	3199	3503	3808	3808
5	Persentase Koperasi Aktif	Persen	8	8	10	12	14	16	16,13
12	**Penanaman Modal**								
1	Jumlah Investor PMA-PMDN	Investor	7	11	14	17	21,00	25	25
2	Nilai Investasi berskala nasional (PMA-PMDN)	Juta	1.334.968	1.468.465	1.615.311	1.776.842	1.954.527	2.149.979	2.149.979
3	Persentase Pelayanan Perizinan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
13	**Kepemudaan dan Olahraga**								
1	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	Jumlah	P : 12 N : 4	P : 12 N : 4	P : 13 N : 4	P : 13 N : 5	P : 14 N : 6	P : 15 N : 7	P : 15 N : 7
2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam pembangunan daerah	Persen	35	35	40	45	50	55	55
3	Persentase jumlah kasus pemuda terlibat narkoba dan zat aditif di Aceh Jaya	Kasus	12	12	10	8	6	4	4
4	Cakupan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persen	35	40	55	65	75	85	90
5	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	Persen	15	0	35	45	55	65	75
6	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	25	2	15	25	35	45	70
14	**Statistik**								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Target Tahun ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Ketersediaan Dokumen Statistik	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15	**Persandian**								
1	Ketersediaan Dokumen Informasi yang diamankan	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
16	**Perpustakaan**								
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	1500	1500	1650	1780	1800	1950	1950
2	Koleksi Bahan Perpustakaan	Jumlah	14000	14000	14400	14600	15000	15200	15200
3	Judul Buku Yang Tersedia di Perpustakaan	Jumlah	3500	3500	3600	3650	3750	3800	3800
17	**Kearsipan**								
1	Persentase SKPK Yang Menerapkan pengelolaan Arsip secara baku	Persen	5,00	5,00	8,00	10,00	12,00	14,00	14,00
2	Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persen	10,00	10,00	12,50	13,00	14,50	15,00	15,00
	Keistimewaan dan Kekhususan Aceh								
1	**Pendidikan**								
1	Persentase Dayah yang memenuhi standarisasi dayah	Persen	22,86	28,57	32,26	38,71	45,16	51,61	51,61
2	Cakupan santri yang mendapatkan pendidikan dan fasilitas yang memadai	Persen	4,37	4,37	4,76	5,16	5,56	5,95	5,95
3	Persentase dayah yang menerapkan standar manajemen dayah	Persen	16,13	16,13	32,26	48,39	64,31	80,65	80,65
4	Pesertanse dayah yang terakreditasi	Persen	83,87	83,87	87,15	90,32	93,55	100	100
5	Jumlah santri yang menyelesaikan pendidikan Tahfidh	Persen	12	12	15	20	25	30	30
6	Persentase guru dayah yang tersertifikasi.	Persen	48,05	48,05	50,75	60,30	65,20	70	70
7	Persentase Pengawasan terhadap kebijakan dan program-program pendidikan yang diterapkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	**Kebudayaan**								
1	Hukum Adat yang Terselesaikan	Persen	20,93	20,93	23,26	24,42	25,78	26,74	26,74
2	Pelestarian Adat	Persen	16,67	16,67	41,67	50	66,67	83,33	83,33
3	Penerapan budaya keacehan dalam kehidupan bermasyarakat	Persen	37,56	37,56	39,91	40,34	57,35	82,33	82,33
4	Pembinaan adat Perkawinan	Persen	6,94	6,94	22,22	23	36,31	41,62	41,62
3	**Keagamaan**								
1	Persentase Mesjid yang Memenuhi Standar								
	- Persentase Mesjid yang memenuhi standar Ri'ayah	Persen	70,00	75	78	81	84	87	87
	- Persentase Mesjid yang memenuhi standar Imarah	Persen	66,00	70	73	76	79	82	82
	- Persentase Mesjid yang memenuhi standar Idarah	Persen	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	45
2	Hafidzh/hafidzah dan Qari/qariah	Jumlah	101	234	125	133,00	141,00	150	150
3	Dana ZISWAF yang terhimpun	Jumlah	5.800.000.000	6.380.000.000	6.999.000.000	7.033.950.000	7.380.647.000	7.754.929.875	7.754.929.875
4	Angka Melek Al-Qur'an	Persen	NA	75	78	81	84	87	87

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Target Tahun ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5	Persentase Keputusan/Rekomendasi Ulama yang diterapkan	Persen	16	20	24	28	32	36	36
6	Jumlah Kader Ulama Muda	Jumlah	20	22	23	25	27	30	127
7	Persentase Penguatan Aqidah di Masyarakat	Persen	70	75	80	85	90	95	95
	Pilihan								
1	**Kelautan dan Perikanan**								
1	Cakupan Anggota Kelompok pengolah dan pemasar produk perikanan yang terbina	Org	20	20	20	20	20	20	20
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	244	244	246	250	251	255	255
3	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	12730	12730	8250	8663	9096	9550	9550
4	Jumlah Konsumsi Ikan	kg/kap/thn	44	44	46	48	50	53	53
5	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	Persen	2,37	2,49	2,55	2,61	2,67	2,73	2,73
6	Lembaga Laut yang dibina	Jumlah	9	9	9	9	9	9	9
2	**Pariwisata**								
1	Persentase Pengembangan lokasi objek wisata berbasis islami	Persen	25	31,25	37,5	43,75	50	56,25	56,25
2	Persentase Peningkatan PAD sektor pariwisata	Persen	0	5	7	9	11	14	14
3	**Pertanian**								
1	Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan terhadap PDRB	Persen	26,31	26,99	27,33	27,67	28,01	28,35	28,35
2	Produksi Padi	Ton	100.132	100.132	105.139	85.500	89.775	94.264	94.264
3	Produksi Jagung	Ton	6.577	6.577	6.906	7.251	7.614	7.995	7.995
4	Produksi Kedelai	Ton	639	639	671	705	740	777	777
5	Produksi Kelapa Sawit	Ton	87.968	87.968	92.366	96.985	101.834	106.926	106.926
6	Produksi Karet	Ton	5.637	5.637	5.919	6.215	6.526	6.852	6.852
7	Produksi Kopi	Ton	316	316	332	348	366	384	384
8	Produksi Kelapa Dalam	Ton	2.388	2.388	2.507	2.632	2.764	2.902	2.902
9	Produksi Nilam	Ton	80	80	84	88	92	97	97
10	Produktifitas Padi	Ton/Ha	6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6
11	Produktifitas Jagung	Ton/Ha	4	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4
12	Produktifitas Kedelai	Ton/Ha	2	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2
13	Persentase Kelompok Yang Menerapkan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persen	10	10	10	10	10	10	10
14	Jumlah Komoditi Pertanian/Perkebunan yang dipasarkan (komoditi)	Komuniti	5	5	6	7	8	9	9
15	Jumlah Luas Areal Tanaman Perkebunan yang dikembangkan (Ha)	Ha	800	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.600
16	Persentase Status Kesehatan Hewan terhadap Agent Penyakit								
	-Parasit	Persen	44	44	42	41	40	38	38
	-Virus	Persen	44	44	42	41	40	38	38
	-Bakteri	Persen	7	7	6	5	4	4	4
17	Peningkatan Populasi Ternak	Jumlah	821.230	821.230	982.600	1.214.601	1.340.676	1.513.131	1.513.131
	-Ternak Besar	Jumlah	24.000	24.000	25.000	33.917	36.891	40.030	40.030
	-Ternak Kecil	Jumlah	30.000	30.000	35.000	44.754	46.630	48.201	48.201
	-Unggas	Jumlah	767.230	767.230	922.600	1.135.930	1.257.155	1.424.900	1.424.900
18	Persentase Kelompok yang Menerapkan Teknologi Peternakan	Persen	7	7	12	19	29	41	41
19	Persentase Cakupan Pelaksanaan Sistem LAKUSI secara berkelanjutan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
20	Persentase Penyuluh Pertanian Lapangan yang ditingkatkan Pengetahuannya	Persen	20	20	20	20	20	20	20
4	**Energi dan Sumber Daya Mineral**								
1	Panjang Jalan terpasang PJU	Meter	105250	14000	8800	8800	8800	8800	49.200
2	Jumlah SR/IR	Rumah	14470	10000	9800	9500	9000	8000	8000
5	**Perdagangan**								
1	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB	Persen	2,02	2,14	2,2	2,22	2,36	2,40	2,40
6	**Perindustrian**								
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	1,74	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
2	kontribusi industri terhadap PDRB	Persen	3,33	3,57	3,65	3,73	3,81	3,89	3,89

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Target Tahun ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
7	**Transmigrasi**								
1	Persetase Kawasan Transmigrasi yang Dibangun	Persen	20	20	40	60	80	100	100
2	Persentase Transmigran Yang Ditempatkan	Persen	57,78	57,78	68,89	80	91,11	100	100
3	Persentase Transmigran yang Dibina	Persen	47,62	47,62	57,14	66,67	76,19	85,71	85,71
	Penunjang Urusan								
1	**Pengawasan**								
1	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	1	2	3	3	4	4	4
2	Tingkat Maturitas SPIP	Level	1,00	2	3	3	3	3	3
3	Jumlah Rekomendasi Temuan yang Ditindaklanjuti	Persen	31,58	41,58	46,58	51,58	56,58	61,58	61,58
2	**Perencanaan**								
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPK yang telah ditetapkan dengan qanun	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMK yang telah ditetapkan dengan qanun	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPK yang telah ditetapkan dengan perbup	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan qanun	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan qanun	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan qanun	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Persentase Tahapan Proses Perencanaan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan	Persen	80	100	100	100	100	100	100
3	**Penelitian dan Pengembangan**								
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	0	100	100	100	100	100	100
4	**Keuangan**								
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Persen	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Aceh Jaya	Persen	16,34	16,34	19,34	21,34	24,34	27,34	27,34
3	Ketepatan waktu penetapan APBK	Persen	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	TepatWaktu	TepatWaktu	TepatWaktu	TepatWaktu	TepatWaktu	TepatWaktu
5	**Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**								
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07
2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	18,63	20,84	23,06	45,23	47,45	49,67	49,67
6	**Sekretariat Dewan**								
1	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPR Kabupaten	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Target Tahun ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	Tersusunnya dan terintegrasinya program-program kerja DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan qanun, dan fungsi anggaran dalam Dokumen Rancana Pembangunan Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPK)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasinya program-program kerja DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan qanun dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRK	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

BAB IX
PENUTUP

Dokumen Perubahan RPJMK ini merupakan dokumen yang menerjemahkan cita-cita Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dijelaskan dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan, sasaran, dan program pembangunan, lalu upaya-upaya yang harus dilakukan, serta penentuan keterlibatan dan peran dari berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMK ini.

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan Perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah supaya tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

9.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjamin konsistensi proses perencanaan, Perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 akan menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan masa transisi untuk perencanaan dan penganggaran pembangunan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2023.

Dokumen perencanaan transisi ini menjadi pedoman untuk penyusunan RKPK Tahun 2023 dan Renja SKPK Tahun 2023. Masa transisi ini berlaku sampai ditetapkannya Qanun Daerah tentang RPJMK Aceh Jaya Tahun 2022-2027 sesuai kepala daerah terpilih.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RPJMK Aceh Jaya ini menjadi pedoman bagi SKPK di pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam menyusun program - program pembangunan serta bagi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

(DPRK) dalam mengkoordinasi aspirasi masyarakat, dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Maka dari itu, diperlukan kesepahaman, kerjasama, transparansi, konsistensi, dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi demi tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya agar melaksanakan program-program dalam Perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Perubahan RPJMK Aceh Jaya 2017-2022 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan dan menjadi Pelaksana Harian dalam pelaksanaan Perubahan RPJMK Aceh Jaya 2017-2022;
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Jaya berkewajiban untuk menyusun perubahan rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMK Aceh Jaya 2017-2022 yang nantinya akan menjadi pedoman di dalam menyusun Renja SKPK Aceh Jaya dan penyusunan anggaran SKPK Aceh Jaya;
5. Penjabaran lebih lanjut perubahan RPJMK Tahun 2017-2022 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPK Aceh Jaya yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
6. Penyusunan RKPK Aceh Jaya dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara

berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Gampong, Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten;

7. RKPK Aceh Jaya menjadi acuan bagi setiap SKPK dalam menyusun Rencana Kerja SKPK (Renja-SKPK) dengan pendekatan pencapaian hasil (*outcomes*);
8. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPK Kabupaten Aceh Jaya merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
9. Renja-SKPK yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPK (RKA-SKPK) dan menjadi kontrak kinerja Kepala SKPK;
10. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas Perubahan RPJMK Tahun 2017-2022, Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati;
11. Dalam pelaksanaan Perubahan RPJMK Aceh Jaya tahun 2017-2022 perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Jaya agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.

Demikian perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 disusun guna menyikapi dan mengakomodir beberapa dinamika yang berkembang serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMK tersebut selama kurun waktu 2 (dua) tahun sampai dengan tahun 2019.

Dokumen perubahan RPJMK Aceh Jaya ini selanjutnya akan menjadi penyusunan dokumen perencanaan lainnya. Arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam pembahasan RPJMK Aceh Jaya pada prinsipnya tidak mengalami banyak perubahan dan menjadi pedoman bagi

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam melaksanakan pembangunan sampai dengan tahun 2022.

Calang, Oktober 2019

Bupati Aceh Jaya

Drs. H.T. IRFAN. TB.

LAMPIRAN I

1.1 Visi

Tidak ada perbedaan antara Visi pada RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 dengan Visi pada Perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022, yaitu:

"**Gerakan Pembangunan Rakyat Aceh Jaya: Sehat, Ekonomi, Kejayaan Agama, Tangguh Infrastruktur dan Informatif dengan Potensi Sumber Daya Manusia yang Kompetitif (GERBANG RAJA SEJATI)**"

1.2 Misi

Tidak ada perbedaan antara Misi pada RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 dengan Misi pada Perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022, yaitu:

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

Misi Pertama	:	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Misi Kedua	:	Mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat.
Misi Ketiga	:	Kejayaan nilai-nilai agama islam dalam kehidupan masyarakat.
Misi Keempat	:	Mewujudkan infrastruktur daerah yang tangguh, Informatif dan merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.
Misi Kelima	:	Mewujudkan pendidikan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.
Misi Keenam	:	Meningkatkan kehidupan sosial, serta peran pemuda dan olahraga.
Misi Ketujuh	:	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.3 Isu Strategis

Terdapat perbedaan antara Isu Strategis Kabupaten Aceh Jaya pada RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 dengan Isu Strategis Kabupaten Aceh Jaya Perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022, yaitu: Penambahan pada point 1 pada Peningkatan daya saing, pertumbuhan ekonomi pada peningkatan daya saing perkebunan terutama pada komoditi nilam, kopi, dan kelapa, serta pendirian Badan Usaha Milik Daerah.

Memperhatikan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Aceh Jaya seiring dengan dinamika dan pengembangan Kabupaten Aceh Jaya serta menelaah isu-isu di lingkup Propinsi Aceh, Nasional dan global, maka dirumuskan 8 (delapan) isu strategis Kabupaten Aceh Jaya sebagai berikut:

1. **Peningkatan daya saing, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang inklusif**
   - ✓ Peningkatan daya saing sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan menjadi sektor basis dalam struktur perekonomian di Kabupaten Aceh Jaya dan masih menjadi sektor andalan dengan penyerapan tenaga kerja yang sangat banyak. *Peningkatan daya saing perkebunan terutama pada komoditi nilam, kopi, dan kelapa.* Tidak stabilnya harga produk pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan dan dukungan infrastruktur yang belum optimal serta menurunnya angkatan kerja disektor pertanian menjadi permasalahan yang dihadapi dalam mempertahankan serta meningkatkan kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kelautan.
   - ✓ Sektor Pariwisata menjadi salah satu sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Aceh Jaya sebagai daerah dengan anugerah alam yang sangat bervariasi. membuka kesempatan bagi Aceh Jaya untuk menarik wisatawan (nusantara dan mancanegara) melalui wisata alam (ekowisata) maupun budaya. Banyak potensi parawisata yang

sampai sekarang belum tersentuh dan dikelola dengan baik, harus dioptimalkan melalui dukungan infrastruktur, manajemen maupun promosi yang intens.

- ✓ *Mendorong sektor industri, UMKM, perdagangan, dan koperasi serta pendirian Badan Usaha Milik Daerah* agar dapat berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penyediaan lapangan kerja.

1.4 Tujuan dan Sasaran

Terdapat perbedaan antara Tujuan dan Sasaran Kabupaten Aceh Jaya pada RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 dengan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Aceh Jaya Perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022, sebagaimana terlihat pada table berikut:

NO	URAIAN	PENJELASAN	
		RPJM MURNI	RPJM PERUBAHAN
	TUJUAN DAN SASARAN		
	TABEL 6.1	SASARAN 1 MISI 2 MENINGKATNYA DAYA SAING USAHA PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN, PARIWISATA, KOPERASI DAN UKM	PERBAIKAN SASARAN 1 MISI 2 MENINGKATNYA DAYA SAING USAHA PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN, PARIWISATA, KOPERASI, DAN BUMD
			PENAMBAHAN STRATEGI PADA MISI 2 "MENDIRIKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH"
		TUJUAN MISI KE-3 PENINGKATAN KUALITAS DAN EFEKTIFITAS TATANAN AQIDAH, AKHLAK DAN PELAKSANAAN SYARIAH	PERBAIKAN TUJUAN DAN SASARAN UNTUK MISI KE-3 YANG SEHARUSNYA SAMA DENGAN TABEL 5.3 BAB V,DIMANA TUJUAN PADA MISI KE-3 ADALAH PENINGKATAN KUALITAS MASYARAKAT BERBASIS ALQUR'AN DAN HADIST
		SASARAN -1 PADA MISI KE-3, TUJUANNYA ADALAH MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA KEAGAMAAN DAN BUDAYA BERBASISI ISLAMI	PERBAIKAN SASARAN PADA MISI KE 6 (6.1.1) YANG SEHARUSNYA MENGACU TABEL 5.3 BAB V, DIMANA SASARANNYA ADALAH MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA PERIBADATAN
		SASARAN-1 PADA MISI KE-6, MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN PMKS	PERBAIKAN SASARAN-1 PADA MISI KE-6 YANG SEHARUSNYA MENGACU PADA TABEL 5.3 BAB V, YAITU MENURUNNYA JUMLAH PMKS MELALUI PEMBERDAYAAN PMKS USIA PRODUKTIF DALAM KELOMPOK-KELOMPOK USAHA EKONOMI PRODUKTIF

1.5 Strategi dan Arah Kebijakan

Terdapat perbedaan antara Strategi Kabupaten Aceh Jaya pada RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 dengan Strategi Kabupaten Aceh Jaya Perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022, yakni Penambahan Strategi pada Misi 2 yaitu “Mendirikan Badan Usaha Milik Daerah”.

Tidak ada perbedaan antara Arah Kebijakan Kabupaten Aceh Jaya pada RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 dengan Arah Kebijakan Kabupaten Aceh Jaya Perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022.

LAMPIRAN II

Terdapat beberapa perbedaan (sebagaimana terlampir).

LAMPIRAN III

Tidak ada perbedaan antara Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 dengan Indikator Kinerja Perangkat Daerah pada Perubahan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2019